



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) bahwa Gubernur wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 memuat capaian kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026.

Kami sampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik untuk tahun selanjutnya,

Pangkalpinang, Maret 2025

**Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



SUGITO

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.1.1 Penjelasan Umum.....	I-1
	a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	I-1
	b. Data Geografis Wilayah.....	I-1
	c. Jumlah Penduduk.....	I-5
	d. Jumlah Kabupaten/Kota (Untuk Provinsi)...	I-5
	e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	I-6
	f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	I-16
	1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-18
	a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	I-18
	b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-19
	c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	I-20
	d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I-23
	1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	I-35
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
	2.1 Capaian Kinerja Makro.....	II-1
	2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II-2
	2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II-2

	2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-10
	2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II-13
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III.1
	1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.	III-1
	2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi.....	III-2
	3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	III-2
	3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi.....	III-6
	3.1.1 Target Kinerja.....	III-6
	3.1.2 Realisasi.....	III-15
	3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota.....	III-76
	3.2.1 Target Kinerja.....	III-76
	3.2.2 Realisasi.....	III-76
	3.3 Permasalahan dan Kendala.....	III-77
	3.4 Saran dan Tindak Lanjut.....	III-78
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	IV-1
	4.1 Urusan Pendidikan.....	IV-1
	4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-1
	4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-1
	4.1.3 Realisasi.....	IV-2
	4.1.4 Alokasi Anggaran.....	IV-5
	4.1.5 Dukungan Personil.....	IV-11
	4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-12
	4.2 Urusan Kesehatan.....	IV-12
	4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-12
	4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-12

4.2.3	Realisasi.....	IV-13
4.2.4	Alokasi Anggaran.....	IV-15
4.2.5	Dukungan Personil.....	IV-16
4.2.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-16
4.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-16
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-16
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-17
4.3.3	Realisasi.....	IV-18
4.3.4	Alokasi Anggaran.....	IV-19
4.3.5	Dukungan Personil.....	IV-21
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-22
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-22
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-22
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-22
4.4.3	Realisasi.....	IV-23
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	IV-24
4.4.5	Dukungan Personil.....	IV-26
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-27
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-27
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-27
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-27
4.5.3	Realisasi.....	IV-28
4.5.4	Alokasi Anggaran.....	IV-30
4.5.5	Dukungan Personil.....	IV-32
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-32
4.6	Urusan Sosial.....	IV-33
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-33
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan	

	Minimal oleh Daerah.....	IV-34
4.6.3	Realisasi.....	IV-36
4.6.4	Alokasi Anggaran.....	IV-40
4.6.5	Dukungan Personil.....	IV-42
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-43
4.7	Program dan Kegiatan.....	IV-44
4.7.1	Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan.....	IV-46
4.7.2	Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan.....	IV-46
4.7.3	Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-47
4.7.4	Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-47
4.7.5	Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-48
4.7.6	Program dan Kegiatan Urusan Sosial.....	
BAB V	PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang ke 32 (tiga puluh dua), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada awal terbentuknya provinsi, terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Beberapa tahun kemudian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

b. Data Geografis Wilayah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara astronomis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada wilayah Indonesia sebelah Barat, dengan posisi geografis yang sangat strategis. Berada pada pertemuan arus Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sehingga menjadi wilayah yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan. Disamping itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dekat dan berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Jalur pada ALKI I difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A), berada pada posisi silang antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dengan Semenanjung Malaysia dan Singapura. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi berkembangnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk saat ini dan dimasa yang akan datang.

Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization, land management* dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh *geological formation*, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

1) Batas Wilayah

Berdasarkan batas wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Selat Karimata di sebelah Timur;
- Laut Jawa di sebelah Selatan;
- Selat Bangka di sebelah Barat; dan
- Laut Natuna di sebelah Utara.

2) Luas Wilayah

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- Kabupaten Bangka luas wilayah : 2.950,68 km²
- Kabupaten Bangka Barat luas wilayah : 2.820,61 km²
- Kabupaten Bangka Tengah luas wilayah : 2.155,77 km²
- Kabupaten Bangka Selatan luas wilayah : 3.607,08 km²
- Kabupaten Belitung luas wilayah : 2.293,61 km²
- Kabupaten Belitung Timur luas wilayah : 2.506,91 km²
- Kota Pangkalpinang luas wilayah : 89,40 km²

Berdasarkan wilayah administrasi, pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2016 sebagai berikut:

- Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa;
- Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa;
- Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa;
- Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa;
- Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa;

- Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa;
- Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

3) Topografis

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki topografi yang pada umumnya relatif datar dan terdiri dari dataran rendah hingga berbukit serta hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi terdapat pada puncak Gunung Maras di Kabupaten Bangka dengan ketinggian 699 meter dan puncak Gunung Tajam di Kabupaten Belitung dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut. Komposisi lahan datar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah, dan sebagian kecil di Kabupaten Bangka Selatan.

4) Geologi

Pulau Bangka dan Belitung termasuk bagian tengah dari “*Tin Mayor South East Asian Tin Belt*” dengan tipe *granit main range* yang mempunyai ciri-ciri megakristal (terutama *K-Feldspar*) dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya. Granit ini umumnya terdiri atas granit biotit dan granit muskovit yang semuanya merupakan tipe sedimen tipe S yang diperkirakan umurnya Trias (Sumber: Arsip PT. Koba Tin: *Survey dan Geology Department*, 2007). Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan. Terdapat pula mineral-mineral ikutan timah seperti *Zircon* (ZrSiO_4), *Monazite* ((Ce, La, Dy) PO_4 (ThSi) O_2), *Hematite* (Fe_2O_3), *Pyrite* (FeS_2), *Ilmenite* (FeTiO_3), dan *Xenotime* (YPO_4). Sedangkan secara geologis mineralisasi timah di Indonesia terikat pada sabuk granit (*granitebelt*) Asia Tenggara yang memanjang dari Yunan (China) melalui Myanmar, Thailand, Semenanjung Melaka sampai pada Kepulauan Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep dan Pulau Karimun. Selain produk timah dan mineral ikutannya, ada pula produk tambang lainnya seperti pasir kuarsa (SiO_2), material Kaolin, dan *bilitonite* (dikenal

dengan nama “Satam”). Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya. Sedangkan Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca.

5) Hidrologi

Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Utara Pulau Bangka. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, dan Sungai Lenggang.

6) Klimatologi

Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Berdasarkan data BPS yang dirilis dari BMKG pada tahun 2019-2021, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki suhu rata-rata tahunan antara 26,7-28,2 °C dan curah hujan antara 2.355,3-3.012,9 mm dengan jumlah hari hujan 134-234 hari. Curah hujan maksimum tertinggi tahun 2021 sebesar 3.012,9 mm. Sementara kelembabannya relatif tinggi mencapai 50 derajat di tahun 2021. Di bulan Desember dan Januari, biasanya musim penghujan terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, disertai angin kencang dan ombak laut cenderung meninggi.

Berdasarkan data Bangka Belitung Dalam Angka 2023, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki suhu rata-rata tahun 2022 sebesar 28,1°C dengan suhu maksimum 34,6°C dan

suhu minimum 21,6°C. Curah hujan tergolong tinggi mencapai sebesar 3.026,7 mm dengan jumlah hari hujan 234 hari. Sedangkan Pulau Belitung, berdasarkan data Stasiun Meteorologi H.AS Hanandjoedin tercatat memiliki suhu rata-rata sebesar 27°C dengan suhu maksimum 35,8°C dan suhu minimum 20,6°C. Pulau Belitung memiliki total curah hujan lebih tinggi yakni 2.650 mm dengan jumlah hari hujan lebih sedikit yakni 143 hari.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 mencapai 1.511.899 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,33.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Penduduk Menurut Kabupaten Kota (Jiwa/Orang)				
	2019*	2020	2021	2022	2023
Bangka	337.337	325.155	329.486	333.755	337.939
Belitung	189.824	182.604	184.827	187.035	189.225
Bangka Barat	213.163	203.827	206.857	209.866	212.854
Bangka Tengah	196.196	198.052	201.237	204.357	207.435
Bangka Selatan	209.973	197.539	200.337	203.102	205.829
Belitung Timur	129.572	126.487	128.111	129.706	131.281
Pangkalpinang	212.727	217.650	220.932	224.165	227.336
Kepulauan Bangka Belitung	1.488.792	1.451.314	1.471.787	1.491.986	1.511.899

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, serta 1 (satu) Kota yaitu Kota Pangkalpinang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemekaran, dengan membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 7 (tujuh), terdiri dari 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Bangka	Sungailiat	8	8	8	8	8
Kab. Bangka Barat	Muntok	6	6	6	6	6
Kab. Bangka Tengah	Koba	6	6	6	6	6
Kab. Bangka Selatan	Toboali	8	8	8	8	8
Kab. Belitung	Tanjungpandan	5	5	5	5	5
Kab. Belitung Timur	Manggar	7	7	7	7	7
Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	7	7	7	7
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		47	47	47	47	47

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2024)

- e. Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki perangkat daerah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dan unit kerja perangkat daerah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua)

Tabel 1.3
Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	SEKRETARIAT DAERAH	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	- Biro Pemerintahan	
	- Biro Kesejahteraan Rakyat	
	- Biro Hukum	
	- Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	
	- Biro Pengadaan Barang/Jasa	
	- Biro Organisasi	
	- Biro Umum	
2	SEKRETARIAT DPRD	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	DINAS PENDIDIKAN	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2023 Tentang

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan
	- SLBN Pangkalpinang	
	- SMAN 1 Pangkalpinang	
	- SMAN 2 Pangkalpinang	
	- SMAN 3 Pangkalpinang	
	- SMAN 4 Pangkalpinang	
	- SMKN 1 Pangkalpinang	
	- SMKN 2 Pangkalpinang	
	- SMKN 3 Pangkalpinang	
	- SMKN 4 Pangkalpinang	
	- SMKN 5 Pangkalpinang	
	- SLBN Koba Bangka Tengah	
	- SMAN 1 Koba Bangka Tengah	
	- SMAN 1 Lubuk Besar Bangka Tengah	
	- SMAN 1 Namang Bangka Tengah	
	- SMAN 1 Pangkalan Baru Bangka Tengah	
	- SMAN 1 Sungaiselan Bangka Tengah	
	- SMAN 1 Simpang Katis Bangka Tengah	
	- SMAN 2 Sungaiselan Bangka Tengah	
	- SMAN Olahraga Muhammad Noer Pangkalan Baru Bangka Tengah	
	- SMKN 1 Koba Bangka Tengah	
	- SMKN 1 Pangkalan Baru Bangka Tengah	
	- SMKN 1 Simpang Katis Bangka Tengah	
	- SMKN 1 Sungaiselan Bangka Tengah	
	- SMKN 2 Koba Bangka Tengah	
	- SLBN Sungailiat Bangka	
	- SMAN 1 Bakam Bangka	
	- SMAN 1 Belinyu Bangka	
	- SMAN 1 Mendo Barat Bangka	
	- SMAN 1 Merawang Bangka	
	- SMAN 1 Pemali Bangka	
	- SMAN 1 Puding Besar Bangka	
	- SMAN 1 Riau Silip Bangka	
	- SMAN 1 Sungailiat Bangka	
	- SMAN 2 Mendo Barat Bangka	
	- SMAN 2 Puding Besar Bangka	
	- SMAN 2 Sungailiat Bangka	
	- SMKN 1 Bakam Bangka	
	- SMKN 1 Belinyu Bangka	
	- SMKN 1 Mendo Barat Bangka	
	- SMKN 1 Sungailiat Bangka	
	- SMKN 2 Sungailiat Bangka	

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	- SLBN Toboali Bangka Selatan	
	- SMAN 1 Air Gegas Bangka Selatan	
	- SMAN 1 Kepulauan Pongok Bangka Selatan	
	- SMAN 1 Lepar Pongok Bangka Selatan	
	- SMAN 1 Payung Bangka Selatan	
	- SMAN 1 Pulau Besar Bangka Selatan	
	- SMAN 1 Simpang Rimba Bangka Selatan	
	- SMAN 1 Toboali Bangka Selatan	
	- SMAN 2 Toboali Bangka Selatan	
	- SMAN 3 Toboali Bangka Selatan	
	- SMKN 1 Air Gegas Bangka Selatan	
	- SMKN 1 Payung Bangka Selatan	
	- SMKN 1 Pulau Besar Bangka Selatan	
	- SMKN 1 Simpang Rimba Bangka Selatan	
	- SMKN 1 Toboali Bangka Selatan	
	- SMKN 1 Tukak Sadaï Bangka Selatan	
	- SLBN Muntok Bangka Barat	
	- SMAN 1 Jebus Bangka Barat	
	- SMAN 1 Kelapa Bangka Barat	
	- SMAN 1 Muntok Bangka Barat	
	- SMAN 1 Parittiga Bangka Barat	
	- SMAN 1 Simpang Teritip Bangka Barat	
	- SMAN 1 Tempilang Bangka Barat	
	- SMKN 1 Kelapa Bangka Barat	
	- SMKN 1 Muntok Bangka Barat	
	- SMKN 1 Parittiga Bangka Barat	
	- SMKN 1 Simpang Teritip Bangka Barat	
	- SMKN 1 Tempilang Bangka Barat	
	- SLBN Tanjung Pandan Belitung	
	- SMAN 1 Membalong Belitung	
	- SMAN 1 Sijuk Belitung	
	- SMAN 1 Tanjung Pandan Belitung	
	- SMAN 2 Tanjung Pandan Belitung	
	- SMKN 1 Badau Belitung	
	- SMKN 1 Selat Nasik Belitung	
	- SMKN 1 Sijuk Belitung	
	- SMKN 1 Tanjung Pandan Belitung	
	- SMKN 2 Tanjung Pandan Belitung	
	- SMKN 3 Tanjung Pandan Belitung	
	- SLBN Manggar Belitung Timur	
	- SMAN 1 Damar Belitung Timur	
	- SMAN 1 Gantung Belitung Timur	
	- SMAN 1 Kelapa Kampit Belitung Timur	
	- SMAN 1 Manggar Belitung Timur	
	- SMAN 1 Simpang Pesak Belitung	

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	Timur	
	- SMKN 1 Dendang Belitung Timur	
	- SMKN 1 Kelapa Kampit Belitung Timur	
	- SMKN 1 Manggar Belitung Timur	
	- SMKN 1 Simpang Renggang Belitung Timur	
	- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (Pangkalpinang Dan Bangka Tengah)	
	- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (Bangka)	
	- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Bangka Selatan)	
	- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (Bangka Barat)	
	- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V (Belitung dan Belitung Timur)	
	- UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	
4	DINAS KESEHATAN	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	- UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	
	- UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno	
	- UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah	
5	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	- UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah	
	- UPTD Panti Sosial Bina Serumpun	
6	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	- UPTD Pengawasan Dan Peralatan	
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	- Cabdin ESDM Wilayah Bangka	
	- Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	
	- Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat	
	- Cabdin ESDM Wilayah Belitung	
	- Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur	
9	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	- UPTD Balai Pengembangan Pariwisata Wilayah Belitung	
10	DINAS PERHUBUNGAN	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	- UPTD Pelayanan Perizinan Terpadu Wilayah Belitung	
13	DINAS TENAGA KERJA	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	- UPTD Balai Latihan Kerja	
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	- UPTD Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang	
	- UPTD Rumah Promosi Dan Kemasan	
16	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	- UPTD Balai Benih Pertanian	
	- UPTD Balai Proteksi Tanaman	
	- UPTD Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih	
	- UPTD Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	
17	DINAS PPPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	- UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peraturan Gubernur Kepulauan

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	- UPTD Balai Pemuliaan Ikan	
	- UPTD Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	- UPTD Laboratorium Lingkungan	
	- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung (Unit I)	
	- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Jebu Bembang Antan (Unit II)	
	- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bubus Panca (Unit III)	
	- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sigambir Kota Waringin (Unit IV)	
	- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sungai Sembulan (Unit V)	
	- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Muntai Palas (Unit VII)	
	- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Belantu Mendanau (Unit X)	
	- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gunung Duren (Unit XIII)	
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
21	INSPEKTORAT DAERAH	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan,

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
24	BADAN KEUANGAN DAERAH	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	- UPTB Wilayah Kabupaten Bangka	
	- UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	
	- UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	
	- UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat	
	- UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang	
	- UPTB Wilayah Kabupaten Belitung	
	- UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur	
25	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
28	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	

Sumber: BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2024)

Adapun jumlah ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 sebanyak 6358 pegawai dengan komposisi PNS sebanyak 5157 dan PPPK sebanyak 1202 pegawai.

Tabel 1.4
Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	26	261	128	415
2.	SEKRETARIAT DPRD	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	4	55	50	109
3.	DINAS PENDIDIKAN	Urusan Pendidikan	27	5736	172	5935
4.	DINAS KESEHATAN	Urusan Kesehatan	36	1158	121	1315
5.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Urusan Sosial Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa	132	127	50	309
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	20	39	145	204
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16	108	8	132
8.	DINAS ENERGI DAN	Urusan Energi dan	23	57	62	142

No.	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
	SUMBER DAYA MINERAL	Sumber Daya Mineral				
9.	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	Urusan Kepemudaan dan Olahraga Urusan pariwisata kebudayaan dan	11	67	52	130
10.	DINAS PERHUBUNGAN	Urusan Perhubungan	12	8	61	81
11.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Persandian dan Statistik	4	66	24	94
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Urusan Penanaman Modal	6	44	29	79
13.	DINAS TENAGA KERJA	Urusan Tenaga Kerja Urusan Transmigrasi	11	121	21	153
14.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah	10	36	27	73
15.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Urusan Perindustrian Urusan Perdagangan	13	105	52	170
16.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Urusan Pertanian Urusan Pangan	17	257	55	329
17.	DINAS PPPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	9	40	17	26
18.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Urusan Kelautan dan Perikanan	16	114	33	163
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Urusan Lingkungan Hidup Urusan Kehutanan	39	230	72	341
20.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Urusan Kearsipan	6	81	18	105

No.	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
21.	INSPEKTORAT DAERAH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pengawasan	6	125	13	144
22.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian	7	133	21	161
23.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Penelitian	8	93	21	122
24.	BADAN KEUANGAN DAERAH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	44	54	221	319
25.	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	20	27
26.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6	40	20	66
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5	35	16	56
TOTAL			519	9152	1529	11200

Sumber: BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2024)

- f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebesar Rp.2.701.092.460.786,00 dengan realisasi Rp.2.492.973.023.519,00
- g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Tabel 1.5
Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan
Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

No.			Urusan Pemerintahan Daerah	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
01			PELAYANAN UMUM		
01	2	03	Pangan	55.147.366.410,00	51.469.096.829,00
01	2	10	Komunikasi dan Informatika	20.773.730.247,00	20.388.826.825,00
01	2	14	Statistik	-	-
01	2	15	Persandian	-	-
01	2	18	Kearsipan	-	-
01	4	01	Sekretariat Daerah	166.030.537.662,00	157.268.439.443,00
01	4	02	Pengawasan	23.167.189.159,00	21.782.751.327,00
01	4	03	Perencanaan	19.469.036.704,00	17.588.118.632,00
01	4	04	Keuangan	537.118.196.300,00	511.778.695.545,00
01	4	05	Kepegawaian	26.961.140.993,00	25.300.634.194,00
01	4	06	Pendidikan dan Pelatihan	-	-
01	4	07	Penelitian dan Pengembangan	-	-
01	4	08	Sekretariat DPRD	125.128.006.058,00	116.224.520.243,00
01	4	09	Penghubung	11.170.640.515,00	10.734.974.095,00
01	4	12	Kesatuan Bangsa dan Politik	70.710.127.787,00	69.337.409.293,00
					-
03			KETERTIBAN DAN KEAMANAN		-
03	1	05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	36.001.217.688,00	34.090.030.955,00
03	4	12	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
					-
04			EKONOMI		-
04	2	01	Tenaga Kerja	19.887.315.927,00	19.518.981.216,00
04	2	07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-
04	2	09	Perhubungan	19.877.610.459,00	18.076.505.516,00
04	2	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.857.024.928,00	16.030.800.423,00
04	2	12	Penanaman Modal	12.170.699.603,00	11.530.479.535,00
04	3	01	Kelautan dan Perikanan	31.114.252.292,00	28.509.622.689,00
04	3	03	Pertanian	-	-
04	3	04	Kehutanan	-	-
04	3	05	Energi dan Sumberdaya Mineral	21.529.657.398,00	20.450.510.154,00
04	3	06	Perdagangan	23.077.608.564,00	22.443.261.034,00
04	3	07	Perindustrian	-	-
04	3	08	Transmigrasi	-	-
					-

No.			Urusan Pemerintahan	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja
05			LINGKUNGAN HIDUP		-
05	2	04	Pertanahan	-	-
05	2	05	Lingkungan Hidup	49.591.024.933,00	47.036.187.368,00
					-
06			PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		-
06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	218.067.944.220,00	209.645.856.028,00
06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	-
					-
07			KESEHATAN		-
07	1	02	Kesehatan	299.318.458.662,00	274.382.224.741,00
07	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-
					-
08			PARIWISATA DAN BUDAYA		-
08	2	16	Kebudayaan	-	-
08	3	02	Pariwisata	45.380.079.126,00	40.703.097.819,00
					-
10			PENDIDIKAN		-
10	1	01	Pendidikan	716.640.432.188,00	616.649.511.819,00
10	2	13	Kepemudaan dan Olah Raga	-	-
10	2	17	Perpustakaan	13.529.760.757,00	13.193.271.841,00
					-
11			PERLINDUNGAN SOSIAL		-
11	1	06	Sosial	31.481.090.989,00	30.034.016.740,00
11	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.226.977.669,00	9.907.345.090,00
11	2	06	Administrasi Kependudukan dan Capil	-	-
TOTAL				2.622.427.127.238,00	2.414.075.169.394,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2024)

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan Daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Sejumlah permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini diidentifikasi sebagai faktor yang perhatian untuk pembangunan di masa mendatang

Permasalahan daerah adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.

1. Rendahnya PDRB Sub Sektor Pertanian
2. Rendahnya PDRB Sub Sektor Perikanan
3. Rendahnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian
4. Rendahnya PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan
5. Rendahnya PDRB Sub Sektor Perdagangan
6. Rendahnya Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik
7. Rendahnya Ekspor
8. Belum maksimalnya nilai investasi (PMA/PMDN) daerah
9. Rendahnya Pembangunan Manusia
10. Menurunnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga dalam demokrasi
11. Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan
12. Kurangnya ketersediaan infrastruktur
13. Rendahnya kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang
14. Tingginya risiko bencana.
15. Belum optimalnya pembangunan kawasan pedesaan
16. Lambatnya penurunan laju pertumbuhan penduduk
17. Lambatnya penurunan kemiskinan
18. Rendahnya kesempatan kerja
19. Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup

b. Visi dan Misi Kepala Daerah;

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahunan. Tujuan pembangunan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekonomi Daerah
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat

6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Untuk mencapai ke 6 (enam) tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 19 (sembilan belas) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian
2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan
3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian
4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan
5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan
6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik
7. Meningkatnya Ekspor
8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah
9. Meningkatnya Pembangunan Manusia
10. Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi
11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
12. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur
13. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang
14. Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana
15. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan
16. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
17. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
18. Meningkatkan Kesempatan Kerja
19. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

- c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;

Program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dan ditetapkan, selain sebagai solusi penyelesaian masalah dan isu strategis, maka yang utama adalah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan dukungan strategi dan arah kebijakan.

Program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah.

Dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS), telah dirumuskan dan ditetapkan sebanyak 47 (tujuh) Program Pembangunan Daerah, yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun ke 47 Program Pembangunan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Program Penyusunan kebijakan Perlindungan lahan pertanian untuk berkelanjutan
2. Program Peningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan
3. Program Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan
4. Program Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Program Peningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya
6. Program Pengembangan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan
7. Program pengembangan pembangunan pariwisata
8. Program Pengembangan kawasan pendukung pembangunan pariwisata
9. Program Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
10. Program Peningkatan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah hasil tambang yang berwawasan lingkungan
11. Program Pengembangan Kawasan industri berbasis potensi daerah
12. Program Pengembangan Kemandirian Energi
13. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
14. Program Penciptaan Peluang lapangan pekerjaan dan usaha
15. Program Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS
16. Program peningkatan pengendalian Inflasi Daerah
17. Program Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
18. Program Pemenuhan infrastruktur pertanian
19. Program Pemenuhan infrastruktur air baku
20. Program Peningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat
21. Program Peningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
22. Program pengembangan konektivitas perhubungan laut
23. Program pengembangan konektivitas perhubungan darat
24. Program Pembangunan jalan dan jembatan

25. Program Peningkatkan partisipasi sekolah masyarakat
26. Program Peningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
27. Program Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral
28. Program Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
29. Program Pengendalian Penyalahgunaan Napza
30. Program Peningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
31. Program Peningkatan tata kelola pengawasan
32. Program Peningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja
33. Program peningkatan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan
34. Program Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
35. Program Peningkatan pencapaian reformasi birokrasi
36. Program peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah
37. Program Peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi
38. Program Peningkatkan pelayanan pemerintah yang efektif dan efisien berbasis teknologi
39. Program Peningkatan kebebasan sipil Masyarakat
40. Program Peningkatan partisipasi politik masyarakat
41. Program pengembangan lembaga demokrasi
42. Program peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana
43. Program pengembangan kawasan berbasis penanggulangan bencana
44. Program Peningkatkan kualitas air
45. Program Peningkatan kualitas Udara
46. Program peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan
47. Program pengendalian terhadap lingkungan Hidup

d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah hingga kegiatan prioritas pembangunan daerah. Adapun kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Ekonomi		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Disnaker
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Disnaker
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Disnaker
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Disnaker
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
	Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	PERDAGANGAN
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi yang terkelola	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DIPARBUDKEPORA
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	DIPARBUDKEPORA
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DIPARBUDKEPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DIPARBUDKEPORA
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	DIPARBUDKEPORA
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	DIPARBUDKEPORA
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Provinsi	DIPARBUDKEPORA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	DIPARBUDKEPORA

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	DIPARBUDKEPORA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DIPARBUDKEPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	DIPARBUDKEPORA
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	DIPARBUDKEPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	DIPARBUDKEPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DPMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	DPMPTSP
Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Lingkungan		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
	(PPLH) Provinsi	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Perbenihan Tanaman Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	DP3CASKB
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DP3CASKB
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	DP3CASKB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak	DP3CASKB

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
	Anak Kewenangan Provinsi	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	DP3CASKB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	DP3CASKB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DP3CASKB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DP3CASKB
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	DP3CASKB
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	DP3CASKB
	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	DP3CASKB
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	DP3CASKB
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	DP3CASKB
	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	DP3CASKB
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DP3CASKB
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	DP3CASKB
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	DP3CASKB
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Profil Kependudukan	DP3CASKB
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	DP3CASKB
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	DP3CASKB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DP3CASKB
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DP3CASKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP3CASKB
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP3CASKB
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS KESEHATAN
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk	DINAS KESEHATAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
	Hewan Lintas Daerah Provinsi	
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	DINAS KESEHATAN
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	DINAS KESEHATAN
	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	DINAS KESEHATAN
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RSUP
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RSUP
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	RSUP
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	RSUP
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	RSUP
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	RSUP
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RUMAH SAKIT JIWA
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RUMAH SAKIT JIWA
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	RUMAH SAKIT JIWA
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	RUMAH SAKIT JIWA
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	RUMAH SAKIT JIWA
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	RUMAH SAKIT JIWA
Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Demokrasi		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	SATPOL PP

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
	Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	SATPOL PP
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	SATPOL PP
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	SATPOL PP
	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Wilayah		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRPERKIM
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	DINAS PERHUBUNGAN
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan	DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
	Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	DINAS PERHUBUNGAN
	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN
	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	DINAS PERHUBUNGAN
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	DINAS PERHUBUNGAN
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN
	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	DPUPRPERKIM
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	DPUPRPERKIM
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	DPUPRPERKIM
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	DPUPRPERKIM
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	DPUPRPERKIM
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	DPUPRPERKIM
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15	DPUPRPERKIM

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
	(Lima Belas) Ha	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	DPUPRPERKIM
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	BPBD
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BPBD
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	DINSOSPEMDES
PROGRAM PENATAAN DESA	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	DINSOSPEMDES
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	DINSOSPEMDES
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	DINSOSPEMDES
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	DISNAKER
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DINSOSPEMDES
Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Pendapatan Masyarakat		
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	DINSOSPEMDES
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	DINSOSPEMDES
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	DINSOSPEMDES
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	DINSOSPEMDES
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	DINSOSPEMDES
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	DINSOSPEMDES
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	DISNAKER
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga	DISNAKER

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelatihan Kerja	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DISNAKER
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DKUKM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DKUKM
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DKUKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DKUKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DKUKM
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	DKUKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	DKUKM
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	DP3CASKB
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DIPARBUDKEPORA
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	DIPARBUDKEPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	DIPARBUDKEPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	DIPARBUDKEPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	DIPARBUDKEPORA
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Disnaker
Prioritas Pembangunan Daerah : Pembangunan Pemerintahan		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG JASA	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	BIRO PENGADAAN BARANG JASA
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BAKUDA
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Pembentukan Perda dan Peraturan	SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
TUGAS DAN FUNGSI DPRD	DPRD	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	BIRO HUKUM
	Fasilitasi Bantuan Hukum	BIRO HUKUM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Mutasi dan Promosi ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Pengembangan Kompetensi ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BAKUDA
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	BADAN PENGHUBUNG
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	BIRO ORGANISASI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	OPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	OPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	OPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAKUDA
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	BAPPEDA
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	BAPPEDA
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPEDA
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	BAPPEDA
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPEDA
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	BAPPEDA
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	BAPPEDA
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	BAPPEDA
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	BAPPEDA

Sumber : RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1.1.3.1 Latar Belakang

Otonomi yang seluas-luasnya diberikan kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan adalah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sama-sama wajib menerapkan SPM untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lebih lanjut penerapan Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan terkait dengan mutu pelayanan dasar, pengaturan lebih rinci ditetapkan oleh masing-masing Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh Menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Untuk itu, mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, namun mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan pada pengumpulan data secara empiris, penghitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk itu dalam rangka memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat Bangka Belitung.

Penerapan SPM oleh Pemerintah Provinsi dipandang perlu agar pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi lebih terukur. Hal ini dikarenakan SPM sudah disertai tolok ukur pencapaian target kinerja yang logis dan riil sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparat Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di daerah

1.1.3.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar pelayanan Minimal Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten;

1.1.3.3 Kesimpulan

Laporan capaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disampaikan. Dimana untuk indeks capaian penerapan SPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan adalah sebesar 97,73 %. Dengan rincian indeks capaian urusan pendidikan yaitu 96,97 % (kategori tuntas utama), urusan kesehatan dengan indek capaian sebesar 100 % (kategori tuntas paripurna), urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan masing-masing indeks capaian sebesar 100 % (kategori tuntas paripurna), urusan ketentraman dan ketertiban umum dengan indeks capaian sebesar 96,28 % (kategori tuntas utama) dan urusan sosial dengan indeks capaian sebesar 93,13 % (kategori tuntas utama).

Berdasarkan hasil capaian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian SPM tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum telah tercapai. Namun demikian yang perlu mendapatkan perhatian, seperti urusan pekerjaan umum, dimana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki SPAM regional dan SPALD regional karena terkendala beberapa hal, seperti kondisi geografis (sumber air baku) di Bangka Belitung, sehingga indikator ini belum dapat untuk dilaksanakan.

Berdasarkan study kelayakan SPAM Regional di Pulau Belitung, hasil kajian menyatakan bahwa pembangunan SPAM Regional tidak layak untuk dilaksanakan. Salah satu faktornya dikarenakan sumber air baku untuk mendukung kapasitas 20L/detik di Pulau Belitung belum ada.

Idle Capacity untuk infrastruktur yang sudah terbangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih besar sehingga prioritas untuk SPAM saat ini adalah meningkatkan capaian SR dan perluasan jaringan SPAM Perpipaan.

Namun demikian pemerintah provinsi pada Tahun 2024 telah melakukan upaya bantuan kepada pemerintah kabupaten berupa Kegiatan Penyediaan Prasarana Jamban Sehat untuk Pemicuan PHBS dari Intervensi Penurunan Stunting di 4 (empat) Kabupaten sebanyak 153 unit. Adapun kegiatan pembangunan ini juga dimaksudkan untuk membantu meningkatkan capaian SPM kabupaten bidang sanitasi layak bagi masyarakat dan sekaligus menjadi capaian SPM provinsi.

Pada urusan sosial yang menjadi kendala utama adalah adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2024, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Selain itu kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2024 diakhir bulan Oktober 2024 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan

pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan.

Pada urusan kesehatan dan trantibunlinmas masih sulitnya menghitung target capaian SPM dalam tahapan penghitungan kebutuhan, dikarenakan indikatornya bersifat respon kasus.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja pada tabel 2.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023 (N-1)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (N)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,09	74,55	0,621
2	Angka Kemiskinan	4,52	4,55	0,664
3	Angka Pengangguran	4,56	4,63	1,535
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,38	0,77	-82,42
5	Pendapatan Per Kapita	67.813.241	70.194.392	3,511
6	Ketimpangan Pendapatan	0,245	0,244	-0,408

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Capaian kinerja makro yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 sebesar 74,55 mengalami perubahan dengan adanya peningkatan sebesar 0,621% dari tahun 2023 yang sebesar 74,09. Selama periode 2020- 2024, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata meningkat sebesar 0,62% per tahun. Angka Kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 4,52 dan pada tahun 2024 sebesar 4,55 mengalami perubahan dengan peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,664 %, Angka Pengangguran tahun 2023 sebesar 4,56 tahun 2024 sebesar 4,63 mengalami perubahan dengan peningkatan sebesar 1,535 %, Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 sebesar 4,38 dan tahun 2024 sebesar 0,77 mengalami perubahan dengan penurunan sebesar -82,42, Pendapatan Perkapita (ADHK) tahun 2023 sebesar 67.813.241 dan tahun 2024 sebesar 70.194.392 mengalami perubahan sebesar 3,511 % dan Ketimpangan Pendapatan tahun 2023 sebesar 0,245 dan tahun 2024

0,244 mengalami perubahan dengan penurunan sebesar -0,408.

Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 difokuskan pada penguatan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan sumber daya manusia dan stabilitas demokrasi. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu dari empat prioritas pembangunan utama, prioritas lainnya meliputi pembangunan lingkungan, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan demokrasi. Dengan fokus pada penguatan ekonomi, pengembangan SDM, dan stabilitas demokrasi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Upaya-upaya lainnya juga dilaksanakan pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan sektor pariwisata dan pertanian dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Pemerintah daerah dapat memperkuat program-program pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah daerah dapat terus memantau dan mengevaluasi program-program pembangunan untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	68,85		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	29,73		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,72		
		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100		
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	5,98		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	0		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	59,39		
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0		
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0		
		Rasio kemantapan jalan	93,03		
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan	65,82		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sertifikat pelatihan ahli			
4	Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0		
		Persentase Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	3,60		
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	85,61		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100		
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	50		
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100		
		Persentase penanganan pra bencana	100		
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100		
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100		
7	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	57,14		
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0.19		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	87,8		
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	34,23		
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	72,16		
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang - undangan bidang ketenagakerjaan	11,07		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	21,09		
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	4,56		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk	20,53		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perempuan			
9	Pangan	Persentase Cadangan Pangan	124,64		
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0		
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	0		
		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	0		
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	72,79		
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	13,72		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100		
		Pemanfaatan data kependudukan	100		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100		
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	34,78		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,18		
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,18		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,98		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Perhubungan	Rasio konektivitas provinsi	4,70		
		V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,19		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	96,29		
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	90,90		
		Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	4,72		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	11,32		
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	3,38		
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	91,05		
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,42		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,261		
		Peningkatan Prestasi Olahraga	31		
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	71,78		
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	77,77		
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	77,47		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	84,59		
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	50		
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	95,90		
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	90,28		
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	26,30		
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	-14,68		
		Tingkat hunian akomodasi	41,96		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3,02		
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	596,30		
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-100		
28	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	50		
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	50,39		
		Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0,98		
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100		
		Persentase Desa yang Teraliri Listrik	100		
30	Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	-17,81		
		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100		
		Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	90,58		
		Tertib Usaha	0		
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	88,51		
		Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	100		
		Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	8,06		
31	Perindustrian	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	7,69		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP	81,54		
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	0		Surat keterangan
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		Surat keterangan
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		Surat keterangan
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125		
32	Transmigrasi		0		Tidak ada IKK

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	18,82		
		Rasio PAD	37,79		
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer	67,29		

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		expenditures)			
		Opini Laporan Keuangan	WTP (7)		
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3		
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		
2	Pemerintahan (Pengadaan)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0		
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	80,24		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	53,33		
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-46,86		
3	Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	67,85		
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	36,85		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25,90		
4	Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam	19,73		

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		APBD			
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	17,59		
		Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? Ya 2. Apakah ada manual untuk Menyusun daftar asset tetap? Ya 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? Ya 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? Ya		
		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	6,18		
5	Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>information on resources available to frontline service delivery units</i>)	89,51		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>public access to fiscal information</i>)	100		

2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.2.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2022 Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung memasuki masa akhir jabatan periode 2017- 2022. Hal tersebut juga berarti berakhir pula dokumen perencanaan yang diacu yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan tahun 2017 menjabat hingga tahun 2022 dan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan diangkat Penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan serentak pada tahun 2024. Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 memberikan solusi bagi daerah untuk mengisi kekosongan dokumen pembangunan jangka menengah akibat kekosongan jabatan kepala daerah. Inmendagri tersebut juga memerintahkan secara khusus bagi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Pada Tahun 2024 ini merupakan Tahun kedua dari Perencanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Penyusunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 ini merupakan bagian dari kerangka mewujudkan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 yaitu untuk **“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Maju, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan 2025”**. RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 sebagai bagian dari RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, juga merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya. RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 juga harus memperhatikan keselarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, dimaksudkan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai

program pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi, dan selaras, yang pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Setiap kebijakan pembangunan wilayah harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program utama dalam dokumen RTRW. Substansi dokumen RPD ini juga mengintegrasikan substansi Peraturan lainnya seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Standar Pelayanan Minimal, dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK).

Atas dasar hal tersebut, penyusunan dokumen RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 perlu dirumuskan Tujuan dan Sasaran hingga program pembangunan daerah yang mampu mewujudkan cita-cita pembangunan Daerah Kepulauan Bangka Belitung, terutama mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan tahun 2023-2026 akan difokuskan pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pembangunan ekonomi dilihat dari beberapa indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB

per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan.

Memperhatikan terhadap landasan berpikir sebagaimana di atas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 beserta indikator dan target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target				Akhir
				2021	2023	2024	2025	2026	2026
Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	7,78*	3,85	4,23	4,43	4,60	4,60
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-9,76	4,03	4,05	4,25	4,45	4,45
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	-9,23	2,95	4,52	1,75	0,46	0,46
		Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	-5,64	1,86	3,25	4,50	4,55	4,55
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	-4,62	6,50	4,94	5,50	5,55	5,55
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	43,00	2,70	2,63	2,56	2,50	2,50
		Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	106,95	8,13	7,51	6,99	6,53	6,53
		Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	-39,68	25,00	30,00	30,77	34,12	34,12

Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,69	71,91	72,13	72,35	72,57	72,58
Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77,79	77,39	78,40	79,41	80,42	80,42
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	68,25	69,00	69,75	70,50	70,51
Menurunkan disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	39,45	25,50	49,51	69,85	100	100
		Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,8
		Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	160,98	160,48	159,98	159,48	158,98	158,98
		Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	0,704	0,721	0,730	0,739	0,748	0,748
		Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,93	1,79	1,74	1,70	1,68	1,68
	Indeks Gini	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,67	4,30	4,20	4,10	4,01	4,01
		Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,03	4,47	4,39	4,26	4,19	4,19

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	75,43	75,84	76,7	77,5	77,5
--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------	-------	-------	-------	------	------	------

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

2.2.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan dokumen RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026. Hal tersebut karena setelah penetapan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih telah disusun RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022-2027 yang akan berlaku mulai tahun 2025. Meskipun sebagai dokumen antara, RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 diharapkan mampu mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama dengan mewujudkan program/kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 selanjutnya disusun memuat target kinerja yang akan dicapai oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024, yang mengacu pada target capaian tahunan dan program-program yang dimuat dalam RPD Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026.

Dokumen RKPD Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 berada pada tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026, yang berada pada tahapan lima tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 dengan penekanan memprioritaskan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan menekan tingkat inflasi serta menciptakan rasa aman, pemerintah harus tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, pemerintah menetapkan membangun dari pinggiran, menolak negara lemah dalam reformasi hukum, meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan produktivitas dan daya saing, kemandirian ekonomi, revolusi karakter

bangsa dan mempertegas kebhinekaan.

Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. 2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah). 3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS APBD) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD. 4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja jangka menengah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Selanjutnya ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Selanjutnya, sesuai yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 yang mengacu pada dokumen RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 disebutkan bahwa:

- 1) Pencapaian target sasaran Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 9 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp16.558.926.180,00
- 2) Pencapaian target sasaran Meningkatnya PDRB Sub Sektor

Perikanan pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 5 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 6.428.782.747,00

- 3) Pencapaian target sasaran Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 4 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 443.861.399,00
- 4) Pencapaian target sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 4 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 1.246.234.440,00.
- 5) Pencapaian target sasaran Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 5 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 521.331.788,00.
- 6) Pencapaian target sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 9 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 4.347.268.384,00.
- 7) Pencapaian target sasaran Meningkatnya Ekspor pada tahun 2024 (TIDAK ADA PROGRAM)
- 8) Pencapaian target sasaran Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 4 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 1.443.420.245,00.
- 9) Pencapaian target sasaran Meningkatnya Pembangunan Manusia pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 21 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 442.759.272.391,00.
- 10) Pencapaian target sasaran Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 7 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 70.586.189.312,00.
- 11) Pencapaian target sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 24 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 1.887.153.516.035,00.
- 12) Pencapaian target sasaran Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 12 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 183.428.062.612,00.

- 13) Pencapaian target sasaran Meningkatkan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 3 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 4.812.544.859,00.
- 14) Pencapaian target sasaran Menurunkan Resiko Bencana pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 2 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 4.399.136.352,00.
- 15) Pencapaian target sasaran Percepatan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 4 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 2.135.328.163,00.
- 16) Pencapaian target sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 4 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 468.713.000,00.
- 17) Pencapaian target sasaran Menurunkan Tingkat Kemiskinan pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 5 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 3.211.461.250,00.
- 18) Pencapaian target sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 13 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 27.063.029.664,00.
- 19) Pencapaian target sasaran Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 12 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp 7.744.357.721,00.

Capaian kinerja Tahun 2024 tersebut, didasarkan kepada dokumen Perubahan RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 oleh Tim Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika pembangunan saat ini, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 guna penyesuaian terhadap prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pergeseran pagu program/kegiatan/sub kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan program/kegiatan/subkegiatan, penambahan program/kegiatan/subkegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu program/kegiatan/subkegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang digunakan

dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2024.
 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
 Proyeksi Laju Pertumbuhan ekonomi Perubahan Tahun 2024

Lapangan Usaha		2024				Growth
(1)		TW I	TW II	TW III	TW IV	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.904.478,66	2.919.147,98	2.944.385,27	2.969.622,55	4,01
B	Pertambangan dan Penggalian	1.332.004,17	1.672.723,05	1.326.089,74	1.323.132,52	-11,74
C	Industri Pengolahan	2.823.555,34	3.290.104,00	3.308.719,00	3.327.334,01	0,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.697,24	16.809,45	17.006,16	17.202,86	10,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.691,16	2.889,18	2.914,30	2.939,42	7,09
F	Konstruksi	1.231.846,08	1.440.010,90	1.455.097,27	1.470.183,65	6,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.119.960,82	2.367.168,27	2.388.836,72	2.410.505,18	6,90
H	Transportasi dan Pergudangan	623.389,99	643.850,08	650.190,11	656.530,13	3,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	448.670,87	443.063,40	447.787,28	452.511,16	4,37
J	Informasi dan Komunikasi	543.944,61	532.354,01	539.200,52	546.047,04	9,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	306.866,99	295.250,31	298.321,52	301.392,73	2,74
L	Real Estat	535.324,44	542.610,14	547.932,74	553.255,34	3,22
M,N	Jasa Perusahaan	41.621,45	41.772,87	42.147,53	42.522,20	10,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	778.642,08	867.931,42	876.435,65	884.939,88	3,29
P	Jasa Pendidikan	410.685,39	403.762,10	407.906,52	412.050,93	2,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	225.571,38	244.980,69	247.756,78	250.532,87	8,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	130.744,77	132.924,43	134.370,46	135.816,48	9,66
Produk Domestik Regional Bruto			14.475.695,44	15.857.352,29	15.635.097,56	15.756.518,93

Berdasarkan proyeksi laju Pertumbuhan ekonomi diatas, maka disusunlah Perjanjian Kinerja sesuai dengan target perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Perubahan 2024
1.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	1,56
2.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	7,80
3.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	-11,74
4.	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	0,20
5.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	6,90
6.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	4,42
7.	Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	6,49
8.	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	10,57
9.	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,94 - 73,06
10.	Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	78,40
11.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	69
12.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	49,51
13.	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,70
14.	Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	159,98
15.	Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	0,73
16.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,74
17.	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,49
18.	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,89
19.	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,24

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. (data diolah)

Perjanjian Kinerja Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, memuat target kinerja yang akan dicapai oleh Gubernur

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yang mengacu pada target capaian tahunan dan program-program yang dimuat dalam RPD Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 (Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026) dan APBDP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024).

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Rencana pelaksanaan pembangunan di Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimuat dalam RKPD Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, disusun mengacu pada target kinerja RPD Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026.

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 disusun dengan memedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis aktual. Tema pembangunan tahun 2024 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKPD 2024. Dalam rancangan RKPD 2024, tema pembangunan sementara masih didasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dalam RPD Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 dengan memperhatikan isu pembangunan yang berkembang.

Tema Pembangunan Tahun 2024 yaitu Pembangunan ekonomi menjadi salah satu dari empat prioritas pembangunan utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disamping pembangunan lingkungan, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan demokrasi. empat prioritas pembangunan utama ini akan didukung oleh pembangunan wilayah, pemerataan pendapatan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan.

Mendasarkan pada tema pembangunan diatas, maka prioritas pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan Lingkungan
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Pembangunan Demokrasi
5. Pembangunan Wilayah

6. Pembangunan Pendapatan Masyarakat
7. Pembangunan Pemerintahan

Ketujuh rumusan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 yang tercantum dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026

2.2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dengan Tahun Sebelumnya

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, terdapat 19 sasaran Pemerintah Daerah dengan 19 indikator Sasaran Perangkat Daerah yang menjadi indikator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Capaian indikator tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024	Ket.
1.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	%	5,50	1,56	2,26	144,87	TERCAPAI
2.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	0,27	7,80	4,91	62,94	Tidak Tercapai
3.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	%	-1,19	-11,74	-4,00	165,93	TERCAPAI
4.	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1,92	0,20	-3,93	-1.965,00	Tidak Tercapai
5.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	%	2,36	6,90	-0,34	-4,93	Tidak Tercapai
6.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	%	10,32	4,42	-4,25	-96,15	Tidak Tercapai
7.	Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	%	-22,93	6,49	-16,50	-254,24	Tidak Tercapai

8.	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	%	9,03 T	10,57 T	12,37 T	117,03	TERCAPAI
9.	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,09	72,94 - 73,06	74,55	102,04	TERCAPAI
10.	Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	75,95	78,40	75,95*)	96,875	Data belum dirilis dari pusat
11.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,00	69,00	69,00*)	100	Data belum dirilis dari KEMENPAN
12.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	%	19,89	49,51	29,38	59,34	Tidak Tercapai
13.	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	0,6	0,70	0,65	92,86	Tidak Tercapai
14.	Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	155,61	159,98	143,42	110,35	TERCAPAI
15.	Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	Indeks	0,721	0,73	0,81	110,96	TERCAPAI
16.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,37	1,74	1,35	122,41	TERCAPAI
17.	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	%	4,52	4,49	4,55	98,66	Tidak Tercapai
18.	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,56	4,89	4,63	105,32	TERCAPAI
19.	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,64	73,24	72,79	99,39	Tidak Tercapai

Sumber: Perangkat Daerah Penanggung Jawab Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024
(Data diolah)

Berdasarkan tabel realisasi capaian indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 menunjukkan dari 19 indikator kinerja, terdapat 8 indikator kinerja yang memiliki persentase capaian $\geq 100\%$ terhadap

target RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026.

Namun, masih terdapat 9 indikator kinerja yang **belum** tercapai sesuai dengan target. Sebanyak 2 indikator belum bisa ditentukan keberhasilannya karena capaian tahun 2024 belum dirilis oleh Kementerian pengampu indikator. Meskipun demikian, beberapa indikator mengalami peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun 2024. Masih terdapat pekerjaan rumah yang menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dan menjadi sorotan di masyarakat yaitu angka kemiskinan dan ketimpangan.

Dari total 8 indikator yang telah tercapai, atau ketercapaiannya sama atau bahkan lebih dari 100% yaitu:

- 1) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian,
- 2) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian
- 3) Pertumbuhan Investasi
- 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 5) Indeks Resiko Bencana
- 6) Indeks desa membangun
- 7) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
- 8) Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari total 9 indikator yang belum tercapai atau tingkat capaiannya berada pada aras <100% yaitu:

- 1) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
- 2) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
- 3) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan
- 4) Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik
- 5) Laju Pertumbuhan Ekspor
- 6) Persentase Ketersediaan Infrastruktur
- 7) Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 8) Persentase Angka Kemiskinan
- 9) Indeks Kualitas Lingkungan

Sebanyak 2 indikator yang belum bisa ditentukan keberhasilannya dikarenakan nilai capaian tahun 2024 belum dirilis oleh Kementerian pengampu, yaitu:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi
- 2) Indeks Demokrasi Provinsi

Dampak dari pandemi masih berpengaruh terhadap capaian kinerja, sebanyak sebelas indikator yang realisasinya belum sesuai target tersebut, selanjutnya perlu menjadi fokus Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya. Uraian pencapaian dari masing-masing IKU Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersebut di atas, diinformasikan sebagai berikut.

2.2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Sasaran 1: Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian adalah Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian.

1. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian.

Sektor Pertanian merupakan sektor unggulan dalam prioritas pembangunan daerah Bangka Selatan. Hal ini didasari karena sektor utama dalam mata pencaharian penduduk di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. kinerja pertanian diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura diperkirakan meningkat seiring dengan upaya pemerintah dan masyarakat dalam memperluas lahan tanam untuk mendukung peningkatan produksi. Lebih lanjut, subsektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit juga diperkirakan mengalami peningkatan produktivitas pasca berakhirnya fenomena El Nino yang berlangsung pada tahun 2023.

Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$ <p>PDRBi(t) : PDRB sub sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sub sektor i tahun t-1</p> $\frac{7455125.44 - 7064929.87}{7455125.44} \times 100\% = 5.52$

Keterangan: *) Sumber Data: Basis Data PDRB Kementerian Pertanian Republik Indonesia

*) PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2022 -2023

Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan $\frac{7455125.44 - 7064929.87}{7455125.44} \times 100\%$. Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah **2,26** atau sebesar **144,87** dari target **1,56**. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Indikator sasaran diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan PDRB sub sektor pertanian tahun 2023 dikurangi PDRB sub sektor pertanian tahun 2022 dibagi PDRB sub sektor pertanian tahun 2023 dikali 100% (*Perhitungan menggunakan angka tahun sebelum, dikarenakan data PDRB Tahun 2024 belum dirilis*). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui laju pertumbuhan PRDB sub sektor pertanian sebesar 2,26.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				Target	Realisasi	Persentase capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	4,03	5,5	1,56	2,26	144,87	4.60	49,13

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian adalah sebagai berikut:

- Tercapai 2,26, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 144,87. (tercapai).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 5,5 terhadap target tahun lalu sebesar 4.03 terdapat penurunan sebesar 3,24.
- Dibandingkan dengan target akhir RPD, sasaran baru berhasil tercapai sebesar 49,13

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 tumbuh sebesar 2,26 didorong oleh pertumbuhan pada lapangan usaha (LU) utama yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU lainnya yaitu LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; LU Jasa Pendidikan; serta LU Informasi dan Komunikasi. Tumbuhnya LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan utamanya didorong oleh sub kategori perikanan, seiring dengan peningkatan jumlah produksi perikanan.

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga didorong oleh subkategori perkebunan tahunan seperti produksi lada dan karet.

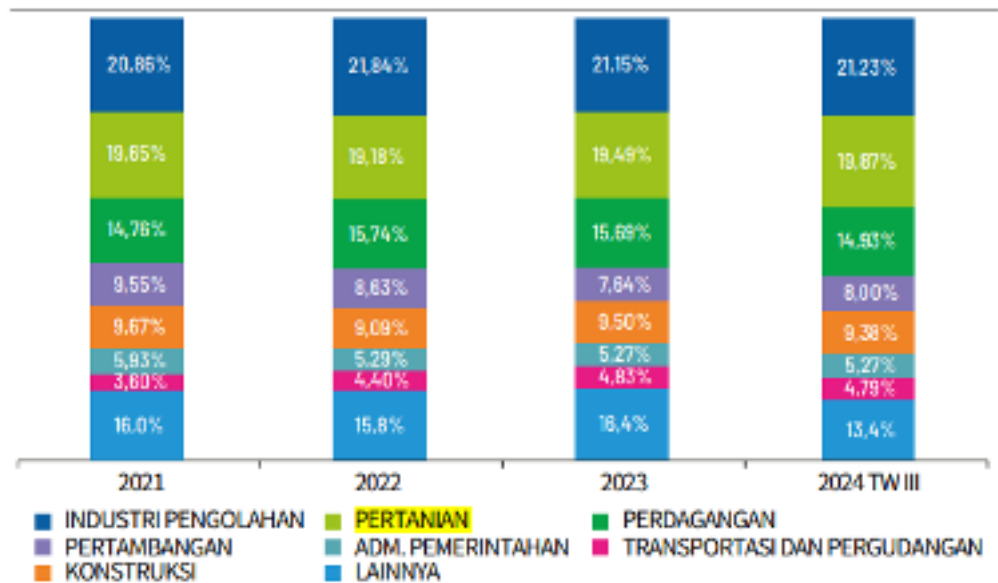
Pertumbuhan ekonomi Sub Sektor Pertanian sejalan dengan peningkatan kinerja nilai ekspor lada yang mencapai 70,69% (yoy) pada TW 3 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 38,42% (yoy). Puncak musim panen lada disertai dengan kenaikan harga lada internasional sebesar 32,14% (yoy) atau sebesar 3.141 MYR/100 kg pada triwulan III 2024 berdampak pada kenaikan ekspor lada. Sebagai komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kenaikan harga lada tersebut menjadi angin segar bagi para petani lada untuk terus memperkuat produksi lada. Pada 2024, komoditas unggulan lada dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diekspor ke negara tujuan utama yaitu Singapura dengan pangsa 30,78%. Selain itu, komoditas tersebut juga dipasarkan ke negara Jepang dengan pangsa 14,75%, Amerika Serikat dengan pangsa 11,46%, Taiwan dengan pangsa 10,53%, dan Vietnam 8,17%.

Lebih lanjut, subsektor perkebunan tahunan komoditas karet juga menunjukkan perbaikan kinerja. Produksi karet meningkat seiring beralihnya pekerja dari sektor pertambangan dan industri pengolahan logam timah ke sektor perkebunan karet. Penambahan pekerja tersebut menyebabkan lahan perkebunan karet yang tergarap lebih banyak dan berdampak pada hasil produksi yang meningkat. Pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tertahan oleh kinerja komoditas kelapa sawit dan Crude Palm Oil (CPO) yang kurang optimal. Belum masuknya musim panen pada triwulan laporan disertai beberapa kebun kelapa sawit telah mencapai umur 25 tahun berdampak pada hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) yang kurang optimal.

Lebih lanjut, sebagian lahan perkebunan kelapa sawit masih dalam proses replanting, sehingga lahan kebun produktif menjadi lebih sedikit. Indikasi penurunan produksi TBS tersebut tersebut tecermin dari kinerja ekspor komoditas CPO yang berkontraksi, baik secara volume maupun nilai. Pada 2024, secara nilai, ekspor CPO juga berkontraksi 20,35% (yoy). Meskipun demikian, penurunan nilai lebih lanjut tertahan seiring dengan harga CPO internasional yang tumbuh menguat sebesar 9,59% (yoy) pada Tahun 2024

Berikut ini gambar pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama empat tahun terakhir

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 tersebut sejalan arah pertumbuhan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,07% (c-to-c). Secara sektoral, pertumbuhan terutama dikontribusikan oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi, pertanian dan lapangan usaha lainnya. Sementara dari sisi pengeluaran, semua komponen mengalami turut berkontribusi, termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto.

Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024, terlihat bahwa capaian pada tahun 2024 sebesar 2,26% lebih tinggi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1,56%. Capaian tersebut juga lebih rendah bila di bandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,50% pada tahun 2023.

Secara angka target Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian sudah sesuai dengan target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024, dan capaian kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian menunjukkan arah perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

Namun jika dibandingkan dengan capaian secara nasional lebih pertumbuhan PDRB Sub Sektor pertanian lebih rendah yaitu sebesar 2,79.

Tabel 2.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<p>Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian</p> $\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100$ <p>PDRBi(t) : PDRB sub sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sub sektor i tahun t-1</p> <p>Realisasi:= (390195.57/7064929.87) x 100% = 5.52</p>	5	4.23	5,05	2,26	101 %	130.57 %

2. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan

Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$ $\frac{(3682,58 - 3673,63)}{3673,63} \times 100\% = 0,24$ <p>PDRBi(t) : PDRB sub sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sub sektor i tahun t-1</p>

Keterangan: *) Sumber Data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*) PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2023 (Milyar Rupiah)

Kinerja sasaran meningkatkan PDRB sub sektor perikanan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan PDRB sub sektor perikanan tahun 2024 dikurangi PDRB sub sektor perikanan tahun 2023 dibagi PDRB sub sektor perikanan tahun 2023 dikali 100%.

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 4,91 atau sebesar 62,94% dari

target 7,80 .Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.9 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				Target	Realisasi	Persentase capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	5,18	0,24	7,80	4,91	62,94	4,45	110

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 (diolah)

Analisis Ketercapaian Sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan adalah sebagai berikut:

- Tercapai 4,91 dengan demikian prosentase capaian terhadap target sebesar 62,94 (tidak tercapai).
- PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,67 dibandingkan tahun lalu.
- jika dibandingkan dengan target akhir RPD capaian tahun 2024 telah mencapai 110 % (tercapai).

Subsektor perikanan menjadi kontributor utama pertumbuhan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Produksi komoditas perikanan meningkat pada 2024, tecermin dari volume ekspor perikanan yang meningkat 32,53% (yoy). Sebagai wilayah kepulauan yang kaya akan potensi sumber daya perikanan, masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki preferensi untuk mengonsumsi ikan tangkapan laut.

Selain masyarakat lokal, permintaan perikanan tangkap juga berasal dari pasar luar negeri. Malaysia menjadi negara tujuan ekspor utama komoditas perikanan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dengan pangsa mencapai 70,67%. Selain Malaysia, terdapat beberapa negara tujuan Asia lainnya yang turut mengimpor komoditas perikanan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain Vietnam dengan pangsa 14,67%, Singapura dengan pangsa 11,73%, dan Hongkong dengan pangsa 1,81%. Secara umum, jenis perikanan tangkap unggulan

dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain cumi-cumi, rajungan, ikan selar, ikan tenggiri, dan ikan kembung. Di sisi lain, NTP subsektor perikanan mengalami penurunan menjadi 109,68. Hal tersebut didukung oleh beberapa komoditas perikanan pada tahun 2024 yang tercatat deflasi, yakni ikan kembung (-23,27%;yoy), ikan selar (-11,71%; yoy), ikan tongkol (-18,34%; yoy), ikan singkur (-28,11%; yoy) dan ikan kerisi (-22,04%; yoy).

Meskipun secara angka target Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan belum sesuai dengan target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, namun capaian kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan menunjukkan arah perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

Namun jika dibandingkan dengan capaian secara nasional capaian provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah yaitu sebesar 0,58

Tabel 2.10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Capaian	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<p>Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan</p> $\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)}$ <p>PDRBi(t) : PDRB sub sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sub sektor i tahun t-1</p> <p>Realisasi $\frac{(3682,58-3673,63)}{3673,63} \times 100\% = 100,24\%$</p>	8,71	5,25	60,28%	5,49	4,91	4,37%.%

3. Laju Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertambangan dan Penggalian

Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Penggalian diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Penggalian. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan PDRB Sektor pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Penggalian	$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$ <p> PDRBi(t) : PDRB sub sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sub sektor i tahun t-1 </p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah -4 atau sebesar 293,5 dari target -11,74. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.12 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				Target	Realisasi	Persentase capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	2,95	-1,19	-11,74	-4	293,5	0,46	-11,5

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian adalah sebagai berikut:

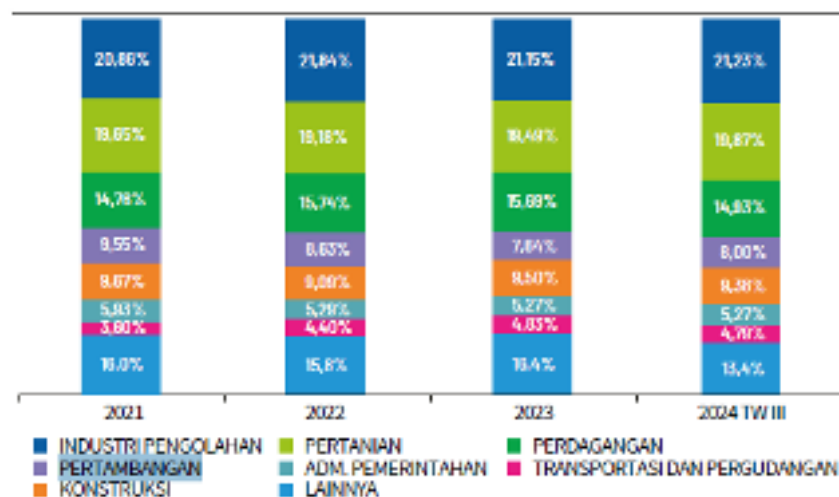
- Tercapai -4, dari target sebesar -11,74 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 293,5% (tidak tercapai*).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar -1,19 % (kolom 4), terdapat penurunan *) sebesar 2,81.
- Dibandingkan dengan target akhir RPD, sasaran tidak tercapai sebesar -11,5 (capaian masih diangka minus)

Pada tahun 2024, LU Pertambangan dan Penggalian melanjutkan kontraksi. Aktivitas produksi timah yang masih belum normal berdampak pada terkontraksinya LU Pertambangan dan Penggalian. Meskipun demikian, LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan laporan membaik dibandingkan triwulan

sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah smelter swasta yang memperoleh persetujuan RKAB dan melakukan kegiatan penambangan. Kinerja LU Industri Pengolahan tetap berkontraksi, meskipun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Subkategori industri logam dasar memiliki pangsa terbesar dalam LU Industri Pengolahan.

Sub kategori industri logam dasar yang ditopang oleh logam timah masih menurun cukup dalam dibandingkan tahun sebelumnya. Proses hukum tata kelola dan tata niaga timah yang masih berlangsung serta masih berjalannya proses persetujuan RKAB beberapa smelter swasta menjadi salah satu penyebab tertahannya kinerja LU Industri Pengolahan.

Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Sebaliknya, tren pangsa LU Pertambangan dan Penggalian cenderung menurun. LU Pertambangan dan Penggalian memberikan andil pertumbuhan negatif sebesar 0,18% (yoy), tidak sedalam kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,81% (yoy).

Gambar 2.3 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Perbaikan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian tersebut utamanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah smelter swasta yang memperoleh persetujuan RKAB dan melakukan kegiatan penambangan selama Tahun 2024. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang tetap kuat sebesar 7,52%, kendati melambat sebesar 11,08% . Meskipun demikian, terkontraksinya kinerja LU Pertambangan dan Penggalian secara tahunan turut dipengaruhi oleh aktivitas penambangan bijih timah yang masih belum normal. Penurunan kinerja sektor Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

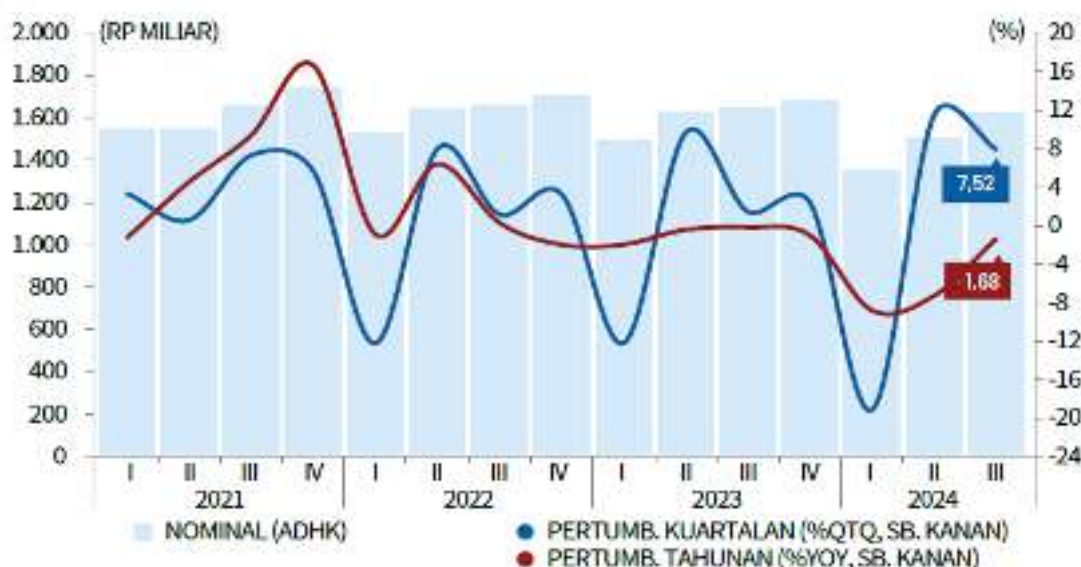
secara tidak langsung mempengaruhi harga timah internasional. Sebagai produsen timah terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Myanmar pada tahun 2023 (Grafik 1.10), Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pasokan timah global, yang didominasi bersumber dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terbatasnya pasokan timah dunia dari Indonesia pada Tahun 2024 mendorong kenaikan harga timah internasional. Pada Tahun 2024, rata-rata harga timah internasional sebesar 31.745 USD/MT atau meningkat 18,30% Komoditas logam timah memiliki prospek yang baik seiring dengan tren penggunaan kendaraan listrik yang terus meningkat.

Kesadaran akan penggunaan *renewable energy* untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan pada 8 Agustus 2019 diperkirakan akan membutuhkan sumber daya timah yang cukup tinggi. Hal ini seiring dengan kebutuhan timah sebagai salah satu komponen penting dalam mobil listrik.

Selain itu, permintaan timah dunia sebagai logam *solder* juga terus tumbuh, seiring dengan meningkatnya prospek usaha produk *chip* di pasar global. Kedepannya, Pemerintah Daerah dan berbagai pihak terkait terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola dan tata niaga timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Meskipun secara angka target Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian belum sesuai dengan target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, namun capaian kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan arah perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 2.4 Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

Namun jika dibandingkan dengan capaian secara nasional capaian provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah yaitu sebesar 5,14.

Tabel 2.13 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

N o .	Indikator dan Formula Perhitungan	Targe t (Nasi onal)	Targ et (PD)	Cap aian	Real isasi (Nasi onal)	Real isasi (PD)	Cap aian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<p>Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Penggalian</p> $\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$ <p>PDRBi(t) : PDRB sub sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sub sektor i tahun t-1</p> <p>Realisasi = $(14.350/16.204) \times 100\% = 88,56\%$ (cth)</p>	N/A	4,05	N/A	3,46	-1,68	N/A

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

4. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{100\% \text{ PDRBi}(t-1)} \times$ <p>PDRBi(t) : PDRB sub sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sub sektor i tahun t-1</p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah -3,68 atau sebesar -1.965% dari target 0,20. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.15 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	1,86	1,92	0,20	-3,93	-1.965	4,55	-86,37

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan adalah sebagai berikut:

- Tercapai -3,93 (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar -1.965% (kolom 7) (tercapai/tidak tercapai*).

- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 1,92 (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 1,86 (kolom 3) terdapat peningkatan/penurunan*) sebesar 1.966,92% (persentase capaian capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, sasaran Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan berhasil tercapai/tidak tercapai sebesar -86,37% (kolom 9)

Berdasarkan data tabel diatas capaian pada indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan mencapai angka -1.965 hal ini dikarenakan penurunan produksi baik bijih maupun logam timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dampak permasalahan tata niaga pertambangan timah. Hal tersebut juga terkonfirmasi dengan adanya informasi beberapa smelter pengolahan logam timah yang menghentikan kegiatan operasionalnya serta adanya isu terkait beberapa smelter swasta yang masih belum mendapatkan persetujuan RKAB ekspor logam timah sehingga menahan volume ekspor timah. Sejalan dengan terdeselerasinya LU Pertambangan dan Penggalian, LU Industri Pengolahan juga diperkirakan melambat seiring terhambatnya pengolahan logam timah. Penghentian operasional sejumlah smelter timah secara temporer berdampak pada penurunan kapasitas produksi logam timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lebih lanjut, terdapat penutupan dua pabrik kelapa sawit yang juga menjadi penyebab penurunan kinerja LU Industri Pengolahan pada tahun 2024. Meskipun demikian, permintaan global terhadap komoditas timah diperkirakan tetap tinggi seiring meningkatnya permintaan terhadap peralatan berteknologi tinggi, produk renewable energy, mobil listrik, dan semi konduktor. Pada tahun 2025, kinerja LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh menguat, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Seiring dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah telah melakukan revisi terhadap ketentuan sebelumnya, yang mana RKAB sebelumnya diajukan setiap tahun menjadi tiga tahun sekali. Perubahan tersebut diharapkan memberikan efisiensi pengelolaan kegiatan pertambangan oleh

pelaku usaha, termasuk mengurangi beban administratif.

lapangan usaha yang mengalami kontraksi terbesar kedua paada tahun 2024 adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 3,93%. Dengan demikian, pada tahun 2025 diprakirakan perusahaan tambang dapat segera beroperasi untuk mendorong kinerja komoditas timah. Hal ini seiring persetujuan RKAB yang telah diperoleh pada tahun 2024 untuk tiga tahun kedepan (2024 - 2026).

Gambar 2.5 Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian

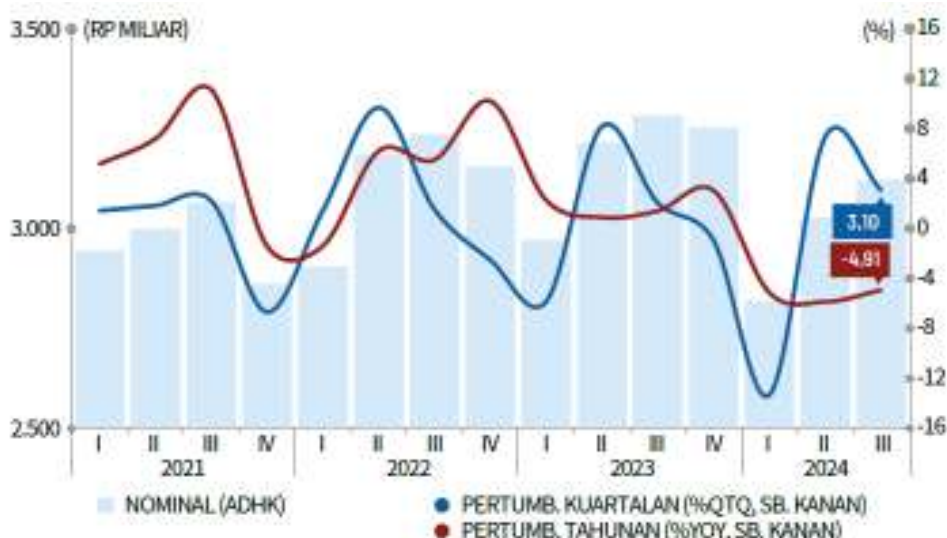


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Meskipun perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 optimis tumbuh menguat, namun Pemerintah Daerah, mitra strategis, dan masyarakat tetap perlu waspada. ke depan perekonomian masih dibayangi risiko, baik dari sisi eksternal dan internal. Tensi geopolitik global yang masih tinggi berisiko menyebabkan perlambatan volume global dan dikhawatirkan berdampak pada perlambatan ekspor komoditas strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lebih lanjut, mitra dagang utama komoditas timah, yaitu Tiongkok, diprakirakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2025 seiring ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan internasional. Sementara itu dari sisi internal, tata kelola dan tata niaga timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 diharapkan semakin membaik sehingga dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan seraya mengoptimalkan potensi ekonomi dari sektor pertambangan dan pengolahan timah.

Gambar 2.6 Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Belum normalnya aktivitas pengolahan logam timah menyebabkan tertahannya kinerja LU Industri Pengolahan.

5. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan

Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB sub Sektor Perdagangan diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB sub Sektor Perdagangan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan PDRB sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sub Sektor Perdagangan	$\frac{\text{PDRBi}(t) - \text{PDRBi}(t-1)}{100\% \text{ PDRBi}(t-1)} \times 100$ <p>PDRBi(t) : PDRB sub sektor i tahun t PDRBi(t-1) : PDRB sub sektor i tahun t-1</p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah -0,34 atau sebesar -4,93% dari target 6,90. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.18 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laju Pertumbuhan PDRB sub Sektor Perdagangan	6,50	2,36	6,90	-0,34	-4,93 %	5,55	-6,12%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan PDRB sub Sektor Perdagangan adalah sebagai berikut:

- Tercapai -0,34 (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar -4,93 % (kolom 7) (tercapai/tidak tercapai*).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 2,36 (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 6,50 (kolom 3) terdapat peningkatan/penurunan*) sebesar -2,02% (persentase capaian capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)
- Dibandingkan dengan target akhir RPD, sasaran Meningkatkan PDRB sub Sektor Perdagangan dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB sub Sektor Perdagangan berhasil tercapai/tidak tercapai -6,12% (kolom 9)

Berdasarkan data tabel diatas capaian pada indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan mencapai diangka -4,93 hal ini dikarenakan Perdagangan tertahan seiring penurunan jumlah pendaftaran kendaraan baru imbas dari permasalahan tata kelola dan tata niaga timah. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah pendaftaran kendaraan baru untuk roda 2 dan roda 4 pada Tahun 2024 sebanyak 6.426 atau terkontraksi 39,29% (Grafik 1.14).

Hal ini juga tecermin dari pertumbuhan kredit kendaraan bermotor baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang masing-masing terkontraksi 22,55% dan 4,56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan lebih lanjut kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tertahan oleh momentum libur sekolah, perayaan kemerdekaan RI, HBKN Tahun Baru Hijriah & perayaan Maulid Nabi, serta berbagai kegiatan yang

diselenggarakan dalam rangka kampanye pemilihan kepala daerah yang turut mendorong konsumsi masyarakat pada triwulan laporan.

Disamping itu, berbagai *event* besar, baik skala nasional maupun lokal, juga dilaksanakan selama Tahun 2024 turut mendukung kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, antara lain Jelajah Pesona Jalur Rempah 2024 di Kabupaten Belitung Timur, Festival Harmoni Belinyu dan Mooncake Festival di Kabupaten Bangka, Festival Pangkalpinang dan Festival Serumpun di Kota Pangkalpinang, dan penyelenggaraan MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions*) oleh Kementerian/Lembaga. Lebih lanjut, volume barang yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melanjutkan peningkatan. Hal tersebut terindikasi dari maraknya keberadaan ritel modern dan lokal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 2.7 Pertumbuhan Sub sektor Perdagangan



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Penurunan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran juga tecermin dari penurunan pembelian kendaraan baru. Pada Tahun 2024, pembelian kendaaran baru terkontrasi 39,29%, melanjutkan kontraksi pada Tahun 2024 yang tercatat sebesar 20,67%. Kendati demikian, perlambatan lebih lanjut tertahan seiring volume barang yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melanjutkan peningkatan. Hal tersebut terindikasi dari maraknya keberadaan ritel modern dan lokal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. LU Perdagangan Besar dan Eceran diperkirakan tumbuh solid dan mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih lanjut.

Sektor Perdagangan pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan perbaikan pada sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan yang berpotensi meningkatkan peluang lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Hal ini juga turut didukung potensi kenaikan harga timah internasional sehingga mendorong Konsumsi Rumah Tangga, baik untuk pembelian kendaraan baru, maupun barang yang diperdagangkan pada ritel modern dan lokal. Lebih lanjut, membaiknya kondisi pariwisata di

Belitung berpotensi mendorong penyelenggaraan event budaya dan olahraga, baik dalam lingkup regional, nasional, maupun internasional.

Selain itu, daya tarik Belitung sebagai salah satu Global Geopark UNESCO (GGU) serta dukungan pemerintah berupa promosi dan berbagai insentif bagi pelaku usaha pariwisata diharapkan dapat menjadi stimulus untuk terus mendorong pariwisata Belitung. Meskipun perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 optimis tumbuh menguat, namun Pemerintah Daerah, mitra strategis, dan masyarakat tetap perlu waspada. ke depan perekonomian masih dibayangi risiko, baik dari sisi eksternal dan internal. Tensi geopolitik global yang masih tinggi berisiko menyebabkan perlambatan volume global dan dikhawatirkan berdampak pada perlambatan ekspor komoditas strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lebih lanjut, mitra dagang utama komoditas timah, yaitu Tiongkok, diperkirakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2025 seiring ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan internasional. Sementara itu dari sisi internal, tata kelola dan tata niaga timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 diharapkan semakin membaik sehingga dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan seraya mengoptimalkan potensi ekonomi dari sektor pertambangan dan pengolahan timah. Mendirikan pasar induk sebagai pusat transaksi perdagangan utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pasar ini diharapkan menjadi titik distribusi kebutuhan yang mendukung kelancaran aktivitas perdagangan di pasar-pasar lain, baik dalam provinsi maupun antarprovinsi.

6. Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik

Kinerja sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara diukur dengan indikator : Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara	$\frac{\Sigma W(t) - \Sigma W(t-1)}{\Sigma W(t-1)} \times 100\%$ <p> $\Sigma W(t)$: jumlah wisatawan tahun t $\Sigma W(t-1)$: jumlah wisatawan tahun t-1 </p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah -4,25 atau sebesar -96,15 dari target 4,42%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.21 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara	9%	10,32	4,42	-4,25	-96,15	2,5	-170

Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan adalah sebagai berikut:

- Tercapai -4,25 % (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar -96,15 % (kolom 7) (tercapai/tidak tercapai*).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 10,31 % (kolom 4),

terhadap target tahun lalu sebesar 9% (kolom 3) terdapat peningkatan/penurunan *) sebesar 14,57 % (persentase capaian capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)

- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, sasaran tidak tercapai yaitu sebesar -170.

Berdasarkan data tabel diatas capaian pada indikator Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara mencapai diangka -4,25 hal ini dikarenakan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung Tahun 2023-2044, diharapkan dapat mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Bangka Belitung yang mempunyai peran strategis dalam pengembangan pariwisata nasional. Melalui Perpres ini, akan dilakukan pembangunan dan pengembangan investasi pariwisata di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga berpotensi mendorong kinerja PMTB lebih lanjut. Mendorong diversifikasi ekonomi dan sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, antara lain dengan menyelenggarakan berbagai event besar serta memperkuat peran UMKM sebagai penyangga perekonomian.

Pada tahun 2024, Kabupaten Belitung Timur kembali terpilih menjadi lokasi rangkaian kegiatan Karisma Event Nusantara (KEN) 2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam tajuk Jelajah Pesona Jalur Rempah (JPJR) Belitung Timur. JPJR merupakan event pariwisata yang bertajuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan yang menggambarkan posisi penting Belitung Timur sebagai simpul jalur rempah Nusantara maupun dunia. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan mampu membangkitkan semangat kewirausahaan masyarakat dalam memanfaatkan rempah untuk meningkatkan perekonomian melalui peran UMKM.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga terus meningkatkan geliat mobilitas masyarakat dengan menambah rute dan frekuensi dari/ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2024 untuk mendorong tumbuhnya perekonomian lebih lanjut. Pada tahun 2024, Kabupaten Belitung Timur kembali terpilih menjadi lokasi rangkaian kegiatan Karisma Event Nusantara (KEN) 2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam tajuk Jelajah Pesona Jalur Rempah (JPJR) Belitung Timur. JPJR merupakan event pariwisata yang bertajuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan yang menggambarkan

posisi penting Belitung Timur sebagai simpul jalur rempah Nusantara maupun dunia.

Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan mampu membangkitkan semangat kewirausahaan masyarakat dalam memanfaatkan rempah untuk meningkatkan perekonomian melalui peran UMKM. Selain itu, Pemerintah Daerah juga terus meningkatkan geliat mobilitas masyarakat dengan menambah rute dan frekuensi dari/ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2024 untuk mendorong tumbuhnya perekonomian lebih lanjut. Memajukan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya di Pulau Belitung. Penguatan promosi event dilakukan secara masif dan tepat sasaran untuk menarik minat wisatawan datang ke destinasi wisata unggulan seperti Geopark Belitung sebagai Global Geopark UNESCO.

Upaya pengembangan pariwisata juga dapat dilakukan dengan menyediakan sarana prasarana yang memadai, seperti penambahan maskapai premium dari/ke Pulau Belitung, perluasan rute penerbangan termasuk rute internasional, serta atraksi wisata yang berkualitas. Membaiknya kondisi pariwisata di Belitung berpotensi mendorong penyelenggaraan *event* budaya dan olahraga, baik dalam lingkup regional, nasional, maupun internasional. Selain itu, daya tarik Belitung sebagai salah satu Global Geopark UNESCO (GGU) serta dukungan pemerintah berupa promosi dan berbagai insentif bagi pelaku usaha pariwisata diharapkan dapat menjadi stimulus untuk terus mendorong pariwisata Belitung.

7. Laju Pertumbuhan Ekspor

Kinerja sasaran Meningkatnya ekspor diukur dengan indikator : Laju Pertumbuhan ekspor. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N o	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya ekspor	Laju Pertumbuhan ekspor	$\frac{\sum W(t) - \sum W(t-1)}{\sum W(t-1)} \times 100\%$ <p> $\sum W(t)$: jumlah ekspor tahun t $\sum W(t-1)$: jumlah ekspor tahun t-1 </p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah -16,50 atau sebesar -254,24% dari target 6,49. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.23 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laju Pertumbuhan Ekspor	8,13	-22,93	6,49	-16,50(*)	-254,24	6,53	-252,67%

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya ekspor adalah sebagai berikut:

- Tercapai -16,50 (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar -254,24% (kolom 7) (~~tercapai~~/tidak tercapai*).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar -22,93 (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 8,13 (kolom 3) terdapat kenaikan *) sebesar 6,43% (persentase capaian capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)
- Dibandingkan dengan target akhir RPD, sasaran Meningkatnya ekspor dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekspor berhasil ~~tercapai~~/tidak tercapai -252,67% (kolom 9)

Berdasarkan data tabel diatas capaian pada indikator Laju Pertumbuhan Ekspor mencapai angka -254,24 hal ini dikarenakan pada Tahun 2024 Kinerja Ekspor Barang dan Jasa masih berkontraksi dipengaruhi aktivitas produksi logam timah yang masih belum normal. Meskipun demikian, kinerja Ekspor Barang dan Jasa membaik seiring bertambahnya Volume dari Triwulan II menuju ke Triwulan III sebab jumlah smelter swasta yang melakukan ekspor pada Tahun 2024.

**Tabel 2.24 perkembangan Nilai dan Volume Komoditas Ekspor
Tahun 2024**

KOMODITAS	NILAI (RIBU USD)				VOLUME (TON)			
	Tw II 2024	% YOY	Tw III 2024	% YOY	Tw II 2024	% YOY	Tw III 2024	% YOY
Karet	4.151	(9,62)	4.988	38,75	2.475	(25,27)	2.822	6,35
CPO	47.624	11,17	41.539	(20,35)	53.178	7,00	45.074	(29,45)
Lada	7.607	38,24	13.782	70,69	1.174	18,86	1.677	29,16
Ikan	5.587	(13,57)	7.976	29,48	2.557	5,78	3.269	32,53

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai

Volume ekspor perikanan yang meningkat 32,53%, lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 sebesar 5,78% komoditas lada juga menjadi salah satu pendorong kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan lebih lanjut. Hal ini tecermin dari volume ekspor lada yang tumbuh positif sebesar 29,16% pada Tahun 2024. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja nilai ekspor lada yang mencapai 70,69% pada Tahun 2024. Puncak musim panen lada disertai dengan kenaikan harga lada internasional sebesar 32,14% atau sebesar 3.141 MYR/100 kg pada Tahun 2024 (Grafik 1.6) berdampak pada kenaikan ekspor lada. Sebagai komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kenaikan harga lada tersebut menjadi angin segar bagi para petani lada untuk terus memperkuat produksi lada Hal ini tecermin dari volume maupun nilai ekspor yang tumbuh positif.

Dari sisi volume, terdapat peningkatan ekspor karet sebesar 6,35% pada Tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut, nilai ekspor karet juga tumbuh 38,75% pada Tahun 2024. Peningkatan nilai ekspor tersebut didukung harga karet internasional dengan rata-rata sebesar 2,50 USD/kg atau tumbuh 40,67% (Grafik 1.7). Kenaikan tersebut turut dipengaruhi berkurangnya ketersediaan bahan baku di sejumlah negara penghasil produk karet dan turunannya. Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi negara utama tujuan ekspor karet dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahunl 2024 dengan pangsa masing-masing 37,43% dan 33,78%.

Selain itu, komoditas ekspor karet juga dipasarkan ke negara Luksemburg (pangsa 8,96%), Jerman (8,87%), dan Malaysia (6,80%). Pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tertahan oleh kinerja komoditas kelapa sawit dan Crude Palm Oil (CPO) yang kurang optimal. Belum masuknya musim panen disertai beberapa kebun kelapa sawit telah mencapai umur 25 tahun

berdampak pada hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) yang kurang optimal.

Lebih lanjut, sebagian lahan perkebunan kelapa sawit masih dalam proses replanting, sehingga lahan kebun produktif menjadi lebih sedikit. Indikasi penurunan produksi TBS tersebut tersebut tecermin dari kinerja ekspor komoditas CPO yang berkontraksi, baik secara volume maupun nilai. Pada Tahun 2024, volume ekspor CPO berkontraksi 29,45%. Secara nilai, ekspor CPO juga berkontraksi 20,35% . Meskipun demikian, penurunan nilai lebih lanjut tertahan seiring dengan harga CPO internasional yang tumbuh menguat sebesar 9,59% (Grafik 1.8).

Pada Tahun 2024, India menjadi negara tujuan ekspor utama CPO dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pangsa 43,90%. Negara tujuan ekspor CPO selanjutnya yaitu Tiongkok (17,92%), Myanmar (13,56%), Korea Selatan (13,00%), dan Filipina (11,62%). Komoditas timah mengalami penurunan volume dan nilai ekspor pada Tahun 2024, meskipun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya.

Secara tahunan, volume ekspor timah berkontraksi 16,81%, tidak sedalam kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 54,96% (Grafik 1.26). Adanya perbaikan volume ekspor turut menopang kinerja ekspor timah secara triwulanan yang didukung oleh bertambahnya jumlah smelter swasta. Semakin bertambahnya jumlah smelter swasta yang melakukan ekspor pada Tahun 2024 mendorong kinerja volume ekspor yang lebih tinggi, yaitu sebesar 43,09%. Selain itu, nilai ekspor timah juga masih berkontraksi 1,44%.

8. Pertumbuhan Investasi

Kinerja sasaran Meningkatnya Meningkatkan Realisasi Investasi diukur dengan indikator Realisasi Investasi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Dari Laporan LKPM

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 12,37 Trilyun atau sebesar 117,03 % dari target 10,57 Trilyun. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.27 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Realisasi Investasi	2,5 T	9.03 T	10,57 T	12,37 T	117,03	34 T	36,25%

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya Nilai Investasi adalah sebagai berikut:

- Tercapai Rp12,37 T, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 117,03 % (tercapai/tidak tercapai*).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp9,03 T (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar Rp2,5 T terdapat peningkatan/penurunan *) sebesar 3,34% (persentase capaian capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)
- Dibandingkan dengan target akhir RPD, sasaran berhasil tercapai/tidak tercapai

Realisasi tersebut telah mencapai 117,03 % dari target investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 sebesar Rp 10,57 triliun. Kondisi ini didorong oleh berlanjutnya realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan lokasi, Kabupaten Bangka menjadi wilayah dengan sebaran investasi tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pangsa 62,72% atau mencapai Rp3,00 triliun.

Berlanjutnya investasi juga didukung oleh pertumbuhan kredit, khususnya dari komponen kredit investasi. Pada Tahun 2024, kredit investasi tumbuh menguat 43,16%. Lebih lanjut, peningkatan kinerja investasi secara triwulanan turut didorong

oleh adanya investasi smelter timah dan kapal laut (investasi nonbangunan). Selain itu, pangsa kredit investasi pada triwulan laporan semakin bertambah jika dibandingkan dengan pangsa kredit modal kerja dan kredit konsumsi. DPMPTSP senantiasa berupaya mendorong investasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui program strategis Ngobrol Perihal Perizinan (Ngopi), DPMPTSP memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memperoleh perizinan investasi atau penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

Jangka waktu proses pengurusan perizinan menjadi lebih terukur karena dilakukan berbasis digital dan terintegrasi. Adapun salah satu sasaran utama program Ngopi adalah UMKM yang belum mengetahui cara mendaftar NIB melalui sistem online. Ke depan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan proyek strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti pengembangan Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular, Kawasan Industri Sadai, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, Kawasan Pertanian di Kabupaten Bangka Selatan, dan proyek strategis lainnya.

Selain itu, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai melakukan pembangunan proyek Pelabuhan Mantung Kecamatan Belinyu di Kabupaten Bangka dan Pelabuhan Bakit Kecamatan Parittiga di Kabupaten Bangka Barat yang mendorong kinerja PMTB lebih lanjut. Disamping itu, sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung Tahun 2023-2044, diharapkan dapat mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Bangka Belitung yang mempunyai peran strategis dalam pengembangan pariwisata nasional. Melalui Perpres ini, akan dilakukan pembangunan dan pengembangan investasi pariwisata di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga berpotensi mendorong kinerja PMTB lebih lanjut. Mendorong iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan usaha.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dan perlu terus ditingkatkan, antara lain melalui implementasi Sistem One Single Submission (OSS), penyederhanaan dan harmonisasi peraturan, kebijakan insentif kepada investor potensial, serta kemudahan pembebasan lahan. Pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga diperlukan untuk memperluas peluang investasi, baik yang bersumber dari sektor swasta maupun BUMN dan Percepatan transformasi ekonomi digital.

Namun jika dibandingkan dengan capaian secara nasional capaian provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah yaitu sebesar 1.248,63.

Tabel 2.28 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

N o .	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasion al)	Ta rg et (PD)	Capai an	Realis asi (Nasio nal)	Realisasi (PD) %	Cap aia n%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Realisasi Investasi Formula : Realisasi Investasi Dari Laporan LKPM Rp12,37 T	25,0 6 T	9,2 T	12,37 T	1.261 T	12,37 T	49,3 6

9. Indeks Pembangunan Manusia

Kinerja sasaran Meningkatnya Pembangunan Manusia diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N o .	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran} \times 100}$ <p>Dimensi Kesehatan : $I \text{ kesehatan} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$</p> <p>Dimensi Pendidikan : $I \text{ HLS} = \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ maks} - HLS \text{ min}}$</p> <p>$I \text{ ALS} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$</p> <p>$I \text{ pendidikan} = \frac{I \text{ HLS} + I \text{ RLS}}{2}$</p> <p>Dimensi Pengeluaran:</p> <p>$I \text{ pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$</p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 74.55 atau sebesar 102.04% dari target 73,06 Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.30 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

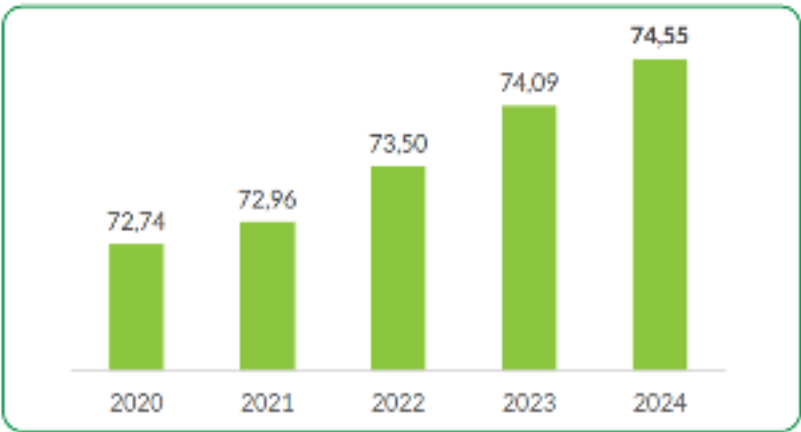
No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD(2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Manusia	71.91	74.09	73,06	74.55	102,04	72.57	102,72

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

- Tercapai 74.55%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 102,04% (tercapai).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 74.09%, terhadap target tahun lalu sebesar 71.91 terdapat peningkatan sebesar 0.46 (persentase capaian capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)
- Dibandingkan dengan target akhir RPD, sasaran sudah berhasil tercapai yaitu sebesar 102,72 %

Pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami kemajuan. Selama 2020-2024, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata meningkat sebesar 0,62 persen per tahun, dari 72,74 pada tahun 2020 menjadi 74,55 pada tahun 2024. Pertumbuhan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 melambat menjadi 0,62 persen dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya.

Gambar 2.8 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



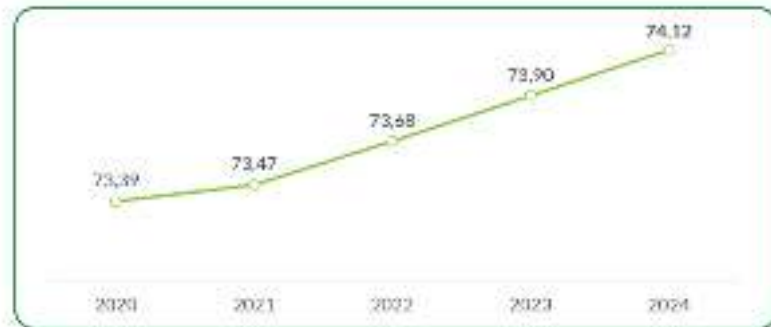
Tabel 2.31 Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020-2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	tahun	73,39	73,47	73,68	73,90	74,12
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,05	12,17	12,18	12,31	12,49
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,06	8,08	8,11	8,25	8,33
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	12.794	12.819	13.358	13.589	13.667
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		72,74	72,96	73,50	74,09	74,55

9.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah meningkat sebesar 0,73 tahun atau rata-rata pertumbuhan Umur Harapan Hidup sebesar 0,25 persen per tahun. Bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 73,39 tahun atau sekitar 73 tahun 4 bulan 20 hari. Pada tahun 2024, harapan hidup bayi yang baru lahir bertambah menjadi 74,12 tahun atau sekitar 74 tahun 1 bulan 13 hari. UHH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

meningkat 0,22 tahun atau 0,30 persen dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,23 persen per tahun.

Gambar 2.9 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



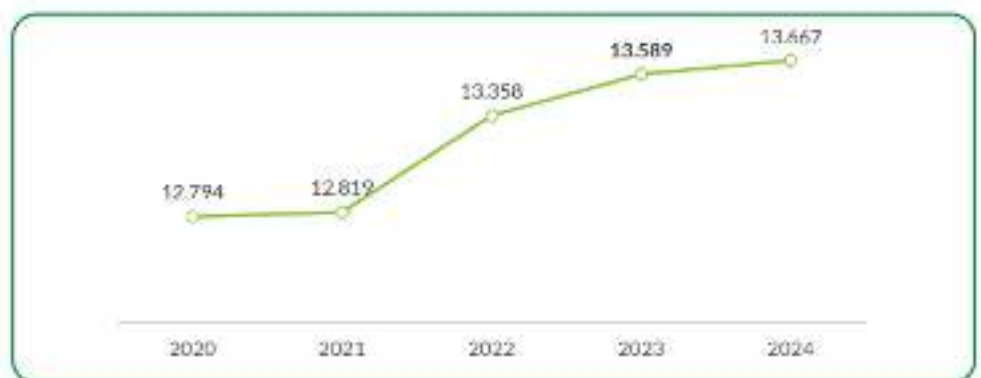
- 9.2 Dimensi Pengetahuan Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat 0,44 tahun atau 5 bulan 8 hari, sementara RLS meningkat 0,27 tahun atau 3 bulan 7 hari. Secara rata-rata, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 0,90 persen per tahun dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 0,83 persen per tahun. Pada tahun 2024, HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat 0,18 tahun atau 1,46 persen dibanding tahun 2023, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,71 persen per tahun. Sementara itu, RLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 meningkat 0,08 tahun atau 0,97 persen dibanding tahun 2023, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,78 persen per tahun.

Gambar 2.10 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-Rata Lama sekolah (RLS)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



9.3 Dimensi Standar Hidup Layak Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp13,67 juta per tahun. Capaian ini meningkat 78 ribu rupiah atau 0,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,03 persen per tahun.

Gambar 2.11 Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang disesuaikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ribu Rupiah), 2020 - 2024



Status pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 sudah mencapai status “tinggi”.

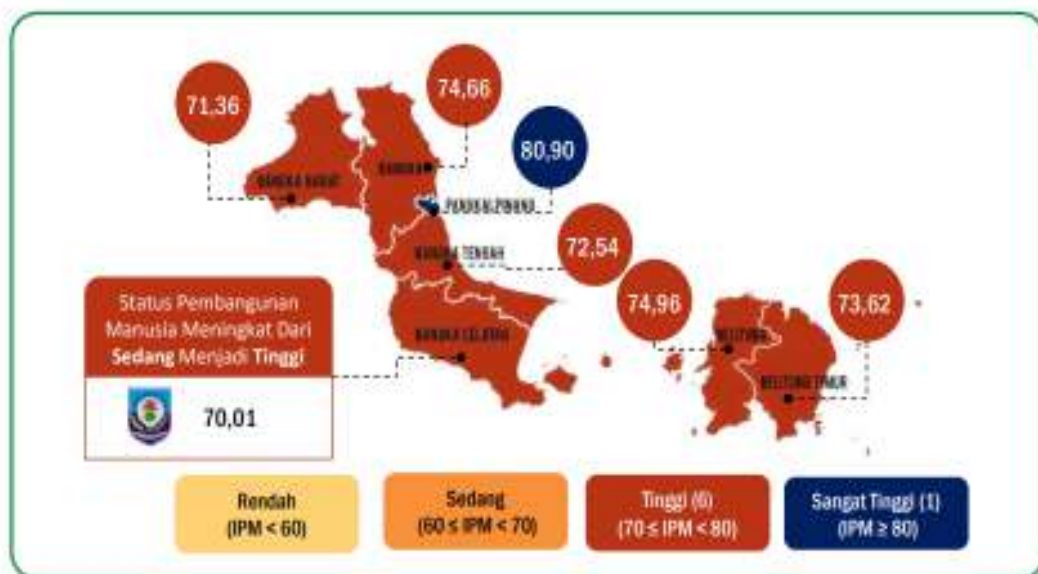
Gambar 2.12 IPM Indonesia Menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia, 2024



Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota Pada tahun 2024, capaian Indeks Pembangunan Manusia di tingkat kabupaten/kota berada pada rentang 70,01 (Bangka Selatan) hingga 80,90 (Pangkal Pinang). Semua kabupaten/kota mengalami peningkatan pembangunan manusia yang cukup signifikan dibanding tahun 2023. Pada tahun 2024, status pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Selatan meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM sebesar 70,01.

Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, semua wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Selatan berstatus pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$). Sementara itu, hanya Kota Pangkal Pinang berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$). Kemajuan pembangunan manusia di Kota Pangkal Pinang selaku pemilik capaian IPM “sangat tinggi” (80,90) didorong oleh semua dimensi kehidupan. Sebagai ibukota provinsi, Kota Pangkal Pinang selalu tercatat sebagai wilayah dengan angka indeks tertinggi, baik untuk Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, maupun Pengeluaran Riil per Kapita. Sementara itu, Kabupaten Bangka Selatan tercatat sebagai wilayah dengan IPM terendah (70,01), dipengaruhi oleh rendahnya indeks pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, serta dimensi pengetahuan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 2.13 IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2024



Perbandingan IPM kabupaten/Kota dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel 2.32 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan IPM dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023-2024

Provinsi	IPM		Pertumbuhan IPM		Peringkat IPM	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	74,34	74,66	0,98	0,43	3	3
Belitung	74,49	74,96	0,89	0,63	2	2
Bangka Barat	71,13	71,36	0,48	0,32	6	6
Bangka Tengah	72,36	72,54	0,42	0,25	5	5
Bangka Selatan	69,67	70,01	0,80	0,49	7	7
Belitung Timur	73,31	73,62	0,76	0,42	4	4
Kota Pangkal Pinang	80,45	80,90	0,85	0,56	1	1
Kep. Bangka Belitung	74,09	74,55	0,80	0,62		

Tren capaian IPM selama 5 tahun terakhir, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu tumbuh positif. Seperti yang disajikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.14 Tren Capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024



Namun jika dibandingkan dengan capaian secara nasional capaian provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah yaitu sebesar 0,47.

Tabel 2.33 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Capaian	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<p>IPM = $\frac{3\sqrt{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran}}}{100}$</p> <p>Dimensi Kesehatan :</p> <p>$I \text{ kesehatan} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$</p> <p>Dimensi Pendidikan :</p> <p>$I \text{ HLS} = \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ maks} - HLS \text{ min}}$</p> <p>$I \text{ ALS} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$</p> <p>$I \text{ pendidikan} = \frac{I \text{ HLS} + I \text{ RLS}}{2}$</p> <p>Dimensi Pengeluaran:</p> <p>$I \text{ pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$</p> <p>Realisasi = $(72.13 / 74.55) \times 100\% = 103.35\%$</p>	75.02	72.13	96.15	75.02	74.55	99.37%

10. Indeks Demokrasi Indonesia

Kinerja sasaran Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga dalam Demokrasi diukur dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga dalam Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	$IDIProvinsi = \sum_{i=1}^3 w_i (A_i)$ <p> IDIProvinsi = Indeks demokrasi Indonesia provinsi <i>w_i</i> = Nilai penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-<i>i</i> (<i>i</i> = 1,2,3) <i>I</i>(<i>A_i</i>) = Indeks aspek ke-<i>i</i> (<i>i</i>-1) = aspek kebebasan sipil (<i>i</i>-2) = hak-hak politik (<i>i</i>-3) = lembaga demokrasi </p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 75,95 atau sebesar 96,875 dari target 78,40. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.35 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	75,7	76,65	78,40	75,95*)	96,875	80,42	94,44

*) Data Tahun 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran tercapai adalah sebagai berikut:

- Tercapai nilai 75,95 *) dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 96,875 % (tidak tercapai)
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 76,65%, terhadap target tahun lalu sebesar 75,7 terdapat penurunan sebesar 0,70%
- Dibandingkan dengan target akhir RPD, sasaran belum berhasil tercapai yaitu sebesar 94,44

Gambar 2.15 Nilai IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023



Selama empat belas tahun perhitungan IDI, status kondisi demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih banyak berada pada kategori sedang dengan nilai kategori 60-80. Status demokrasi dengan kategori baik pernah dicapai pada tahun 2016 dan 2017. IDI Kepulauan Bangka Belitung pada 2023 mencapai 75,95 dan berada pada kategori sedang. Dinamika indeks demokrasi juga tercermin dari ketiga aspek pembentuknya yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Pada tahun 2023, Aspek Kapasitas Lembaga.

Demokrasi memiliki nilai tertinggi dibandingkan aspek lainnya yaitu aspek kebebasan dan aspek kesetaraan. Aspek lembaga demokrasi pada tahun 2023 mencapai nilai 79,83. Aspek kesetaraan mencapai nilai 78,98 sedangkan aspek kebebasan mencapai nilai 68,34. Aspek kebebasan memiliki nilai terendah dibandingkan aspek lainnya. Seluruh aspek dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada kategori sedang.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 mencapai angka 75,95 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2022 yang sebesar 76,65. Capaian kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori “sedang”.

Nilai IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun karena adanya penurunan pada aspek kapasitas lembaga demokrasi. 2 Peningkatan Aspek Kebebasan tidak lepas dari terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara dan masyarakat, pemenuhan hak-hak pekerja, dan peran pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Peningkatan Aspek Kesenjangan disebabkan oleh meningkatnya akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah, akses masyarakat terhadap informasi publik, kesetaraan dalam pelayanan dasar.

Penurunan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi disebabkan oleh menurunnya kinerja lembaga legislatif, jaminan pemerintah/ pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang lingkup masyarakat, kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan pendidikan politik pada kader partai politik.

Indeks Demokrasi merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu negara memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, termasuk kebebasan sipil, hak politik, proses pemilihan umum yang adil, serta pengaturan dan keberhasilan institusi-institusi demokratis. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60). Indeks Demokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel 2.59.

Tabel 2.36 Indeks Demokrasi Indonesia Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Demokrasi	76,75	77,39	74,11	76,65	75,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung, 2024

Indeks demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuasi dari tahun 2019 sebesar 76,75 pada tahun 2021 menjadi 75,95 di tahun 2023 dengan nilai indeks demokrasi tertinggi di tahun 2020 yaitu sebesar 77,39. Kondisi Indeks Demokrasi yang fluktuasi mencerminkan dinamika demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung skala 0-100 berada dalam kategori “sedang”.

Kategori Sedang dalam Indeks Demokrasi berarti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kualitas demokrasi yang baik, seperti kebebasan sipil dan pemilihan umum yang aman, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tantangan dalam pelaksanaan demokrasi termasuk ketidakmerataan dalam partisipasi politik, masalah transparansi pemerintahan, dan kelemahan dalam perlindungan hak-hak sipil.

Selain itu, diperlukan perbaikan dalam beberapa bagian demokrasi untuk meningkatkan kualitasnya. Ini mungkin termasuk meningkatkan partisipasi publik, memperbaiki proses pemilihan, atau meningkatkan perlindungan hak-hak sipil.

Namun jika dibandingkan dengan capaian secara nasional capaian provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah yaitu sebesar 3,56.

Tabel 2.37 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Capaian	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<p>Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi</p> $IDI_{\text{Provinsi}} = \sum_{i=3}^3 P_i I(A_i)$ <p>IDI_{Provinsi} = Indeks demokrasi Indonesia provinsi P_i = Nilai penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-i (i = 1,2,3) I(A_i) = Indeks aspek ke-i (i-1) = aspek kebebasan sipil (i-2) = hak-hak politik (i-3) = lembaga demokrasi</p> <p>Realisasi = (14.350/16.204)x100%= 88,56% (Kolom 7)</p>		76,17		79,51	75,95	95,52%

11. Indeks Reformasi Birokrasi

Kinerja sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.38 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	<p>Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian akan ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan/atau pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 2. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau 3. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 69*) atau sebesar 100 dari target 69 Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.39 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026(%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	68,25	69	69	69*)	100	70,51	-

*) Data tahun 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran tercapai adalah sebagai berikut:

- Tercapai nilai 69 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100 % (realisasi tahun 2023)
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 69%, (belum bisa dibandingkan karena realisasi tahun 2024 belum dirilis)
- Dibandingkan dengan target akhir RPD, belum bisa dibandingkan karena realisasi masih tahun 2023.

Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- Terdapat Kegiatan Utama Mandatory yang belum ditetapkan sebagai target Instansi Pemerintah; dan targetnya belum didasarkan pada baseline dan target nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023)
- Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama dan belum menggambarkan intervensi terhadap permasalahan utama;
- Masih terdapat Indikator Output atas Rencana Aksi yang belum cukup menggambarkan Sasaran dan targetnya dan
- Secara umum capaian pelaksanaan kebijakan belum baik:
 - 3 indikator nilainya (0) yaitu Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, Tingkat

Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, Indeks Kualitas Kebijakan

- 5 indikator nilainya belum baik, yaitu: Tingkat keberhasilan ZI, Tingkat pengelolaan pengaduan, indeks reformasi hukum, dan kematangan statistic sektoral
8. Pada capaian sasaran strategis umumnya sudah baik, namun perlu penguatan yaitu Indeks BerAkhlak dan integritas mencapai 71,3 % (Cukup Sehat)
 9. Nilai pada Strategi Pelaksanaan RB Tematik dan Capaian Indikator Dampak masih perlu penguatan, karena nilainya masih 42%, terutama pada penyampaian strategi laju inflasi yang nilainya belum ada.

Tabel 2.40 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

N O	KOMPONEN PENILAIAN	BOB OT	202 3	%
a	Strategi Pelaksanaan RB General	10	5	50%
b	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40	20,9 7	52,43%
c	Capaian Sasaran Strategis	50	34,5 7	69,14%
	RB General	100	60,5 4	60,54%
d	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5	2	42,00%
e	Capaian Indikator Dampak	15	6,36	42,40%
	RB Tematik	20	8,46	42,30%
	Nilai Hasil Evaluasi	120	69, 00	57,50%
	Predikat		B	

12. Persentase ketersediaan infrastruktur

Kinerja sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur diukur dengan indikator Persentase Ketersediaan Infrastruktur. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.41 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N o	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur	Persentase ketersediaan infrastruktur	$((\text{Persentase kemantapan jalan}/14) + (\text{Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak}/14) + (\text{Persentase rumah tangga yang besanitasi}/14) + (\text{Persentase Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi}/14) + (\text{Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani}/14) + (\text{Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU}/14) + (\text{Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara}/14) + (\text{Persentase Kebutuhan Bangunan Pantai yang terpenuhi}/14) + (\text{Persentase Kebutuhan Tanggul Sungai yang terpenuhi}/14) + (\text{Persentase Kebutuhan Polder/Kolam Retensi yang Terpenuhi}/14) + (\text{Persentase Pemenuhan Kebutuhan air baku}/14) + (\text{Rasio Jaringan Irigasi}/14) + (\text{Rasio Ketersediaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi}/14) + (\text{Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah}/14))$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 29.38 % atau sebesar 59,34 % dari target 49,51% Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.42 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

N o	Indikator Sasaran	Tar get 202 3	Rea lisa si 202 3	2024			Tar get Ak hir RPD (20 26)	Cap aian s/d 202 4 terha dap targe t 2026(%)
				Ta rg et	Real isasi	% Capa ian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Ketersediaan	18.9	19.89	49.5	29.3	59,34	100	29

	iaan Infrastru ktur	3		1	8			
--	---------------------------	---	--	---	---	--	--	--

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- Tercapai 29.38 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 59,34 % (tidak tercapai)
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 19.89 % (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 18.93 %(kolom 3) terdapat peningkatan sebesar 9,49 %.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai 54.39 %.

Daya Saing Fasilitas/infrastruktur Wilayah

1. Daya Saing Infrastruktur

Daya saing infrastruktur merujuk pada kemampuan suatu wilayah atau negara untuk menyediakan infrastruktur yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menarik investasi. Infrastruktur yang memiliki daya saing tinggi biasanya ditandai oleh kualitas, keandalan, aksesibilitas, dan keberlanjutannya. Ketersediaan Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel 2.49.

Tabel 2.43 Persentase Ketersediaan Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
PU	1,80	1,20	7,49	6,04
Dasar	0,00	0,00	8,50	5,80
Perhubungan	5,75	7,14	8,84	4,14
Ketersediaan Infrastruktur	5,85	9,45	1,61	1,99

Sumber: Dispupr Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Berdasarkan Tabel 2.49, persentase ketersediaan infrastruktur, ketersediaan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 persentase ketersediaan infrastruktur sebesar 25,85%, terus meningkat sampai tahun 2022 mencapai 51,61%. Persentase

ketersediaan infrastruktur mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 41,99%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan terhadap tingkat ketersediaan atau aksesibilitas infrastruktur di tahun 2023.

2. Perumahan

Permintaan terhadap rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, karena rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia di samping pakaian dan makanan. Meningkatnya permintaan rumah harus diimbangi dengan penyediaan akan kebutuhan perumahan bagi penduduk. Luas lantai rumah yang ditempati rumah tangga dapat dijadikan pendekatan dalam menilai kesejahteraan rumah tangga. Menurut standar kesehatan, perumahan yang memenuhi syarat sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai perkapita minimal 10 m². Berdasarkan Kepemilikan bangunan atau status penguasaan bangunan tempat tinggal atau rumah yang ditempati dilihat dari sisi anggota rta yang mendiaminya. Pada tahun 2023, 88.65% rumah tangga Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki tempat tinggal, 3.95 menempati tempat tinggalnya dengan cara kontrak/sewa, 6.41% menempati bangunan tempat tinggal secara bebas sewa. Adapun perkembangan status kepemilikan tempat tinggal yang ditempati disajikan pada tabel 2.50

Tabel 2.44 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati

Kepemilikan Tempat Tinggal	2019	2020	2021	2022	2023
Milik Sendiri	85,51	85,33	83,14	88,39	88,65
Kontrak/Sewa	5,92	5,76	7,31	4,48	3,95
Bebas Sewa	6,68	7,73	7,57	6,24	6,41
Lainnya	1,89	1,18	1,98	0,89	0,99

Sumber : Statistik Kesejahteraan Prov Kepulauan bangka Belitung, 2024

Berdasarkan Tabel persentase rumah menurut status

kepemilikan sendiri sebesar 91,57% rumah tangga di Kabupaten Bangka Selatan sudah menempati rumah milik sendiri dan merupakan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disisi lain, Kota Pangkalpinang merupakan daerah dengan persentase rumah tangga dengan kepemilikan rumah milik sendiri yang terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Pangkalpinang cukup banyak yang berstatus sebagai pendatang, hanya sebesar 79,88% rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri. Rendahnya kepemilikan rumah di Pangkalpinang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti harga properti yang tidak terjangkau, keterbatasan akses pembiayaan, dan kurangnya pasokan rumah bersubsidi.

Tabel 2.45 Persentase Rumah Menurut Status Kepemilikan sendiri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Bangka	85,96	91,92	85,13	83,66	89,18
Belitung	88,35	89,4	88,37	85,92	89,23
Bangka Barat	88,26	88,41	89,67	84,85	88,46
Bangka Tengah	88,11	88,35	87,99	87,42	90,91
Bangka Selatan	88,33	85,17	91,32	87,34	91,57
Belitung timur	86,48	83,04	81,52	87,34	89,74
Pangkalpinang	76,77	73,3	73,1	68,2	79,88

Sumber : Statistik Daerah Prov Kepulauan Bangka Belitung, 2024

3. Transportasi

Pembangunan sektor transportasi merupakan prioritas pembangunan dalam mendukung konektivitas antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pembangunan transportasi berperan penting sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan dengan arah pada terwujudnya sistem transportasi

yang terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien. Transportasi dan ekonomi memiliki hubungan yang erat. Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen dan meniadakan jarak diantara keduanya. Transportasi juga menentukan *level of accessibility*, yang menggambarkan tingkat kemudahan suatu daerah dicapai atau di akses dari daerah lainnya.

Ketersediaan kondisi jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun terakhir telah mengalami peningkatan yang baik yaitu 393 Km dari 5.498 Km. Ketersediaan panjang jalan pada tahun 2019, menjadi 5.891 km pada tahun 2023. Berdasarkan kewenangan pengelolaan ruas jalan, Jalan Negara berkurang dari 680 km menjadi 599 km sementara jalan kab/kota meningkat dari 3.967 km menjadi 4.441 km. Adapun panjang jalan provinsi selama 5 tahun terakhir tetap pada 851 km. Kondisi perubahan tersebut dapat disebabkan adanya perubahan satu kewenangan jalan yang sebelumnya dibawa negara menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Tabel 2.46 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat kewenangan Pemerintah (Km) Tahun 2019-2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Akhir Tahun	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Total
Bangka	2019	-	141	735	876
	2020	-	141	735	876
	2021	-	141	735	876
	2022	-	125	735	860

Kabupaten/Kota	Akhir Tahun	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Total
	2023	-	125	735	860
Belitung	2019	-	186	666	852
	2020	-	186	666	852
	2021	-	186	666	852
	2022	-	135	666	801
	2023	-	135	666	801
Bangka Barat	2019	-	111	701	812
	2020	-	111	701	812
	2021	-	111	701	812
	2022	-	111	809	920
	2023	-	111	809	920
Bangka Tengah	2019	-	132	347	479

Kabupaten/Kota	Akhir Tahun	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Total
	2020	-	132	347	479
	2021	-	132	441	573
	2022	-	149	441	590
	2023	-	168	441	609
Bangka Selatan	2019	-	123	634	757
	2020	-	123	634	757
	2021	-	123	634	757
	2022	-	123	634	757
	2023	-	103	634	737
Belitung timur	2019	-	115	481	596
	2020	-	115	481	596
	2021	-	115	481	596

Kabupaten/Kota	Akhir Tahun	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Total
	2022	-	166	752	918
	2023	-	166	752	918
Pangkalpinang	2019	-	43	403	446
	2020	-	43	403	446
	2021	-	43	403	446
	2022	-	43	403	446
	2023	-	43	403	446
Kepulauan Bangka Belitung	2019	680	851	3.967	5.498
	2020	680	851	3.967	5.498
	2021	680	851	4.332	5.863

Kabupaten/Kota	Akhir Tahun	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Total
	2022	599	851	4.441	5.891
	2023	599	851	4.441	5.891

Sumber : Statistik Daerah Prov Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Berdasarkan kondisi Panjang jalan, jumlah dalam jalan dengan kondisi baik semakin bertambah, dan jalan rusak semakin berkurang. Dilihat menurut kondisi jalan pada tahun 2023, sebesar 69,85% jalan dalam kondisi baik, sebesar 9,12% jalan dalam kondisi sedang, sebesar 7,50% jalan dalam kondisi rusak ringan, dan masih ada sebesar 13,53% jalan yang berstatus rusak berat.

Tabel 2.47 Persentase Kondisi Jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2023

Kondisi Jalan	2020	2021	2022	2023
Baik	78,37	62,92	68,51	69,85
Sedang	16,46	12,19	11,47	9,12
Rusak Ringan	3	11,	11,	7,5

	, 6 7	24	37	
Rusak Berat	1 , 5	13, 65	8,6 5	13, 53

Sumber : Statistik Daerah Prov Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 2 bandar udara sebagai bandar udara pengumpul skala tersier yaitu Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru di Pangkalpinang dan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan. Sedangkan untuk Pelabuhan Utama yaitu Pelabuhan Tanjung Batu dan Pelabuhan Pangkal Balam. Sedangkan untuk Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Belinyu, Pelabuhan Sadai, Pelabuhan Mentok, Pelabuhan Pandan Tanjung, Pelabuhan Manggar.

4. Ketenagalistrikan

Dalam pengembangan sektor industri maupun sektor lainnya, energi listrik menjadi komponen yang tidak dapat terpisahkan. Berdasarkan data PLN tahun 2019-2023, kondisi listrik selalu mengalami surplus baik pada Pulau Bangka maupun Pulau Belitung. Daya mampu listrik pada Pulau Bangka mengalami kenaikan dari tahun 2022 hingga 2023, dimana beban puncak penggunaan mencapai 197.5 MW masih tersedia *reserve margin* mencapai 47.59. pada Pulau Belitung Daya mampu 82.16 MW, beban puncak 54.88 masih tersedia surplus 27.28 MW.

Tabel 2.48 Daya Tampung dan Beban Puncak Listrik pada Tahun 2020-2023 (MW)

Sitem Kelistrikan	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Bangka	Daya Mampu	183,35	180,3	185	215	245,9
	Beban Puncak	158,44	158,6	184	187,3	197,5

Sitem Kelistrikan	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
	<i>Reserve Margin</i>	24,91	21,7	1	64.2	47,59
Belitung	Daya Mampu	79,85	77,9	79,2	75.4	82,16
	Beban Puncak	44,45	43	48,2	52.4	54,88
	<i>Reserve Margin</i>	35,4	34,9	31	23	27,28

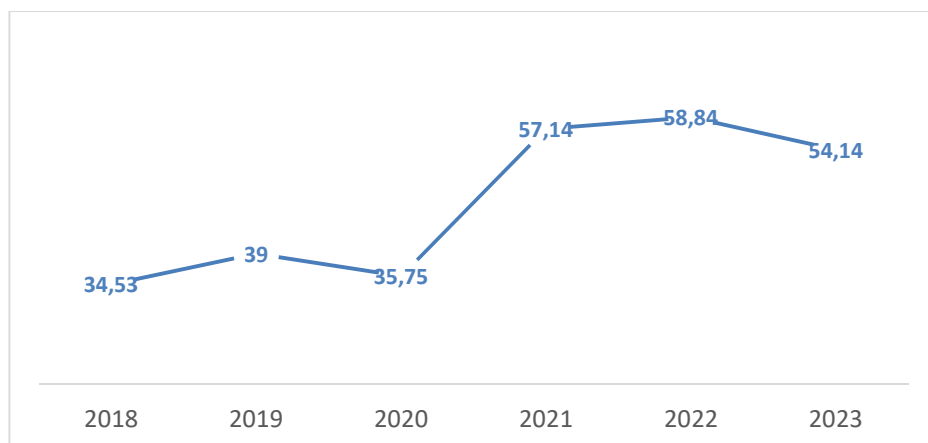
Sumber: PLN. 2024

5. Infrastruktur Perhubungan

a. Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi pada Urusan Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Perhubungan Darat (pengelolaan terminal penumpang tipe B, penyediaan perlengkapan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas di jaringan jalan provinsi, penyediaan angkutan umum (orang dan/atau barang) antar kota dalam satu provinsi); Pelayaran/Perhubungan Laut (Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional) terdiri dari Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat dan laut serta modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah. Gambaran tentang ketersediaan infrastruktur perhubungan di Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana Gambar 2.16 dibawah ini.

Gambar 2.16 Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung, 2024

Infrastruktur perhubungan dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepelabuhanan, dan Angkutan Pelayaran. Dari ketiga komponen tersebut, capaian Infrastruktur perhubungan terealisasi pada tahun 2018 sebesar 34,53%, tahun 2019 sebesar 39,00%, tahun 2020 menurun menjadi 35,75% dan tahun 2021 meningkat hingga 57,14%. Dari grafik tersebut menunjukkan *trend* positif penyediaan infrastruktur perhubungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini diharapkan dapat terus ditingkatkan.

Kondisi saat ini, Infrastruktur Perhubungan di Provinsi Kep. Bangka Belitung belum di Kelola oleh Provinsi dan masih berada di bawah kewenangan masing-masing Kabupaten. Infrastruktur tersebut terdiri dari:

- 1 (satu) Terminal Tipe B yang terletak di Kota Pangkalpinang;
- 2 (dua) Pelabuhan Pengumpan Regional yang terletak di Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;
- 2 (dua) Pelabuhan Penyeberangan yakni Pelabuhan Bakit, Kabupaten Bangka Barat dan Pelabuhan Sebetik, Kabupaten Bangka Selatan.

Hal ini dikarenakan belum adanya serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana Pelabuhan, serta dokumen administrasi penyelenggaraan Pelabuhan seperti yang diamanatkan pada Pasal 115 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Terkait hasil tersebut,

Tahun 2023 baru akan dilakukan rencana pengambilalihan kewenangan (serah terima) untuk Pelabuhan Regional dan Pelabuhan Penyeberangan yang seharusnya menjadi kewenangan provinsi.

- b. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Tabel 2.49 Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun 2002 - 2021

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Perlengkapan jalan berperan penting untuk mendukung ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Perlengkapan jalan raya inilah yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien.

Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Bangka Belitung sejak tahun 2002-2021 sebesar

No.	Jenis Perlengkapan Jalan	Satuan	Jumlah Pemasangan
1	Paku Jalan	Unit	2998
2	Rambu Petunjuk Pengarah Jurusan	Unit	237
3	Rambu Jalan	Unit	2227
4	<i>Delineator</i>	Unit	3725
5	Pagar Pengaman	Meter	920
6	<i>Traffic Light (APILL)</i>	Set	10
7	<i>Warning Light</i>	Set	12
8	Penerangan Jalan Umum (PJU)	M ²	57080
9	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	592

39,46% terdiri dari Paku Jalan sebanyak 2998 Unit, Rambu Petunjuk Pengarah Jurusan sebanyak 237 Unit, Rambu Jalan sebanyak 2227 Unit, Delineator sebanyak 3725 Unit, Pagar Pengaman 920 meter, *Traffic Light* (APILL) sebanyak 10 set, Warning Light sebanyak 12 set, Marka Jalan sebanyak 57080 M², Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebanyak 592 Unit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 diamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek (RUJT). Terkait hal ini, Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung telah menyusun RUJT pada Tahun 2023, dan untuk nilai rasio izin trayek, telah terlayani di atas 80% per Tahun 2020.

c. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan

Klasifikasi Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 3 (tiga) kategori yakni Pelabuhan Pengumpan (PP), Pelabuhan regional (PR), dan Pelabuhan Lokal (PL). Pelabuhan Pengumpan (PP) sejumlah 8 (delapan) pelabuhan, Pelabuhan Regional (PR) sejumlah 2 (dua) pelabuhan dan Pelabuhan Lokal sejumlah 8 (delapan) pelabuhan. Dari 18 Pelabuhan tersebut, yang telah beroperasi sebanyak 6 (enam) pelabuhan, 3 (tiga) digunakan sebagai tambat kapal nelayan, 1 (satu) Pelabuhan tidak beroperasi, dan sisanya masih dalam proses dokumen /pembangunan. Klasifikasi Pelabuhan dan otoritas Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50 Klasifikasi Pelabuhan di Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Nama	Lokasi	Panjang Dermaga (m)	Kapal Berdasarkan DWT	Otoritas	Ket.	Ket
1	Pangkal Balam	Pk. Pinang	60;68;55 ;71 = 254 m	2 ton/m ² ; 3 ton/m ²	PT Pelabuhan Indonesia II	Beroperasi	PP
2	Tanjung Gudang	Bangka	1515 m	50 ton / m ²	PT. Pelabuhan Indonesia II	Beroperasi	PP
3	Tanjung Pandan	Belitung	4200 m ²	2,5 ton / m ²	Administrasi pelabuhan	Beroperasi	PP
4	Tanjung Batu	Belitung	204 m	8000 ton	Kemenhub	Beroperasi	PP
5	Sadai	Bangka Selat	175 m ²	3000 ton	Kemenhub	Beroperasi	PP

No	Nama	Lokasi	Panjang Dermaga (m)	Kapal Berdasarkan DWT	Otoritas	Ket.	Ket
		an					
6	Toboali	Bangka Selatan	171 m		Kantor UPP Toboali	Digunakan untuk Tambat Kapal Nelayan	PP
7	Tanjung Ular	Bangka Barat	-	-		Sedang Proses Pembangunan	PP
8	Mentok	Bangka Barat	30 m	2 ton/m ²	PT Pelabuhan Indonesia II	Digunakan untuk Tambat Kapal Nelayan	PR
9	Sungai Selan	Bangka Tengah	50 m ²	200 ton	PEMDA Kabupaten	Beroperasi	PR
10	Jelitik	Bangka	100 m ¹	200 ton	PEMDA Kabupaten Bangka	Digunakan untuk Tambat Kapal Nelayan	PL
11	Manggar	Belitung Timur	65,5 m	2,5 ton / m ²	Kemenhub	Tidak beroperasi	PL
12	Ninjuk/ Tuining	Bangka	-	-	BUMD	Sedang Persiapan Studi	PL
13	Pulau Liat	Bangka Selatan	-	-	Kabupaten	FS, SID, DED	PL
14	Tanjung Gading	Bangka Selatan	-	-	Kabupaten	FS, SID, DED	PL
15	Pulau Besar	Bangka Selatan	-	-	Kabupaten	FS	PL
16	Pulau Gersik	Belitung	-	-	Kabupaten	FS	PL
17	Pulau Siliu	Belitung	-	-	Kabupaten	FS	PL
18	Dendang	Belitung Timur	-	-	Kemenhub	FS, SID, RIP, DLKR/DLKP	PP

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

d. Persentase Rute Pelayaran yang Terfasilitasi

Pelabuhan yang beroperasi di Kepulauan Bangka Belitung melayani Rute pelayaran yang dari dan ke Pulau Bangka serta Pulau Belitung. Terdapat 12 rute pelayaran dari dan Ke Pulau Bangka dan 6 rute pelayaran dari dan ke Pulau Belitung. Rute Pelayaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di sajikan

pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51 Rute Pelayaran di Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Rute	Trip Kapal	Ukuran (Gt)	Asal	Tujuan
Pulau Bangka					
1	Bangka - Belitung	KM. Express Bahari 3A	252	Pk. Balam	Tg. Pandan
2	Bangka Selatan - Belitung	KM. Menumbing Raya	652	Sadai	Tg. Ru
3	Bangka Selatan - Belitung	KM. Gorare	236	Sadai	Tg. Ru
4	Tg. Api - Tg. Kelian	Feri 9 Unit		Tg. Kalian	Tg. Api - Api
5	Bangka Selatan - Beltim	KM. Sabuk Nusantara 30	1202	Sadai	Manggar
6	Tg. Priok - Belinyu	Pelni KM. Bukit Raya	6022	Tg. Priok	Belinyu
7	Belinyu - Kijang	Pelni KM. Bukit Raya	6022	Belinyu	Kijang
8	Pekajang - Belinyu	KM. Sabuk Nusantara 48	2090	Belinyu	Pekajang
9	Jakarta - Pangkalpinang	KM. Srikandi	1914	Tg. Priok	Pk. Balam
10	Selan - Palembang	KM. Lawit	6022	Selan	Palembang
11	Jakarta - Selan	Kapal Klm	150-250	Sunda Kelapa	Selan
12	Oki (Sumsel) - Bangka	Jejofern Faster	27	Kelian (Muntok)	Sunsang
Pulau Belitung					
1	Belitung - Bangka	KM. Express Bahari 3A	252	Tg. Pandan	Pk. Balam
2	Beltim - Ketapang	KM. Sabuk Nusantara 30	1202	Sadai	Manggar
3	Bangka Selatan - Beltim	KM. Sabuk Nusantara 30	1202	Sadai	Manggar
4	Jakarta - Belitung	Star Belitung	2534	Tg. Priok	Tg. Pandan
5	Belitung - Pontianak	KM. Lawit	6022	Tg. Batu	Dwikora
6	Jakarta - Belitung	KM. Lawit	6022	Tg. Priok	Tg. Batu

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2022

Pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 6 (enam) pelabuhan yang terdiri dari 2 (dua) pelabuhan di Pulau Bangka, dan 4 (empat) pelabuhan di Pulau Belitung yang sebagian besar dibawah otoritas Kementerian Perhubungan kecuali Pelabuhan Tj. Kalian di Kabupaten Bangka Barat yang berada di bawah otoritas PT. ASDP Indonesia Ferry, sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.52**

Tabel 2.52 Rute Pelayaran di Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Nama	Lokasi	Otoritas	Status	Ket
1	Tanjung Kalian	Bangka Barat	PT ASDP Indonesia Ferry	Beroperasi	ASDP
2	Sadai	Bangka Selatan	Kemenuhub	Beroperasi	ASDP
3	Tanjung RU	Belitung	Kemenuhub	Beroperasi	ASDP
4	Manggar	Belitung Timur	Kemenuhub	Tidak beroperasi	ASDP
5	Tanjung Gading	Belitung	Kemenuhub	Sarana sudah Siap, operasi menunggu SK Menteri	ASDP
6	Tanjung Nyato	Belitung	Kemenuhub	Sarana sudah Siap,	ASDP

No	Nama	Lokasi	Otoritas	Status	Ket
				operasi menunggu SK Menteri	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2022

13. Indeks Penyelenggaraan penataan ruang

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang diukur dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 4.53 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	$IP = \frac{\left(\frac{\text{Struktur ruang termanfaat}}{\text{renovasi struktur ruang}} \right) + \left(\frac{\text{pola ruang termanfaat}}{\text{renovasi pola ruang}} \right)}{2}$ $IK = (IP + E) / 2$ <p>E: Hasil Pengawasan Teknis (%)</p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 0.65 % atau sebesar 92,86 % dari target 0.70 % Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.54 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikatorr Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026(%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.6	0.6	0,70	0.65	92,86	0.8	81,25

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 0.65 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 92,86 % (tidak tercapai).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 0.6 % , terhadap target tahun lalu sebesar 0.6 % terdapat peningkatan sebesar 0,05 %.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran tercapai 81,25%.

a) Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang terdapat di Provinsi. Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta memperhatikan kawasan budidaya kabupaten/kota.

1. Rencana Kawasan Lindung

Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi :

a. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung tersebar di seluruh kabupaten meliputi :

- 1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas 28.589 Ha
- 2) Kabupaten Bangka dengan luas 15.736 Ha
- 3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas 32 Ha
- 4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas 28.234 Ha
- 5) Kabupaten Belitung dengan luas 39.306 Ha
- 6) Kabupaten Belitung Timur dengan luas 45.874 Ha

b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.

c. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:

- 1) Sempadan pantai yang terdapat seluruh wilayah provinsi
- 2) Sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di provinsi
- 3) Kawasan sekitar danau/waduk, berupa kolam bekas pertambangan yang disebut kolong
- 4) Kawasan sempadan mata air yang menyebar di seluruh wilayah provinsi
- 5) Kawasan terbuka hijau kota, yang menyebar di kawasan perkotaan dan bukan perkotaan

- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya, meliputi:
 - 1) Kawasan hutan meliputi : Gunung Lalang dan Gunung Tajam di Kabupaten Belitung, Gunung Menumbing dan Jering Menduyung di Kabupaten Bangka Barat, Gunung Maras di Kabupaten Bangka, Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, dan Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan
 - 2) Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur
 - 3) Kawasan pantai berhutan bakau terdapat diseluruh Kabupaten/Kota
 - 4) Taman wisata alam laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur dan Perairan Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Bangka.
 - 5) Situs dan kawasan cagar budaya tersebar
- e. Kawasan rawan bencana alam, meliputi:
 - 1) Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Mentok, Parittiga, Kelapa, Jebus (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Lubuk Besar, Koba, Namang, Sungai Selan, dan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan); Kota Pangkalpinang; Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur); Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Sungailiat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);
 - 2) Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parittiga, Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Lubuk Besar, Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Badau, Tanjung Pandan, Selat Nasik dan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Gantung, Simpang Pesak, Dendang dan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Tukak Sadai, Simpang Rimba Permis, Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan

Sungailiat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka)

3) Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat).

2. Rencana Kawasan Budidaya

Rencana pengembangan kawasan budidaya meliputi:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi, yang tersebar di seluruh kabupaten meliputi:
 - 1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas 77.841 Ha
 - 2) Kabupaten Bangka dengan luas 65.884 Ha
 - 3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas 84.990 Ha
 - 4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas 106.154 Ha
 - 5) Kabupaten Belitung dengan luas 40.377 Ha
 - 6) Kabupaten Belitung Timur dengan luas 57.638 Ha
- b. Kawasan peruntukan pertanian, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 903.450 Ha terdiri atas peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas 355.453 Ha, peruntukan pertanian hortikultura dengan luas 221.512 Ha, kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 316.383 Ha, kawasan peruntukan peternakan dengan luas 10.102 Ha (**Gambar 2.17**).

Gambar 2.18 Kawasan Peruntukan Pertanian Provinsi Bangka Belitung Tahun 2014-2034



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Adapun distribusi luas kawasan peruntukan tanaman pertanian pangan pada masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti disajikan pada **Tabel 2.9** berikut. Berdasarkan Tabel 2.9, Luas Lahan Pertanian terluas adalah 1) Kabupaten Bangka Selatan (1171.350 ha) dan 2). Kabupaten Bangka (72.433 ha). Kedua kabupaten ini dapat di menjadi daerah potensial dalam pengembangan kebutuhan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 2.55 Luas Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan
Provinsi Bangka Belitung Berdasarkan Pola Ruang
RTRW**

Tahun 2014-2034

Kabupaten/Kota	Luas (ha)	Persentase (%)
Kabupaten Bangka	72.433	21
Kabupaten Belitung	25.763	7
Kabupaten Bangka Barat	36.330	10
Kabupaten Bangka Tengah	11.044	3
Kabupaten Bangka Selatan	171.350	48
Kabupaten Belitung Timur	38.473	11
Total	355.453	100

*Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014-2034*

Distribusi luas kawasan peruntukan tanaman pertanian hortikultura pada masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti disajikan pada **Tabel 2.10** berikut.

**Tabel 2.56 Luas Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura
Provinsi Bangka Belitung Berdasarkan Pola Ruang RTRW
Tahun 2014-2034**

Kabupaten/Kota	Luas (ha)	Persentase (%)
Kabupaten Bangka	33.245	15
Kabupaten Belitung	40.252	18
Kabupaten Bangka Barat	53.116	24
Kabupaten Bangka Tengah	23.171	11
Kabupaten Bangka Selatan	52.958	24
Kabupaten Belitung Timur	18.000	8
Total	221.512	100

*Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014-2034*

Distribusi luas kawasan peruntukan tanaman perkebunan besar dan perkebunan rakyat pada masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti disajikan pada **Tabel 2.57** dan **Tabel 2.58**

**Tabel 2.57 Luas Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar
Provinsi Bangka Belitung Berdasarkan Pola Ruang RTRW Tahun 2014-2034**

Kabupaten/Kota	Luas (ha)	Persentase (%)
Kabupaten Bangka	16.590	13
Kabupaten Belitung	33.188	27
Kabupaten Bangka Barat	30.808	25
Kabupaten Bangka Tengah	4.908	4
Kabupaten Bangka Selatan	4.329	3

Kabupaten Belitung Timur	35.047	28
Total	124.870	100

*Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014-2034*

**Tabel 2.58 Luas Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat
Provinsi Bangka Belitung Berdasarkan Pola Ruang RTRW
Tahun 2014-2034**

Kabupaten/Kota	Luas (ha)	Persentase (%)
Kabupaten Bangka	45.660	24
Kabupaten Belitung	18.456	10
Kabupaten Bangka Barat	40.120	21
Kabupaten Bangka Tengah	34.687	18
Kabupaten Bangka Selatan	30.326	16
Kabupaten Belitung Timur	22.264	11
Total	191.513	100

*Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014-2034*

Adapun distribusi luas kawasan peruntukan peternakan pada masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti disajikan pada Tabel 2.59.

**Tabel 2.59 Luas Kawasan Peruntukan Peternakan
Provinsi Bangka Belitung Berdasarkan Pola Ruang RTRW
Tahun 2014-2034**

Kabupaten/Kota	Luas (ha)	Persentase (%)
Kabupaten Bangka	318	3
Kabupaten Belitung	871	8
Kabupaten Bangka Barat	467	5
Kabupaten Bangka Tengah	7.720	77
Kabupaten Bangka Selatan	566	6
Kabupaten Belitung Timur	160	1
Total	10.102	100

*Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014-2034*

c. Kawasan peruntukan perikanan, meliputi :

- 1) Perikanan tangkap dikembangkan di perairan Selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Natuna Utara, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Natuna Utara, dan perairan timur Pulau Belitung

- 2) Perikanan budidaya yang terdiri atas budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas PPN Sungailiat dan PPN Tanjungpandan. Pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha, Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha.
- d. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan darat seluas 400.000 Ha di dalam wilayah pertambangan yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. Adapun distribusi luas kawasan peruntukan pertambangan pada masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60 Luas Kawasan Peruntukan Pertambangan Provinsi Bangka Belitung Berdasarkan Pola Ruang RTRW Tahun 2014-2034

Kabupaten/Kota	Luas (ha)	Persentase (%)
Kabupaten Bangka	79.900	20
Kabupaten Belitung	29.900	7
Kabupaten Bangka Barat	62.700	16
Kabupaten Bangka Tengah	55.800	14
Kabupaten Bangka Selatan	125.700	31
Kabupaten Belitung Timur	46.000	12
Total	400.000	100

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

- e. Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri dilakukan pada kawasan pengembangan industri yang terdiri dari:

- 1) Kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Mentok di Kabupaten Bangka Barat
- 2) Kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat
- 3) Kawasan peruntukan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah
- 4) Kawasan peruntukan industri Ketapang di Pangkalpinang

- 5) Kawasan peruntukan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan
 - 6) Kawasan peruntukan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung
 - 7) Kawasan peruntukan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur
- f. Kawasan peruntukan pariwisata atau destinasi pariwisata, pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan melalui:
- 1) Identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh
 - 2) Penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Belitung
 - 3) Revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada
 - 4) Pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi
 - 5) Peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas :

- a) Wisata alam, yang meliputi :
 - Seluruh wilayah pesisir Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil
 - Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur
 - Taman wisata laut
 - Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tanjung Kelayang
 - Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
 - Geopark
- b) Wisata budaya, yang meliputi :
 - Kawasan Cagar Budaya Pangkalpinang
 - Kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat

- Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka
 - Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di Kabupaten/Kota
 - Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di Kabupaten/Kota
 - Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur
 - Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di Kabupaten/Kota.
- c) Wisata buatan, merupakan kawasan wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema dan resort serta fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten/Kota.
- g. Kawasan peruntukan permukiman
Kawasan peruntukan permukiman dengan luas kurang lebih 59.188 Ha meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan diseluruh wilayah Provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.
- h. Kawasan peruntukan lainnya
Kawasan peruntukan lainnya, meliputi kawasan pertahanan keamanan berada di Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung

14. Indeks Resiko Bencana

Kinerja sasaran Menurunnya Risiko Bencana diukur dengan indikator Indeks Risiko Bencana. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.61 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	$R = H \times \frac{V}{C}$ <p>Dimana R = Tingkat Risiko Bencana</p>

			H= Indeks Bahaya V= Indeks Kerentanan C= Indeks Kapasitas
--	--	--	-----------------------------------------------------------------

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 143,42 atau sebesar 110,35 % dari target 159,98. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.56 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Risiko Bencana	160,48	155,61	159,98	143,42	110,35	158,98	109,79

Analisis Ketercapaian Sasaran Indeks Risiko Bencana adalah sebagai berikut:

- Tercapai 143,42 (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 110,35 % (kolom 7) (tercapai).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 155,61, terhadap target tahun lalu sebesar 160,48 (kolom 3) terdapat penurunan sebesar 12,19 %.
- Dibandingkan dengan target akhir RPD, sasaran berhasil tercapai 109,79

Kondisi bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digambarkan sebagai berikut :

1. Wilayah Rawan Bencana

Daftar rawan bencana mengacu pada kajian KLHS RPJPD yang terdiri dari bencana penting, angin kencang, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, dan gelombang pasang, serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Tabel 2.62, kejadian bencana yang sering muncul di tahun 2022 adalah banjir, diikuti oleh angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang, dan angin kencang, serta petir.

Tabel 2.62 Kejadian Bencana per Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Bencana	Bangka	Bangka Barat	Bangka Selatan	Bangka Tengah	Belitung	Belitung Timur	Pangkalpinang	Jumlah
---------	--------	--------------	----------------	---------------	----------	----------------	---------------	--------

Petir	0	4	0	0	0	0	0	4
Angin Kencang	0	7	0	0	0	0	0	7
Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0	0
Banjir	8	0	4	7	6	0	73	98
Kebakaran Hutan dan Lahan	0	24	0	8	0	0	4	36
Angin Puting Beliung	30	9	0	6	0	0	50	95
Gelombang Pasang	0	8	0	0	0	0	0	8
Jumlah	38	52	4	21	6	0	127	248

Sumber : BPS Bangka, 2023; BPS Babar, 2023; BPS Bateng, 2023; BPS Basel, 2023; BPS Pangkalpinang, 2023; BPS Belitung, 2023; BPS Beltim, 2023

Tabel 2.63 Wilayah Rawan Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	Rawan Banjir	Rawan Abrasi/ Erosi	Rawan Longsor
Bangka	Sungailiat, Puding Besar, Mendo Barat	Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu	-
Belitung	Tanjung Pandan	Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk	-
Bangka Barat	Kecamatan Mentok, Parittiga, Kelapa, Jebus	Kecamatan Parittiga, Kecamatan Tempilang	Kecamatan Simpang Teritip
Bangka Tengah	Kecamatan Lubuk Besar, Koba, Namang, Sungai Selan, dan Pangkalan Baru	Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru	-
Bangka Selatan	Kecamatan Toboali dan Pulau Besar	Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali	-
Belitung Timur	Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung	Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar	-
Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Pantai Pasir Padi	-

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

a. Banjir

Banjir adalah peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Berdasarkan data bahaya banjir yang diperoleh dari data Inarisk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dapat diketahui bahwa bahaya banjir di wilayah Bangka Belitung didominasi wilayah yang tidak ada bahaya banjir. Bahaya banjir kategori rendah seluas 5.762,2 Ha, kategori sedang seluas 217.334,2 Ha, dan kategori tinggi seluas 386.366,8 Ha.

Wilayah kabupaten yang tidak terdapat bahaya banjir terluas adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan persentase wilayah yang tidak ada bahaya banjir sebesar 59,50% dari luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten Bangka

Selatan juga termasuk wilayah dengan kategori bahaya banjir kategori rendah terluas dengan persentase sebesar 0,31% dan wilayah dengan bahaya banjir kategori tinggi tertinggi dengan persentase sebesar 27,76%. Selengkapnya, tabulasi luas daerah bahaya banjir di wilayah kajian dan wilayah perencanaan dapat dilihat pada Tabel 2.64 berikut.

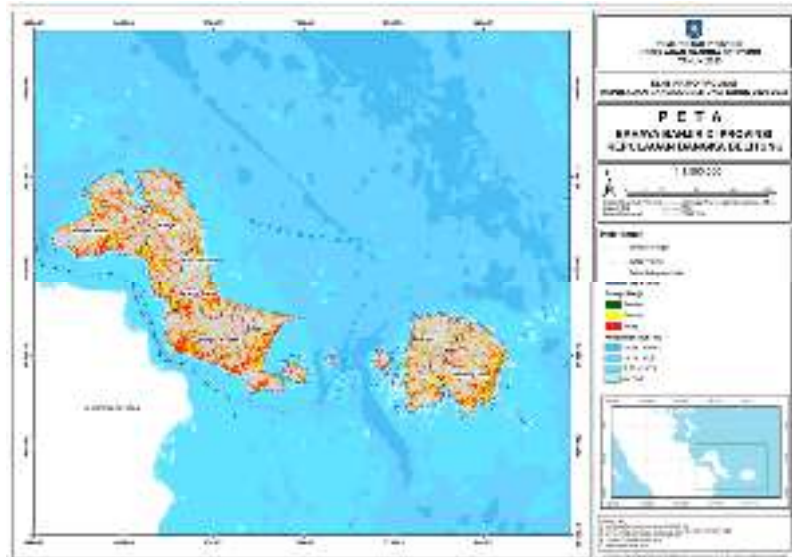
Tabel 2.64 Bahaya Bencana Banjir Per Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kategori	Bangka	Bangka Barat	Bangka Selatan	Bangka Tengah	Belitung	Belitung Timur	Pangkal-pinang	Jumlah
Tidak Ada Data	574,9	-	-	-	-	-	-	574,9
Tidak Ada	198.795,8	187.961,8	214.058,4	142.286,2	154.959,3	155.957,7	5.198,6	1.059.217
Rendah	1.069,4	886,4	1.363,7	738,1	528,6	1.156,7	19,4	5.762,2
Sedang	37.466,4	32.489,2	44.457,9	30.940,1	29.210,9	40.555,1	2.214,6	217.334,
Tinggi	64.761,8	63.816,7	99.847,7	51.627,2	42.277,7	61.018,8	3.016,8	386.366,
Jumlah	302.668,3	285.154,1	359.727,7	225.591,7	226.976,5	258.688,3	10.449,4	1.669.255

Sumber: Olahan Data Inarisk, 2022

Berdasarkan tabulasi data luasan risiko bencana banjir yang didominasi dengan kategori risiko rendah, maka bencana banjir dipertimbangkan untuk tidak menjadi isu yang dianggap strategis. Sebaliknya, berdasarkan data dari BPBD, kejadian banjir sering terjadi di daerah tertentu, seperti di Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Kecamatan Damar Kabupaten Belitung. Dengan demikian, kejadian bencana banjir harus tetap menjadi pertimbangan pada saat merumuskan kebijakan pengelolaan dalam perencanaan tata ruang wilayah.

Gambar 2.19 Bahaya Bencana Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: KLHS RPJPD Prov Kep. Bangka Belitung Tahun 2025-2045

b. Kekeringan

Kekeringan adalah kejadian ketika ketersediaan air yang ada jauh dibawah kebutuhan air untuk hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang di atasnya ada tanaman yang sedang dibudidayakan. Bahaya kekeringan di wilayah kajian dan wilayah perencanaan, rata-rata termasuk ke dalam kategori sedang. Luas wilayah dengan bahaya kekeringan kategori sedang tertinggi berada di Kabupaten Bangka Selatan. Wilayah dengan bahaya kekeringan kategori tinggi tertinggi berada di Kabupaten Belitung Timur. Selengkapnya, tabulasi luas daerah rawan bencana kekeringan dapat dilihat pada **Tabel 2.65**.

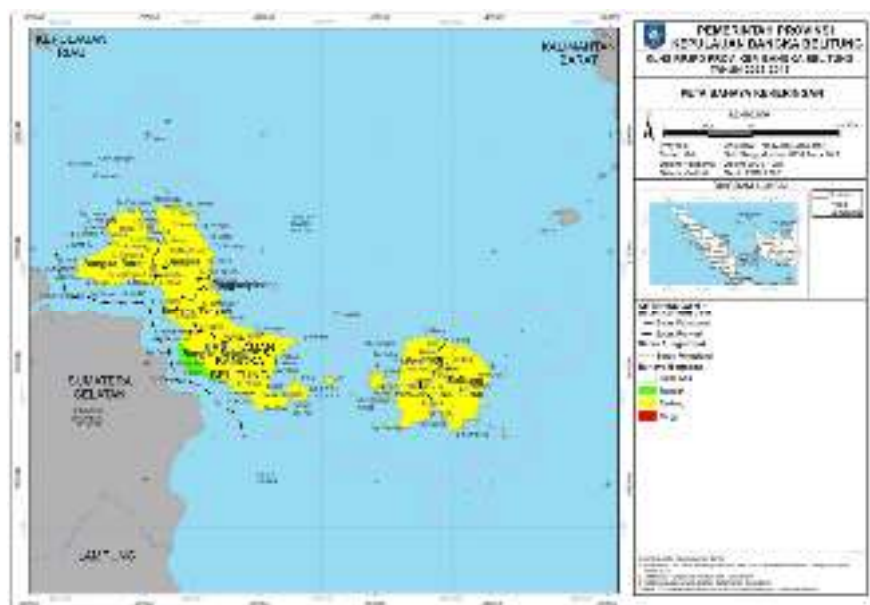
Tabel 2.65 Bahaya Bencana Kekeringan Per Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kategori	Bangka	Bangka Barat	Bangka Selatan	Bangka Tengah	Belitung	Belitung Timur	Pangkalpinang	Jumlah
Tidak Ada Data	574,7	-	-	-	-	-	-	574,7
Tidak Ada	1.083,3	989,5	1.467,2	341,8	1.760,7	1.211,4	10,3	6.864,2
Rendah	-	-	40.571,8	602,2	-	-	-	41.174,0
Sedang	301.010,2	283.210,0	317.688,6	224.647,7	225.215,8	256.017,7	10.439,2	1.618.228,5
Tinggi	-	954,6	-	-	-	1.459,1	-	2.413,7
Jumlah	302.668,3	285.154,1	359.727,7	225.591,7	226.976,5	258.688,3	10.449,4	1.669.225,0

Sumber: Olahan Data Inarisk, 2022

Pulau Bangka dan Belitung didominasi oleh bahaya kekeringan sedang yang dapat diamati pada **Gambar 2.10**. Berdasarkan tabulasi data tersebut, bencana kekeringan dapat dipertimbangkan untuk menjadi isu yang dianggap strategis dalam wilayah kajian KLHS. Sebaliknya, data kejadian bencana yang bersumber dari BPBD menyebutkan bahwa bencana kekeringan tidak pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, bencana kekeringan tidak menjadi isu yang dianggap strategis, namun tetap menjadi bahan pertimbangan.

Gambar 2.20 Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: KLHS RPJPD Prov Kep. Bangka Belitung Tahun 2025-2045

c. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan saat hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau kerugian nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Luas daerah dengan bahaya kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada **Tabel 2.66**.

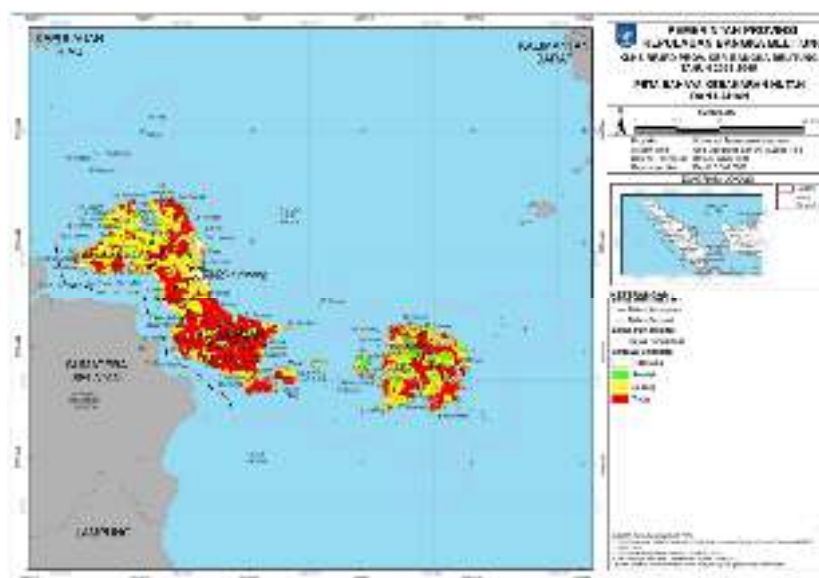
Tabel 2.66 Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kategori	Bangka	Bangka Barat	Bangka Selatan	Bangka Tengah	Belitung	Belitung Timur	Pangkalpinang	Jumlah
Tidak Ada Data	574,7	-	-	-	-	-	-	574,7
Tidak Ada	48.638,9	46.648,8	25.673,9	30.702,1	46.638,1	38.030,2	7.275,5	243.607,4
Rendah	5.435,5	9.699,0	2.238,3	4.957,0	23.446,4	17.881,5	71,2	63.728,8
Sedang	137.489,5	171.668,1	88.616,3	69.016,8	100.953,3	100.286,3	2.718,8	670.749,2
Tinggi	110.529,7	57.138,1	243.199,1	120.915,8	55.938,6	102.490,3	383,9	690.595,6
Jumlah	302.668,3	285.154,1	359.727,7	225.591,7	226.976,5	258.688,3	10.449,4	1.669.255,6

Sumber : Olahan Data Inarisk, 2022

Berdasarkan Tabel 2.66, bahaya kebakaran hutan dan lahan didominasi oleh kategori sedang dan tinggi. Luas area dengan bahaya kebakaran hutan dan lahan kategori tinggi seluas 690.595,6 Ha dan bahaya kategori sedang seluas 670.749,2 Ha. Kabupaten dengan kategori bahaya kebakaran hutan dan lahan kategori tinggi terluas berada di Kabupaten Bangka Selatan dengan persentase 67,61% dari total luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Wilayah dengan kategori tidak ada bahaya kebakaran hutan dan lahan tertinggi berada di Kabupaten Bangka Barat dengan persentase 16,36% dari luas wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 2.21 Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: KLHS RPJPD Prov Kep. Bangka Belitung Tahun 2025-2045

d. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah fenomena cuaca yang berpotensi menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial seperti hujan lebat, hujan es, angin kencang dan badai taifun. Pada data Inarisk, cuaca ekstrim menganalisis angin kencang/puting beliung. Luasan bahaya cuaca ekstrim ada di **Tabel 2.67**

Tabel 2.67 Bahaya Cuaca Ekstrim Per kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (ha)

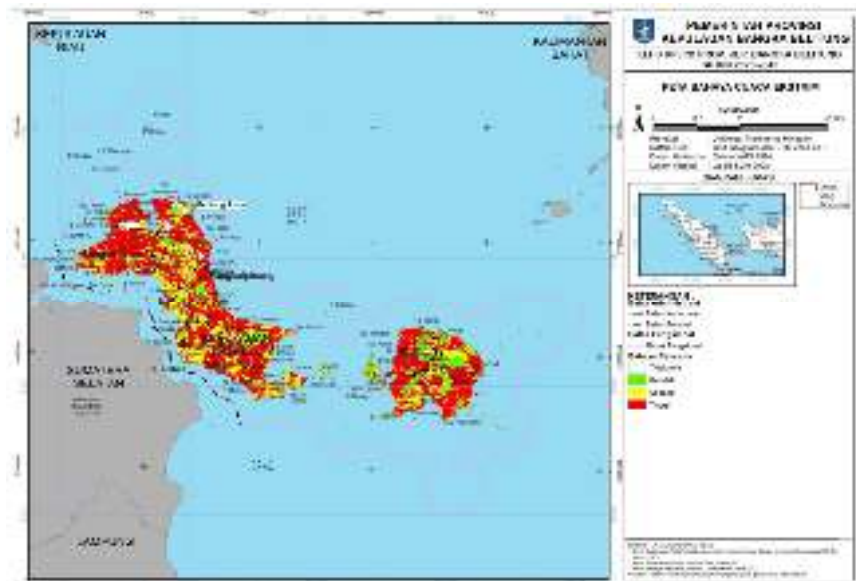
Kategori	Bangka	Bangka Barat	Bangka Selatan	Bangka Tengah	Belitung	Belitung Timur	Pangkal- oinang	Jumlah
Tidak Ada Data	574,7	-	-	-	-	-	-	574,7
Tidak Ada	25.713,7	16.381,8	2.073,1	1.744,6	1.129,0	513,1	15,6	47.570,9
Rendah	16.241,6	11.432,8	18.767,4	19.592,6	36.610,8	40.662,1		143.307,3
Sedang	107.606,5	56.030,6	147.024,1	87.008,1	58.902,7	72.852,8	1.376,9	530.801,7
Tinggi	152.531,7	201.308,9	191.863,1	117.246,4	130.333,9	144.660,2	9.056,9	947.001,2
Jumlah	302.668,3	285.154,1	359.727,7	225.591,7	226.976,5	258.688,3	10.449,4	1.669.251,9

Sumber: Olahan Data Inarisk, 2022

Berdasarkan Tabel 2.67, hampir seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh bahaya cuaca ekstrim kategori tinggi dengan persentase mencapai 56,75% dari luasan wilayah kajian dan perencanaan. Cuaca ekstrim dengan kategori tinggi terluas berada di Kabupaten Bangka Barat seluas 201.308,9 ha. Bahaya cuaca ekstrim dengan kategori tidak ada seluas 47.570,9 ha, dengan wilayah terluas berada di Kabupaten Bangka dengan persentase 8,51% dari luasan wilayah Bangka.

Gambar 2.22 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung



Sumber: KLHS RPJPD Prov Kep. Bangka Belitung Tahun 2025-2045

Indeks Risiko Bencana melakukan perhitungan yang mempertimbangkan bahaya (bahaya), kerentanan (kerentanan), dan kapasitas (kapasitas) masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen Bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana, seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, dan banjir, antara lain. Kerentanan terdiri dari kondisi fisik, kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terhadap bencana. Namun, komponen kapasitas termasuk ketahanan daerah, seperti kelembagaan dan kebijakan, pendidikan dan pelatihan, logistik, mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat, serta kemampuan pemulihan.

Hasil perhitungan indeks risiko bencana tahun 2023 menunjukkan 13 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 25 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang dan tidak ada provinsi yang berada pada risiko bencana rendah sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.68**. Tiga provinsi yang berisiko paling tinggi yaitu Provinsi Sulawesi Barat (skor 160,08), Maluku (skor 160,03), dan Kepulauan Bangka Belitung (skor 155,61). Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki indeks risiko terendah pada kelas sedang adalah Provinsi Kepulauan Riau (skor 107,79), Papua Pegunungan (skor 102,05), dan DKI Jakarta (skor 61,31).

Tabel 2.68 Indeks Risiko Bencana Per Provinsi Tahun 2023

NO	PROVINSI	2022	2023	STATUS	CAPAIAN
1	Aceh	149,1	146,9	□	TURUN
2	Sumatera Utara	142,51	140,65	□	TURUN
3	Sumatera Barat	144,39	144,38	□	TURUN
4	Riau	141,26	137,75	□	TURUN
5	Jambi	133,49	135,69	□	NAIK
6	Sumatera Selatan	132,99	131,24	□	TURUN
7	Bengkulu	155,35	148,75	□	TURUN
8	Lampung	142,55	135,66	□	TURUN
9	Kepulauan Bangka Belitung	158,52	155,61	□	TURUN
10	Kepulauan Riau	110,93	107,79	□	TURUN
11	DKI Jakarta	62,58	61,31	□	TURUN
12	Jawa Barat	131,62	123,16	□	TURUN
13	Jawa Tengah	115,38	109,01	□	TURUN
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	119,56	108,15	□	TURUN
15	Jawa Timur	121,7	118,61	□	TURUN
16	Banten	144,51	132,21	□	TURUN
17	Bali	123,98	120,21	□	TURUN
18	Nusa Tenggara Barat	119,83	115,37	□	TURUN
19	Nusa Tenggara Timur	139,23	132,81	□	TURUN
20	Kalimantan Barat	136,72	138,92	□	NAIK
21	Kalimantan Tengah	123,56	121,72	□	TURUN
22	Kalimantan Selatan	128,81	129,44	□	NAIK
23	Kalimantan Timur	146,67	144,43	□	TURUN
24	Kalimantan Utara	157,47	148,16	□	TURUN
25	Sulawesi Utara	129,62	128,01	□	TURUN
26	Sulawesi Tengah	143,44	140,56	□	TURUN
27	Sulawesi Selatan	150,07	144,47	□	TURUN
28	Sulawesi Tenggara	155,79	153,08	□	TURUN
29	Gorontalo	120,61	116,71	□	TURUN
30	Sulawesi Barat	165,23	160,08	□	TURUN
31	Maluku	162,47	160,03	□	TURUN
32	Maluku Utara	149,22	148,71	□	TURUN
33	P A P U A	138,27	138,59	□	NAIK
34	Papua Barat	143,92	145,76	□	NAIK
35	Papua Selatan	138,2	138,2		TETAP
36	Papua Tengah	116,1	116,49	□	NAIK
37	Papua Pegunungan	102,05	102,05		TETAP
38	Papua Barat Daya	150,11	148,44	□	TURUN

Sumber : BNPB, 2024

Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 155.61. Ancaman kebencanaan yang ada di seluruh kepulauan Bangka Belitung adalah Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan,

cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 2.69 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko 2023
1	Bangka Selatan	180,4	180,4	180,4	179,12	179,37	Tinggi
2	Belitung Timur	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	Tinggi
3	Bangka Barat	180,4	180,4	180,4	180,4	163,61	Tinggi
4	Bangka	168,4	168,4	168,4	168,4	160,48	Tinggi
5	Belitung	168,4	168,4	164,44	148,48	158,53	Tinggi
6	Bangka Tengah	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	Tinggi
7	Kota Pangkal Pinang	120,4	120,4	120,4	120,4	114,48	Sedang

Sumber BNPB, 2024

Namun jika dibandingkan dengan capaian secara nasional capaian provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah yaitu sebesar 30,86.

Tabel 2.70 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Capaian	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<p>Indeks Resiko Bencana</p> $R = H \times \frac{V}{C}$ <p>Dimana R = Tingkat Risiko Bencana H= Indeks Bahaya V= Indeks Kerentanan C= Indeks Kapasitas</p> <p>Realisasi = 143,42</p>	-	159,98	111,55%	174,28	143,42	121,52.%

15. Indeks Desa Membangun

Kinerja sasaran Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan diukur dengan indikator Indeks Desa Membangun. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2.71 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Indeks Variabel = $\frac{(\sum \text{indikator } X)}{(\text{Nilai maksimum } (X))}$

			$IDM = \frac{1}{3 (IS \times IE \times IL)}$ <p>IS = Indeks Sosial IE = indeks Ekonomi IL = Indeks Lingkungan</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 0,81 atau sebesar 110,96 % dari target 0,73. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.72 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Desa Membangun	0,721	0,721	0,73	0,81	110,96	0,75	108,29

Analisis Ketercapaian Sasaran Menurunkan tingkat Pengangguran adalah sebagai berikut:

- Tercapai 0,81 % (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 110,96 % (kolom 7) (tercapai/tidak tercapai*).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 0,721 % (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 0,721 (kolom 3) terdapat peningkatan/~~penurunan~~ sebesar 0,088 %, (persentase capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai/tidak tercapai

Berikut adalah informasi mengenai Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

- Pada tahun 2024, ada beberapa desa di Bangka Barat yang naik status menjadi desa mandiri, termasuk semua desa di Kecamatan Mentok.
- Pada tahun 2023, ada 3 desa yang masih berstatus berkembang, sedangkan pada tahun 2024 tinggal 2 desa yang berkembang.
- IDM merupakan indikator tunggal pembangunan yang mengukur perkembangan desa dari berbagai aspek, seperti ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi lingkungan.

- IDM pertama kali diluncurkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun 2015.
- Status desa menentukan jumlah kucuran dana yang masuk ke desa
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mencapai 74,55, meningkat 0,46 poin atau 0,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 74,09. „ Selama 2020-2024, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata meningkat sebesar 0,62 persen per tahun.

16. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kinerja sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap penanggulangan bencana diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.73 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	$r = \left\{ \left(\frac{Pt}{Po} \right)^{\frac{1}{t}} - 1 \right\} \times 100$ <p> r = laju pertumbuhan penduduk Pt = jumlah penduduk pada tahun t Po = jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan Po </p> $Pt = Po + (B - D) + (Mi - Mo)$ <p> Pt = jumlah penduduk pada tahun t Po = jumlah penduduk pada tahun dasar B (birth) = jumlah kelahiran selama periode $0 - t$ D (death) = jumlah kematian Mo = jumlah migrasi keluar selama periode $0 - t$ Mi = jumlah migrasi masuk selama periode $0 - t$ </p>

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 1,35% atau sebesar 122,41% dari target 1,74% Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.74 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,79 %	1,39 %	1,74 %	1,35 %	122,41%	1,68 %	119,05%

Analisis Ketercapaian Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk adalah sebagai berikut:

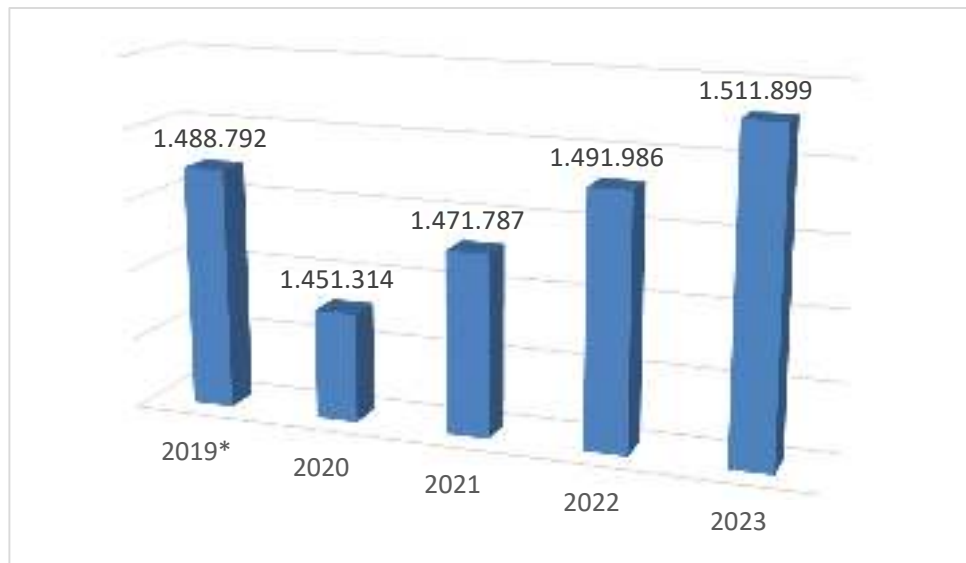
- Tercapai 1,35 % (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 122,41% (kolom 7) (tercapai/~~tidak tercapai~~*).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 1,39 % (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 1,79 % (kolom 3) terdapat ~~peningkatan~~/penurunan *) sebesar 0,03% (persentase capaian capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai/~~tidak tercapai~~

laju pertumbuhan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per tahun, 2020-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.22 dan Gambar 2.23.

Laju Pertumbuhan Penduduk provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019-2023 mengalami trend yang positif yang menurun. Tren ini memiliki arti bahwa terjadi peningkatan penduduk pertahun namun jumlah pertambahan penduduk setiap tahunnya menurun jumlahnya. Dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,48%, kemudian tahun 2023 tetap mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,39%. Hal ini dialami oleh berbagai provinsi di Indonesia, sebagaimana hasil Sensus Penduduk 2020, sepanjang 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25%, menurun cukup tajam dibandingkan periode 1971-1980 yang sebesar 2,31%. Laju pertumbuhan penduduk terjadi karena dipengaruhi faktor kematian, kelahiran, dan migrasi.

Gambar 2.23 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

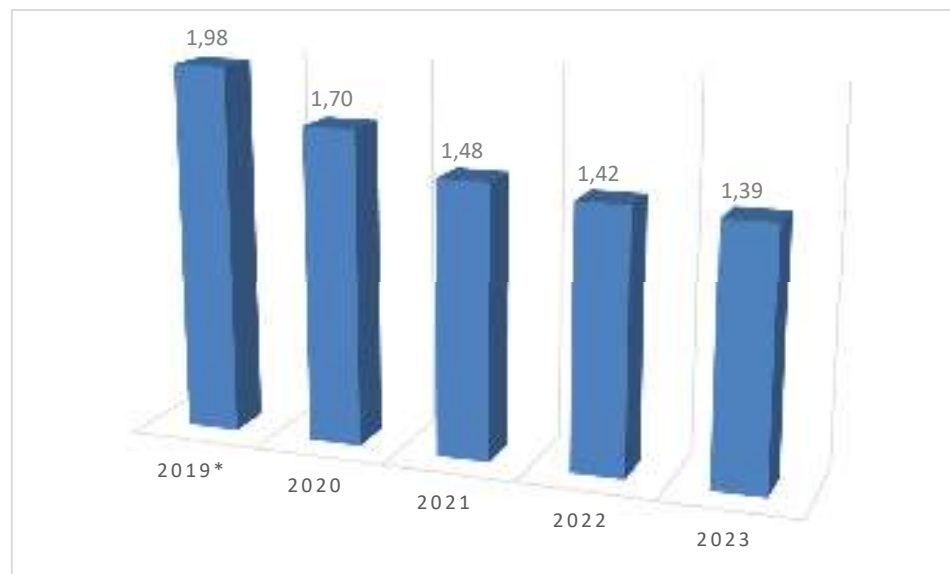
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS. Prov Kep. Bangka Belitung. Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari periode ke periode memiliki kecenderungan menurun, salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk lewat Program Keluarga Berencana yang diluncurkan sejak 1980an, penyebab lainnya adalah tingginya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga berpotensi menurun jumlah kelahiran penduduk.

Gambar 2.24 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023



Sumber: BPS. Prov Kep. Bangka Belitung. Tahun 2024

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 yaitu perbandingan penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,62. Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 mencapai 90,58 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 7 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Pangkalpinang dengan kepadatan sebesar 2.174,63 jiwa/ km² dan terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 50,71 jiwa/Km².

Tabel 2.75 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Penduduk Menurut Kabupaten Kota (Jiwa/Orang)				
	2019*	2020	2021	2022	2023
Bangka	337.337	325.155	329.486	333.755	337.939
Belitung	189.824	182.604	184.827	187.035	189.225
Bangka Barat	213.163	203.827	206.857	209.866	212.854
Bangka Tengah	196.196	198.052	201.237	204.357	207.435
Bangka Selatan	209.973	197.539	200.337	203.102	205.829
Belitung Timur	129.572	126.487	128.111	129.706	131.281
Pangkalpinang	212.727	217.650	220.932	224.165	227.336
Kepulauan Bangka Belitung	1.488.792	1.451.314	1.471.787	1.491.986	1.511.899

Sumber: BPS. Prov Kep. Bangka Belitung. Tahun 2024

Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah, maka proyeksi penduduk perlu dilakukan untuk melihat potensi besaran jumlah penduduk di masa yang akan datang khususnya selama 5 tahun kedepan. Jumlah penduduk ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan suatu kebijakan terutama dalam aspek sosial dan ekonomi, hal ini dikarenakan aspek sosial dan ekonomi menjadi aspek yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan jumlah penduduk.

Gambar 2.25 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026-2029



Sumber: BPS. Prov Kep. Bangka Belitung. Tahun 2024

Berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan terjadi peningkatan dimana tahun 2026 jumlah penduduk Provinsi Bangka Belitung berjumlah 1,569,749 jiwa dan pada tahun 2029 meningkat menjadi 1.624.147 jiwa atau bertambah sekitar 54,398 jiwa. Dilihat dari proporsi penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kelompok usia, terlihat bahwa pada Tahun 2019-2023, jumlah penduduk terbanyak pada kelompok umur 15-44 tahun yang merupakan usia produktif dan semakin meningkat jumlahnya pada Tahun 2023 (Tabel 2.24). Untuk jumlah penduduk dengan usia 64 tahun sampai 75 tahun keatas jumlahnya lebih sedikit sehingga mencerminkan ketergantungan lansia yang tidak terlalu besar, namun dilihat dari usia belum produktif (0-14 tahun) jumlahnya masih tinggi. Jika diakumulasi secara keseluruhan maka *dependency ratio* penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergolong rendah, artinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada dalam era bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding jumlah penduduk tidak produktif.

Tabel 2.76 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019-2023

Kelompok Umur	Laki-Laki					Perempuan					Total				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	68 502,0	61.368,0	62 283,0	63 272,0	65 071,0	65 831,0	58.424,0	59 298,0	60 265,0	62 211,0	134 333,0	119.792,0	121 581,0	123 537,0	123 537,0
5-9	67 412,0	60.122,0	59 485,0	59 499,0	60 256,0	64 768,0	57.330,0	56 990,0	57 159,0	57 449,0	132 180,0	117.452,0	116 475,0	116 658,0	116 658,0
10-14	65 456,0	64.871,0	63 922,0	62 853,0	61 758,0	62 258,0	60.929,0	60 297,0	59 616,0	58 535,0	127 714,0	125.800,0	124 219,0	122 469,0	122 469,0
15-19	63 297,0	65.256,0	65 397,0	65 668,0	65 361,0	59 906,0	61.321,0	61 491,0	61 813,0	61 316,0	123 203,0	126.577,0	126 888,0	127 481,0	127 481,0
20-24	63 624,0	64.276,0	64 465,0	64 850,0	64 677,0	58 835,0	60.998,0	61 362,0	61 836,0	61 289,0	122 459,0	125.274,0	125 827,0	126 686,0	126 686,0
25-29	67 540,0	63.843,0	63 526,0	63 544,0	63 876,0	61 455,0	60.363,0	60 443,0	60 831,0	60 911,0	128 995,0	124.206,0	123 969,0	124 375,0	124 375,0
30-34	67 689,0	64.832,0	64 651,0	64 414,0	64 116,0	61 220,0	60.225,0	60 976,0	61 175,0	60 588,0	128 909,0	125.057,0	125 627,0	125 589,0	125 589,0
35-39	65 180,0	61.695,0	62 367,0	63 215,0	63 524,0	58 312,0	52.276,0	58 069,0	59 060,0	59 370,0	123 492,0	113.971,0	120 436,0	122 275,0	122 275,0
40-44	60 667,0	57.838,0	58 623,0	59 435,0	59 730,0	52 062,0	52.835,0	53 715,0	54 659,0	55 251,0	112 729,0	110.703,0	112 338,0	114 094,0	114 094,0
45-49	52 839,0	50.667,0	52 003,0	53 403,0	54 612,0	45 168,0	46.167,0	47 314,0	48 542,0	49 932,0	98 007,0	96.834,0	99 317,0	101 945,0	101 945,0
50-54	42 312,0	41.313,0	42 766,0	44 409,0	46 015,0	36 691,0	37.816,0	39 194,0	40 718,0	42 255,0	79 003,0	79.129,0	81 960,0	85 127,0	85 127,0
55-59	32 128,0	33.182,0	34 277,0	35 461,0	36 659,0	29 570,0	30.687,0	31 778,0	32 956,0	34 109,0	61 698,0	63.869,0	66 055,0	68 417,0	68 417,0
60-64	24 728,0	25.094,0	26 180,0	27 358,0	28 395,0	23 238,0	23.807,0	24 761,0	25 814,0	27 022,0	47 966,0	48.901,0	50 941,0	53 172,0	53 172,0
65-69	16 488,0	17.629,0	18 570,0	19 526,0	20 360,0	15 695,0	17.178,0	18 173,0	19 168,0	20 059,0	32 183,0	34.807,0	36 743,0	38 694,0	38 694,0
70-74	9 020,0	10.106,0	10 983,0	11 919,0	12 770,0	9 325,0	10.437,0	11 299,0	12 249,0	13 139,0	18 345,0	20.543,0	22 282,0	24 168,0	24 168,0
75+	7 641,0	7.456,0	8 054,0	8 756,0	9 427,0	9 935,0	9.837,0	10 453,0	11 178,0	11 856,0	17 576,0	17.293,0	18 507,0	19 934,0	19 934,0
Jumlah	774 523,0	749.553,0	757.552,0	767 582,0	776 607,0	714 269,0	700.624,0	715 613,0	727 039,0	735 292,0	1.488.792,0	1.450.208,0	1 473 165,0	1.494.621,0	1.511.899,0

Sumber: BPS. Prov Kep. Bangka Belitung. Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel. 2.24, diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dari Tahun 2019 hingga 2023 didominasi oleh penduduk dengan rentang usia dari balita hingga penduduk usia dewasa. Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin memiliki tren fluktuatif. Pada tahun 2019 hingga 2020 terjadi penurunan jumlah penduduk dari 1.488.792 jiwa menjadi 1.450.208 jiwa, yang diduga penurunan jumlah penduduk ini karena adanya pandemi COVID. Setelah itu, mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2023 jumlah penduduknya menjadi 1.511.899 jiwa. Dilihat dari komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.77 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Capaian	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<p>Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</p> $r = \left\{ \left(\frac{Pt}{Po} \right)^{\frac{1}{t}} - 1 \right\} \times 100$ <p>r = laju pertumbuhan penduduk Pt = jumlah penduduk pada tahun t Po = jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan Po</p> <p>Pt = Po + (B - D) + (Mi - Mo)</p> <p>Pt = jumlah penduduk pada tahun t Po = jumlah penduduk pada tahun dasar B (birth) = jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = jumlah kematian Mo = jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi = jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t</p> <p>Realisasi = (14.350/16.204)x100%= 88,56% (Kolom 7)</p>	1,13	1,74		1,11	1,36%	

17. Persentase Angka Kemiskinan

Kinerja sasaran Menurunkan Tingkat Kemiskinan diukur dengan indikator Persentase Angka Kemiskinan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.78 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4

1	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p> $\alpha = 0$ $z =$ garis kemiskinan $y_i =$ rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan $q =$ banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan $n =$ jumlah penduduk </p>
---	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 4,55 % atau sebesar 98,66 % dari target 4,49 %. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.79 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Angka Kemiskinan	4,52	4,52	4,49	4,55	98,66	4,01	86,53

Analisis Ketercapaian Sasaran Persentase Angka Kemiskinan adalah sebagai berikut:

- Tercapai 4,55 % (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 98,66 % (kolom 7) (tidak tercapai*).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 4,52 % (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 4,52 (kolom 3) terdapat peningkatan/penurunan *) sebesar 0.03 %, (persentase capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tercapai sebesar 86,53

September Tahun 2023, tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4.52% berada di bawah tingkat kemiskinan nasional (9.57%) dan merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah ke-4 (empat). Sedangkan angka garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk kategori tinggi yaitu sebesar Rp 874.204.00/kapita/bulan. Garis kemiskinan periode 2019-2023 terus mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun. Tahun 2019 garis kemiskinan sebesar Rp 677.716.00/kapita/bulan lalu meningkat pada Tahun 2023 sebesar Rp 263.670.00/kapita/bulan menjadi Rp 874.204.00/kapita/bulan. Untuk melihat secara rinci kondisi perkembangan kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019- 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.31.

**Tabel 2.80 Indeks Perkembangan Kemiskinan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	0	0	0	0	0
	1	2	2	2	2
	9	0	1	2	3
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	67.37	72.05	69.70	66.70	66.70
	3	0	7	6	6
	7	5	0	9	9
Persentase Penduduk Miskin (persen)	4.50	8.90	6.70	6.10	5.20
	5	8	6	6	5
	0	9	7	1	2
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	677.716	720.500	705.000	874.204	874.204
	7	2	5	0	7
	7	1	2	1	4
	0	0	0	0	2
	7	4	2	4	0
	1	5	0	3	4
	6	5	3	7	
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.57	0.77	0.56	0.44	0.66
	5	7	5	4	6
	7	7	6	3	3
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.11
	1	1	1	0	1
	2	7	1	6	3

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka 2024

Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung fluktuatif. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 67.37 ribu jiwa dengan persentase sebesar 4.50%. Kemudian meningkat di Tahun 2020 sebesar 0.39% (penduduk miskin menurun 72.05 ribu jiwa) dikarenakan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 69.70 ribu jiwa (0.22%). Persentase penduduk miskin di tahun 2021 hingga 2023 baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin menurun yang mengindikasikan bahwa terdapat pengurangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tingkat kemiskinan suatu daerah juga dapat dilihat dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di suatu daerah. Kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin (garis kemiskinan). Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahannya Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 memiliki tren fluktuatif namun cenderung menurun. Tingkat kedalaman kemiskinan meningkat pada tahun 2020 sebesar 0.20 poin, sedangkan di tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan 0.43 menurun sebesar 0.13 poin dari tahun sebelumnya serta di tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan kembali sebesar 0.20 menjadi 0.63. Kenaikan tingkat kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami peningkatan atau semakin tinggi.

Tingkat keparahan kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang cenderung menurun dapat dilihat pada Tabel 2.31 yang memberikan gambaran bahwa tahun 2023 tingkat keparahan kemiskinan sebesar 0.13 meningkat sebesar 0.07 poin dari tahun sebelumnya, meskipun sempat meningkat di Tahun 2020 menjadi 0.17. Periode 2019-2023, indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.0. Peningkatan tingkat keparahan kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin membesar atau tinggi.

Tabel 2.81 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023

Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	2019	2020	2021	2022	2023
Bangka	16.52	15.41	16.19	14.5	14.87
Belitung	11.88	12.07	13.53	12.34	12.51
Bangka Barat	5.65	5.83	5.85	5.3	5.91
Bangka Tengah	9.8	9.64	10.03	9.61	10.58
Bangka Selatan	7.02	7.49	7.72	6.81	6.66
Belitung Timur	8.51	8.56	9.29	8.47	8.89
Pangkalpinang	9	9.4	10.1	9.76	9.27

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka. 2024

Berdasarkan tabel 2.32 dan tabel 2.33 jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak tersebar di Kabupaten Bangka dan Belitung dengan rata-rata penduduk miskin mencapai 11.88-14.87 ribu orang atau 4,26-6,46% dari jumlah penduduk. Adapun populasi

pendidik miskin terendah ada di Kabupaten Bangka Selatan dengan rata-rata 6,66 ribu penduduk.

**Tabel 2.82 Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023**

Persentase Penduduk Miskin (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Bangka	4.92	4.51	4.81	4.26	4.32
Belitung	6.29	6.27	7.15	6.45	6.46
Bangka Barat	2.67	2.70	2.75	2.46	2.71
Bangka Tengah	5.02	4.85	5.13	4.86	5.29
Bangka Selatan	3.36	3.52	3.69	3.22	3.11
Belitung Timur	6.60	6.52	7.20	6.49	6.73
Pangkalpinang	4.25	4.36	4.76	4.55	4.27

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka. 2024

Jika dilihat dari garis kemiskinan berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023, dimana kabupaten dengan garis kemiskinan terendah adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan rata-rata sebesar Rp 591.477/kapita/bulan. Sementara itu, Kabupaten Belitung merupakan kabupaten dengan garis kemiskinan tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar Rp 833.331/kapita/bulan. Rincian perkembangan garis kemiskinan berdasarkan kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.34.

**Tabel 2.83 Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2019-2023 (rupiah)**

Garis Kemiskinan (Ribu Rupiah)	2019	2020	2021	2022	2023
Bangka	541.925	577.093	595.429	639.535	685.810
Belitung	766.276	812.321	830.484	860.629	896.948
Bangka Barat	549.496	589.894	599.887	635.861	681.517
Bangka Tengah	693.842	721.331	735.479	773.509	814.969
Bangka Selatan	523.155	561.617	581.970	621.629	669.016
Belitung Timur	684.277	725.395	798.017	854.534	899.482
Pangkalpinang	748.487	795.653	808.839	85.884	894.224

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka 2023

Pergerakan garis kemiskinan baik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kabupaten/kota cenderung meningkat dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 yang berarti bahwa laju pertumbuhan garis kemiskinan cenderung mengalami peningkatan.

Namun jika dibandingkan dengan capaian secara nasional capaian provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah yaitu sebesar 5,24.

Tabel 2.84 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Capaian	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Angka Kemiskinan $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk Realisasi = $(14.350/16.204) \times 100\% = 88,56\%$ (Kolom 7)	9.79 %	4.55 %	4.549 %	9.79 %	4.549 %	9.999 % NB. : Capaian realisasi Prov. Kep. Bangka Belitung berada dibawah / diatas realisasi nasional

18. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kinerja sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100 \%$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini Adalah 4,63 % atau sebesar 105,32 dari target 4,89 % Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.85 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,47	4,56	4,89	4,63	105,32	4,19	89,50

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut:

- Tercapai 4,63 % (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 105,32 % (kolom 7) (tercapai*).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 4,56 % (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 4,47.(kolom 3) terdapat peningkatan/penurunan *) sebesar 0,07 (persentase capaian capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran berhasil tidak tercapai sebesar 89,50

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Di samping itu. angka pengangguran merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Pembangunan ketenagakerjaan sendiri diarahkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan jumlah penduduk yang bekerja.

**Tabel 2.86 Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023 (persen)**

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bangka	3.80	5.42	5.97	5.39	5.03
Belitung	2.90	4.82	3.51	4.30	4.14
Bangka Barat	2.85	4.12	3.83	4.86	4.77
Bangka Tengah	4.39	5.59	4.95	3.99	3.88
Bangka Selatan	3.87	5.42	5.29	5.09	4.84
Belitung Timur	1.71	3.93	3.78	2.50	2.41
Pangkalpinang	5.01	6.93	6.81	5.90	5.76
Kepulauan Bangka Belitung	3.65	5.25	5.03	4.77	4.56

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka, 2024

Berdasarkan Tabel 2.35, TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 5.25%. Namun pada Tahun 2023 menurun menjadi 4.56% dengan tingkat penurunan sebesar 0.69% dari Tahun 2020. TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terendah terjadi pada Tahun Tahun 2019. Rata-rata TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2019 hingga 2023 adalah sebesar 4.652% (dibawah rata-rata TPT nasional 5.99%). Secara spasial, pada tahun 2019 hingga 2023 kabupaten/kota yang memiliki rata- rata TPT tertinggi terdapat pada Kota Pangkalpinang, yaitu

dengan nilai rata-rata sebesar 6.082% (diatas rata-rata TPT provinsi dan dibawah rata-rata TPT nasional). Sedangkan TPT terendah terdapat di Kabupaten Belitung Timur, yaitu dengan nilai rata-rata sebesar 2.866% (dibawah rata-rata TPT provinsi dan nasional). Pada tahun 2023, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan pada TPT, sedangkan kabupaten/kota lain mengalami penurunan termasuk juga TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami penurunan.

Pengangguran Terbuka terjadi peningkatan di tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi covid 19 dari 3.65 % di tahun 2019 menjadi 5.25% di tahun 2020. Secara bertahap pemulihan pasca pandemi terus dilakukan sehingga pengangguran mengalami penurunan kembali menjadi 4.77 % di tahun 2022 dan 4.56% di tahun 2023. Selain melihat perkembangan TPT, perlu juga dilihat gambaran seberapa besar penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah yaitu berdasarkan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai ukuran persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Perkembangan jumlah angkatan kerja dan TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.36 dan Tabel 2.37.

Tabel 2.87 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023 (persen)

% Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (%TPAK)	2019	2020	2021	2022	2023
Bangka	64,3	63,93	62,68	68,81	67,46
Belitung	68,74	69,32	66,28	65,25	68,09
Bangka Barat	66,99	65,76	65,98	70,23	70,22
Bangka Tengah	69,65	70,85	66,24	66,47	70,09
Bangka Selatan	68,12	68,86	68,96	66,71	66,93
Belitung Timur	71,37	71,33	69,23	67,36	70,48
Pangkalpinang	68,35	62,37	65,16	65,78	66,55
Provinsi Kep. Bangka Belitung	67,7	66,89	65,88	67,38	68,34

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2.86 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023

Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	2019	2020	2021	2022	2023
Bangka	159.995	159.985	159.364	177.723	178.011
Belitung	98.436	99.692	96.844	96.818	97.41
Bangka Barat	103.518	102.281	104.271	112.728	113.449
Bangka Tengah	97.778	100.904	95.386	97.63	98.26
Bangka Selatan	102.896	104.518	106.305	104.407	105.78
Belitung Timur	70.103	70.345	69.332	68.536	69.517

Pangkalpinang	110.117	100.912	107.115	109.761	109.995
Provinsi Kep. Bangka Belitung	742.798	738.637	738.617	767.603	799.017

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif. Berdasarkan tabel 2.36 bahwa TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat di tahun 2023 sebesar 68.34% dan jumlah angkatan kerja meningkat pada tahun 2023 sebesar 799.017. Jumlah angkatan kerja tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan terendah pada tahun 2021 dengan rata-rata jumlah angkatan kerja adalah 743.115 per tahun. Secara spasial, Kabupaten Bangka merupakan kabupaten yang memiliki jumlah angkatan kerja tertinggi dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki jumlah angkatan kerja terendah terdapat pada Kabupaten Belitung Timur.

Tahun 2023, TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1.04%. TPAK tertinggi terjadi pada Tahun 2023 dan terendah pada Tahun 2021 dengan rata-rata TPAK per tahun sebesar 67.13%. TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami penurunan masing-masing sebesar 0.09%, 0.81% dan 1.01%. Secara spasial, rata-rata TPAK terendah terdapat pada Kabupaten Bangka yaitu sebesar 64.76% per tahun. Kabupaten Bangka merupakan kabupaten yang memiliki angkatan kerja tertinggi namun memiliki nilai TPAK terendah dari semua kabupaten/kota. Sedangkan yang memiliki nilai rata-rata TPAK tertinggi adalah Kabupaten Belitung Timur sebesar 70.24% dan merupakan kabupaten yang memiliki angkatan kerja terendah.

Namun jika dibandingkan dengan capaian secara nasional capaian provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi yaitu sebesar 0,26.

Tabel 2.87 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Capaian	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	4,39	-	4,91	4,65	-

19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kinerja sasaran Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.88 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH Provinsi = $(0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan IKAL : Indeks Kualitas Air Laut

Kinerja sasaran Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup diukur dengan formulasi perhitungan IKLH = $(0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$. Perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 72,79 atau sebesar 99,39 % dari target 73,24. Nilai IKLH merupakan agregasi dari perhitungan data pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.89 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,87	71,64	73,24	72,79	99,39	77,5	93,92

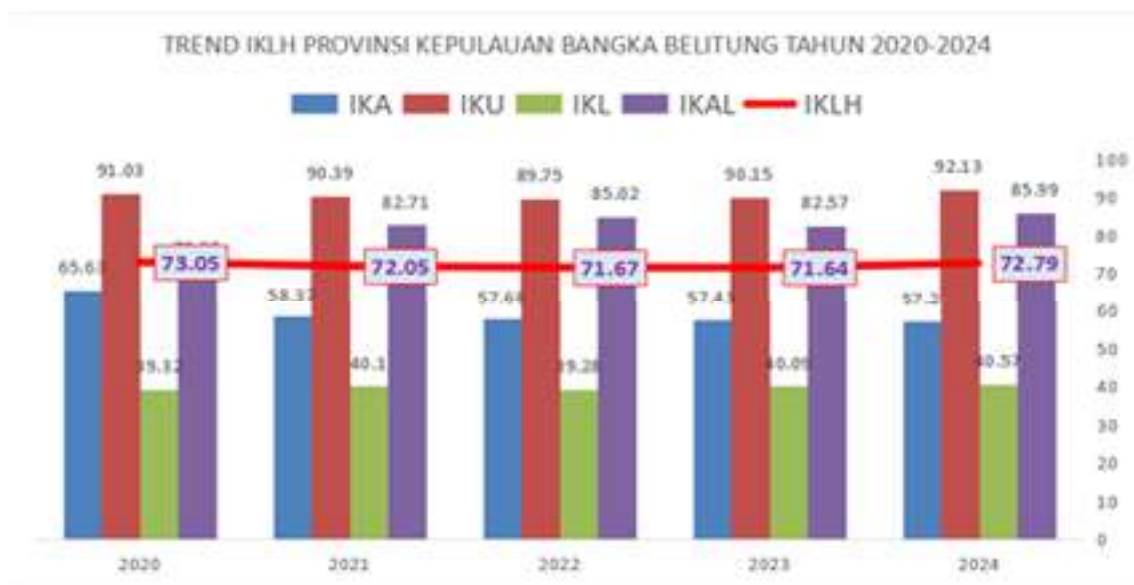
Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- Tercapai 72,79 (kolom 6), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 99,39 % (kolom 7) (~~tercapai~~/tidak tercapai*).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 71,64 (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 72,87 (kolom 3) terdapat peningkatan sebesar 1,15 % (persentase capaian capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu).
- Dibandingkan dengan target akhir RPD target ini masih sedikit dibawah target RPD, namun Indeks kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung masih dalam kategori baik berdasarkan kategori Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

- d. Nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dicapai adalah 72,79. Jika dilihat perkomponen IKLH, Indeks Kualitas Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan sebesar 0,48 poin ini berkorelasi dengan berbagai kegiatan pemulihan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilakukan pada tahun 2023-2024. Indeks Kualitas Udara mengalami kenaikan sebesar 1,98 poin naik dari tahun 2023, Untuk Indeks Kualitas Air mengalami penurunan 0,23 poin dari tahun 2023 sedangkan Indeks Kualitas Kualitas Air Laut mengalami kenaikan sebesar 3,42 poin dari tahun 2023. Secara umum indeks kualitas lahan masih dalam kategori kurang, indeks kualitas udara berada dalam kategori sangat baik, Indeks kualitas air dalam kategori sedang dan indeks kualitas air laut masih dalam kategori baik.
- e. Nilai IKLH Provinsi merupakan agregasi nilai IKLH dari Kabupaten/Kota sehingga untuk menaikkan nilai IKLH perlu bersama-sama melakukan berbagai upaya perbaikan lingkungan yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten /Kota dengan berbagai instansi teknis, pelaku usaha dan masyarakat yang dapat dilakukan dengan :
 - 1. **Untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan:** upaya rehabilitasi hutan dan lahan dan peningkatan tutupan vegetasi diluar kawasan, serta peningkatan dan pengawasan reklamasi.
 - 2. **Indeks Kualitas Air:** Pengelolaan Air limbah bagi pelaku usaha sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan, pengawasan ketaatan pelaku usaha, Penerbitan berbagai kebijakan pengelolaan pencemaran air, Pendidikan dan Penyadartahuan melibatkan masyarakat dengan pemberian informasi pengelolaan Lingkungan hidup
 - 3. **Indeks Kualitas Udara:** Kegiatan pembinaan, pengawasan Ketaatan Pelaku Usaha dalam pengendalian pencemaran, PROPER, dan penegakan hukum untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan sumber pencemar yang telah berjalan/beroperasi, penghijauan, penggunaan energi baru dan terbarukan serta kebijakan transportasi yang lebih berkelanjutan.
 - 4. **Indeks Kualitas Air Laut:** kegiatan penertiban dan pengawasan tambang timah ilegal yang banyak dilakukan disekitar aliran sungai, pesisir dan laut yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas air laut, membuat regulasi terkait perlindungan Mutu Air Laut (RPPML) dan kebijakan peraturan daerah/ Peraturan Gubernur tentang perlindungan daerah pesisir dan laut.

Gambar 2.26 Trend IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2024



Tabel 2.90 Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber : Permen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan dapat dikatakan sebagai bencana yang merugikan masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi dampak yang lebih besar juga dapat melekat pada kehidupan manusia. Upaya pengurangan laju kerusakan dan pemulihan lingkungan terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat. Di beberapa negara, kinerja kualitas lingkungan dipantau dan dinilai dalam banyak aspek, seperti dimensi lingkungan dalam kualitas hidup, kesadaran dan perilaku lingkungan ditinjau dari faktor sosial-psikologis, dan indeks Kesehatan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disusun sebagai alat ukur untuk menggambarkan target dan ukuran pencapaian sehingga dapat merefleksikan sejauh mana hubungan pembangunan suatu wilayah dengan lingkungan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemutakhiran informasi kualitas lingkungan hidup pun perlu dilakukan secara rutin dan berkala. Secara sederhana, IKLH dapat dijadikan sebagai indikator awal untuk mengidentifikasi dampak implementasi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada

kondisi lingkungan hidup.

Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi indikator tujuan pengelolaan lingkungan hidup dalam misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Tahun 2022, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 71,67 dan terjadi penurunan IKLH sebesar 0,38 poin jika dibandingkan dengan IKLH tahun 2021 sebesar 72,05. Tahun 2023, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 71,62 dan terjadi penurunan IKLH sebesar 0,05 poin jika dibandingkan dengan IKLH tahun 2022. Nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum masih berada dalam predikat baik sesuai kategori perhitungan IKLH dari KLHK.

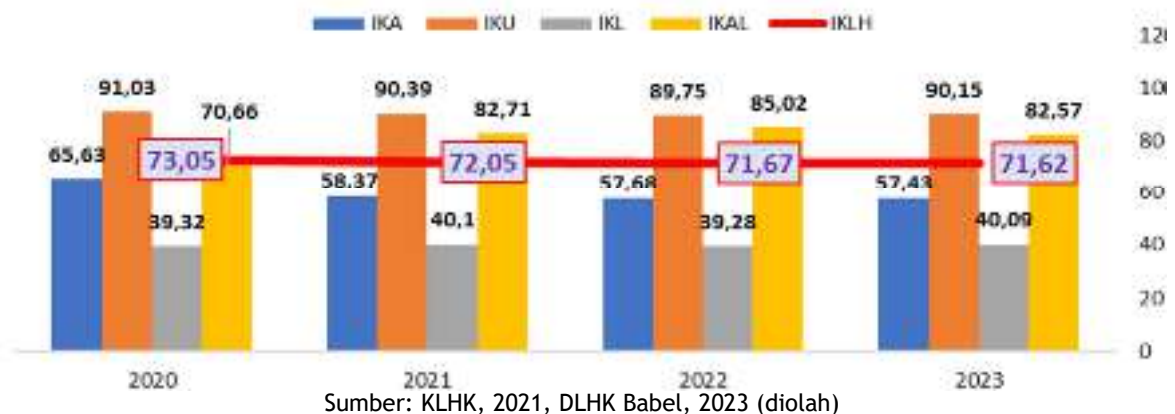
Tabel 2.91 Capaian IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dan 2023

Target IKLH 2022	Realisasi IKLH 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPD (2026)	Persentase Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
75,99	71,67	72,87	71,62	98,28	73,94	96,82

Sumber: KLHK, 2021, DLHK Babel, 2023

Komponen IKLH terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Jika dilihat per komponen, IKL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan sebesar 0,81 poin yang menunjukkan adanya korelasi dengan berbagai kegiatan pemulihan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilakukan pada tahun 2022-2023. Nilai IKU mengalami kenaikan sebesar 0,4 poin dari tahun 2022, sementara IKA mengalami penurunan 0,25 poin dari tahun 2022 dan IKAL mengalami penurunan sebesar 2,54 poin dari tahun 2022. Jika dikelompokkan berdasarkan kategorinya, maka secara umum, indeks kualitas lahan masih dalam kategori kurang, indeks kualitas udara berada dalam kategori sangat baik, indeks kualitas air dalam kategori sedang, dan indeks kualitas air laut masih dalam kategori baik. Gambar berikut menyajikan tren nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2023.

Gambar 2.27 Tren Nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2023

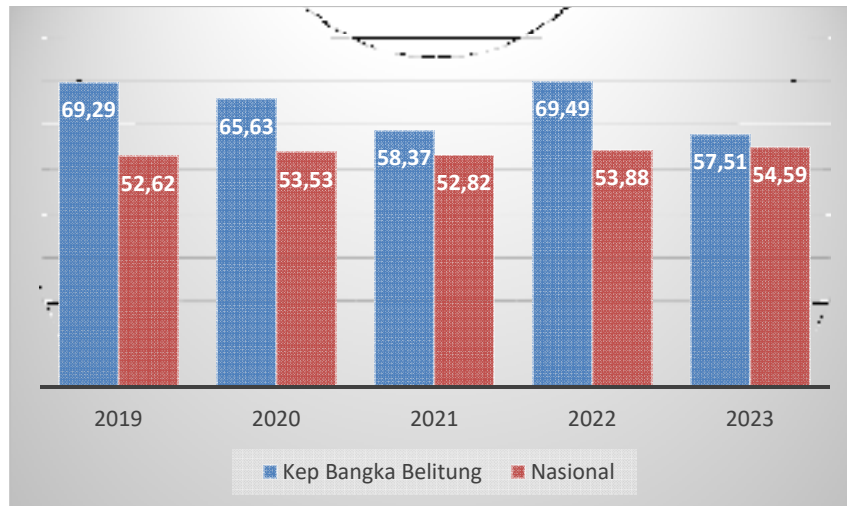


Berdasarkan tren di atas, terlihat bahwa IKLH Kepulauan Bangka Belitung memiliki kecenderungan semakin menurun meskipun laju penurunannya semakin melambat dan selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Strategi upaya yang lebih besar secara komprehensif dan integratif diperlukan untuk memulihkan berbagai kerusakan lingkungan di darat, udara, dan laut sehingga tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, namun juga target IKLH dapat tercapai.

a. Indeks Kualitas Air

Indek Kualitas Air (IKA) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA dirumuskan berdasarkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Data kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dari badan air. Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2019-2023 Nilai IKA mengalami penurunan dari 69,29 (2019) menjadi 57,51 (2023) dengan rata-rata penurunan indeks 2,945 pertahun. Berdasarkan nilai IKA tahun 2023 kualitas air di Provinsi Bangka Belitung cenderung buruk dan kurang memenuhi standar namun beberapa wilayah dapat terjaga walaupun kadang buruk dan terancam.

Gambar 2.28 Indeks Kualitas Air Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023

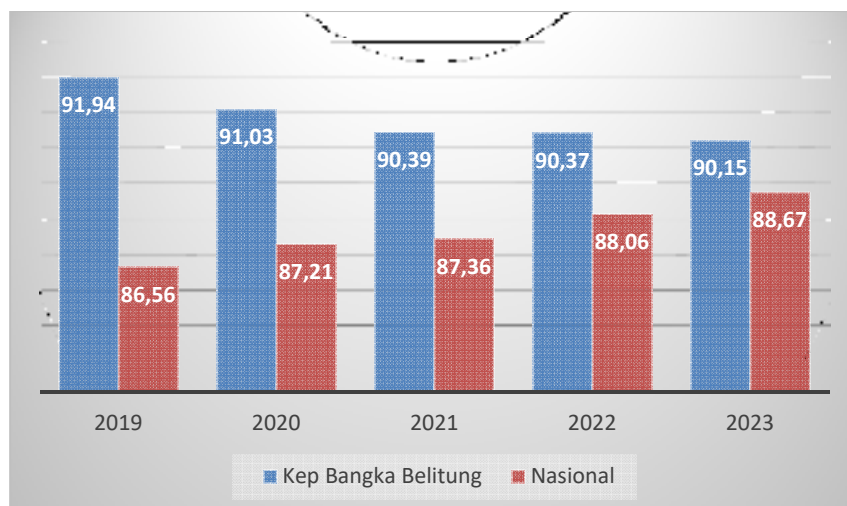


Sumber: KLHK, 2024, DLHK Babel, 2024 (diolah)

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA dirumuskan berdasarkan data hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh pusat (Ditjen PPKL dan P3E), Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gambar 2.29 Indeks Kualitas Udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2019-2023



Sumber: KLHK, 2024, DLHK Babel, 2024 (diolah)

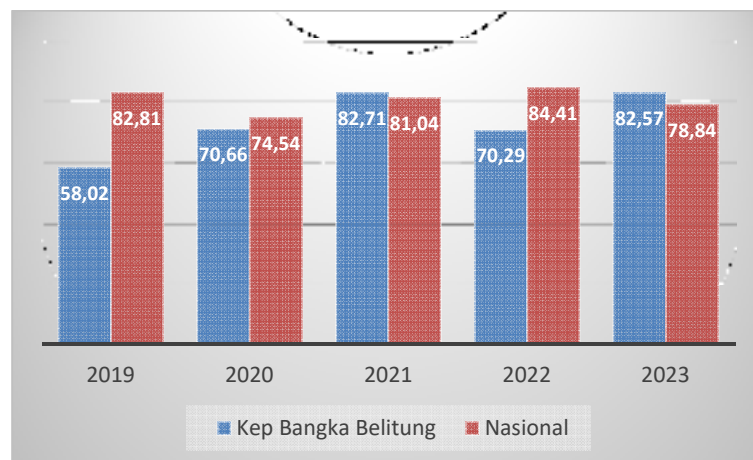
Berdasarkan analisa *trend* IKU nasional dan setiap Provinsi tahun 2020-2023, terdapat kecenderungan penurunan kualitas udara yang tinggi pada Provinsi Banten, D.I. Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun demikian nilai Indeks Kualitas Udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 90,15 (2023) masih diatas rata-rata nasional yaitu (88,67). Peningkatan IKU mencerminkan efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara yang diterapkan. Penerapan kebijakan

tersebut melibatkan langkah-langkah konkret seperti pengetatan baku mutu emisi, pembatasan kendaraan, dan evaluasi kualitas udara perkotaan. Selain itu, faktor meteorologi, seperti arah angin, kecepatan angin, jumlah hari hujan, dan waktu pengambilan sampel (musim penghujan atau musim kemarau) juga berpengaruh signifikan terhadap hasil IKU. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta upaya pemantauan kualitas udara yang lebih intensif dengan durasi dan frekuensi pengambilan sampel yang tepat, turut berkontribusi pada peningkatan IKU provinsi dan nasional.

c. Indeks Kualitas Air Laut

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKAL dihitung berdasarkan data pemantauan kualitas air laut yang dilakukan oleh pusat serta Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan pada 34 provinsi. Lokasi Pemantauan Kualitas Air Laut ditentukan berdasarkan keadaan kondisi lingkungan di lokasi tersebut seperti muara sungai, sekitar pelabuhan, sekitar perkampungan nelayan, dan sekitar industri.

Gambar 2.30 Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023



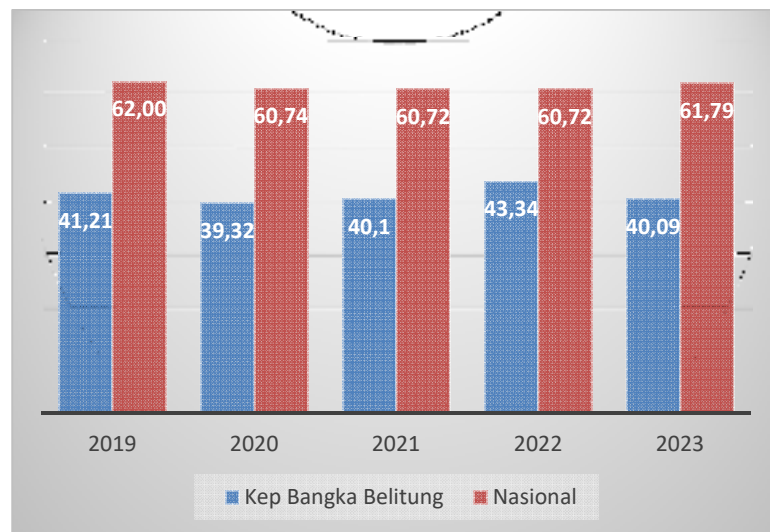
Sumber: KLHK, 2024, DLHK Babel, 2024 (diolah)

Berdasarkan analisa *trend* IKAL setiap Provinsi tahun 2020 - 2023, terdapat kecenderungan penurunan kualitas air laut yang tinggi pada Provinsi Jambi dan Sumatera Utara. Sementara Provinsi dengan kecenderungan mengalami peningkatan kualitas air laut secara signifikan adalah Provinsi Aceh, Jawa Barat, Bengkulu, Banten, Gorontalo, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sementara *trend* IKAL Provinsi Bangka Belitung memiliki kecenderungan meningkat, dengan peningkatan per tahun adalah 6,13 point per tahun, sehingga nilai capaian tahun 2023 menjadi 82,57 di atas rata-rata nasional 78,84.

d. Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang dihitung dari berdasarkan Luas Tutupan Lahan, belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung, Ruang Terbuka Hijau, Taman Keanekaragaman Hayati, Hutan Kota dan Taman Kota serta kejadian kebakaran hutan dan lahan serta keberadaan kanal pada ekosistem gambut.

Gambar 2.31 Indeks Kualitas Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023



Sumber: KLHK, 2024, DLHK Babel, 2024 (diolah)

Semakin tinggi nilai IKL, semakin baik kualitas lahan tersebut untuk mendukung berbagai fungsi ekologis dan penggunaan manusia. Sebaliknya, nilai IKL yang rendah menunjukkan kualitas lahan yang buruk, yang mungkin memerlukan intervensi untuk pemulihan atau peningkatan kualitas. Rendahnya nilai IKL memiliki potensi penurunan pada :

- **Penurunan Produktivitas:** Lahan dengan kualitas rendah cenderung kurang subur, sehingga hasil panen bisa menurun dan memerlukan lebih banyak input seperti pupuk dan irigasi.
- **Degradasi Lingkungan:** IKL yang rendah sering dikaitkan dengan masalah lingkungan seperti erosi tanah, penurunan kualitas air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
- **Penurunan Nilai Lahan:** Lahan dengan kualitas rendah mungkin memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dan bisa menjadi kurang menarik untuk investasi.

Namun jika dibandingkan dengan capaian secara nasional capaian provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah yaitu sebesar 0,76.

Tabel 2.92 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Capaian	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<p>Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</p> <p>Formula Perhitungan IKLH PROVINSI =</p> $(0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ <p> IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan IKAL : Indeks Kualitas Air Laut </p>	69,74	73,28	95,17	73,55	72,79	

9.3.1.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Tingkat efisiensi anggaran dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja anggaran. Semakin kinerja sasarnya tercapai dan penganggarnya masih bersisa dapat dikatakan telah berhasil melakukan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan penghitungan, maka akan diketahui efisien atau tidaknya penggunaan anggaran terhadap pencapaian target sasaran yang sudah ditetapkan. Dalam memberikan penilaian tingkat efisiensi dapat menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 2.93 Skala Pengukuran Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja

No	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Anggaran	Kategori
1	100 % s.d. diatas 100 %	< 100	Efisien
2	< 100 %	< 100	Tidak efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 19 indikator sasaran kinerja terdapat **10** indikator kinerja yang penggunaan anggarannya efisien dan **9** indikator kinerja yang penggunaan anggarannya **tidak efisien**. Dari **10** indikator kinerja yang efisien dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 116.315.405.695,-** atau terbilang (*seratus enam belas milyar tiga ratus lima belas juta empat ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*)

Tabel 2.94 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN	KEUANGAN		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		TARGET	REALISASI	EFISEINSI
1	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	0%	1,56	2,26	144,87	TERCAPAI	16.558.926.180	14.662.180.763	1.896.745.417
2	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	7,80	4,91	62,94	tidak tercapai	6.428.782.747	4.901.543.327	1.527.239.420
3	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Persen	-11,78	-4	165,93	TERCAPAI	443.861.399	406.366.936	37.494.463
4	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	0,20	-3,933	-1.965	tidak tercapai	1.246.234.440	1.049.046.672	197.17.768
5	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	Persen	6,90	-0,34	-4,93	tidak tercapai	521.331.788	509.436.689	11.895.099
6	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Persen	4,42	-4,25	-96,15	tidak tercapai	4.347.268.384	2.772.926.753	1.574.341.631
7	Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	Persen	6,49	-16,50	-254,24	tidak tercapai	0	0	0
8	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	Persen	10,57 T	12,37 T	117,03	TERCAPAI	1.443.420.245	1.278.455.386	164.964.859
9	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	73,06	74,55	102,04	TERCAPAI	442.759.272.391	411.635.140.549	31.124.131.842
10	Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Persen	78,4	75,95	96,875	tidak tercapai	70.586.189.312	69.396.397.162	1.189.792.150

	demokrasi									
11	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	69	69 *)	100	TERCAPAI	1.887.153.516.035	1.809.219.952.436	77.933.563.599
12	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	Persen	49,51	29,38	59,34	tidak tercapai	183.428.062.612	174.149.670.563	9.278.392.049
13	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	0,7	0,65	92,86	tidak tercapai	4.812.544.859	4.241.912.047	570.632.812
14	Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Persen	159,98	143,42	110,35	TERCAPAI	4.399.136.352	4.322.719.064	76.417.288
15	Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	Persen	0,73	0,81	110,96	TERCAPAI	2.135.328.163	2.036.077.027	99.251.136
16	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,74	1,35	122,41	TERCAPAI	468.713.000	405.038.579	63.674.421
17	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	4,49	4,55	98,66	tidak tercapai	3.211.461.250	2.616.188.639	595.272.611
18	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,89	4,63	105,32	TERCAPAI	27.063.029.662	23.718.208.625	3.344.821.039
19	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	73,24	72,79	99,39	tidak tercapai	7.744.357.721	6.341.511.496	1.402.846.225
TOTAL EFISIENSI									116.315.405.695	

9.3.1.2 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Kinerja pelaksanaan program/kegiatan Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendukung target 19 indikator kinerja berdasarkan APBD sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 dapat dilaporkan sebagai berikut :

Tabel 2.95 dukungan Progam terhadap sasaran kinerja

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program/Kegiatan	Keuangan			PD Penanggungjawab
			Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	Efisiensi	
1	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	1,56	2,26	144,87		16.558.926.180	14.662.180.763	1.896.745.417	
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10.170.222.722	9.190.978.982	979.243.740	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.934.960.800	1.910.014.066	24.946.734	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	240.469.604	231.827.350	8.642.254	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	708.946.700	549.050.616	159.896.084	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	167.711.300	123.836.000	43.875.300	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	391.168.954	198.929.488	192.239.466	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	126.491.600	66.593.448	59.898.152	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	521.973.700	262.925.067	259.048.633	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.296.980.800	2.128.025.746	168.955.054	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	7,8	4,91	62,94		6.428.782.747	4.901.543.327	1.527.239.420	
						PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	737.433.026	639.958.731	97.474.295	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.324.115.510	3.037.522.649	1.286.592.861	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	585.694.500	563.817.840	21.876.660	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	612.042.511	521.814.467	90.228.044	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	169.497.200	138.429.640	31.067.560	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju PertumbuhanPDR B Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	-11,78	-4	165,93		443.861.399	406.366.936	37.494.463	

						PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	44.000.000	41.420.990	2.579.010	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	208.359.799	189.653.016	18.706.783	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	70.000.000	65.232.082	4.767.918	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	121.501.600	110.060.848	11.440.752	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	0,2	-3,933	-1.965		1.246.234.440	1.049.046.672	197.187.768	
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	720.122.640	585.700.133	134.422.507	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	26.970.500	26.219.400	751.100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	346.299.800	306.664.459	39.635.341	DINAS TENAGA KERJA
						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	152.841.500	130.462.680	22.378.820	DINAS TENAGA KERJA
5	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	6,9	-0,34	-4,93		521.331.788	509.436.689	11.895.099	
						PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	11.671.500	11.544.944	126.556	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	110.219.300	108.538.322	1.680.978	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

						PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	102.178.200	97.862.033	4.316.167	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	258.790.400	253.926.400	4.864.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	38.472.388	37.564.990	907.398	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	4,42	-4,25	-96,15		4.347.268.384	2.772.926.753	1.574.341.631	
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	532.729.700	139.998.165	392.731.535	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	833.033.276	733.767.235	99.266.041	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
						PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.272.629.100	935.844.576	336.784.524	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
						PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	331.669.404	258.516.982	73.152.422	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	716.053.304	442.007.656	274.045.648	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
						PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	97.577.700	-	97.577.700	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA

						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	420.798.800	165.710.540	255.088.260	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	51.777.500	18.092.300	33.685.200	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
						PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	90.999.600	78.989.299	12.010.301	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
7	Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	6,49	-16,5	-254,24				-	
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	10,57 T	12,37 T	117,03 T		1.443.420.245	1.278.455.386	164.964.859	
						PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	325.900.616	297.146.592	28.754.024	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	99.589.960	62.385.716	37.204.244	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	965.999.469	868.058.469	97.941.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	51.930.200	50.864.609	1.065.591	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
9	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,06	74,55	102,04		442.759.272.391	411.635.140.549	31.124.131.842	

						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	135.269.400	122.177.506	13.091.894	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
						PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	296.999.400	263.673.651	33.325.749	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	149.950.000	122.766.900	27.183.100	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
						PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	150.917.200	141.449.920	9.467.280	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	46.306.604.388	43.130.352.758	3.176.251.630	DINAS KESEHATAN
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.150.222.900	1.439.456.146	710.766.754	DINAS KESEHATAN
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	33.999.900	10.450.500	23.549.400	DINAS KESEHATAN
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	92.710.553	-	92.710.553	DINAS KESEHATAN
						PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	85.637.200	62.327.500	23.309.700	DP3ACSKB
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	173.968.750	43.997.440	129.971.310	DP3ACSKB
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.344.166.000	199.653.320	2.144.512.680	DP3ACSKB
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	237.281.500	176.860.000	60.421.500	DP3ACSKB

						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	120.742.800	108.524.765	12.218.035	DP3ACSKB
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.559.500	39.576.200	983.300	DP3ACSKB
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	442.233.300	235.037.947	207.195.353	DP3ACSKB
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	247.294.250	169.372.851	77.921.399	DP3ACSKB
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	292.710.996.686	278.562.902.283	14.148.094.403	DINAS PENDIDIKAN
						PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	24.560.000	23.501.540	1.058.460	DINAS PENDIDIKAN
						PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	191.369.700	175.633.429	15.736.271	DINAS PENDIDIKAN
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.940.351.428	67.125.517.032	5.814.834.396	RUMAH SAKIT JIWA
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	23.883.437.536	19.481.908.861	4.401.528.675	RUMAH SAKIT JIWA
10	Meningkatkan Kebebasan, Kestaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	78,4	75,95	96,875		70.586.189.312	69.396.397.162	1.189.792.150	
						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.903.638.640	2.621.741.009	281.897.631	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	57.868.809.860	57.735.081.974	133.727.886	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	169.753.400	144.580.837	25.172.563	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	583.578.000	539.663.720	43.914.280	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	616.286.800	505.629.810	110.656.990	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.241.629.520	6.800.717.066	440.912.454	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.202.493.092	1.048.982.746	153.510.346	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
11	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	69	69*	100		1.887.153.516.035	1.809.219.952.436	77.933.563.599	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.292.145.561.730	1.245.486.981.629	46.658.580.101	Seluruh PD

						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.929.209.404	2.315.240.937	613.968.467	BKPSDMD
						PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.492.903.245	1.592.052.888	900.850.357	BKPSDMD
						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	441.969.250.732,47	425.323.111.158	16.646.139.574	BADAN KEUANGAN DAERAH
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	505.782.100	389.304.642	116.477.458	BADAN KEUANGAN DAERAH
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.184.177.940	2.543.826.448	640.351.492	BADAN KEUANGAN DAERAH
						PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.666.696.800	1.609.279.463	57.417.337	BADAN PENGHUBUNG
						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	657.019.700	188.307.153	468.712.547	BAPPEDA
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.762.024.400	2.255.288.710	506.735.690	BAPPEDA
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	498.226.116	398.356.268	99.869.848	BAPPEDA
						PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	859.989.300	763.167.927	96.821.373	Biro Hukum
						PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	53.047.512.500	48.488.315.591	4.559.196.909	Biro Kesejahteraan Rakyat
						PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.189.878.800	1.097.894.428	91.984.372	Biro Organisasi
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	10.505.022.143	10.339.540.564	165.481.579	Biro Pemerintahan
						PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.257.155.134	1.013.980.147	243.174.987	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

						PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	358.557.000	350.878.861	7.678.139	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
						PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	129.522.500	123.914.801	5.607.699	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	44.000.000	43.651.074	348.926	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	188.020.700	186.199.929	1.820.771	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.067.574.800	4.963.597.033	103.977.767	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.894.283.600	4.881.107.608	13.175.992	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.746.547.815	1.516.066.849	230.480.966	INSPEKTORAT DAERAH
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	525.260.776	453.231.467	72.029.309	INSPEKTORAT DAERAH
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	58.529.338.800	52.896.656.861	5.632.681.939	SEKRETARIAT DPRD
12	Persentase ketersediaan infrastruktur	Persentase ketersediaan infrastruktur	49,51	29,38	59,34		183.428.062.612	174.149.670.563	9.278.392.049	
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	38.758.544.059	36.393.232.779	2.365.311.280	DINAS PUPRPRKP

						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	609.998.400	498.769.828	111.228.572	DINAS PUPRPRKP
						PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	35.997.800	26.825.480	9.172.320	DINAS PUPRPRKP
						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.878.561.700	6.321.892.405	556.669.295	DINAS PUPRPRKP
						PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	27.300.000	10.660.000	16.640.000	DINAS PUPRPRKP
						PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	85.169.600	51.513.842	33.655.758	DINAS PUPRPRKP
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.185.040.800	2.511.659.000	673.381.800	DINAS PUPRPRKP
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.920.980.900	3.818.461.034	102.519.866	DINAS PUPRPRKP
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	124.127.827.629	119.780.954.241	4.346.873.388	DINAS PUPRPRKP
						PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	535.062.176	427.054.352	108.007.824	DINAS PUPRPRKP
						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.036.572.298	2.724.760.323	311.811.975	DINAS PERHUBUNGAN
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.227.007.250	1.583.887.279	643.119.971	DINAS PERHUBUNGAN
13	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,49	4,55	98,66		3.211.461.250	2.616.188.639	595.272.611	

						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	361.913.800	360.465.110	1.448.690	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
						PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	4.281.300	-	4.281.300	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.405.237.450	1.150.259.549	254.977.901	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.003.679.500	684.310.713	319.368.787	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
						PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	436.349.200	421.153.267	15.195.933	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
14	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,7	0,65	92,6		4.812.544.859	4.241.912.047	570.632.812	
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.443.297.800	3.200.004.253	243.293.547	DINAS PUPRPRKP
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	219.462.500	127.373.400	92.089.100	DINAS PUPRPRKP
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.149.784.559	914.534.394	235.250.165	DINAS PUPRPRKP
15	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,89	4,63	105,32		27.063.029.664	23.718.208.625	3.344.821.039	
						PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	26.315.700	18.865.400	7.450.300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

						PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	31.247.700	-	31.247.700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	38.995.000	33.931.750	5.063.250	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.348.198.120	3.151.384.046	196.814.074	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	199.059.500	149.365.800	49.693.700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.226.627.138	977.448.300	249.178.838	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.370.605.954	799.283	1.369.806.671	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	930.691.948	601.807.163	328.884.785	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
						PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	19.204.929.404	18.179.493.183	1.025.436.221	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	563.432.200	497.604.400	65.827.800	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	27.927.000	24.282.800	3.644.200	DP3ACSKB
						PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	23.000.000	17.790.000	5.210.000	DINAS TENAGA KERJA
						PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	72.000.000	65.436.500	6.563.500	DINAS TENAGA KERJA

16	Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	159,98	143,42	110,35		4.399.136.352	4.322.719.064	76.417.288	
						PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.375.534.212	3.307.545.844	67.988.368	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.023.602.140	1.015.173.220	8.428.920	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
17	Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,73	0,81	110,96		2.135.328.163	2.036.077.027	99.251.136	
						PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	4.000.000	1.730.000	2.270.000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
						PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	807.470.976	735.960.747	71.510.229	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.240.631.060	1.227.121.280	13.509.780	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	83.226.127	71.265.000	11.961.127	DINAS TENAGA KERJA
18	Laju Pertumbuhan Penduduk	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1,74	1,35	122,41		468.713.000	405.038.579	63.674.421	
						PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	128.555.300	121.414.539	7.140.761	DP3ACSKB
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	128.196.700	117.810.260	10.386.440	DP3ACSKB
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	179.630.000	151.941.280	27.688.720	DP3ACSKB

						PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	32.331.000	13.872.500	18.458.500	DP3ACSKB
19	Indeks Kualitas Lingkungan HidupLingkungan Hidup	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	73,24	72,79	99,39		7.744.357.721	6.341.511.496	1.402.846.225	
						PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	406.317.950	382.066.648	24.251.302	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.338.818.932	2.259.010.687	79.808.245	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.829.040.746	2.677.705.743	151.335.003	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	162.129.350	145.675.489	16.453.861	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	29.964.300	29.787.245	177.055	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.528.764.256	410.656.743	1.118.107.513	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	59.596.861	59.483.159	113.702	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	73.813.300	73.739.197	74.103	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	56.979.336	56.588.636	390.700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	208.703.640	201.824.714	6.878.926	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	4.463.000	4.361.500	101.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	45.766.050	40.611.735	5.154.315	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ketercapaian Program/Kegiatan sebagaimana tabel diatas, didukung oleh program-program dibawah ini :

A. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan sasaran program tersedia dan berkembangnya sarana pertanian, mempunyai Indikator:
 - a. Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi. formula perhitungan indikator ini adalah Perbandingan pengawasan peredaran pada tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(100/100) \times 100 = 100\%$ dari target 100% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yang sebesar 100%.
 - b. Persentase peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura, formulasi perhitungan indikator ini adalah membandingkan antara luas tanam tahun berjalan (n) dengan tahun sebelum (n-1), dibagi luas tanam tahun sebelum (n-1), dikali 100% lalu diambil rata-rata dari jumlah masing-masing komoditi yang diintervensi oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian dan ketahanan pangan. Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diintervensi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain; padi, jagung, cabai besar, cabai kecil, bawang merah, durian, dan alpukat. Capaian kinerja indikator dapat dilihat melalui perhitungan berikut
$$\sum \left(\frac{(40+40+10+15+15+300+150)}{14438,25} \right) \times 100 = 3.95\%$$
 target 2,5% atau sebesar 157,91%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 4.82%.
 - c. Persentase peningkatan luas tanam perkebunan, formulasi perhitungan indikator ini adalah membandingkan antara luas tanam komoditas perkebunan yang diintervensi oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian dan ketahanan pangan tahun berjalan (n) dengan luas tanam komoditas perkebunan tahun sebelum (n-1), dibagi luas tanam tahun sebelum (n-1), dikali 100%. Komoditi perkebunan yang diintervensi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 adalah Komoditi Kelapa Sawit. Target kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 1,5%, Capaian kinerja indikator dapat dilihat melalui perhitungan berikut:

$\Sigma \left(\frac{(97804.19)-(96101.5)}{(97804.19)} \times 100\% \right) = 1,77\%$ dari target 1,5% atau sebesar 118,12%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 2.45%.

- d. Peningkatan benih/bibit tanaman (pangan, horti, dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat, perhitungan indikator ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat tahun berjalan (n), dikurangi jumlah benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat tahun berjalan ($n - 1$), dibagi jumlah benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat tahun sebelum ($n - 1$), dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\Sigma \left(\frac{(618561)-(589105)}{(618561)} \times 100\% \right) = 5\%$ dari target 5% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yang sebesar 5%.
- e. Persentase pertambahan angka populasi ternak, formulasi perhitungan indikator ini adalah perbandingan angka populasi ternak tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelum ($n-1$), dibagi angka populasi ternak tahun sebelum ($n-1$), dikali 100%. Target kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 5%, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\Sigma \left[\left(\frac{(19741-18710)}{(18710)} \right) \times 100\% \right] = 5.5\%$ dari target 5% atau sebesar 110,21%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 5%..
- f. Persentase Peningkatan produksi benih bermutu, formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah produksi benih/bibit bermutu tahun berjalan (n) dibandingkan dengan jumlah produksi benih/bibit bermutu tahun sebelum ($n-1$) dibagi jumlah produksi benih/bibit bermutu tahun sebelum ($n-1$), dikali 100%. Target kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 2.5 %, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\Sigma \left[\left(\frac{(102 - 99)}{(102)} \right) \times 100\% \right] = 2,94\%$ dari target 2,5% atau

sebesar 117,65%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 3,85%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terjalannya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait;
- Tersedianya dukungan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang memadai;
- Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran petani tentang cara penanganan, pengolahan, dan budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices*);
- Meningkatnya produksi ternak dalam daerah.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- Kelompok tani sering dijadikan sebagai alat atau wadah untuk memberikan bantuan/subsidi yang berkaitan dengan program pemerintah sehingga pembentukan dan penumbuhan kelompok tani banyak dilakukan karena adanya proyek bantuan tersebut, sehingga berakhir kelompok tani tidak meningkat kelas kemampuannya atau bahkan tidak berungsi;
- Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan tambang;
- Cuaca ekstrim di Provinsi kepulauan bangka belitung sehingga menyebabkan produksi pertanian menurun.
- Terjadinya refocusing anggaran pada tahun 2024 sehingga menyebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan;

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada petani tentang teknik budidaya pertanian yang sesuai dengan Good Agriculture Practice (GAP), serta edukasi/pendekatan kepada petani tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian;
 - Pelaksanaan Sekolah Lapang yang bisa memberikan pengetahuan/edukasi kepada petani dalam menangani Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan sasaran program tersedia dan berkembangnya Prasarana Pertanian, mempunyai indikator:
- a. Rasio ketersediaan prasarana pertanian, dengan formulasi

perhitungan kebutuhan prasarana pertanian dibagi ketersediaan, dikali 100%. Capaian indikator adalah $\left(\frac{285}{10} \times 100\%\right) = 3.5\%$ dari target 3.5%. Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebanyak 3.5% atau tercapai 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terjalannya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait;
 - Tersedianya Petugas/Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetan/memadai.
 - Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :
 - Terjadinya Perubahan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi dari Rp 392.000.000,- menjadi Rp 0,- dikarenakan Refocusing Kegiatan Non Prioritas.
 - Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
 - Penambahan jumlah fasilitas prasarana pra panen dan pasca panen pertanian kepada kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani;
 - Menerapkan kebijakan terkait optimalisasi lahan sawah untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
- Program Perizinan Usaha Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai indikator dokumen perizinan usaha pertanian. Formula perhitungan adalah jumlah dokumen perizinan usaha pertanian. Capaian indikator kinerja adalah 1 dokumen dari target sebesar 1 dokumen. Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% sama bila dibandingkan dengan capaian kinerja ppada tahun 2023 yaitu 1 dokumen.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terjalannya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait;
- Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terdapat perbedaan standar satuan biaya (SSB) sehingga penyerapan anggaran tidak dapat diserap secara maksimal.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Sosialisasi kepada pelaku usaha pertanian tentang pentingnya izin usaha pertanian.
 - Melakukan Pengawasan/Monitoring secara berkala terhadap jalannya usaha pertanian yang telah diberikan izin
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai Indikator kinerja:
- a. Dokumen laporan pengendalian dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI), formula perhitungan indikator ini adalah jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Capaian indikator kinerja adalah 1 dokumen dari target 1 dokumen. Capaian kinerja pada tahun 2024 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebanyak 1 dokumen atau tercapai 100%.
 - b. Terkendalnya Bencana Pertanian akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), formula perhitungan indikator ini adalah jumlah Persentase perbandingan antara target luas lahan (Ha) yang terkendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan realisasi jumlah Luasan (Ha) Bahan Pengendali OPT yang didistribusi dan dimanfaatkan ke Poktan dan Gapoktan. Capaian indikator kinerja ini adalah 4.19% dari target 3%. Capaian kinerja pada tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yang sebesar 5%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terjalannya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait, serta dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terjadinya Pengurangan Anggaran Yang disebabkan Refocusing Kegiatan Non Prioritas;
- Kurangnya kesadaran petani untuk mengasuransikan usahanya;
- Masih kurangnya pengetahuan petani terkait pengendalian

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Edukasi kepada petani dan peternak tentang manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kebrau (AUTS/K);
- Meningkatkan peran pemerintah provinsi melalui UPTD Balai Proteksi Tanaman dalam menangani Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

- Program Penyuluhan Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai Indikator Persentase peningkatan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian. Formula perhitungan indikator ini adalah Persentase Jumlah penerapan informasi teknis dan inovasi pertanian yang diterapkan pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 32 penerapan di 32 BPP = $(32+32)/2 \times 100 = 100\%$ dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 yang sebesar 90%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- Adanya peningkatan kinerja penyuluh pertanian lapangan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kelompok tani;
- Banyaknya sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan informasi yang dapat di akses dari media online untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan SDM (petani/penyuluh).

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Penghapusan sub kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian dan sub kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian dikarenakan Refocusing Kegiatan Non Prioritas;
- Rendahnya kesadaran SDM (petani) untuk mempelajari hal-hal baru terutama yang berkaitan dengan teknologi.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Meningkatkan kapasitas SDM (petani) melalui berbagai kegiatan pendampingan dan Latihan oleh penyuluh pertanian lapangan;
- Meningkatkan kapabilitas ketenagaan dan kelembagaan penyuluh pertanian.

- Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan sasaran program peningkatan produksi peternakan mempunyai Indikator persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dengan target penurunan 2%.

Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) dikurangi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 4% dari target 2% atau sebesar 200%. Perhitungannya adalah hasil capaian penurunan kasus PMK thn 2024 mencapai 96%, sedangkan penurunan kasus pada 2023 mencapai 95%. Penghitungannya berupa $(96-95)/95 \times 100\% = 4\%$ Capaian kinerja pada Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 11%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terjalannya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait;
- Pelaksanaan vaksin dan pemberian obat kepada hewan ternak sapi, kambing, dan kerbau untuk mencegah perluasan penyebaran Penyakit.
- Meningkatnya nilai angka ketersediaan suplay bibit ternak di UPTD Balai Benih Pertanian tahun 2024.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terjadinya refocusing kegiatan untuk efisiensi anggaran TA 2024;
- Terjadinya Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease pada ternak yang sudah ditetapkan sebagai wabah dan penyebarannya yang masif.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Eduksi kepada peternak tentang untuk meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease;
 - Pelaksanaan vaksinasi kepada hewan ternak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengurangi penyebaran Penyakit pada hewan ternak, seperti Penyakit Mulut dan Kuku, *Lumpy Skin Disease*, rabies dan lain-lain.
- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Formula perhitungan indikator ini adalah Pengolahan nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan. Capaian indikator kinerja adalah 90.3 dari target sebesar 84.1 dengan persentase capaian 107,37%. Capaian kinerja tahun 2024 ini meningkat bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 yang

sebesar 87.9.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Gencarnya promosi penganekaragaman konsumsi pangan lokal.
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi ideal masyarakat yang dianjurkan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Menggiatkan upaya-upaya dalam meningkatkan Skor PPH konsumsi pangan lokal khususnya kacang-kacangan, sayur dan buah melalui advokasi, kampanye, sosialisasi, dan promosi.
- Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai Indikator Menurunnya daerah rentan rawan pangan. Formula perhitungan indikator ini adalah persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan tahun berjalan dibandingkan tahun awal Renstra. Capaian indikator kinerja adalah $(5 - 10) = -5$ Daerah dari target sebanyak 1 Daerah atau persentase capaian sebesar -500%. Daerah rentan rawan pangan meningkat dari 5 kecamatan di Tahun 2023 menjadi 10 kecamatan di Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan indikator dan cara perhitungan pada aplikasi FSVA (Konversi GKG ke beras) sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan indikator. Capaian kinerja pada Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 karena terjadi perubahan cara perhitungan indikator dari Badan Pangan Nasional.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Perubahan cara perhitungan indikator dan klasifikasi daerah “Rentan rawan pangan” aplikasi FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Badan Pangan Nasional, sehingga menyebabkan klasifikasi daerah Rentan Rawan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertambah;
- Menurunnya kondisi ekonomi masyarakat di Provinsi Bangka Belitung secara global yang berimbas kepada penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pangan.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terjadinya refocusing kegiatan untuk efisiensi anggaran TA 2024;

- Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan sangat tergantung dengan ketersediaan pasokan pangan dari luar daerah.
Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
 - Mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), serta penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat daerah rentan rawan pangan.
- Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai Indikator persentase pangan yang aman dikonsumsi. Formula perhitungan indikator ini adalah bobot pengawasan di peredaran (60%) dijumlahkan dengan bobot registrasi dan sertifikasi (40%) pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Capaian indikator kinerja adalah $((70\%)+(16\%)) = 86\%$ dari target sebesar 86% atau persentase capaian sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 85.77%.
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- Tingginya tingkat kesadaran stakeholder/pelaku usaha pertanian untuk mendaftarkan usahanya guna mendapatkan Sertifikat Prima 3;
 - Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :
- Terjadinya refocusing kegiatan non prioritas untuk efisiensi anggaran TA 2024;
 - Penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengakibatkan produk pertanian yang dihasilkan memiliki kadar kandungan bahan kimia yang tinggi sehingga memiliki risiko yang berdampak pada kesehatan apabila dikonsumsi.
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- Melakukan sosialisasi Teknik budidaya pertanian yang sesuai dengan *Good Agriculture Practice* (GAP) untuk meminimalisir penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya oleh petani;
 - Memaksimalkan pengawasan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebelum diedarkan dipasaran.

B. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan

- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dengan sasaran kinerja program Meningkatnya jenis Jasa Kelautan yang dapat difasilitasi mempunyai Indikator kinerja lokasi Jasa

Kelautan yang dimanfaatkan untuk peningkatan investasi di perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung formula perhitungan indikator ini adalah jumlah lokasi Jasa Kelautan yang difasilitasi. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 44 Jenis Jasa Kelautan Yang difasilitasi dari target 25 Jenis jasa yang difasilitasi atau sebesar 176%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 73 Jenis jasa yang difasilitasi.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersedianya sarana dan prasarana penunjang seperti laptop pemetaan, drone, GPS, kamera underwater dan sarana lainnya.
- Tersosialisasinya kewajiban pelaku usaha dan pemerintah terkait pengajuan persetujuan/konfirmasi pemanfaatan ruang laut.
- Koordinasi dengan berbagai *stake holder* telah terjalin sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan baik verifikasi teknis maupun verifikasi lapangan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- kondisi perekonomian yang memang cenderung menurun dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
- terbatasnya sumberdaya manusia terkait GIS dan tenaga survei misalnya penyelam
- adanya konflik pemanfaatan ruang sehingga terjadinya protes dari masyarakat maupun dari pihak lainnya.
- Sebagian pelaku usaha memerlukan tindakan tegas dari pihak terkait terkait kepatuhan pelaksanaan persetujuan pemanfaatan ruang laut.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Diperlukan pengadaan pegawai untuk tenaga GIS dan tenaga survey
 - Adanya pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam analisis pemanfaatan ruang laut
 - Melakukan analisis data terkait konflik yang ada di masyarakat terkait pemanfaatan ruang sehingga dapat memberikan solusi terkait konflik pemanfaatan ruang.
 - Berkoordinasi dengan satuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sehingga dapat melakukan tindakan tegas bagi pelaku usaha yang tidak patuh menjalankan amanah Undang-Undang.
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan sasaran program Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap mempunyai Indikator Volume produksi perikanan tangkap formula perhitungan indikator ini adalah Data Produksi Kab/Kota. Capaian indikator kinerja adalah 232.505 ton dari target sebesar 238.713 ton. Capaian kinerja pada

Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 228.616,13 ton.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan tangkap agar dapat menjamin penangkapan ikan tidak melampaui kemampuan populasi ikan (overfishing) sehingga kelestarian dan produktivitas ikan yang dikelola tidak terancam atau rusak,
- Penangkapan ikan berbasis kuota penangkapan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kendala armada dan alat tangkap yang belum memadai
- Kendala lingkungan, nelayan dihadapkan dengan perubahan kondisi pasang surut, angin, gelombang, dan arus laut yang kuat.
- Daerah penangkapan untuk kapal dibawah 5 GT potensi sumberdaya ikan sudah menipis

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Akses Permodalan dan bantuan sarana dan prasarana kapal dan alat penangkapan ikan yang memadai,
 - Akses informasi terkait mendapatkan informasi cuaca, gelombang, arah angin, dan lokasi ikan penangkapan ikan,
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan sasaran program Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya mempunyai Indikator Volume produksi perikanan budidaya formula perhitungan indikator ini adalah produksi perikanan budidaya. Capaian indikator kinerja adalah 11.319 ton dari target sebesar 15.525 ton. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 10.913,68 ton.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Sudah tersedianya sarana yang sudah dimiliki oleh pelaku pembudidaya Sumber daya lingkungan mendukung proses budidaya ikan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Belum tersedianya benih yg bermutu secara kontinyu
- Perubahan cuaca yang secara tiba-tiba
- Naiknya harga pakan pabrikan untuk kegiatan budidaya
- Pasar untuk budidaya kerapu masih dimonopoli oleh supplier sehingga pelaku usaha kesulitan dalam memasarkan hasil budidayanya

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai

- Berkoordinasi dengan instansi terkait dan Stake holder terkait dengan ketersediaan benih yang sesuai yang dibutuhkan
- Berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui prakiraan cuaca
- Pembuatan pakan mandiri dengan berbahan baku lokal
- Penambahan komoditas baru untuk kegiatan budidaya

- Menciptakan pembudidaya baru skala rumah tangga
- Mencari atau mendapatkan pasar baru untuk komoditas kerapu
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan dengan sasaran program “Meningkatnya Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan” mempunyai Indikator “Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)” formula perhitungan indikator ini adalah “Jumlah total dari ((Jumlah pelaku usaha KP yang patuh) dibagi (Jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa)) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(270,84/3) \times 100\% = 90,28\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 73%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 76,08%.
 - Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
 - Pelaku usaha yang diawasi relatif lebih sadar akan kewajibannya memiliki perizinan berusaha.
 - Adanya kemudahan pelaku usaha untuk mengurus dokumen perizinan berusaha dengan difasilitasi Gerai Perizinan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan sasaran program Meningkatkan Produksi pengolahan hasil perikanan mempunyai Indikator Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan. Capaian indikator kinerja adalah 38.571 ton. dari target sebesar 22.810 ton. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 56.010,62 ton.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terutama Unit Pengolahan Ikan skala mikro kecil terhadap mutu dan keamanan pangan produk olahan hasil perikanan sebagai salah satu persyaratan ekspor untuk memperluas pasar.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Perlu upaya sosialisasi kepada pelaku usaha dalam jaminan mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan

C. PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

- Program pengelolaan aspek kegeologian dengan sasaran kinerja program peningkatan kepatuhan penataan perizinan air tanah mempunyai Indikator kinerja persentase kepatuhan penataan izin air tanah formula perhitungan indikator ini adalah jumlah pengguna air

tanah yang memiliki izin dibagi jumlah pengguna air tanah. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(42/73) \times 100\% = 57,53\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 85% atau sebesar 48,9%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terbitnya peraturan-peraturan terkait air tanah,
- Terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah,
- Pemerintah Pusat mendukung kegiatan atau usaha Pemerintah Daerah terkait penatausahaan air tanah.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Cekungan air tanah di Pulau Bangka berada di wilayah sungai strategis nasional yang menjadi kewenangan pusat. Sedangkan Cekungan air tanah di pulau Belitung berada di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memiliki kewenangan di Pulau Belitung,
- Masih kurangnya kesadaran pengguna air tanah untuk memasang meter air sebagai alat ukur debit air,
- Belum adanya Peta Zona Konservasi Air Tanah,
- Pengurangan Anggaran Kegiatan sehingga pengawasan tidak berjalan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Sosialisasi peraturan air tanah terkait penataan perizinan air tanah,
 - Merevisi peraturan Gubernur terkait Nilai Perolehan Air Tanah,
 - Melakukan penataan perizinan air tanah untuk sumur yang belum berizin sebelum bulan Maret 2023 dan untuk sumur yang telah habis masa berlakunya
 - Koordinasi dan konsultasi ke Badan Geologi Kementerian ESDM dan stakeholder.
- Program pengelolaan mineral dan batubara dengan sasaran program Peningkatan pengelolaan pertambangan mempunyai Indikator Kinerja persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah IUP aktif yang dibina dan diawasi dibagi jumlah IUP aktif dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(61/144) \times 100\% = 42,36\%$ dari target sebesar 46,06 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023

yang sebesar 46,06% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tertib administrasi perusahaan pengelola pertambangan yang semakin baik,
- Pembinaan dan pengawasan yang tepat sasaran,
- Rekomendasi yang dilakukan pada saat pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan,
- Adanya sinergitas antara Dinas ESDM dengan Inspektur Tambang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Jumlah SDM yang melakukan pembinaan dan pengawasan masih terbatas,
- Jumlah IUP yang relatif banyak sedangkan penganggaran terkait pembinaan dan pengawasan relatif kecil,
- Terlalu banyak aspek pengawasan yang harus diawasi.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Adanya penambahan anggaran yang signifikan terkait pengawasan dan pembinaan,
- Adanya penambahan pegawai teknis untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

- Program pengelolaan energi terbarukan dengan sasaran program peningkatan Bauran Energi mempunyai Indikator Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah penggunaan energi baru terbarukan dibagi jumlah penggunaan energi total dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(212.735,23 \text{ TOE} / 1.156.511,53) \times 100\% = 18,39\%$ dari target sebesar 12,32%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 17,27% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Koordinasi yang baik dengan Dewan Energi Nasional terkait perhitungan bauran energi daerah,
- Anggaran kegiatan pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah Provinsi TA 2024,
- Perubahan kebijakan di pemerintah pusat terkait penggunaan BBM Biosolar dari B30 menjadi B35.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Ketersediaan data penggunaan bahan bakar minyak dan batubara yang valid sulit diperoleh.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Agar anggaran kegiatan pengelolaan konservasi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah Provinsi

lebih ditingkatkan,

- Mendorong Badan Usaha dan stakeholder yang melakukan kegiatan penyediaan, pengusahaan maupun pemanfaatan energi lebih mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan dibanding dengan energi fosil
 - Tetap menjalin koordinasi yang baik dengan semua pihak yang terkait.
- Program pengelolaan ketenagalistrikan dengan sasaran program Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik mempunyai Indikator Rasio Elektrifikasi formula perhitungan indikator ini adalah jumlah rumah tangga berlistrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(511.902/511.853) \times 100\% = 99,99\%$ dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Koordinasi dengan PLN,
- Ketersediaan anggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan melalui APBD,
- Adanya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dari anggaran PLN

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Ketersediaan Anggaran Kegiatan APBD Tahun 2024 kecil
- Belum adanya kegiatan pendataan yang berhubungan dengan Rumah Tangga belum memiliki listrik dari PLN atau Non PLN,
- Tahun 2024 tidak ada anggaran kegiatan listrik perdesaan dari APBN,
- Ada pertumbuhan pembangunan rumah oleh developer atau masyarakat akibat dari pertumbuhan penduduk.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Penambahan anggaran kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi,
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM RI dan PLN,
- Pengusulan anggaran APBN untuk tugas pembantu atau dekontrasi untuk pembangunan dan pengawasan infrastruktur ketenagalistrikan,
- Pengusulan anggaran APBD untuk kegiatan pendataan yang berhubungan dengan Rumah Tangga belum memiliki listrik dari PLN atau Non PLN

D. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK

eselon 3):

➤ Program perencanaan dan pembangunan industri dengan sasaran program Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan dan Pembangunan Industri mempunyai Indikator Pertumbuhan Unit Usaha Industri formula perhitungan indikator ini adalah:

- $(\text{Jumlah Usaha Industri}(N) - \text{Jumlah Usaha Industri}(N-1))$ dibagi $(\text{Jumlah Usaha Industri}(N-1))$ dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini adalah $(23.479 - 22.905 / 22.906) \times 100\% = 2,501\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 2,50%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 3,04% (capaian tahun lalu).
- $(\text{Jumlah desain dan cetak kemasan Produk UMKM yang terfasilitasi}(N))$ dibagi $\text{Jumlah Produk UMKM yang mengajukan fasilitasi}(N)$ dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini adalah $((351 + 726) / 1077) \times 100\% = 100,00\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 60,00% atau sebesar $(100,00\% / 60,00\%) = 166,67\%$. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 166,67% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Pertumbuhan pada subkategori industri makanan dan minuman dan kerajinan melalui program dan kegiatan penumbuhan wirausaha baru industri dan fasilitasi pembuatan perizinan usaha.
- Kebijakan pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan dan insentif, termasuk perbaikan infrastruktur dan kemudahan perizinan memberikan peluang investasi di sektor industri pengolahan dan sektor-sektor potensial lainnya.
- Pengeluaran konsumsi rumah tangga, dalam memperingati hari besar keagamaan, liburan sekolah, pencairan gaji 13 dan 14 PNS dan kegiatan- kegiatan bazaar ekonomi kreatif yang dilaksanakan secara berkala berperan dalam mendukung pertumbuhan wirausaha baru industri.
- Meningkatkan sarana dan prasarana terhadap mesin dan peralatan agar dapat menghasilkan produk kemasan IKM yang berkualitas tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada para pelaku usaha IKM.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Adanya permasalahan tata kelola timah yang belum selesai yang berimplikasi terhadap sektor industri lainnya.
- Belum optimalnya hilirisasi industri berbasis sumber daya alam,
- Ketergantungan terhadap komoditi timah dan belum

berkembangnya potensi pasar dan diversifikasi produk potensial lainnya seperti hasil laut, pertanian an perkebunan dalam menunjang perekonomian Bangka Belitung.

- Belum optimalnya penyebaran infomasi tentang pemanfaatan fasilitas layanan promosi dan kemasan di Kab/Kota,
 - Keterbatasan teknologi mesin dan peralatan serta keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kepada para pelaku IKM,
 - Belum adanya dukungan intervensi secara regulasi untuk mengarahkan pemanfaatan layanan kemasan,
 - Keterbatasan jumlah SDM dan kemampuan operator mesin / tenaga desain;
 - Fluktuasi harga bahan baku serta tempat penyimpanan bahan baku Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
 - Percepatan hilirisasi produk-produkdalam RPIP dengan melibatkan stakeholder terkait, Upgrading skill Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan
 - Sumber Daya Mesin dan Peralatan yang dimiliki,
 - Memberikan pembekalan dalam rangka memaksimalkan kemampuan tenaga operator/desain dalam mengoperasikan mesin dan peralatan;
 - Perlunya intervensi regulasi yang sifatnya himbauan dalam rangka pemanfaatan layanan kemasan secara maksimal;
 - penyediaan tempat yang representatif untuk penyimpanan barang (bahan baku-barang jadi;
- Program pengendalian izin usaha industri dengan sasaran program Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri mempunyai Indikator:
- Persentase pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memenuhi komitmen perolehan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)(N)) dibagi (Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang mengajukan perolehan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)(N)) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(0/0) \times 100\% = 0\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 100,00%.

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100,00% (capaian tahun lalu).

- Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang diawasi dan dikendalikan (N)) dibagi (Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang terdaftar di SIINas (N)) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(0/0) \times 100\% = 0\%$ dari target sebesar 40%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 48,68% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Adanya dukungan kebijakan pemerintah mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem OSS (*Online Single Submission*);
- Adanya kolaborasi antar OPD terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha;
- Kemudahan akses perolehan Informasi industri melalui media internet;
- Kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya memiliki izin usaha sebagai legalitas dalam berusaha.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan;
- Keterbatasan kompetensi sumber daya industri / tenaga kerja industri;
- Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha;
- Kurangnya pemahaman pelaku industri terhadap peraturan perundang- undangan tentang pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Ketersediaan anggaran yang memadai;
- Meningkatkan kolaborasi antar OPD terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha;
- Optimalisasi penggunaan teknologi dalam menunjang penyampaian informasi
 - data industri;
- Pembekalan kompetensi sumber daya industri/ Tenaga Kerja Industri dengan mengikuti pelatihan/bimtek;
- Melaksanakan Bimtek verifikasi teknis perizinan berusaha bagi

pelaku industri;

- Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepatuhan dalam berusaha sektor industri bagi pelaku industri dan ASN.

- Program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan sasaran program Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional mempunyai Indikator Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Laporan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri di SIINas(N)}) \div (\text{Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang terdaftar di SIINas(N)}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(48/78) \times 100\% = 61,54\%$ dari target sebesar 60%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 81,59% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Adanya dukungan kebijakan peraturan perundang-perundangan sektor industri;
- Kesadaran pelaku industri besar dalam penginputan data industri melalui SIINas.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kurangnya pemahaman pelaku industri besar dalam penyampaian data industri;
- Kurangnya kepatuhan pelaku industri besar dalam penyampaian data industri;
- Belum adanya sanksi bagi pelaku industri yang tidak melaporkan data industri melalui SIINas.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Melaksanakan Bimtek pelaporan data industri melalui SIINas;
- Melaksanakan Sosialisasi terkait tata cara pengisian dan pelaporan SIINas

E. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK eselon 3):

- Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan sasaran program Meningkatnya Ketertiban dalam Penerbitan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai Indikator Persentase Tertib Usaha formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Pelaku Usaha B2 yang berizin}(N)) \div (\text{Jumlah Pelaku Usaha B2}(N1)) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(1/1) \times 100\% = 100,00\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 100,00%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100,00% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terpantaunya terhadap komitmen pelaku usaha dalam memiliki perizinan perdagangan,
- Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan perdagangan yang mereka miliki serta memfasilitasi pemenuhan komitmen surat izin usaha perdagangan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- Niat / Keinginan pelaku usaha untuk melengkapi perizinan yang belum mereka miliki

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami tentang perizinan perdagangan,
- Masih adanya pelaku usaha yang enggan untuk koordinasi kepada petugas dalam hal untuk pengurusan perizinan perdagangan yang harus mereka miliki sesuai dengan usaha perdagangan yang di lakoni.
- Sering terjadinya Perubahan aturan atau regulasi
- Kurang informasinya pelaku usaha terhadap perubahan aturan
- Kurangnya anggaran

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Penyelenggaraan edukasi dan edukasi bagi pelaku usaha yang efektif,
- Memfasilitasi Penyediaan sistem pelayanan melalui elektronik,
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan administrasi perizinan terhadap pelaku usaha perdagangan.

- Memberikan pembinaan dan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan

➤ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Dengan sasaran program Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai Indikator Persentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah sarana distribusi yang terkelola dengan baik}(N)) \div (\text{Jumlah sarana distribusi yang terkelola}(N)) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(19/22) \times 100\% = 86,36\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 77%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 84,21% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Semakin baiknya sistem distribusi,
- Meningkatnya jumlah pasokan barang kebutuhan pokok.
- Tersedianya pengelola Pasar Lelang Komoditas

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Masih lemahnya sistem pengumpulan data dan informasi,
- Tidak tersedianya pusat perdagangan grosir/ pasar induk.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan pelaku usaha distribusi,
- Membuat suatu sistem informasi terpadu terkait data informasi perdagangan.

➤ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Dengan sasaran program Meningkatnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mempunyai Indikator Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})) \div (\text{Target}) \times 100\%$ dengan Nilai Koefisien Variasi <9%. Capaian indikator kinerja adalah 8,06% atau $(8,3 - (8,06 - 8,3)) \div 8,3 \times 100\% = 102,89\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 8,3. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 8,44 atau 100,71% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Melakukan Operasi Pasar dan Pasar Murah dalam rangka pengendalian inflasi.
- Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.

- Meningkatkan sinergitas dengan pelaku usaha guna menciptakan ketahanan dan ketersediaan bahan pokok.
- Mengawal kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok ke pasar-pasar rakyat dengan cara berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk :
- Memberikan prioritas distribusi untuk barang kebutuhan pokok.
- Memberikan prioritas bongkar muat di pelabuhan untuk komoditas barang kebutuhan pokok.
- Melakukan komunikasi yang intens dengan media terkait kondisi stabilitas harga dan kecukupan stok beras dalam rangka menjaga psikologis masyarakat tetap kondusif (media *briefing* berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan).
- Melakukan koordinasi dengan Kanwil Bulog setempat dalam rangka optimalisasi SPHP Beras Medium guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terhambatnya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dari produsen ke distributor di daerah hingga ke agen dan toko-toko.
- Masih kurangnya informasi pelaku usaha terkait aturan yang berlaku saat ini.
- Faktor cuaca ekstrem yang terjadi pada bulan tertentu yang mengakibatkan distribusi barang kebutuhan pokok terganggu.
- Secara geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan yang mendatangkan barang kebutuhan pokok khususnya beras, minyak goreng, bawang merah, cabai dari luar, akibatnya harga barang tersebut sering terjadi kenaikan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai :

- Melakukan pengawasan kepada distributor dan agen-agen agar tidak melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting di saat terjadi kelangkaan barang.
- Edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan *panic buying* apabila mendapat informasi tentang kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- Melakukan pemantauan dan pengawasan harga di pasar tradisional/ritel modern/lokal.
- Melakukan pemantauan dan pengawasan stok barang kebutuhan bahan pokok di tingkat distributor/sub distributor.
- Melakukan kegiatan operasi pasar dan pasar murah di Kabupaten/Kota.
- Meningkatkan sinergitas dengan pelaku usaha guna menciptakan ketahanan dan ketersediaan bahan pokok.

- Melaksanakan monitoring, pelaporan, distribusi barang kebutuhan pokok di tingkat distributor/sub distributor.
 - Melaksanakan rapat koordinasi dengan distributor/sub distributor/retail modern dalam rangka menjelang HBKN khususnya Natal dan Tahun Baru.
- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- Dengan sasaran program Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen) mempunyai Indikator:
- Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen formula perhitungan indikator ini adalah Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen(N). Capaian indikator kinerja adalah $(43/43) \times 100\% = 100,00\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 43. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 42 (capaian tahun lalu).
 - Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB) formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah komoditas yang memenuhi standardisasi(N)}) / (\text{Jumlah komoditas potensial(N)}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(1/1) \times 100\% = 100,00\%$ dari target sebesar 1 atau sebesar $(1/1) = 100,00\%$. Capaian kinerja pada tahun 2024 ini sama dengan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 100,00% . (UPTD BPSMB)
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Perlindungan Konsumen sehingga konsumen dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen serta mampu dan lebih kritis untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen melalui edukasi, sosialisasi dan menyediakan wadah untuk pengaduan konsumen dan membantu menyelesaikannya serta melakukan penguatan terhadap BPSK dan LPKSM sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
 - Menumbuhkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha dengan cara edukasi kepada konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha agar tercipta iklim usaha yang sehat sehingga dapat melindungi konsumen dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa yang berasal dari barang dan jasa yang tidak memenuhi persyaratan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan dengan melakukan pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota serta konsumen.

- Peningkatan pelayanan pengujian komoditi potensial berdasarkan SNI serta pengembangan dan penambahan ruanglingkup akreditasi/lingkup pengujian yang bertambah (Lada, CPO dan Mikrobiologi dan Beras) yang terakreditasi KAN sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap Laboratorium Pengujian BPSMB.
- Peran pelaku usaha dalam pemenuhan standar khususnya jaminan mutu yang ber Standar Nasional Indonesia (SNI) yang bersifat sukarela perlu ditingkatkan melalui serangkaian kegiatan guna peningkatan pemenuhan penerapan SNI dan untuk mendukung penerapan SNI melalui akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Masih ada konsumen yang belum memahami tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen, rendahnya literasi masyarakat tentang regulasi perlindungan konsumen, Lembaga perlindungan konsumen serta belum mengetahui tentang wadah untuk melakukan pengaduan konsumen. Serta masih perlu diadakan sosialisasi dan edukasi melalui pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
- Masih banyak stakeholders yang belum mengetahui pelayanan pengujian mutu barang oleh Laboratorium BPSMB yang sudah terakreditasi KAN serta belum adanya regulasi terkait dalam penunjukan dan penetapan pemanfaatan laboratorium pengujian UPTD BPSMB dalam pengujian komoditi potensial daerah dalam mendukung peningkatan PAD.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Penyelenggaraan edukasi, sosialisasi dan advokasi konsumen yang efektif,
- Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan peredaran barang/jasa, dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada konsumen mengenai lokasi dan fungsi dari lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen, mulai dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), termasuk Kementerian Perdagangan selaku leading sector perlindungan konsumen.
- Penyampaian informasi mengenai Laboratorium terakreditasi KAN melalui berbagai media elektronik

- Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan sasaran program Mengikatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai Indikator Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar formula perhitungan indikator ini adalah:
 - a. $(\text{Jumlah Produk Lokal yang dipasarkan(N)}) / (\text{Jumlah Produk Lokal yang di fasilitasi(N)}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi adalah terealisasi 12 UMKM $(12/12) \times 100\% = 100\%$ dan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi terealisasi 17 UMKM $(17/12) \times 100\% = 142\%$. (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 65%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 200,00% (capaian tahun lalu).
 - b. $(\text{Jumlah Produk IKM yang dipasarkan(N)}) / (\text{Jumlah Produk IKM(N)}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $((67/67) \times 100\% = 100,00\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 40% atau sebesar $(100\%/40\%)=250\%$. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 146,90% (capaian tahun lalu). (UPTD RPK)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terjalin kolaborasi dan sinergi dari Kementerian Perdagangan RI dan Pelaku Usaha yang mandiri sehingga dapat mendukung promosi dan pemasaran produk melalui pameran produk unggulan kuliner dan pangan kemasan dari seluruh Indonesia;
- Fasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis Pengembangan Potensi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Hasil Produksi UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Fasilitasi Promosi melalui Video ke pelaku usaha yang potensial;

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kurang aktifnya pelaku usaha dalam membangun rebranding produk, sehingga berakibat minimnya daya saing produk dipasar nasional.

- Masih minimnya kesadaran atau usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk secara mandiri. Pelaku usaha cenderung sangat bergantung dengan kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Melakukan kegiatan promosi yang tepat sasaran,
- Melakukan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait guna mendukung pemasaran produk,
- Melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap peningkatan kualitas produk;
- Melakukan koordinasi sinergi dan kolaborasi pemberdayaan UMKM seperti pendampingan kepada pelaku UKM melalui Forum UMKM terutama yang prematur dalam menjalankan usaha.

F. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan sasaran kinerja program meningkatnya kualitas kawasan pariwisata, mempunyai Indikator kinerja Persentase Kawasan Pariwisata yang Ditingkatkan Kualitasnya formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Kawasan di Destinasi yang Dikelola}) / (\text{Total Jumlah Kawasan di Destinasi}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(5/6) \times 100\% = 83,33\%$ dari target sebesar 83%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini adalah tetap/tidak berubah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 83,33%..

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Dukungan kebijakan, regulasi, dan anggaran untuk meningkatkan sektor pariwisata.
- Kualitas produk wisata yang ditawarkan.
- Ketersediaan fasilitas yang nyaman seperti akomodasi, tempat makan, dan pusat informasi wisata.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Destinasi tidak memiliki ciri khas yang membedakannya dari tempat lain.
- Kurangnya inovasi dalam atraksi wisata, sehingga kurang menarik wisatawan.
- Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pariwisata yang tidak terkendali.
- Ketersediaan dan kepastian anggaran sesuai dengan kebutuhan

dan target program.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Melibatkan masyarakat dalam menjaga dan mempromosikan destinasi.
- Peningkatan kualitas produk wisata yang ditawarkan.
- Pelatihan dan pengembangan kemampuan SDM dalam industri pariwisata.
- Adopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.

- Program Pemasaran Pariwisata dengan sasaran program meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, mempunyai Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun n. Capaian indikator kinerja adalah **431.946 orang (data BPS per November 2024)** Wisatawan yang terdiri dari **425.863 orang** wisatawan nusantara dan **6.083 orang** wisatawan mancanegara, dari target sebesar 285.144 wisatawan. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar **509.731 orang** (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Pemanfaatan media sosial, platform digital, dan website untuk memasarkan destinasi.
- Infrastruktur yang mendukung seperti infrastruktur transportasi, ketersediaan fasilitas akomodasi, tempat makan dan informasi wisata.
- Jaminan keamanan bagi wisatawan melalui penanganan bencana, pengendalian kriminalitas, dan layanan kesehatan.
- Promosi daya tarik khas, seperti budaya, kuliner, alam, dan sejarah.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Promosi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau preferensi pasar target.
- Kurangnya transportasi yang nyaman dan terjangkau menuju destinasi.
- Krisis ekonomi atau konflik politik yang mengurangi minat wisatawan.
- Dana terbatas untuk menjalankan kampanye pemasaran yang efektif.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Keterlibatan industri perhotelan, restoran, dan operator tur dalam mendukung kampanye pemasaran.
- Penyesuaian dengan tren pariwisata global seperti ekowisata,

wellness tourism, dan digital nomad tourism.

- Analisis data untuk memahami tren wisatawan dan pola perjalanan mereka.

➤ Program Pengembangan Ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

dengan sasaran program berkembangnya sektor ekonomi kreatif, mempunyai indikator persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan, formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan} / \text{Jumlah Keseluruhan Ekonomi Kreatif}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah (4 Sektor: fashion, kuliner, kriya, fotografi / 17 sektor) $\times 100\% = 23,53\%$ dari target sebesar 15,38 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 17,65% (3 Sektor: kriya, kuliner, fashion).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kebijakan yang mendorong inovasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan kemudahan berusaha di sektor ekonomi kreatif.
- Penguatan jejaring antar-pelaku ekonomi kreatif untuk berbagi ide dan sumber daya.
- Promosi terintegrasi untuk memperkenalkan produk kreatif kepada pasar lokal dan global.
- Keterkaitan produk kreatif dengan tren keberlanjutan, seperti produk ramah lingkungan.
- Pengembangan produk kreatif yang unik, bernilai tambah, dan relevan dengan tren pasar.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kebijakan yang belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual yang lemah.
- Alokasi dana yang terbatas untuk program pengembangan ekonomi kreatif.
- Produk kreatif sulit bersaing di pasar internasional karena kurangnya promosi dan branding.
- Kurangnya fasilitas seperti ruang kreatif, studio produksi, atau pusat inovasi.
- Produk ekonomi kreatif yang tidak memiliki keunikan yang membedakannya dari kompetitor serta kurang mengikuti tren atau kebutuhan pasar.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Ikut berpartisipasi dalam pameran, festival, atau acara internasional untuk memperluas jangkauan pasar.
- Memperkuat identitas lokal dalam produk kreatif untuk menarik perhatian konsumen.

- Memanfaatkan marketplace lokal dan global untuk distribusi produk kreatif.
- Melakukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas kreatif.
- Memanfaatkan teknologi untuk mempercepat produksi, distribusi, dan pemasaran produk kreatif.
- Menyediakan kebijakan yang mendorong inovasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan kemudahan berusaha di sektor ekonomi kreatif.

➤ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

dengan sasaran program meningkatnya kompetensi Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, mempunyai indikator persentase SDM Pariwisata dan Ekraf yang memiliki kompetensi, formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Memiliki Kompetensi} / \text{Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(102/977) \times 100\% = 10.44\%$. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 9,5%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Adanya kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti insentif fiskal, regulasi yang jelas, dan dukungan finansial, sangat membantu tercapainya program pengembangan SDM.
- Program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif akan menghasilkan SDM yang kompeten dan siap terjun ke dunia kerja. Pelatihan berbasis keterampilan praktis serta sertifikasi kompetensi sangat diperlukan.
- Pemanfaatan bakat lokal yang memiliki potensi besar dalam bidang seni, desain, teknologi, dan lainnya.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Masih ada kesenjangan antara kebutuhan pasar dengan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. SDM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sering kali kurang terlatih dalam hal inovasi dan teknologi yang berkembang pesat.
- Banyak produk ekonomi kreatif yang kurang dikenal secara luas, baik di pasar domestik. Pemasaran yang kurang efektif akan menghambat potensi ekspansi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.
- Banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memiliki keterampilan yang relevan, seperti pemasaran digital atau manajemen bisnis.
- Kurangnya program pelatihan yang mendukung peningkatan kapasitas SDM.

- Keterbatasan jumlah tenaga ahli dalam bidang ekonomi kreatif, seperti desainer, pengembang teknologi, atau seniman.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan serta program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Penguatan program pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi nasional maupun internasional akan membantu mencetak SDM yang siap pakai.
 - Menjalankan program pelatihan dan pendidikan formal atau nonformal untuk meningkatkan keterampilan pelaku kreatif.
 - Pemanfaatan bakat lokal yang memiliki potensi besar dalam bidang seni, desain, teknologi, dan lainnya.
- Program Pengembangan Kebudayaan dengan sasaran program meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan lokal mempunyai Indikator Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan, formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Kebudayaan Lokal yang dikembangkan} / \text{Keseluruhan Kebudayaan lokal}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(7/10) \times 100\% = 70,00\%$ dari target sebesar 49,33%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 40,00%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- adanya sikap toleransi dan terbuka terhadap budaya lain,
- kesadaran dan nilai budaya lokal yang masih melekat di masyarakat,
- ketersediaan media pengembangan kebudayaan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan yang belum optimal,
- apresiasi budaya belum dapat memberikan nilai ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan pelaku seni,
- minimnya fasilitas dan ruang publik untuk ekspresi budaya,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- meningkatkan fasilitasi dan dukungan pemerintah terhadap kegiatan ekspresi budaya masyarakat,
 - meningkatkan kolaborasi berbagai pihak terhadap penyelenggaraan event budaya,
 - meningkatkan kapasitas SDM pelaku seni dan budaya,
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan sasaran program melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keanekaragaman budaya mempunyai Indikator Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan, formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan} / \text{keseluruhan kesenian tradisional}) \times 100\%$.

lintas daerah kab/kota) x 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(65/294) \times 100\% = 22,11\%$ dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 35,71%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- pengembangan kepariwisataan yang berbasis pada budaya setempat,
- kesenian tradisional yang dijadikan pada muatan lokal (pendidikan),
- dukungan kelembagaan dan SDM kesenian tradisional.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- kurangnya pemberdayaan kelembagaan , SDM dan pranata kebudayaan (kesenian tradisional) dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif/inisiatif masyarakat,
- regenerasi kesenian tradisional oleh maestro seni yang belum optimal,
- daya tarik kesenian tradisional yang dapat tergerus oleh kesenian luar (global),

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- pengenalan kesenian tradisional sejak dini guna menguatkan kecintaan nilai budaya tradisional,
 - penyajian paket kesenian tradisional atraktif untuk paket-paket wisata,
 - fasilitasi peningkatan pemahaman tentang kesenian tradisional,
- Program Pembinaan Sejarah dengan sasaran program meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sejarah lokal serta memperkuat jati diri dan karakter bangsa mempunyai Indikator Persentase Sejarah Lokal yang dibina, formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah sejarah lokal yang dibina} / \text{Jumlah Keseluruhan Sejarah Lokal provinsi}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(0/313) \times 100\% = 0\%$ (ditangging/rasionalisasi) dari target sebesar 71%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 3,51%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- sejarah perjuangan kemerdekaan menjadi salah satu nilai penting bagi sejarah lokal,
- dukungan program pembangunan karakter SDM di lintas sektor yang menjadikan sejarah sebagai salah satu materi pokok,
- keberadaan fasilitas edukasi sejarah (museum),

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- potensi sejarah atau prasejarah yang belum terungkap dalam bentuk data informasi maupun hasil-hasil penelitian,
- pencatatan tentang sejarah lokal masih terbatas dan sulit diakses,

- kesadaran dan kepedulian terhadap nilai sejarah lokal yang rendah,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- penggalian nilai-nilai sejarah lokal melalui kerjasama dengan SDM dan institusi yang berkompeten,
- fasilitasi upaya penyebarluasan informasi sejarah lokal (penelitian/penulisan),
- meningkatkan upaya perlindungan terhadap lokus potensi sejarah atau prasejarah,

- Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan sasaran program meningkatkan pelestarian cagar budaya mempunyai Indikator Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola, formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola} / \text{Jumlah keseluruhan cagar budaya peringkat provinsi}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(5/7) \times 100\% = 71,43\%$ dari target sebesar 62%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan Tahun 2023 yang sebesar 71,43%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- cagar budaya yang menjadi objek mendukung kepariwisataan (destinasi),
- keberadaan cagar budaya yang terjaga oleh pemilik karena memiliki nilai aset,
- adanya penetapan peringkat cagar budaya;

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- ketersediaan tenaga ahli cagar budaya yang terbatas,
- pemeliharaan, pelestarian serta pengelolaan cagar budaya membutuhkan investasi/dukungan sumber daya yang besar,
- penanganan potensi objek diduga cagar budaya belum optimal,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- kerjasama dengan pihak dalam penyediaan tenaga ahli cagar budaya,
- mengoptimalkan penetapan peringkat cagar budaya,
- meningkatkan fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya,

- Program pengelolaan permuseuman dengan sasaran program meningkatkan pemahaman masyarakat tentang museum mempunyai Indikator Persentase museum yang dikelola formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah museum yang dikelola} / \text{jumlah keseluruhan museum provinsi}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(1/1) \times 100\% = 100\%$ dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan Tahun 2023 yang sebesar 100 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- keberadaan museum dengan berbagai tema dan pengelola,

- museum menjadi pilihan tempat kunjungan wisata,
- museum dapat menjadi tolak ukur kesadaran masyarakat dalam menjaga sejarah, tradisi dan kebudayaan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- kelembagaan dan SDM museum yang belum tersedia dan terkelola dengan baik,
- kapasitas SDM pengelola yang belum memiliki standarisasi,
- koleksi museum yang terbatas dan biaya perawatan yang besar,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- fasilitasi tata kelola museum,
- peningkatan kapasitas SDM pengelola museum,
- meningkatkan pengelolaan museum melalui kerjasama berbagai pihak,

G. Meningkatnya Ekspor

- (tidak ada Program)

H. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK eselon 3):

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan sasaran kinerja program Banyaknya Investor yang menanamkan modal mempunyai Indikator kinerja Banyaknya investor yang menanamkan modal formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Investor yang menanamkan modal Capaian kinerja untuk indikator ini adalah Banyaknya investor yang menanamkan modal dari target sebesar 25 investor tahun 2024. Capaian kinerja pada Tahun 2024 adalah sebanyak 64 investor ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 51 investor atau naik 25, 49 % (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Telah disusunnya peta potensi dan peluang investasi daerah pulau bangka maupun pulau belitung yang merupakan sinergi potensi/peluang investasi kabupaten/kota sehingga tersedia data dan informasi potensi dan peluang investasi kepada investor;
- Memberikan kemudahan berinvestasi kepada pelaku usaha dan calon investor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kondisi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya yang Kondusif
- Kualitas Produk (Pertanian/Perkebunan dan Kelautan Perikanan) yang dihasilkan relative lebih baik dari daerah lain
- Layanan Perizinan/Non Perizinan Yang Mudah Untuk Penanam Modal
- Adanya Tataran Perencanaan Penanaman Modal (RUPM)
- Iklim Kerjasama Antara UMK Dan Non UMK Yang Terus Digencarkan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Status lahan yang akan ditawarkan kepada calon investor masih yang terkendala masalah, zonasi, Lahan serta harga lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Upah tenaga kerja yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain;
- Masih kurangnya infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri antara lain Pelabuhan yang representatif, sarana angkut, air bersih dan pengumpulan sampah.
- Kurangnya Tenaga kerja yang terampil atau tidak sesuai dengan kebutuhan investor.
- Struktur geografis Bangka Belitung yang merupakan daerah kepulauan sehingga dibutuhkan dana yang besar untuk menjangkau potensi yang ada untuk menyusun peluang investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor, sementara dana APBD terbatas untuk mensupport/menggali potensi yang ada.
- Belum Adanya *City Branding* Di Tiap Kabupaten/Kota
- Kurangnya dukungan dana untuk pelaksanaan program iklim penanaman modal.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Merevisi dan mengimplementasikan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah terkait dengan perizinan dan penanaman modal serta sinkronisasi regulasi pusat dan daerah untuk menghilangkan hambatan birokrasi;
 - Memberikan fasilitas/Insentif dan Kemudahan berinvestasi kepada pelaku usaha;
 - Melaksanakan proses pelayanan perizinan melalui OSS-RBA dan implementasi layanan perizinan ekspres untuk investasi strategis.
 - Meningkatkan infrastruktur di wilayah Kawasan ekonomi khusus dan Kawasan industri terpadu
 - Melakukan pelatihan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan investor.
 - Melakukan promosi investasi yang lebih agresif baik melalui online Website dinas maupun forum investasi baik nasional maupun internasional.
 - Mendorong dukungan dana dari pusat melalui dana alokasi khusus Kementerian Investasi dan hilirisasi/BKPM maupun Kementerian lainnya agar dapat menyusun IPRO sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi.
- Program Promosi Penanaman Modal dengan sasaran program Peluang Investasi Yang Dipromosikan mempunyai Indikator 2 (dua) peluang Investasi yang di Promosikan. formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Peluang Penanaman Modal Dipromosikan dalam satu tahun. Capaian indikator kinerja adalah 0 dari target 2 Peluang

dikarenakan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk pembiayaan. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 2 (dua) peluang Investasi yang di Promosikan (capaian tahun lalu).

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Tidak tersedianya anggaran pelaksanaan pelaksanaan promosi penanaman modal pada tahun anggaran 2024 akibat refocusing anggaran,
- Tidak adanya data peluang investasi baru yang siap ditawarkan,
- Tidak adanya sumberdaya manusia (SDM) di DPMPTSP yang memahami dan memiliki kompetensi dibidang promosi penanaman modal seperti programer computer, bahasa inggris, desain grafis, dan pengelola website, dll.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Perlu disusun peluang investasi baru yang siap ditawarkan / IPRO (Investment Project Ready to Offer), bukan hanya mempromosikan potensi investasi tetapi proyek-proyek investasi yang clear and clean,
 - Mengusulkan anggaran Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi,
 - Mengusulkan penambahan SDM yang memiliki kompetensi dibidang promosi penanaman modal seperti tenaga programer computer, tenaga bahasa inggris, tenaga desain grafis, dan tenaga pengelola website, dll.
- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan sasaran program Meningkatnya kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. mempunyai Indikator pelaku usaha yang terlayani. Formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah pelaku usaha yang terlayani dalam 1 Tahun. Capaian indikator kinerja adalah 1143 Pelaku Usaha dari target sebesar 1000 Pelaku Usaha atau 114,3 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih Rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 1192 Pelaku usaha atau 125,47 (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Pelayanan penyelenggaraan perizinan berusaha sudah di laksanakan melalui sistem informasi perizinan yaitu OSS RBA, sedangkan Pengurusan Perizinan Non Berusaha Aplikasi Si Cantik Cloud
- Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Perizinan
- Kewenangan yang diserahkan ke Dinas DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 24 Tahun 2022)

- Meningkatnya Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perizinan dan melengkapi kewajiban izin mereka

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kurangnya kompetensi SDM yang menangani pelayanan perizinan;
- Kurangnya motivasi kerja;
- Sarana dan Prasarana kurang memadai ; dan
- Adanya refocussing anggaran
- Adanya Perubahan Kebijakan di Kementerian.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Memberikan pelatihan untuk peningkatan kompetensi
- Melakukan pembinaan terhadap petugas layanan
- Melakukan rapat evaluasi kinerja per 3 bulan sekali untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,
- Meningkatkan kegiatan pemantauan terhadap pelaku usaha yang belum menerbitkan izin;
- Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pelayanan

➤ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Kepatuhan Investor Terhadap Regulasi Investasi mempunyai Indikator kinerja Persentase Peningkatan Perusahaan Yang Patuh Terhadap Perundang-Undangan formula perhitungan indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah LKPM Tahun } n - \text{Jumlah LKPM tahun } n-1}{\text{Jumlah LKPM tahun } n-1} \times 100 \%$$

$$\frac{5.164 - 4.232}{4.232} \times 100 \%$$

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(932/4.232) \times 100 = 22,02\%$
 Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 69,38% (capaian tahun lalu).

*keterangan: - 5.164 adalah jumlah LKPM s.d. Triwulan III 2024
 - 4.232 adalah jumlah LKPM s.d Triwulan IV 2023

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Adanya kegiatan pengawasan ke tempat Pelaku Usaha guna pembinaan terkait LKPM dan realisasi investasi perusahaan yang sudah berjalan.
- Pelaku Usaha yang mulai menyadari bahwa terdapat kewajiban pelaporan LKPM di tiap triwulannya.
- Diadakannya penginputan langsung realisasi investasi Pelaku Usaha pada saat diselenggarakannya bimbingan teknis/sosialisasi pada saat periode pelaporan LKPM tiap triwulannya.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Masih adanya ketidakpatuhan dari Pelaku Usaha dalam melaporkan realisasi investasi mereka di LKPM pada saat sudah mendapatkan izin berusaha.
- *Error system* di website penginputan LKPM sering juga terkendala pada saat masa pelaporan yang hanya 10 hari, mengingat banyaknya pelaku usaha se-Indonesia yang melaporkan LKPM.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Masih perlu diadakannya pengawasan ke pelaku usaha guna membina mereka terkait LKPM dan mengetahui sejauh mana progres perizinan/pun realisasi investasi perusahaan.
- Masih tetap harus dibina serta dibimbing para pelaku usaha untuk tetap melaporkan ada tidaknya realisasi investasi di usaha mereka.

- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan sasaran program meningkatnya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan. mempunyai Indikator adalah Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang dikelola. formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola. Capaian indikator kinerja adalah 1 Dokumen atau 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan pada Tahun 2023 yang sebesar 100% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terciptanya kerjasama dan koordinasi antar Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta pemerataan dan pemahaman informasi perizinan.
- Terlaksananya penyusunan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk program dan kegiatan data dan sistem informasi penanaman modal.
- Sistem penyimpanan database base belum tersedia.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan data dan sistem informasi penanaman modal.
- Menyiapkan Sistem penyimpanan database base (server) .

I. Meningkatnya Pembangunan Manusia

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan sasaran kinerja program meningkatnya

elayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat mempunyai Indikator kinerja

Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang merupakan indikator komposit dari persentase peningkatan kesehatan masyarakat, Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya, Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial, Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan lintas kabupaten/kota, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan (SIK) dan persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. Formula perhitungan indikator ini adalah (Rata-rata nilai Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit, Persentase peningkatan kesehatan masyarakat, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya, Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial, Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan lintas kabupaten/kota, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan (SIK), dan persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dengan formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah capaian 7 indikator kinerja/7X100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(88,03+102,85+100+100+100+93,75)/7 \times 100\% = 97,80\%$ dari target 93,42% atau sebesar 104,69%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 97,74%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara intensif terkait program kesehatan masyarakat, program pencegahan dan pengendalian penyakit dan program pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Melakukan Koordinasi dan monitoring secara intensif terkait penerapan standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Dukungan Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik serta dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat
- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- Masih kurang optimalnya peran lintas sektor dalam mendukung pencapaian target indikator baik secara kuantitas maupun kualitas

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Meningkatkan koordinasi antar program dan dengan lintas sektor dalam rangka penerapan regulasi yang ada, agar semua program dilaksanakan sesuai dengan standar
- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan sasaran kinerja program Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan mempunyai Indikator kinerja persentase tenaga Kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi, dengan formulasi perhitungan indikator ini adalah Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi dalam satu tahun dibagi jumlah tenaga kesehatan seluruhnya dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(8.578/9.687) \times 100\% = 88,55\%$ dari target sebesar 89%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 83,03%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target indikator program ini adalah :

- Pelaksanaan ujian kompetensi tenaga kesehatan bagi tenaga kesehatan yang akan naik jenjang jabatan, perpindahan jabatan serta alih kategori tidak dapat dilaksanakan
- Masih terbatasnya anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi teknis tenaga kesehatan
- Bantuan anggaran Pendidikan tugas belajar masih kurang, sehingga banyak tenaga kesehatan yang tidak terakomodir untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Melakukan advokasi ke Kementerian PAN RB terkait penerbitan verifikasi rekomendasi Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan
 - Melakukan advokasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk penambahan anggaran Pendidikan dan pelatihan serta anggaran peningkatan kompetensi lainnya seperti tugas belajar.
 - Melakukan koordinasi dengan Tim di Ditjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI terkait dengan pemberian bantuan Pendidikan tugas belajar bagi tenaga kesehatan dan dokter spesialis / sub spesialis
- Program ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dengan sasaran kinerja program Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi

syarat mempunyai Indikator kinerja Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat, dengan formulasi perhitungan indikator ini adalah Jumlah sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat dibagi total sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dalam satu tahun dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(29/32) \times 100\% = 90,62\%$ atau sebesar 101,82% dari target sebesar 89%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Melakukan pembinaan dan monitoring di sarana distribusi alat kesehatan dan sarana pedagang besar farmasi
- Melakukan pertemuan evaluasi pemenuhan izin pedagang besar farmasi (PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK).

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Masih terbatasnya anggaran untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan sarana distribusi/penyalur alat kesehatan dan sarana pedagang besar farmasi

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai :

- Melakukan advokasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk penambahan anggaran kegiatan pengendalian dan pengawasan sarana distribusi/penyalur alat kesehatan dan sarana pedagang besar farmasi.

- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan sasaran kinerja program Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan mempunyai Indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah kabupaten kota yang memiliki kebijakan GERMAS dalam satu tahun dibagi jumlah kabupaten/kota yang ada $\times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(7/7) \times 100\% = 100\%$ dari target 89% atau sebesar 112,36%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Melakukan promotif dan preventif dalam upaya perilaku hidup bersih sehat (PHBS) kepada masyarakat oleh puskesmas se-Provinsi Kep. Bangka Belitung serta melibatkan pesantren yang ada di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kwarda dan kader Saka Bhakti Husada (SBH) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan merubah perilaku masyarakat
- Menjalin Kemitraan dan bekerjasama dengan lintas program dan lintas sektor, BUMN, Perusahaan Swasta, ormas, organisasi

profesi, dan tokoh agama terkait penguatan gerakan masyarakat hidup sehat

- Melaksanakan edukasi adaptasi kebiasaan baru di tatanan sekolah, tempat-tempat umum dan pelayanan kesehatan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih kurangnya aksi dari Perangkat Daerah dalam pembudayaan Germas di perkantoran atau lingkungan organisasinya

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah sesuai dengan Inpres Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembudayaan Germas
- b. Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah dan menggunakan pendekatan *Pentahelik* untuk mendapat dukungan dalam pelaksanaan Germas di semua sektor.

J. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan Kapasitas Lembaga dalam Demokrasi Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program- program sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan sasaran kinerja program “Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” mempunyai Indikator kinerja “Persentase Daerah Terlibat Konflik Sosial” formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah Daerah Terlibat Konflik Sosial Tahun Berjalan dibagi Jumlah Daerah Terlibat Konflik Sosial Tahun n) x 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 50% dari target 50% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Telah Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Baik dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sasaran kinerja program “Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” mempunyai Indikator kinerja Persentase Jumlah Konflik yang Berlatarbelakang Ideologi” formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Konflik yang Berlatar belakang Ideologi Tahun n dibagi Jumlah Konflik yang Berlatar belakang Ideologi Tahun n- 1 di kali 100 % . Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 50% dari target 50% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun

2024 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Telah Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Baik dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan sasaran kinerja program “Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” mempunyai Indikator kinerja “Persentase Pembinaan Politik di Daerah” formula perhitungan indikator ini adalah ”Jumlah Pembinaan Politik di Daerah Tahun Berjalan dibagi Jumlah Pembinaan Politik di Daerah Tahun n-1 dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 30 dari target 30 atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Telah Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Baik dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait Kegiatan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sasaran kinerja program “Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” mempunyai Indikator kinerja “Indeks Kinerja Ormas” formula perhitungan indikator ini adalah “Indeks Kinerja Ormas” Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 55 dari target nilai 55 atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Telah Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Baik dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sasaran kinerja program Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” mempunyai Indikator

kinerja “Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah” formula perhitungan indikator ini adalah “ Jumlah Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun Berjalan dibagi Jumlah yang akan Dibina dikali 100%” Capaian kinerja untuk indikator ini $(3/3) \times 100\% = 100\%$ dari target 30% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
Telah Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Baik dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

K. Meningkatnya tata kelola pemerintahan

Keberhasilan capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

- Program Program Penataan Organisasi dengan sasaran kinerja program meningkatkan persentase usulan kebijakan daerah dibidang penataan organisasi mempunyai Indikator kinerja persentase usulan kebijakan daerah dibidang penataan organisasi yang tersusun formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi yang disusun/Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi yang diusulkan X 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 80% dari target 80% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 80% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Regulasi Pemerintah baik level pusat dan daerah yang mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan
- Koordinasi, sinergitas dan komunikasi yang baik antar bagian guna mendukung terlaksananya program dan kegiatan
- Dukungan anggaran yang cukup memadai.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Dukungan saran dan prasarana yang kurang maksimal dalam mendukung Kinerja
- Keterbatasan SDM dalam mengelola pelaksanaan kegiatan yang menunjang kinerja.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Meningkatkan komitmen pimpinan serta pegawai sampai level

staf guna mendukung mencapai target kinerja

- Penetapan SK tim kerja untuk memaksimalkan SDM yang ada guna mencapai target kinerja
- Rutin melaksanakan evaluasi internal terkait prioritas kegiatan dan pencapaian target kegiatan.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Akuntabilitas PD Setda mempunyai Indikator kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah Setda formula perhitungan indikator ini adalah Perhitungan Biro Organisasi.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Adanya Dukungan Kebijakan dari Pimpinan dan Pemerintah
- Terlaksananya semua kegiatan dengan baik

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Terkendala akibat adanya kebijakan pengurangan anggaran kegiatan

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Akan lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak - pihak terkait

- Program Perekonomian dan Pembangunan dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan mempunyai Indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Perekonomian dan Perencanaan yang tersusun, formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusun} / \text{Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan}) \times 100\%$, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 75 % atau sebesar 75%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Adanya kerjasama dan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang telah terjalin baik.
- Adanya Sumber Daya Manusia yang dapat meningkatkan kinerja
- Adanya Dukungan Kebijakan dari Pimpinan dan Instansi terkait

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Terkendala akibat adanya kebijakan pengurangan anggaran kegiatan
- Adanya Pembekuan usaha terhadap PT. Jamkrida Babel (persero) oleh OJK

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Lebih Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun pusat
- Melakukan Upaya penyelesaian atau pengaktifan kembali PT. Jamkrida Babel (persero)

- Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan mempunyai Indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pembangunan yang tersusun formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusun} / \text{Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan}) \times 100\%$, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 75 % atau sebesar 75%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Meningkatnya Usulan Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dan APBN yang dibuat.
- Meningkatnya Usulan Rekomendasi Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang dibuat.
- Meningkatnya Usulan Rekomendasi evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah yang dibuat.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Keterbatasan tersedianya Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dan APBN yang dibuat.
- Keterbatasan tersedianya Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang dibuat.
- Keterbatasan tersedianya Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang dibuat

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Meningkatkan Usulan Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dan APBN yang dibuat.
- Meningkatkan Usulan Rekomendasi Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang dibuat.
- Meningkatkan Usulan Rekomendasi evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah yang dibuat.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah mempunyai Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah formula perhitungan indikator ini adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $77,80 / 79,5 \times 100\% = 97,86\%$ dari target 79,5 atau sebesar 97,86%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 77.80.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Komitmen semua pihak untuk melengkapi data LHE SAKIP

- Komitmen semua pihak melaksanakan agenda perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai yang telah ditetapkan.
- Komitmen ketepatan waktu semua pihak untuk menyampaikan dokumen dalev tepat waktu

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini

adalah:

- Terjadinya tagging naggaran serta pembatasan realisasi anggaran di TW IV sehingga pelaksanaan tidak sesuai perencanaan awal,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Memastikan pelaksanaan legiatan sesuai jadwal dan ketersediaan anggaran sehinga dapat selesai tepat waktu.
 - Merencanakan penagnggaran lebih efektif dan effisien.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan sasaran kinerja program meningkatnya pelayanan internal yang dilakukan PD mempunyai Indikator kinerja Survey kepuasan pelayanan internal, formula perhitungan indikator ini adalah dengan melakukan survey kepuasan kepada Pagawai PNS di Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Capaian kinerja untuk indikator variabel kualitas pelayanan adalah 38,6 dengan predikat sangat berkualitas, 59,1 dengan predikat berkualitas dari target 68. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 67.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Penyusunan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan serta indikator yang terukur.
- Pengalokasian anggaran yang mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan program dengan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan pengawasan ketat untuk mencegah kebocoran.
- Dukungan dan komitmen yang penuh dari pimpinan dan seluruh pihak terkait untuk mencapai target.
- Ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian dan kompetensi yang relevan.
- Sinergi antara bidang urusan dengan penguatan koordinasi baik secara internal maupun eksternal untuk menyelaraskan program.
- Sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi untuk mempermudah pelacakan capaian indikator.
- Transparansi informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan
- Penyusunan regulasi yang mendukung implementasi program.

- Evaluasi berkala untuk menilai pencapaian target dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Perencanaan yang tidak berbasis data atau bukti sehingga sulit diimplementasikan, target indikator yang tidak realistis dan Tidak adanya analisis kebutuhan yang mendalam dan relevan.
- Pengalokasian anggaran yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan program.
- Komunikasi yang buruk dalam proses implementasi program.
- Keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai kebutuhan.
- Budaya kerja yang kaku sehingga sulit beradaptasi dengan inovasi.
- Kurangnya fleksibilitas dalam aturan untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- Minimnya tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Menyusun roadmap atau rencana aksi yang jelas dengan tahapan implementasi yang terukur.
 - Mengalokasikan anggaran secara efisien sesuai prioritas program.
 - Mengadakan forum koordinasi rutin untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh bidang urusan.
 - Memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai.
 - Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan perbaikan atau penyesuaian program agar tetap relevan.
 - Menyusun strategi mitigasi untuk mengantisipasi risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan program.
 - Memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang tujuan, manfaat, dan capaian program.
 - Menggunakan mekanisme reward and punishment untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksana program.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan sasaran kinerja program Meningkatkan pelayanan kesekretariatan mempunyai Indikator kinerja:
- Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah formula perhitungan indikator ini adalah Penilaian nilai SAKIP PD Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang diperoleh. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 74,70 dari target 79,00 atau sebesar 94,55%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar

74,65%.

- Indikator kinerja Persentase Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK) formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah pegawai yang puas atas pelayanan})/(\text{Jumlah pegawai keseluruhan}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(295)/(310) \times 100\% = 95,16\%$ dari target 100% atau sebesar 95,15%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 90%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kepemimpinan yang efektif, Perencanaan strategis dan pengelolaan program yang baik, Sumber daya manusia yang kompeten, Komunikasi dan koordinasi yang efektif, Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan dan evaluasi yang efektif.
- Kepemimpinan yang efektif dan visi yang jelas, Perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya, Pengembangan kapasitas SDM, dan Pengelolaan konflik dan perubahan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kecepatan pelayanan dan profesionalitas, kompetensi SDM dan sarana dan prasarana.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Peningkatan perencanaan strategis dan pengelolaan program yang baik, Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengelolaan konflik dan perubahan.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan sasaran kinerja Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan mempunyai Indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPT PPT Wilayah Belitung) formula perhitungan indikator ini adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPT PPT Wilayah Belitung). Capaian kinerja untuk indikator ini 68 dari target 69 atau sebesar 98,55 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 68 .

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- -

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Tidak Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 akibat adanya Recofusing Anggaran di Tahun 2024 sehingga tertundanya rencana penambahan perangkat komputer sebagai sarana dan

prasarana penunjang pelayanan kegiatan di UPTD.

- Tidak tersedianya sumber daya manusia yang menguasai aplikasi-aplikasi yang saat ini banyak digunakan baik di bidang perizinan maupun di tata usaha UPTD.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Mengajukan kembali usulan Anggaran Kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran berikutnya.
- Mengajukan usulan penambahan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan di UPTD.

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan sasaran kinerja Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan mempunyai Indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DPMPTSP PROV. KEP. BABEL) formula perhitungan indikator ini adalah dengan melakukan survey kepuasan kepada Pegawai PNS di DPMPTSP. Capaian kinerja untuk indikator ini 70,16 dari target 69 atau sebesar 101,68 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 134,13 % .

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Pemahaman/persepsi yang sama dalam melaksanakan realisasi belanja
- Tepat waktu

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kurang pemahaman terkait pelaksanaan belanja barang dan jasa
- SIPD masih belum mumpuni dalam penghitungan Anggaran dan realisasi sehingga terjadi lost anggaran dan contra post
- Inventarisasi dan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas/operasional belum optimal

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Mengadakan pertemuan rutin antara PPTK dan pejabat pengadaan sehingga bisa meminimalisir kesalahan dan mengurangi terjadinya kelebihan anggaran yang tidak bisa digunakan.
- Memback up setiap kegiatan dengan kartu kendali manual sampai SIPD bisa dimanfaatkan secara maksimal.
- Pemeliharaan berkala terhadap kendaraan dinas/operasional

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan sasaran kinerja program peningkatan indeks kepuasan pelayanan internal . mempunyai Indikator kinerja indeks kepuasan pelayanan internal formula perhitungan indikator ini adalah Nilai indeks kepuasan pelayanan internal. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 90 dari target 91 atau sebesar 98.9 %.

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100% (90).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- Fasilitas sarana prasarana pendukung pekerjaan yang memadai
- Faktor kepemimpinan yang baik

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Defisit anggaran sehingga tidak memperbolehkan belanja modal peralatan dan mesin

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Secara bertahap melengkapi fasilitas yang masih kurang

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD mempunyai Indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD formula perhitungan indikator ini adalah Nilai rata-rata (\bar{X}) = $\sum \text{Indeks seluruh layanan} / \sum \text{layanan yang dihasilkan}$.

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(279,70/3) = 93,23\%$ dari target 93,15 Nilai atau sebesar 100,09%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 93,13 Nilai (capaian tahun lalu). (PK eselon 3 sudah diupload)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Kinerja pimpinan dan anggota DPRD yang selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan sehingga kebutuhan anggaran yang harus tersedia juga semakin maksimal.
- Pencapaian realisasi kinerja pada perjalanan dinas luar daerah lintas provinsi dan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka fasilitasi tugas pimpinan dan anggota DPRD selalu optimal dalam pelaksanaannya akan tetapi untuk pencapaian realisasi anggarannya masih harus dioptimalkan dikarenakan anggaran yang harus selalu tersedia

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan dilaksanakan secara optimal

- Mendorong pejabat eselon terkait dan para PPTK di Sekretariat DPRD untuk mengintensifkan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan sehingga realisasi keuangan kegiatan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan bersama dalam rangka pencapaian program
- Meningkatkan koordinasi dengan eksekutif terhadap defisit APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya fungsi lembaga DPRD mempunyai Indikator kinerja Persentase meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD formula perhitungan indikator ini adalah Nilai rata-rata (\bar{X}) = Σ persentase seluruh hasil kegiatan / Σ kegiatan yang dilaksanakan. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah (574/7)= 82% dari target 82% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini tetap, yakni tidak terjadi penurunan/penaikan dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 82% (capaian tahun lalu). (PK eselon 3 sudah diupload)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- . Kinerja pimpinan dan anggota DPRD yang selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Peraturan Daerah yang sesuai dengan Program Legislasi Daerah yang diusulkan belum optimal
- Keterlambatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari eksekutif maupun Raperda Insisiatif yang berasal dari Anggota DPRD

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan dilaksanakan secara optimal
- Meningkatkan koordinasi dengan eksekutif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan sasaran kinerja program:

- Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah mempunyai indikator kinerja nilai SAKIP Bappeda, formula perhitungan indikator ini adalah adalah skor SAKIP Bappeda hasil evaluasi Inspektorat. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 83,20 dari target 82,86

atau sebesar 100,41%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 82,86.

- Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah mempunyai indikator survey kepuasan pelayanan internal Bappeda, formula perhitungan indikator ini adalah nilai interval tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan dari hasil survey kepuasan pelayanan kesekretariatan. Capaian indikator kinerja ini adalah 82,02 poin dari target sebesar 80 poin atau sebesar 102,53%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 102,43%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Koordinasi dan sinkronisasi antara bidang berjalan dengan baik dan efektif;
- Adanya komitmen pimpinan atas pencapaian target kinerja;
- Sumber daya manusia dengan dukungan jabatan fungsional perencana dan jabatan fungsional analis kebijakan yang semakin banyak.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Adanya dinamika keuangan daerah baik dari transfer pusat, bagi hasil maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyebabkan refocusing pagu anggaran.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Melakukan efisiensi anggaran berdasarkan skala prioritas perangkat daerah,
- Melakukan evaluasi kinerja terkait kebijakan keuangan daerah untuk tagging pagu kegiatan agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berdasarkan skala prioritas perangkat daerah;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan dalam diklat-diklat teknis.

➤ **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** dengan sasaran kinerja program:

- Meningkatnya kualitas hasil penelitian prioritas pembangunan daerah mempunyai indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, formula perhitungan indikator ini jumlah hasil penelitian pengembangan yang dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan dibagi total jumlah penelitian pengembangan yang dilakukan dalam tahun x 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(5/6) \times 100\% = 83\%$ dari target sebesar 80% atau sebesar 103,8%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dari Tahun 2023 yaitu sebesar 102,5%.
- Meningkatnya jumlah inovasi daerah yang dikembangkan mempunyai indikator persentase jumlah inovasi daerah yang dikembangkan,

formula perhitungan indikator ini jumlah inovasi yang dikembangkan dibagi total inovasi yang diusulkan x 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(49/60) \times 100\% = 82\%$ dari target sebesar 80% atau sebesar 102,5%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 102,5%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri RI dalam memfasilitasi penginputan dan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) serta koordinasi yang baik juga dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didalam penginputan data didalam aplikasi IPKD;
- Koordinasi yang baik juga dengan Universitas Bangka Belitung dalam hal mendukung dan memfasilitasi didalam penerbitan jurnal KAMIKAWA dan sekaligus sebagai Peer Review.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Hasil penelitian, kajian-kajian, dan rekomendasi kebijakan tidak bisa tidak bisa digunakan dalam rekomemdsasi perencanaan;
- b. Keberadaan lembaga penelitian belum dianggap sebagai sebuah lembaga litbang daerah itu dapat menjadi partner dalam perumusan kebijakan;
- c. Tidak ada komitmen dari perumus kebijakan untuk mempertimbangkan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pemerintah;
- d. Adanya perintah Tagging dalam upaya untuk mengatasi defisit anggaran
- e. Minimnya jumlah peneliti dan rendahnya tingkat kemampuan peneliti akan berdampak pada kurangnya kualitas hasil penelitian dan kajian

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Perekrutan jabatan fungsional peneliti ahli (minimal ahli pertama) perlu segera dilakukan oleh lembaga litbang daerah, karena peneliti merupakan ujung tombak dari lembaga litbang untuk menghasilkan kajian-kajian riset;
- b. Peneliti ahli yang direkrut dari berbagai bidang untuk memberikan variasi hasil-hasil kajian / riset;
- c. Perlunya adanya usaha untuk menambah anggaran penelitian

- dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta;
- d. Perlu adanya regulasi yang mengatur dalam perumusan kebijakan harus dilakukan kajian-kajian kebijakan sebelum diterbitkan untuk memberikan kesadaran kepada formulator kebijakan untuk menggunakan hasil-hasil riset yang dihasilkan dari Bidang Penelitian dan Pengembangan.

➤ **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** dengan sasaran kinerja program:

- Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan program pembangunan mempunyai indikator persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah program RKPD dibagi jumlah program yang sama dalam RPD pada tahun rencana x 100 % dan Jumlah program Renstra dibagi jumlah program yang sama dalam RPD pada tahun rencana x 100 % . Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(158/158) \times 100\% = 100\%$ dan $(158/158) \times 100\% = 100\%$ dengan rerata dari parameter tersebut adalah 100% dari target sebesar 100% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 100%.
- Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah mempunyai indikator persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti dibagi total jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah x 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(121/158) \times 100\% = 77\%$ dari target sebesar 75% atau sebesar 102,67%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan Tahun 2023 yaitu 77%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Dukungan dari eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2024 memberikan semangat bagi peserta Musrenbang untuk selalu berpartisipasi dalam penyampaian usulan-usulan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Kesadaran, kemauan dan kemampuan dan yang tinggi untuk menyampaikan aspirasi rakyat dalam pokok-pokok pikiran DPRD;
- Dukungan SDM perangkat daerah serta mitra Bappeda yang berkualitas membantu mewujudkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas;

- Dukungan sarana prasarana serta ketersediaan perangkat yang memudahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi informasi;
- Dukungan dari stakeholder Kementerian/Lembaga/Instansi vertikal dalam pelaksanaan forum FGD bersama mitra PD;
- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam kesediaannya narasumber maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan;
- Adanya dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN;
- Koordinasi dan komunikasi yang berjalan sangat baik antar Bappeda Provinsi dan Perangkat Daerah di Provinsi maupun Bappeda kabupaten/Kota.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Seringnya terjadi pergantian pejabat/personal pelaksana yang membidangi perencanaan sehingga perlu penyesuaian dan waktu pembelajaran bagi penggantinya;
- b. Banyak usulan-usulan dari perangkat daerah, kelompok masyarakat, stakeholder lainnya dari tahun sebelumnya yang belum diakomodir pemerintah provinsi sehingga ada keengganan untuk hadir dalam forum musrenbang;
- c. Revisi anggaran/Refocussing (Pengurangan dan Penambahan) secara bertahap, sehingga beberapa agenda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dan terdapat tambahan target output; sehingga terdapat tambahan target output;
- d. Usulan pokok-pokok pikiran DPRD tidak sesuai dengan kewenangan;
- e. Adanya ketidakselarasan antara perencanaan dan ketersediaan anggaran sehingga menyebabkan program baru terlaksana di triwulan terakhir;
- f. Penentuan metode dalam pemilihan penyedia jasa untuk penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang menjadi kendala dalam penyusunan dokumen;
- g. Waktu pelaksanaan terbatas dan sangat berdekatan antara kegiatan satu dengan yang lain sehingga banyak kegiatan yang digabungkan;
- h. Data-data yang dibutuhkan dalam menganalisis kondisi daerah, serta permasalahan belum tersedia secara aktual
- i. Infrastruktur teknologi yang tidak memadai menjadi tantangan dalam penerapan SIPD di daerah. Daerah masih menghadapi masalah konektivitas internet yang buruk, perangkat keras dan perangkat lunak yang kurang memadai, serta kekurangan dukungan teknis untuk mengelola infrastruktur teknologi yang kompleks

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai :

- a. Melakukan proses checks and balances terhadap perencanaan dan penganggaran sehingga implementasi program lebih efektif;
- b. Melakukan perbaikan komunikasi publik agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan semakin baik;
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan biro pengadaan barang dan jasa serta instansi yang menangani proses pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah;
- d. Menggabungkan beberapa forum diskusi dengan kegiatan-kegiatan yang mengundang perangkat daerah provinsi dalam satu kesempatan untuk mengefektifkan waktu yang tersedia;
- e. Menyediakan media serta waktu yang lebih panjang untuk pengumpulan data-data kondisi daerah;
- f. Melakukan kerjasama dengan penyedia jasa internet dan penyedia jasa perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung penerapan pemanfaatan aplikasi SIPD untuk pembangunan daerah.

➤ **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan sasaran kinerja program :

- Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai indikator persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang memperoleh skor perencanaan kinerja > 25 pada penilaian Lakip PD dibagi total jumlah PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia x 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(15/15) \times 100\% = 100\%$ dari target sebesar 100% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 100%.
- Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam mempunyai indikator persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah PD mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam yang memperoleh skor perencanaan kinerja > 25 pada penilaian Lakip PD dibagi total jumlah PD mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam x 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(10/10) \times 100\% = 100\%$ dari target sebesar 100% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 100 %.
- Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai indikator persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan yang memperoleh skor perencanaan kinerja > 25 pada

penilaian Lakip PD dibagi total jumlah PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan x 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(4/4) \times 100\% = 100\%$ dari target sebesar 100% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

- Meningkatnya rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai indikator persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang ditindaklanjuti dibagi total jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dikali 100%. Capaian indikator adalah $(65/71) \times 100\% = 92\%$ dari target sebesar 90% atau sebesar 102,22%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 92%.
- Meningkatnya rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD bidang bidang perekonomian dan sumber daya alam mempunyai indikator persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD bidang perekonomian dan sumber daya alam, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti dibagi total jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(69/75) \times 100\% = 92\%$ dari target sebesar 90% atau sebesar 102,22%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 102,22%.
- Sasaran program meningkatnya rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai indikator persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD bidang infrastruktur dan kewilayahan, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan yang ditindaklanjuti dibagi total jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(24/26) \times 100\% = 92\%$ dari target sebesar 90% atau sebesar 102,22%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 92%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Adanya komitmen dari pimpinan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan agar lebih baik;
- Dengan dukungan SDM perangkat daerah serta mitra Bappeda yang berkualitas membantu mewujudkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas;
- Perbaikan kualitas data dan informasi rutin dilakukan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium jabatan fungsional baru;
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan forum-forum perencanaan pada bidang sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas perencanaan lintas sektor.;
- c. Belum optimalnya hasil monitoring pelaksanaan kegiatan perangkat daerah sebagai rekomendasi untuk perencanaan selanjutnya;
- d. Administrasi penganggaran APBD-P yang agak terlambat mempengaruhi kepastian penjadwalan kegiatan sehingga mundur dari jadwal semula.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Menyusun peta jabatan baru;
- b. Mengoptimalkan penyelenggaraan forum-forum perencanaan pada bidang sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas perencanaan lintas sektor;
- c. Mengoptimalkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan perangkat daerah sebagai dasar rekomendasi untuk perencanaan selanjutnya

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah Dan Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah mempunyai Indikator kinerja :

- a. Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Kesekretariatan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Aparatur Yang Puas Terhadap Pelayanan Kesekretariatan Dibagi Jumlah Seluruh Aparatur X 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(62/62) \times 100\% = 100\%$ dari target 90% Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100% .
- b. Predikat Nilai SAKIP formula perhitungan indikator ini adalah Perolehan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah Oleh Inspektorat Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 79% dari target 79% Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 78% .

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Fasilitas sarana prasarana pendukung pekerjaan yang memadai;

- Faktor kepemimpinan yang baik;
- Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terkait pelaksanaan program/kegiatan;
- Koordinasi internal dan eksternal yang baik terkait pencapaian kinerja ;
- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- Area Manajemen Perubahan;
 - Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja satuan kerja
- Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Penurunan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan satuan kerja
- Area Penataan Dan Penguatan Organisasi;
 - Penurunan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal satuan kerja.
- Area Penataan Tatalaksana;
 - Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di satuan kerja
- j. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - Peningkatan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur masing-masing satuan kerja;
- k. Area Penguatan Akuntabilitas;
 - Meningkatnya kinerja satuan kerja
- l. Area Penguatan Pengawasan;
 - Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara Oleh masing-masing satuan kerja.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Defisit anggaran sehingga tidak memperbolehkan belanja modal peralatan dan mesin;
- Adanya efisiensi anggaran program dan kegiatan, terkait penyediaan sarana dan prasarana perkantoran;
- Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di satuan kerja;
- Kurangnya SDM yang kompeten sesuai peta jabatan yang telah ditetapkan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Melakukan advokasi ke Pemerintah Provinsi terkait penambahan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana perkantoran;
- Memfasilitasi Penyediaan sistem pelayanan melalui elektronik;
- Mengupayakan pelatihan dan sertifikasi terhadap SDM yang ada.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan sasaran kinerja program meningkatnya indeks kepuasan pelayanan akuntabilitas kerja Inspektat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai Indikator kinerja nilai SAKIP Inspektorat Daerah Povinsi Kepulauan Bangka Belitung formula perhitungan indikator ini adalah Predikat (Nilai) SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 80,30 dari target 79 atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan;
- Anggaran yang memadai ;
- Rencana aksi pelaksanaan kegiatan yang berjalan dinamis.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kurangnya koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan;
- Minimnya anggaran yang tersedia.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Mengoptimalkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja perangkat daerah

- Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai Indikator kinerja nilai materialitas hasil pemeriksaan di bawah 5% formula perhitungan indikator ini adalah Total seluruh temuan eksternal tahun-n yang bersifat materiil dibagi dengan total belanja APBD dikalikan 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 0,11% dari target 2% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 0,09% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Keterbukaan Informasi Publik
- Program kerja pengawasan yang terencana;
- Dukungan anggaran yang memadai;
- Dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai;

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak kompeten dalam bidang pengawasan;
- Ketersediaan anggaran pengawasan yang kurang;
- Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pengawasan yang

kurang memadai.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Mengupayakan peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan para APIP untuk mengikuti pelatihan - pelatihan;
- Meningkatkan ketersediaan anggaran pengawasan;
- Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pendukung di bidang pengawasan.

- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai Indikator kinerja Nilai hasil kapabilitas APIP dan nilai hasil evaluasi Maturitas SPIP formula perhitungan indikator ini adalah Nilai hasil evaluasi kapabilitas APIP dan nilai hasil evaluasi Maturitas SPIP pada tahun-n. penilaian Capaian kinerja untuk indikator ini adalah nilai level 3 dari target nilai level 3 atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini tetap dibandingkan pada Tahun 2023, (capaian tahun lalu). Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya untuk mencapai ke level 3 dengan pemenuhan 6 elemen yang dipersyaratkan pada penilaian kapabilitas APP level 3;
- Inspektorat secara optimal melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam rangka penerapan SPIP secara memadai.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Tidak optimal dalam melakukan administrasi pengawasan yang menjadi syarat dalam pemenuhan 6 elemen pada Penilaian Kapabilitas APIP;.
- Masih rendahnya tingkat pengetahuan pada Perangkat Daerah dalam penerapan SPIP, sehingga penerapan SPIP belum optimal.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk memenuhi seluruh elemen yang ada dalam pemenuhan kapabilitas APIP pada level 3.
- Ketegasan dari pimpinan Perangkat Daerah untuk mendorong organisasi dalam meningkatkan kinerja dan memperbaiki akuntabilitas kinerja dalam merumuskan capaian indikator kinerja Perangkat Daerah;
- Koordinasi yang lebih komprehensif lagi demi meningkatnya

penerapan dan pelaksanaan SPIP yang efektif dan efisien serta mampu mendorong kinerja OPD.

L. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK eselon 3):

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan sasaran kinerja program Menurunkan luas kawasan yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi dan meningkatkan luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola mempunyai Indikator kinerja Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air formula perhitungan indikator ini adalah $((\text{Persentase Pembangunan Seawall dan bangunan}/5) + (\text{Persentase Pembangunan Tanggul Sungai}/5) + (\text{Persentase Pembangunan Polder/Kolam Retensi}/5) + (\text{Persentase Pembangunan Embung atau Penampung Air lainnya}/5) + (\text{Persentase pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi}/5) \times 100\%)$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $((0.78\% + 4.51\% + 33.33\% + 100\% + 50.07\%)/5) \times 100\% = 37.74\%$ dari target sebesar 35.44%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 21.20 % (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Didukung sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak bersama dengan Pemerintah Daerah setempat baik sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan ,
- Rekayasa teknik dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek dan penyelesaian kendala teknis pelaksanaan di lapangan,
- Komitmen penekanan pimpinan untuk evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala dan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing PPK; Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Kegiatan pengendalian banjir yang dilaksanakan lebih kepada wilayah di pulau bangka, sehingga hal tersebut tidak dapat dimasukkan dalam indikator capaian program karena tidak dalam kewenangan provinsi,
 - Degradasi dasar sungai akibat penambangan yang tidak terkendali mempercepat sedimentasi, akibatnya banjir terus berulang ditempat yang sama.
- Program Penyelenggaraan Jalan dengan sasaran program

meningkatnya persentase kemantapan jalan mempunyai Indikator persentase kemantapan jalan formula perhitungan indikator ini adalah Panjang jalan provinsi kondisi mantap (km) dibagi total panjang jalan provinsi (km) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 94.83% dari target sebesar 91.07 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 92.86 %

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Ketersediaan anggaran yang cukup untuk karena dengan dana yang memadai, pihak penyelenggara jalan dapat melakukan pengembangan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemeliharaan efektif dan fungsional jalan dan jembatan sehingga bisa menjadi kunci dalam mencapai target indikator program penyelenggaraan jalan,
- Proses perencanaan yang matang dan terarah yang mencakup identifikasi kebutuhan jalan, penentuan prioritas, dan perencanaan anggaran secara efektif
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah: Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :
 - Terbatasnya pengalokasian anggaran program penyelenggaraan jalan terbatas, hal ini dapat membatasi kemampuan untuk melakukan pengembangan infrastruktur jalan, pemeliharaan efektif dan fungsional jalan dan jembatan yang diperlukan;

- Cuaca ekstrem, bencana alam, atau kondisi iklim yang tidak mendukung dapat menghambat pelaksanaan proyek penyelenggaraan jalan dan berpotensi merusak infrastruktur yang sudah ada;
- Perencanaan yang tidak matang, termasuk identifikasi kebutuhan yang tidak akurat dalam penentuan prioritas yang kurang tepat dan perencanaan anggaran yang tidak sesuai, dapat menghambat pencapaian target indikator.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Meningkatkan alokasi anggaran program penyelenggaraan jalan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibutuhkan,
 - Memastikan perencanaan yang lebih matang dengan melakukan studi yang cermat tentang kebutuhan infrastruktur Jalan dan Jembatan baik dalam hal prioritas dan penyusunan anggaran yang akurat,
 - Mengintegrasikan teknologi terkini dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan, seperti sistem manajemen lalu lintas, pemantauan kondisi jalan, dan sistem informasi geografis (GIS) untuk pengelolaan data infrastruktur jalan
- Program Pengembangan Perumahan dengan sasaran program terselenggaranya pengembangan perumahan mempunyai indikator kinerja Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dan Persentase penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang dilaksanakan dibagi Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang dibutuhkan) x 100%. Capaian indikator kinerja adalah 0 % dari target sebesar 20 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan Tahun 2023 yang sebesar 0 % (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tidak ada.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Tidak adanya alokasi anggaran pada program ini (anggaran 0),
- Kewenangan Provinsi pada penyediaan perumahan bagi korban bencana Provinsi menyesuaikan dengan kejadian bencana yang ditetapkan melalui SK Gubernur sebagai SK Kejadian Bencana Provinsi, di mana pada tahun 2023 yang lalu tidak terdapat

bencana Provinsi, sehingga tidak dapat mengganggu kegiatan di tahun 2024. Demikian pula relokasi program Provinsi, tidak terdapat usulan perumahan yang terdampak rencana program Provinsi, sehingga tidak dapat mengganggu kegiatan. Namun tata cara perhitungan capaian kinerja hanya berdasarkan anggaran.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Perlu penyesuaian tata cara perhitungan capaian kinerja,
- Perlu koordinasi lintas sector/OPD dan pemahaman alur kerja
- Alokasi anggaran yang sesuai rencana kebutuhan.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan sasaran program terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum mempunyai Indikator Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah dokumen perencanaan dibagi Jumlah Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum $\times 100\%$ Capaian indikator kinerja adalah 33 % dari target sebesar 33.33 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 0 % (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersedianya anggaran dalam penyusunan dokumen
- Dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten dalam kolaborasi penyampaian data eksisting dan informasi isu strategis bidang air minum.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kesulitan mendapatkan data eksisting capaian akses air minum aman dan layak yang sesuai dengan real dikarenakan jaranganya melakukan survey secara berkala

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan pihak lainnya untuk memperbaharui data akses air minum.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada Pokja PKP Kabupaten Kota dalam menyiapkan dokumen perencanaan yang baik.

- Program Kawasan Permukiman dengan sasaran program meningkatnya kualitas Kawasan permukiman mempunyai Indikator persentase luas Kawasan kumuh yang tertangani formula perhitungan indikator ini adalah Luas kawasan kumuh yang tertangani dibagi luas kawasan kumuh provinsi dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(0,456 \text{ Ha} / 142,66 \text{ Ha}) \times 100\% = 0,32\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 0.29%

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 2.05 % (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Adanya alokasi anggaran,
- Adanya data RTLH di Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Terbatasnya alokasi anggaran,
- Belum adanya perencanaan skala kawasan kumuh. Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Membuat rencana penanganan kumuh secara Kawasan sesuai kewenangan
- Mengalokasikan anggaran sesuai dokumen perencanaan

- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan sasaran program terselenggaranya pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional mempunyai Indikator Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah dibagi Rumah tangga yang berada di wilayah lintas Kab/Kota yang ditetapkan) x 100%. Capaian indikator kinerja adalah 0 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan Tahun 2023 yang sebesar 0 % (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tidak ada.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Tidak adanya alokasi anggaran pada program ini (anggaran 0).
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- Perlu penyesuaian tata cara perhitungan capaian kinerja,
- Perlu koordinasi lintas sector/OPD dan pemahaman alur kerja

- Alokasi anggaran yang sesuai rencana kebutuhan.
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan sasaran program terselenggaranya peningkatan prasarana , sarana dan utilitas umum (PSU) mempunyai Indikator Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah perumahan yang terfasilitasi dibagi Total perumahan dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(3 \text{ lokasi} / 16 \text{ lokasi}) \times 100\% = 18.75\%$ dari target sebesar 18.75%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 25% (capaian tahun lalu). Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
 - Adanya alokasi anggaran
 - Adanya lokasi yang terintegrasi dengan program pemda kab/kota
 Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
 - Belum adanya pembagian wilayah kerja sesuai kewenangan dikarenakan pekerjaan PSU dapat dilaksanakan oleh banyak pihak.
 - Alokasi anggaran yang terbatas.
 Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
 - a. Mendorong pemerintah pusat untuk dapat mendefinisikan kewenangan dan program peningkatan PSU dengan kriteria yang jelas dan pengukuran kinerja yang sesuai
 - b. Alokasi anggaran yang sesuai.
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan sasaran program terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah mempunyai Indikator persentase rumah tangga yang bersanitasi formula perhitungan indikator ini adalah jumlah rumah tangga yang bersanitasi dibagi jumlah total rumah tangga yang membutuhkan akses sanitasi dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 28,57% dari target sebesar 12 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 3.55 % (capaian tahun lalu). Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
 - Alokasi dana untuk kegiatan sanitasi yang bertambah dari tahun 2023,
 - Kolaborasi pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dalam memprioritaskan percepatan capaian akses sanitasi layak bagi masyarakat.
 - Terlaksananya kegiatan program percepatan sanitasi permukiman di Kabupaten/Kota yang diinisiasi oleh

Pemerintah Pusat.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Alokasi dana untuk kegiatan sanitasi masih terbatas, belum menjadi prioritas,
- Data rumah tangga yang belum memiliki sanitasi belum menggambarkan kebutuhan secara real di lapangan,
- Program percepatan sanitasi permukiman belum menjadi prioritas kegiatan di pemerintah kabupaten dan desa

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Menyampaikan pemahaman kepada kepala daerah dan kepala OPD untuk dapat memprioritaskan kegiatan SPM khususnya bidang sanitasi,
- Melaksanakan pembinaan kepada Pokja PKP Kabupaten Kota untuk melaksanakan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP),
- Mendorong pemerintah kabupaten untuk updating data kebutuhan rumah tangga yang belum bersanitasi dan memvalidasi data tersebut.

- Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan sasaran program meningkatkan tenaga ahli yang terlatih, meningkatkan tingkat kepuasan layanan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi dan tersedianya kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi mempunyai Indikator rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi formula perhitungan indikator ini adalah $A \text{ (Tenaga Ahli} \times 70\%) + B \text{ (Sipjaki} \times 30\%)$. Capaian indikator kinerja adalah $A \text{ (8,92\%)} + B \text{ (16,50\%)} = 25,42\%$ dari target sebesar 36.56%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 23.59 %. Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Komitmen dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi dan meningkatkan layanan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi,
- Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan jasa konstruksi ,
- Responsif dalam layanan penyelenggaraan jasa konstruksi

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Tahun 2023 jumlah kebutuhan Tenaga Ahli adalah sebanyak 1001 orang. Kemudian pada Tahun 2024 jumlah kebutuhan Tenaga Ahli adalah sebanyak 853 orang. Hal ini membuktikan bahwa jumlah Ketersediaan Tenaga Ahli Konstruksi yang bersertifikat masih menjadi kebutuhan yang sangat tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meskipun jumlah tahun 2024 lebih sedikit dari jumlah tahun 2023 namun kebutuhannya sesuai dengan perbandingan jumlah proyek, dimana jumlah proyek tahun 2023 adalah 638 paket dan tahun 2024 adalah 444 paket. Kebutuhan akan Tenaga Ahli ini akan terus ada setiap tahunnya karena setiap tahun pasti ada proyek yang tersedia, sehingga dibutuhkan Tenaga Ahli yang bersertifikat.
- Sertifikat Tenaga Ahli memiliki jangka waktu untuk tetap aktif dan dapat tidak berlaku lagi (expired) sehingga Tenaga Ahli yang sudah pernah memiliki Sertifikat Ahli sebelumnya mungkin akan membutuhkan Sertifikasi Tenaga Ahli lagi dikemudian hari agar tetap dapat bekerja di bidang konstruksi sesuai dengan keahliannya

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Mengoptimalkan layanan penyelenggaraan jasa konstruksi,

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Kementerian Pekerjaan Umum,
 - Melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dengan melibatkan Stakeholder Sub-Urusan Jasa Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Program Penataan Bangunan Gedung dengan sasaran terselenggaranya penataan bangunan gedung mempunyai indikator kinerja persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah bangunan gedung yang diselenggarakan} / \text{Jumlah bangunan gedung yang direncanakan}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(3/3) \times 100\% = 100\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 100 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 64.71 % (capaian tahun lalu). Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- Adanya alokasi anggaran
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- Mengikuti alur perencanaan pembangunan Gedung
 - Alokasi anggaran sesuai rencana kebutuhan.

M. Meningkatnya kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib tata Ruang

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK eselon 3):

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan sasaran program terselenggaranya kegiatan penataan ruang mempunyai indikator Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang formula perhitungan indikator ini adalah $\text{Kesesuaian Rencana tata Ruang} / \text{Realisasi Pemanfaatan ruang} \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah 0.65% dari target sebesar 0.65%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 0.6 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah dan peraturan Menteri ATR/BPN yang merupakan pedoman yang bisa memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan tata ruang di Indonesia;

- Koordinasi dan sinergi yang baik dengan organisasi perangkat daerah lainnya dan Kementerian/Lembaga;
- Koordinasi dan sinergi yang baik dengan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- Adanya Forum Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aktif memberikan masukan dan saran terhadap isu dan permasalahan tata ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Adanya sengketa batas wilayah yang belum terselesaikan dengan Provinsi Kepulauan Riau yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044;
- Masih belum maksimalnya sosialisasi informasi terkait tata ruang ke masyarakat;
- Belum diakomodirnya kewenangan Gubernur terkait penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA);
- Kurang optimalnya pelaksanaan penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Penataan Ruang (PPNS PR);
- Belum adanya peraturan di daerah khusus di sektor tata ruang yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN), misalnya yang mengatur insentif dan disinsentif, pengawasan dan pengendalian tata ruang; dan
- Belum memiliki sarana dan prasarana di bidang teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi tata ruang yang komprehensif.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai :

- Mensinkronkan dokumen perencanaan provinsi dengan kabupaten/kota;
- Mendorong untuk percepatan penyusunan RTRW dan

- Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Menggiatkan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat, dewan perwakilan rakyat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang perlu disinergikan untuk mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
 - Mengoptimalkan peran serta Forum Penataan Ruang sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - Mempersiapkan personil/anggota PPNS-PR yang profesional dengan bekal pendidikan dan pembinaan yang berkelanjutan dan berkualitas;
 - Fasilitas (sarana dan prasarana) dan dukungan anggaran yang memadai dalam rangka mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang;
 - Menjalin kemitraan strategis dengan pihak kepolisian, Kejaksaan, lembaga peradilan, dinas terkait, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi dalam upaya penegakan hukum bidang penata ruang;
 - Mendorong percepatan penyusunan peraturan daerah tentang insentif dan disinsentif yang aplikatif di lapangan baik di provinsi maupun di kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - Mendorong diakomodirnya kewenangan Gubernur terkait penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).
- Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan sasaran kinerja program terselenggaranya Kegiatan Pertanahan mempunyai Indikator kinerja persentase program pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempunyai formula perhitungan indikator ini adalah dihitung luasan pengadaan tanah dibagi luasan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 30 % dari target 30 % atau sebesar 100 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 33.33 % (capaian tahun lalu).
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- Tersedianya peraturan dan petunjuk teknis dari kementerian ATR/BPN terkait pengadaan tanah untuk

kepentingan umum;

- Adanya kesediaan dari Masyarakat yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk menghibahkan tanahnya dengan sukarela tanpa ganti rugi.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Adanya sengketa tanah antar pihak di masyarakat, yang saling mengakui pemilik dari sebidang tanah yang sama, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikannya;
- Terdapat masyarakat yang belum bersedia melepaskan tanahnya yang terkena obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- Harga pasaran yang jauh melebihi taksiran harga yang wajar;
- Adanya rasionalisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sehingga kegiatan tersebut tidak dapat di lanjutkan sehingga capaian kinerja tahun 2024 lebih rendah dari capain kinerja tahun 2023.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Inventarisasi kebutuhan tanah secara komprehensif;
- Membuat skala prioritas pengadaan tanah

➤ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan sasaran program terselenggaranya kegiatan pertanahan mempunyai indikator persentase penyelesaian sengketa tanah garapan formula perhitungan indikator ini adalah jumlah kasus yang terselesaikan dibagi jumlah kasus yang diinventarisasi dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 8 % dari target sebesar 20 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 14.29 % . Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Adanya Kerjasama yang baik dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung terkait dukungan data kepemilikan tanah ;
- Koordinasi yang baik dengan Kantor Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka terkait data kepemilikan tanah.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Adanya pemilik tanah yang alamat tempat tinggalnya tidak diketahui/berubah;
- Belum adanya kesepakatan antar para pihak yang bersengketa;
- Aset tanah milik Pemerintah Provnsi Kepulauan Bangka

Belitung belum terdokumentasi dengan baik.

- Dokumen rencana hibah tanah terkait dengan jalan Alexander belum ditemukan kembali sejak ditandatanganinya kesediaan menghibah lahan di ruas Jalan Alexander sejak tahun 2018.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Mensertifikatkan asset tanah yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Inventarisasi tanah yang masih bersengketa.
- Menyiapkan dokumen kesediaan menghibah lahan di ruas Jalan Alexander

- Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan sasaran program terselenggaranya kegiatan pertanahan mempunyai indikator presentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan formula perhitungan indikator ini adalah jumlah ganti rugi dan santunan tanah yang terselesaikan dibagi jumlah daftar penerima ganti rugi dan santunan tanah dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 51,4 % (dari target sebesar 85 %). Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 25 % .

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Koordinasi yang baik antar instansi terutama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait prosedur penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Tidak Tersedianya anggaran yang cukup untuk membayarkan ganti kerugian yang masih belum terselesaikan;
- Adanya pemilik tanah yang alamat tempat tinggalnya tidak diketahui/berubah;
- Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terdokumentasi dengan baik.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Menggunakan tim penilai tanah yang berlisensi untuk menilai objek pengadaan tanah dengan komprehensif;
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar kegiatan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dapat terlaksana dengan baik sesuai

rencana.

N. Menurunkan Resiko Bencana

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung program-program sebagai Berikut :

- **Program Penanganan Bencana** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai Indikator kinerja Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial dibagi jumlah populasi korban bencana x 100 %. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(77/77) \times 100\% = 100,00\%$ dari target 77 atau sebesar 25.15 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah/sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100.00 % (capaian tahun lalu). (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2024 diakhir bulan Oktober 2024 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- Adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi

kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan antar bidang teknis pada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana, mempunyai indikator kinerja persentase penanganan Pra Bencana formulasi perhitungan indikator ini adalah $(\text{jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(77 \times 100\%)$ dari target 42,86 atau sebesar 612%.
- Meningkatkan upaya kedaruratan dan penyiapan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana mempunyai indikator persentase penanganan tanggap darurat bencana. Formula perhitungan indikator ini adalah $\frac{\text{jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana}}{\text{jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi}} \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(7/7 \times 100\%) = 100\%$ dari target 100% atau sebesar 100%.
- Meningkatkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana mempunyai indikator kinerja persentase penanganan pasca bencana. Formula perhitungan indikator ini adalah $\frac{\text{jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pasca bencana}}{\text{jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi yang terkena dampak bencana}} \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(7/7 \times 100\%) = 100\%$ dari target 71,5 atau sebesar 139,86%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Telah tersusunnya dokumen kebencanaan yaitu kajian risiko bencana, dokumen Rencana Penanggulangan bencana dan dokumen rencana Kontijensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Melibatkan multistakeholders dalam memecahkan permasalahan terkait kebencanaan.
- Penanggulangan bencana menjadi salah satu sasaran RPD Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- Minimnya alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana.

- Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai.
- belum optimalnya koordinasi dan pembagian peran antar multistakeholders terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana.
- Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM terkait teknis penanggulangan bencana.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai :

- Mencari sumber pendanaan lainnya diluar APBD untuk penanggulangan bencana dengan mekanisme *Pooling Fund* bencana (Dana bersama Penanggulangan Bencana)
- Memaksimalkan peran dari unsur pentahelix dalam ketangguhan bencana.
- Melakukan koordinasi dan harmonisasi intensif baik secara internal BPBD maupun eksternal dengan multistakeholders lainnya.
- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM penanggulangan bencana.

O. Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Keberhasilan capaian Indikator Indeks Desa Membangun tersebut didukung program-program sebagai Berikut :

- Program Penataan Desa dengan sasaran kinerja program meningkatnya penataan desa yang dibina, dengan indikator persentase penataan desa yang dibina, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah penataan desa yang dibina dibandingkan dengan jumlah penataan desa yang akan dibina dikali 100. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $0/1 \times 100\% = 0,00\%$ dari target 1 dokumen atau sebesar 0,00 %.

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah/sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100,00 % (capaian tahun lalu). (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini

adalah:

- Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2024 diakhir bulan Oktober 2024 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- Adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan antar bidang teknis pada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan sasaran program meningkatnya kerjasama desa, dengan indikator persentase kerjasama desa yang dilaksanakan, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah kerjasama antar desa yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kerjasama antar Desa yang akan dilaksanakan dikali 100. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $1/1 \times 100\% = 100,00\%$ dari target 1 dokumen atau sebesar 100,00 %.

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah/sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100,00 % (capaian tahun lalu). (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;

- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2024 diakhir bulan Oktober 2024 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- Adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan antar bidang teknis pada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan sasaran program Meningkatnya Penataan Desa, dengan Indikator Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Dibina, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Administrasi Pemerintahan Desa yang dibina dibandingkan dengan Jumlah Administrasi Pemerintahan Desa yang akan dibina dikali 100. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $14/14 \times 100\% = 100,00\%$ dari target 14 dokumen atau sebesar 100,00 %.

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah/sama *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100,00 % (capaian tahun lalu). (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;

- Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2024 diakhir bulan Oktober 2024 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- Adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan antar bidang teknis pada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan sasaran program Meningkatkan lembaga kemasyarakatan yang aktif, dengan Indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dan ditingkatkan dibandingkan dengan Jumlah lembaga kemasyarakatan

yang aktif yang akan ditingkatkan dikali 100. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $7/7 \times 100\% = 100,00\%$ dari target 7 laporan atau sebesar 100,00 %.

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah/sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100,00 % (capaian tahun lalu). (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2024 diakhir bulan Oktober 2024 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- Adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan antar bidang teknis pada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.

P. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

Keberhasilan capaian Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk tersebut didukung program-program sebagai Berikut :

- Program Pendaftaran Penduduk dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan mempunyai Indikator kinerja Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) formula perhitungan indikator ini adalah Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga + Persentase Kepemilikan KTP-el + KIA di bagi 3 jenis dok kependudukan dan dikalikan 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(90,92/89,80) \times 100\% = 101,25\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 89,80% atau sebesar 101,25 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 89,03% (capaian tahun lalu). (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh kabupaten/kota yang memperbanyak pelayanan melalui aplikasi, email dan media sosial.
- Meningkatnya pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, pembinaan guna meningkatkan kapasitas aparatur untuk memperbaiki kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- Sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak baik, sosialisasi ini dilakukan secara klasikal, radio, banner, flyer, maupun media sosial.
- Memberikan pinjaman berupa alat rekam mobile (mobile enrollment) untuk meningkatkan cakupan pelayanan Pendaftaran penduduk.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah dirasakan masih sulit menjangkau anak-anak yang akan direkam,
- masih adanya keterbatasan alat rekam dan cetak serta bahan pendukungnya lainnya pada Dinas Dukcapil kabupaten/kota
- kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kematian masih rendah
- masih ada masyarakat yang sudah memiliki buku nikah namun belum melaporkan atau memutakhirkan status perkawinannya ke Dinas Dukcapil

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Penganggaran yang cukup untuk menggantikan perangkat keras

di Disdukcapil Kabupaten/Kota,

- Meningkatkan anggaran untuk memfasilitasi Disdukcapil kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan terpadu,
 - Melaksanakan secara lebih massif sosialisasi kepada masyarakat.
- Program Pencatatan Sipil dengan sasaran kinerja program Meningkatnya kepemilikan akta pencatatan sipil mempunyai Indikator kinerja Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) formula perhitungan indikator ini adalah Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran + Persentase Kepemilikan Akta Kematian + Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan di bagi 3 jenis dok kependudukan dan dikalikan 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(100/89,50) \times 100\% = 111,73\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 89,50 atau sebesar 111,73%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 99,84% (capaian tahun lalu). (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak baik secara klasikal, baliho, flyer, maupun media sosial
- Pelaksanaan pelayanan jemput bola dilaksanakan lebih massif dari tahun sebelumnya
- Pelayanan secara *online* pada Dinas Dukcapil kabupaten/kota masih tetap dilakukan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kematian masih rendah
- Masih ada masyarakat yang sudah memiliki buku nikah belum melaporkan atau memutakhirkan status perkawinannya ke Dinas Dukcapil

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Kegiatan sosialisasi harus tetap dilakukan, sehingga perlu anggaran yang cukup agar sosialisasi ini akan lebih massif dan dengan beragam media
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan oleh PD dan Sektor lain mempunyai Indikator kinerja Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan perjanjian kerjasama formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PD Provinsi dan sektor lain yang memanfaatkan data dan dokumen kependudukan dibagi Jumlah OPD Provinsi (26 PD) dan 9

sektor lain di kali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(37,14/37,14) \times 100\% = 100\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 37,14 atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 31,43 % (capaian tahun lalu). (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- ketersediaan anggaran meskipun sangat terbatas
- data kependudukan yang sudah dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Data Konsolidasi Bersih) sangat diperlukan oleh PD dalam membuat perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- terjalannya komunikasi dengan semua PD dan instansi pengguna.
- sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak baik secara klasikal, baliho, flyer, maupun media sosial berjalan cukup efektif.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Beberapa perangkat daerah masih enggan dalam pemanfaatan data melalui hak akses
- Ada regulasi yang mewajibkan perangkat daerah pengguna data kependudukan melalui hak akses harus memiliki standar nasional indonesia atau ISO 270001
- Perangkat daerah pengguna harus menyediakan anggaran sendiri jika akan menerapkan SNI atau ISO 270001

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Perangkat Daerah diharapkan memiliki kesadaran dan kemauan untuk dapat memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses
- Kewajiban memiliki SNI atau ISO 270001 diharapkan hanya diterapkan kepada Dinas Kominfo yang memiliki jaringan komunikasi saja, tidak kepada kepada PD pengguna
- Mendorong agar PD pengguna data kependudukan dapat menanggarkan yang cukup untuk menerapkan SNI dan ISO 270001
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan sasaran kinerja program Meningkatnya penyajian data kependudukan tingkat provinsi mempunyai Indikator kinerja Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi formula perhitungan indikator ini adalah Jenis dokumen penyajian data dibagi target penyajian data setiap tahun dikalikan 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(100/100) \times 100\% = 100\%$ (contoh perhitungan persentase capaian

program) dari target 100% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100% (capaian tahun lalu). (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- tersedianya regulasi atau aturan terkait pedoman dan tata cara pembuatan profil kependudukan dan buku agregat
- adanya dukungan anggaran yang cukup untuk pembuatan buku profil dan buku agregat

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Data Konsolidasi Bersih per semester yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri masih memerlukan waktu cukup lama
- Proses penyusunan profil kependudukan dan buku agregat masih secara manual

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Meminta kepada Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat merilis Data Konsolidasi Bersih lebih cepat
- Mendorong agar Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat membuat aplikasi penyusunan profil kependudukan dan agregat

Q. Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Keberhasilan capaian Indikator Persentase Angka Kemiskinan tersebut didukung program-program sebagai Berikut :

- Program Pemberdayaan Sosial dengan sasaran program Meningkatnya PMKS/PSKS yang terberdayakan dengan Indikator Persentase PPKS/PSKS yang terberdayakan, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PSKS yg terberdayakan dibandingkan dengan Jumlah PSKS yang ada dikali 100. Pada tahun 2024 diselenggarakan Pemberdayaan Sosial dengan capaian kinerja untuk indikator ini adalah $455/455 \times 100\% = 100,00\%$ dari target 455 orang atau sebesar 100,00 %.

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama/~~lebih tinggi/rendah~~ dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100,00 % (capaian tahun lalu)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang

dilaksanakan;

- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2024 diakhir bulan Oktober 2024 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- Adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan antar bidang teknis pada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan sasaran program Meningkatnya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani dengan Indikator Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial mempunyai Indikator Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani dibandingkan dengan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang akan yang di ditangani dikali 100. Capaian indikator kinerja adalah $(0/2) \times 100\% = 0,00\%$ dari target 2 orang atau sebesar 23.28 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 11,90 % (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2024 diakhir bulan Oktober 2024 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- Adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;
- Tidak ada klien yang mendapatkan pelayanan pada Kegiatan tersebut.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan antar bidang teknis pada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Program Rehabilitasi Sosial dengan sasaran program Meningkatnya PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti, mempunyai Indikator :
- Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti,

formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah dibandingkan dengan Jumlah PMKS yang akan yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah dikali 100. Pada tahun 2024 diselenggarakan Rehabilitasi sosial dengan capaian kinerja untuk indikator ini adalah $139/139 \times 100\% = 100,00\%$ dari target 139 orang atau sebesar 30,53 %;

- Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Pemerintah (UPTD. PSBS), formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun dibandingkan dengan Jumlah PMKS yang akan yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun dikali 100. Pada tahun 2024 diselenggarakan Rehabilitasi sosial dengan capaian kinerja untuk indikator ini adalah $28/31 \times 100\% = 90,32\%$ dari target 31 orang atau sebesar 29,60 %.
- Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di PSBL, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Sosial Bina Laras dibandingkan dengan Jumlah PMKS yang akan yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Sosial Bina Laras dikali 100. Pada tahun 2024 diselenggarakan Rehabilitasi sosial dengan capaian kinerja untuk indikator ini adalah $20/20 \times 100\% = 100,00\%$ dari target 20 orang atau sebesar 35,00 %.
- Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 104,02 % (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu

adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2024 diakhir bulan Oktober 2024 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;

- Adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;
- Adanya kegiatan yang bersifat respon kasus, sehingga tidak ada klien yang mendapatkan pelayanan pada Kegiatan tersebut.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan antar bidang teknis pada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan sasaran program meningkatnya PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dengan Indikator Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial mempunyai Indikator Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dibandingkan dengan jumlah PMKS yang akan mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dikali 100. Capaian indikator kinerja adalah $(360.012/360.012) \times 100\% = 100,00\%$ dari target 360.012 orang atau sebesar 35,28 %.

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 99,83 % (capaian tahun lalu)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;

- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2024 diakhir bulan Oktober 2024 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- Adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan antar bidang teknis pada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan sasaran program Meningkatnya TMP yang dikelola dengan Indikator Prosentase TMP yang dikelola, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah TMP yang dikelola dibandingkan dengan Jumlah TMP yang ada dikali 100. Pada tahun 2024 diselenggarakan Pemberdayaan Sosial dengan capaian kinerja untuk indikator ini adalah $1/1 \times 100\% = 100,00\%$ dari target 1 TMP atau sebesar 100 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah/sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100,00 % (capaian tahun lalu)

- Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2024 diakhir bulan Oktober 2024 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- Adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan antar bidang teknis pada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

R. Meningkatkan Kesempatan Kerja

Keberhasilan capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut didukung program-program sebagai Berikut :

- Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan sasaran kinerja program pencari kerja yang dibutuhkan/ditempatkan mempunyai

Indikator kinerja meningkatnya persentase Dokumen perencanaan ketenagakerjaan kabupaten/kota formula perhitungan indikator ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen RTKD}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \times 100 \% \text{ Capaian kinerja untuk indikator ini adalah}$$

Jumlah Kabupaten/Kota (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 100 % atau sebesar 0 %. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 7,1 % (capaian tahun lalu). (siapkan PK eselon 3)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Komitmen Kabupaten/Kota dalam menyusun RTKD dan mereview setiap tahunnya
- Ketersediaan anggaran APBD untuk RTKD
- Program Perluasan Kesempatan Kerja Informal baik oleh Kemnaker maupun lintas OPD tertulis
- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Alokasi anggaran APBD yang terbatas sehingga review setiap tahun sulit unyuk dilaksanakan.
- Kurangnya dukungan dari OPD terkait dalam data dukung.
- Keterbatasan Anggaran untuk program/kegiatan Penempatan Tenaga Kerja .
- Keterbatasan SDM yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja.
- Masih kurangnya kerjasama lintas OPD dan dunia usaha.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Mengupayakan Alokasi Anggaran tersedia.
- Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dan lintas OPD
- Meningkatkan SDM aparatur pengantar kerja/petugas antar kerja baik secara kuantitas/ kualitas
- Meningkatkan dukungan sector dunia usaha dalam kerjasama penempatan tenaga kerja.

S. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

Keberhasilan capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tersebut didukung program -program sebagai Berikut :

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan sasaran kinerja program Peningkatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai Indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersusun, formula perhitungan indikator ini adalah (dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun)/(dokumen perencanaan lingkungan hidup yang

direncanakan) $\times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(5/5) \times 100\% = 100\%$ dari target 100% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersusunnya Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi 2 Dokumen (Dokumen Pelaksanaan Verifikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respons IKLH Kabupaten/Kota dan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD);
- Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi (1 Dokumen) dan proses Validasi KLHS RPJMD Kabupaten/Kota (1 Dokumen);
- Terlaksananya validasi KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota (1 Dokumen);

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Tidak terdapat kendala yang signifikan, mengacu pada Permen ATR Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, penyusunan Materi Teknis dan KLHS disusun secara bersamaan, namun materi teknis dari pemakarsa (tim pokja tata ruang) mengalami berbagai perubahan (*Iteratif*) seiring dengan tahapan proses penyusunan materi teknis RTRW, sehingga proses penyusunan KLHS harus menyesuaikan target dan tahapan penyusunan dari tim penyusun RTRW.
- Terdapatnya regulasi baru Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, sehingga membutuhkan penyesuaian dan peningkatan kompetensi bagi validator dan aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk proses dan penyusunan KLHS sesuai Permen LHK yang baru.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Fugsi koordinasi kedepan harus lebih ditingkatkan sehingga proses penyusunan dan target kerja lebih optimis sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan.
- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai Indikator kinerja :
 - Indikator kinerja Persentase Titik Sampling Uji Kualitas Lingkungan formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah titik sampling uji kualitas lingkungan yang dipantau}) / (\text{Jumlah$

seluruh titik sampling uji kualitas lingkungan) x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(21/70) \times 100\% = 30\%$ dari target 62% atau sebesar 48,38%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 56,00%

- Indikator kinerja Persentase Dokumen Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Rekomendasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Formula perhitungan indikator ini adalah Dihitung Jumlah Rekomendasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca yang tersusun. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 1 rekomendasi dari target 1 atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100% .
- Indikator kinerja Persentase Pengujian Sampel Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani, formula perhitungan indikator ini adalah Formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah sampel yang terlayani}) / (\text{Jumlah sampel target}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(1.617 / 2.200) \times 100\% = 73,50\%$ dari target 100% atau sebesar 73,50%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 123%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersedianya laboratorium lingkungan yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan terregistrasi oleh KLHK.
- Tersedianya alat dan SDM, terinputnya data hasil inventarisasi emisi gas rumah kaca kewenangan provinsi di sektor Energi, IPPU, AFOLU dan limbah yang diolah dalam aplikasi signsmart KLHK.
- Tersedianya sapras yang memadai dan SDM yang kompeten di bidang pengambilan dan pengujian sample parameter kualitas lingkungan di Laboratorium Lingkungan Hidup.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kurangnya sinergitas stakeholder terkait didalam upaya meningkatkan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- Data aktivitas sektor Energi, IPPU, AFOLU dan limbah yang kumpulkan dalam kegiatan inventarisasi emisi gas rumah kaca kewenangan provinsi masih terbatas dan anggaran terbatas
- Faktor penghambat tidak tercapainya target pelayanan di Laboratorium Lingkungan Hidup:

- Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 19 Februari 2024, belum ada Peraturan Gubernurnya sebagai Juknis atau Juklak Perda tersebut., sehingga UPTD Laboratorium Lingkungan belum menerima layanan pengambilan dan pengujian sampel parameter kualitas lingkungan sejak Januari sd Februari 2024. Menyebabkan Hilangnya jumlah pelanggan sebagai penyumbang terbesar PAD yang lakukan pengambilan dan pengujian sample parameter kualitas lingkungan pada UPTD Laboratorium Lingkungan.
- Bakuda baru memberikan informasi perihal pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah melalui surat Nomor 974/463/BAKUDA tanggal 26 Februari 2024. Untuk itu, UPTD Laboratorium Lingkungan baru membuka kembali layanan pengambilan dan pengujian sampel parameter kualitas lingkungan pada tanggal 4 Maret 2024, meskipun Pergub sebagai turunan dari Perda PDRD 2024 tersebut belum terbit;
- Berkurangnya perusahaan tambak udang yang lakukan pengambilan dan pengujian di UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Kep. Bangka Belitung, karena banyak yang sudah beroperasi dan memproduksi belum memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha (estimasi 50%), sehingga tidak ada kewajiban yang mengikat untuk dilakukan pengambilan dan pengujian sampel parameter kualitas lingkungan.
- Belum ada Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) yang mengatur tentang Tata Kelola Tambak Udang di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang menjadi pedoman dalam melaksanakan usaha tambak udang. Dinas Teknis *Leading Sector* terkait tambak udang harus menyusun PERKADA tersebut.
- Ada beberapa perusahaan sawit, smelter dan tambak udang sudah tidak lagi beroperasi, karena pemilik perusahaan tersebut terkena kasus hukum, yaitu : CV Mutiara Alam Lestari, PT. Mutiara Hijau Lestari, CV. Gunung Prima dan PT. Bakti Putra Babel, yang sebelumnya adalah pelanggan Laboratorium Lingkungan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Agar ketersediaan anggaran dapat disesuaikan dengan perencanaan yang telah dilakukan guna tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

- Pelaksanaan pemantauan menyesuaikan dengan rencana teknis yang telah direncanakan.
 - Upaya yang akan dilakukan Laboratorium Lingkungan Hidup, melakukan koordinasi kepada pelanggan yang tahun 2024 tidak lagi lakukan pengujian di UPTD Laboratorium Lingkungan agar kembali dapat melakukan kerjasama dengan UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas terkait, segera menyusun dan menerbitkan PERKADA yang mengatur tentang Tata Kelola Tambak Udang di Provinsi Kep. Bangka Belitung, karena salah satu peningkatan PAD berasal dari kegiatan usaha tambak udang.
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai Indikator kinerja Persentase Ketaatan Usaha/ Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Usaha atau Kegiatan yang taat}) / (\text{Jumlah Usaha atau Kegiatan yang diawasi}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(29/100) \times 100\% = 29\%$ dari target 100% atau sebesar 29%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 75%.
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- Adanya sistem pelaporan secara online melalui sistem SIMPEL (KLHK RI).
 - Adanya peraturan perundangan bidang lingkungan hidup yang mengatur kewajiban pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
- Kurangnya SDM PPLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rasio antara SDM PPLH dengan jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan tidak terpenuhi.
 - Regulasi antar sektor Lingkungan Hidup dan sektor lainnya kurang selaras;
 - Tidak adanya super admin daerah untuk Sistem Amdalnet, sehingga koordinasi terkait sistem agak terhambat
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- Agar ketersediaan anggaran dapat disesuaikan dengan target pengawasan yang telah direncanakan.

- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Kelompok Masyarakat yang aktif dan Mandiri Indikator kinerja Persentase Kelompok Swadaya Masyarakat Yang Aktif Dan Mandiri, formula perhitungan indikator ini adalah (jumlah kelompok swadaya masyarakat (Bank sampah) yang aktif dan mandiri dibandingkan dengan jumlah kelompok swadaya masyarakat yang teridentifikasi dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(25/35) \times 100\% = 71,42\%$ dari target 70% atau sebesar 110%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- terselenggaranya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi melalui:
 - Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Lembaga/Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar terkait PPLH dengan diberikan workshop pengelolaan sampah menuju kota bersih teduh dan berkelanjutan sebanyak 35 lembaga.
 - Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan terhadap sekolah yang melaksanakan gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) sebanyak 156 sekolah setingkat SMA/SMK/MA sederajat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendampingan juga dilakukan kepada pramuka saka kalapataru dan green generation Bangka Belitung.
 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi. Melibatkan 250 orang dalam upaya kampanye kurangi sampah plastik saat HPSN 2024 dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di 7 Kabupaten/Kota sebanyak 210 orang tentang pengelolaan bank sampah.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Penyelenggaraan peningkatan kapasitas kepada lembaga masyarakat belum menyentuh ke masyarakat yang berada di pulau terpisah dengan pulau - pulau kecil karena terkendala dengan sumber daya terutama anggaran;
- Perkembangan kelompok pengelola bank sampah kurang optimal karena provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan kepulauan, tidak terdapat industri daur ulang dan sangat bergantung pada kondisi para pengepul barang bekas terkait

harga barang.

- Perbedaan persepsi dari tim pembina gerakan PBLHS dan pihak sekolah terkait pelaksanaan gerakan jadi pendampingan harus intensif dari tim pembina provinsi, namun terkendala dengan ketersediaan SDM yang belum seimbang dengan banyaknya sekolah serta ketersediaan dana operasional pendampingan belum memadai.
- Model Best practice yang bisa ditiru oleh para penggiat lingkungan masih terbatas di dalam provinsi kepulauan bangka belitung sehingga harus belajar dari provinsi lain yang mana dibutuhkan anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas dan peningkatanketerampilan kelompok.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Meningkatkan kemitraan kelompok/lembaga/sekolah dengan pihak ketiga/dunia usaha
 - Mendorong kepala daerah untuk mengoptimalkan program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya PPLH.
 - Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder lain (OPD/LSM/Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam PPLH di daerah pulau-pulau kecil.
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan sasaran kinerja program Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi, mempunyai Indikator kinerja Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan, formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{entitas yang diberikan penghargaan}) / (\text{entitas yang dilakukan penilaian}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(3/3) \times 100\% = 100\%$ dari target 80% atau sebesar 125%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:
 - Penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 9 sekolah;
 - Penghargaan Bank Sampah berkinerja baik sebanyak 9 bank sampah;
 - Penghargaan kepada green generation bangka belitung yang memperoleh penghargaan *the best development regional* di acara kemah Hijau Nasional *green generation* tahun 2024 di kalimantan Selatan sebanyak 3 anak anggota green

generation bangka belitung.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Persepsi kelompok masyarakat/ sekolah terhadap sebuah penghargaan masih berorientasi pada hasil bukan proses, sehingga perlu secara intensif memotivasi dan merefresh pemahaman sasaran;
- Pemberian penghargaan baru berupa sertifikat sehingga kurang memberikan motivasi kepada penerima penghargaan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Perlu pemeliharaan pemahaman terkait sebuah penghargaan kepada masyarakat secara intensif;
 - Bentuk penghargaan perlu ditingkatkan dari sertifikat/piagam ke hadiah dana replika, dana pembinaan, barang, atau kemitraan.
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan sasaran kinerja program tersusunnya dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, mempunyai Indikator kinerja persentase tersusunnya dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, formula perhitungan indikator ini $(\text{jumlah dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati tersusun}) / (\text{jumlah total dokumen rencana keanekaragaman hayati}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(1/1) \times 100\% = 100\%$ dari target 100% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Telah tersusunnya profil keanekaragaman hayati sebagai gambaran potensi keanekaragaman hayati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
- Terdapat lembaga/instansi baik pemerintah ataupun non pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bergerak dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- Keterbatasan dan *refocusing* anggaran sehingga menjadi pertimbangan pengambil kebijakan untuk mengalokasikan anggaran ke program kegiatan yang sangat diprioritaskan.
- Sinergitas dan koordinasi antar lembaga/instansi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi masih belum berjalan secara maksimal;

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai :

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sudah menjadi indikator pembangunan di daerah sehingga diharapkan alokasi anggaran dapat menjadi sangat prioritas.
 - Menggali informasi dan potensi sumber pendanaan dari luar yang mendukung upaya pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Pengelolaan B3 dan Limbah Limbah B3), mempunyai Indikator kinerja Persentase Pengelolaan B3 dan Limbah Limbah B3, formula perhitungan indikator ini adalah (Bahan Bahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Bahan Bahaya Beracun (Limbah B3) yang dikelola) / (Total Bahan Bahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Bahan Bahaya Beracun (Limbah B3) x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(14.350/16.204) \times 100\% = 88,56\%$. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 88,56%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Adanya sistem informasi pengelolaan Limbah B3 yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kementerian LHK Republik Indonesia.
- Adanya asistensi dan pendampingan penyusunan Dokumen Persetujuan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kapasitas SDM dalam pengelolaan B3 dan Limbah B3 kepada seluruh pelaku usaha/kegiatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Anggaran belum memadai untuk menunjang tercapainya sasaran kinerja program.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Membangun sistem peningkatan kapasitas pengelolaan B3 dan Limbah B3 pada usaha/kegiatan, dan dukungan anggaran untuk pelaksanaan program.
- Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan sasaran kinerja program Tersusunnya Dokumen Identifikasi Masyarakat Hukum Adat, mempunyai Indikator kinerja Jumlah Dokumen Identifikasi Masyarakat Hukum Adat, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Dokumen Identifikasi Masyarakat Hukum Adat yang tersusun. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 0 dokumen dari target 1 dokumen atau sebesar 0,00%. Capaian

kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 0,00%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tidak ada

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Hasil inventarisasi tahun 2023, bahwa tidak ada MHA yang menjadi kewenangan provinsi.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Dibentuk MHA yang menjadi kewenangan provinsi.
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Penanganan Pengaduan Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup mempunyai Indikator kinerja Persentase aduan masyarakat Bidang Lingkungan Hidup yang diverifikasi formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah aduan masyarakat yang terferifikasi}) / (\text{Jumlah total aduan masyarakat yang masuk}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(14/14) \times 100\% = 100\%$ dari target 100% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah/sama *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Semangat untuk mengupayakan agar tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dapat berjalan secara bersamaan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kelengkapan data dukung yang belum lengkap dan perlunya verifikasi lapangan yang kurang didukung sarana dan prasarana operasional.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Perlu dukungan pendanaan dan peningkatan kapasitas personil serta koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penanganan pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Program Pengelolaan Persampahan dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Pengelolaan Sampah Secara Regional, mempunyai Indikator kinerja Persentase Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Sampah di TPA/TPST Regional yang ditangani}) / (\text{Jumlah total Sampah di TPA/TPST Regional}) \times 100\%$. Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tidak ada

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Tahun 2024 tidak dilaksanakan, karena peraturan pelaksanaan (Perda Pengelolaan Sampah Regional) belum ada.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah Regional telah masuk dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2025.

➤ Program Pengelolaan Hutan

- Sasaran Kinerja Meningkatkan Pengelolaan Hutan, mempunyai Indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Hutan. Formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Luas kawasan hutan yang dimanfaatkan})/(\text{Total Luas kawasan hutan}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(271.725,88 \text{ ha}/620.361,10 \text{ ha}) \times 100\% = 43,79\%$ dari target 44,16% atau tercapai sebesar 99,15%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 42,42%.
- Sasaran kinerja Meningkatkan Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai Indikator kinerja Persentase luas kerusakan Hutan. Formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah luas kerusakan hutan})/(\text{Luas kawasan hutan}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(13.801,03 \text{ ha}/652.641,52 \text{ ha}) \times 100\% = 2,11\%$. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 2,35%.
- Sasaran Kinerja Meningkatkan Luas Rehabilitasi Lahan Kritis, mempunyai indikator kinerja Persentase Lahan Kritis yang Direhabilitasi. Formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Luas lahan kritis yang direhabilitasi})/(\text{Luas keseluruhan lahan kritis}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(1.649,91 \text{ ha}/167.104 \text{ ha}) \times 100\% = 0,98\%$ dari target 13,17% atau sebesar 7,44%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 3,36%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Tersedianya regulasi dalam pemanfaatan hutan oleh masyarakat dan dunia usaha,
- Upaya penegakan hukum kehutanan atas aktivitas illegal yang terjadi, dan adanya regulasi yang memberikan akses masyarakat untuk legal memanfaatkan hutan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Adanya pengakuan atas lahan yang telah diberikan perizinan berusaha, yang mengakibatkan aktivitas dalam areal izin terganggu.

- Penegakan hukum atas aktivitas illegal perlu dukungan SDM dan pembiayaan yang memadai serta sinergi dengan sektor lain yang beraktivitas dalam kawasan hutan.
- Kecepatan penurunan tutupan hutan lebih tinggi dari upaya rehabilitasi akibat aktivitas illegal dari alih fungsi penggunaan kawasan hutan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Memastikan calon pemegang izin pemanfaatan hutan akan memenuhi segala kewajiban setelah izin diberikan.
 - Peningkatan kapasitas SDM penegakan hukum kehutanan, sinergi dengan pihak terkait dan penyediaan anggaran yang cukup.
 - Peningkatan partisipasi dan dukungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi dan sate holder.
- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Jumlah Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang Dikonservasi mempunyai Indikator kinerja Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Dokumen Pengelolaan KSDAE yang disusun})/(\text{Jumlah Dokumen Pengelolaan KSDAE yang direncanakan}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(2/2) \times 100\% = 100\%$ dari target 100% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar .% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terdapatnya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan
- Terlaksananya koordinasi yang baik antar instansi dan lembaga terkait.
- Tersedia sumber daya manusia yang mendukung program tsbt.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kondisi alam yang harus dihadapi dengan hati-hati
- Sarana dan prasarana yang tidak mendukung

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai
 - Peningkatan kordinasi dengan instansi dan lembaga terkait perlu ditingkatkan.
- Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial. mempunyai Indikator kinerja

Persentase Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial, formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Luas akses legal perhutanan sosial kepada masyarakat}) / (\text{Luas usulan perhutanan sosial}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(48.076,98 \text{ ha}/138.777) \times 100\% = 34,64\%$ dari target 40,00% atau sebesar 86,60%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 34,78%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Dukungan pemerintah pusat dan daerah, Kerjasama dengan instansi lain dan stakeholders, Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Konflik kepentingan antar pihak, Keterbatasan anggaran dan pendanaan, Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Mengembangkan kapasitas SDM, Meningkatkan koordinasi antar instansi, Mengalokasikan anggaran yang memadai.

- Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Luas DAS Yang Dipertahankan Dan Ditingkatkan Daya Dukungnya mempunyai Indikator kinerja Persentase Luas DAS Yang Dikelola, formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Luas DAS yang dikelola})/(\text{Luas DAS keseluruhan}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(30.000 \text{ Ha}/1.671.597 \text{ Ha}) \times 100\% = 1,79\%$ dari target 9,13% atau sebesar 19,60%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 16,42%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Terlaksananya kerjasama pemerintah pusat dan daerah, kerjasama dengan instansi dan satkeholder, partisipasi masyarakat, serta pengakuan dan penghargaan dari pihak eksternal.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan anggaran, konflik kepentingan, dan keterbatasan data dan informasi.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Perlu peningkatan kesadaran masyarakat , pengembangan kapasitas SDM, koordinasi antar instansi, peningkatan partisipasi masyarakat dan menggunakan teknologi pengelolaan DAS.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi :

1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan
 - a) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c) UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 - d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
 - g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023;
 - h) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 tentang Pelimpahan dalam Rangka Tugas Pembantuan terhadap lingkup urusan Pemerintah Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - i) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023;
 - j) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - k) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas Pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan Pemerintahan Pusat atau Pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan pemerintahan tersebut terpilah menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah dengan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 1,00 Dokumen;
- b. Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 30.03 Km;
- c. Terlaksananya Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 0.00 m;
- d. Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) 37.94 Km;
- e. Terlaksananya Preservasi Jembatan 18.30 m;
- f. Terlaksananya Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) 447.70m;
- g. Terlaksananya Layanan Umum 1.00 Layanan;
- h. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan;
- i. Meningkatnya Persentase Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara 80.00 Km;
- j. Terlaksananya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan;
- k. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan;
- l. Tersedianya Irigasi Perpipaan 2.00 Unit;
- m. Tersedianya Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat 9.00 Unit;
- n. Terlaksananya Optimasi Lahan 102.05 km²;
- o. Terlaksananya Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 1.00 Kegiatan;
- p. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen;

- q. Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi 1.00 Kegiatan;
- r. Tersedianya Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) 750.00 Hektar;
- s. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 1.00 Kegiatan;
- t. Tersedianya Area penyaluran benih padi 1000.00 Hektar;
- u. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen;
- v. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen;
- w. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan;
- x. Tersedianya Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 100.00 Hektar;
- y. Tersedianya Kawasan Lada 150.00 Hektar;
- z. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan 2.00 kegiatan;
- aa. Terpenuhinya Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan 2.00 Rekomendasi Kebijakan;
- bb. Tersedianya Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 1.00 Hektar;
- cc. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen;
- dd. Tersedianya Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor 1.00 Lembaga;
- ee. Terpenuhinya Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2.00 Unit;
- ff. Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2.00 unit;
- gg. Terlaksananya Layanan Kesehatan Hewan 2000.00 layanan;
- hh. Terlaksananya Layanan Optimalisasi Reproduksi 600.00 layanan;
- ii. Terlaksananya Layanan BMN 1.00 Layanan;
- jj. Terlaksananya Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan;
- kk. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 6.00 Dokumen;
- ll. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen;
- mm. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 4.00 Dokumen;
- nn. Tersedianya Sarana Pascapanen Hortikultura 2.00 Unit;
- oo. Tersedianya Sarana Pengolahan Hortikultura 2.00 Unit;
- pp. Tersedianya Prasarana Pascapanen Hortikultura 2.00 Unit;
- qq. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen;
- rr. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen;
- ss. Terlaksananya Sampel Monitoring Residu yang diuji 59.00 Sampel;
- tt. Terlaksananya Sampel Monitoring Penyakit Ikan yang diuji 23.00 Sampel;
- uu. Terlaksananya Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan;
- vv. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen;
- ww. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen;
- xx. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen;

- yy. Terlaksananya Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh daerah 1.00 promosi;
- zz. Terlaksananya Industri pengolahan yang dibina oleh daerah 58.00 Industri;
- aaa. Terlaksananya Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan;
- bbb. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen;
- ccc. Tersedianya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP 33.00 Kelompok Masyarakat;
- ddd. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen;
- eee. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen;
- fff. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan;
- ggg. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen;
- hhh. Terlaksananya Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanannya 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota);
- iii. Terlaksananya Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina tata kelola dan operasional pelabuhan perikanannya 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota);
- jjj. Terlaksananya Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap 1.00 Provinsi;
- kkk. Tersedianya Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya 100.00 laporan;
- lll. Tersedianya Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya 8.00 laporan;
- mmm. Tersedianya Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi 150.00 laporan;
- nnn. Terlaksananya Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan;
- ooo. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Layanan;
- ppp. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Layanan;
- qqq. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan;
- rrr. Terlaksananya Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut 1.00 Rekomendasi Kebijakan;
- sss. Terlaksananya Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut 1.00 Kesepakatan;
- ttt. Tersedianya Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya 3.00 Orang;
- uuu. Terlaksananya Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan penerbitan persetujuan dan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 1.00 Rekomendasi Kebijakan;
- vvv. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen;
- www. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen;
- xxx. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen;

- yyy. Terlaksananya Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Tugas Pembantuan 74.00 Industri;
- zzz. Terlaksananya IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi, dan Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan 32.00 Industri;
- aaaa. Terlaksananya Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Unit Pendampingan Langsung (UPL) Melalui Tugas Pembantuan 1.00 Lembaga;
- bbbb. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan;
- cccc. Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komiditas di Daerah 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota);
- dddd. Terlaksananya Perlindungan Kunsumen di Daerah (Edukasi Konsumen dan Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen) 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota);
- eeee. Terlaksananya Pelatihan Pelaporan Distribusi Komuditas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Hasil Industri, serta Barang Penting Tahun Anggaran 2024 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota);
- ffff. Tersedianya SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan 30.00 Orang;
- gggg. Tersedianya SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan 48.00 Orang;
- hhhh. Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional 1.00 kegiatan;
- iiii. Terlaksananya Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan) 3.00 Kegiatan;
- jjjj. Tersedianya Pelaku ekraf yang mendapat pengembangan akses kepada ekosistem ekonomi kreatif melalui Tugas Pembantuan 62.00 Orang;
- kkkk. Terlaksananya Administrasi Tugas Pembantuan 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota);
- llll. Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi 2.00 Lembaga;
- mmmm. Terlaksananya Permasalahan Tanah Transmigrasi yang Difasilitasi Penyelesaiannya 2.00 Perkara;
- nnnn. Terlaksananya Layanan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi 5.00 Orang;
- oooo. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan;
- pppp. Terpenuhinya Fasilitas Umum yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 1.00 Unit;
- qqqq. Terpenuhinya Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 0.60 km;
- rrrr. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan;
- ssss. Terlaksananya Pengembangan Rumah Kemasan bagi Usaha Mikro 1.00 Unit.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp. 86.064.362.000,00,- dengan realisasi Rp. 83.441.065.950,30,- atau 96,95%.

3.1.1. Target Kinerja

1) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Infrastruktur Konektivitas	1. Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 1,00 Dokumen; 2. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 30.03 Km; 3. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 0.00 m; 4. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) 37.94 Km; 5. Preservasi Jembatan 18.30 m. 6. Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) 447.70 m.	4.826.216.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Umum 1.00 Layanan; 2. Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	670.595.000,00
3	Program Ketahanan Sumber Daya Air	1. Irigasi permukaan yang dioperasi dan dipelihara 80.00 Km.	3.240.277.000,00
4	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan;	576.262.000,00

		2. Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	
--	--	--------------------------------------------	--

2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Irigasi Perpipaan 2.00 Unit; 2. Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat 9.00 Unit; 3. Optimasi Lahan 102.05 km ² ; 4. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 1.00 Kegiatan.	61.787.569.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen	1.186.542.000,00
3	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi 1.00 Kegiatan; 2. Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) 750.00 Hektar; 3. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 1.00 Kegiatan; 4. Area penyaluran benih padi 1000.00 Hektar.	1.595.000.000,00
4	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen; 2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen; 3. Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan;	449.092.000,00
5	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	1.650.374.000,00

		<p>Tanaman Perkebunan 100.00 HektarKawasan Padi 100.00 Hektar;</p> <p>2. Kawasan Lada 150.00 Hektar;</p> <p>3. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen,Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan 2.00 kegiatan;</p> <p>4. Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan 2.00 Rekomendasi Kebijakan;</p> <p>5. Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 1.00 Hektar.</p>	
6	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen.	261.540.000,00
7	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<p>1. Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor 1.00 Lembaga;</p> <p>2. Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2.00 Unit;</p> <p>3. Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2.00 unit.</p>	642.500.000,00
8	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<p>1. Layanan Kesehatan Hewan 2000.00 layanan;</p> <p>2. Layanan Optimalisasi Reproduksi 600.00 layanan.</p>	112.270.000,00
9	Program Dukungan Manajemen	<p>1. Layanan BMN 1.00 Layanan;</p> <p>2. Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan;</p> <p>3. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 6.00 Dokumen;</p> <p>4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen;</p>	245.399.000,00

		5. Layanan Manajemen Keuangan 4.00 Dokumen.	
10	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Sarana Pascapanen Hortikultura 2.00 Unit; 2. Sarana Pengolahan Hortikultura 2.00 Unit; 3. Prasarana Pascapanen Hortikultura 2.00 Unit.	700.000.000,00
11	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen; 2. Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen.	100.000.000,00

3) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1. Sampel Monitoring Residu yang diuji 59.00 Sampel; 2. Sampel Monitoring Penyakit Ikan yang diuji 23.00 Sampel.	216.838.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan; 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen; 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen; 4. Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen.	240.153.000,00
3	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh daerah 1.00 promosi;	132.500.000,00

		2. Industri pengolahan yang dibina oleh daerah 58.00 Industri.	
4	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan; 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen.	230.635.000,00
5	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP 33.00 Kelompok Masyarakat.	86.600.000,00
6	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen; 2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen; 3. Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan.	79.652.000,00
7	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen.	396.000.000,00
8	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1. Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanannya 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota); 2. Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina tata kelola dan Operasional pelabuhan perikanannya 1.00 Daerah(Prov/Kab/Kota); 3. Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap 1.00 Provinsi;	290.682.000,00

		<p>4. Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya 100.00 laporan;</p> <p>5. Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya 8.00 laporan;</p> <p>6. Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi 150.00 laporan.</p>	
9	Program Dukungan Manajemen	<p>1. Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan;</p> <p>2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Layanan;</p> <p>3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Layanan;</p> <p>4. Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan.</p>	202.373.000,00
10	Program Kualitas Lingkungan Hidup	<p>1. Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut 1.00 Rekomendasi Kebijakan;</p> <p>2. Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut 1.00 Kesepakatan;</p> <p>3. Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya 3.00 Orang.</p>	150.000.000,00
11	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	<p>1. Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan penerbitan persetujuan dan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 1.00 Rekomendasi Kebijakan.</p>	310.000.000,00

12	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen; 2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen; 3. Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen.	56.825.000,00
----	----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Tugas Pembantuan 74.00 Industri; 2. IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi, dan Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan 32.00 Industri; 3. Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Unit Pendampingan Langsung (UPL) Melalui Tugas Pembantuan 1.00 Lembaga.	868.408.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	59.160.000,00
3	Program Perdagangan Dalam Negeri	1. Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komiditas di Daerah 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota);	344.907.000,00

		2. Perlindungan Konsumen di Daerah (Edukasi Konsumen dan Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen) 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota); 3. Pelatihan Pelaporan Distribusi Komuditas Pertanian, Pternakan, Perikanan, Hasil Industri, serta Barang Penting Tahun Anggaran 2024 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota).	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan 30.00 Orang; 2. SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan 48.00 Orang; 3. Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional 1.00 kegiatan; 4. Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan) 3.00 Kegiatan; 5. Pelaku ekraf yang mendapat pengembangan akses kepada	1.405.000.000,00

		ekosistem ekonomi kreatif melalui Tugas Pembantuan 62.00 Orang.	
2	Program Dukungan Manajemen	1. Administrasi Tugas Pembantuan 1.00 Daerah(Prov/Kab/Kota).	130.000.000,00

6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1. Fasilitasi Lembaga Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi 2.00 Lembaga; 2. Permasalahan Tanah Transmigrasi yang Difasilitasi Penyelesaiannya 2.00 Perkara; 3. Layanan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi 5.00 Orang.	221.485.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	48.709.000,00

7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1. Fasilitas Umum yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 1.00 Unit; 2. Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 0.60 km.	1.092.004.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	56.805.000,00

- 8) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	1. Pengembangan Rumah Kemasan bagi Usaha Mikro 1.00 Unit.	1.401.990.000,00

3.1.2. Realisasi

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Infrastruktur Konektivitas	1. Meningkatnya Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 1,00 Dokumen; 2. Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 30.03 Km; 3. Terlaksananya Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 0.00 m; 4. Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) 37.94 Km; 5. Terlaksananya Preservasi Jembatan 18.30 m; 6. Terlaksananya Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) 447.70 m.	4.821.855.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Umum 1.00 Layanan;	657.992.000,00

		2. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	
3	Program Ketahanan Sumber Daya Air	1. Meningkatnya Persentase Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara 80.00 Km.	3.231.614.163,00
4	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan; 2. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	576.262.000,00

2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Tersedianya Irigasi Perpipaan 2.00 Unit; 2. Tersedianya Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat 9.00 Unit; 3. Terlaksananya Optimasi Lahan 102.05 km ² ; 4. Terlaksananya Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 1.00 Kegiatan.	60.562.562.135,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen.	511.476.837,00
3	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan	1.593.496.986,00

		evaluasi 1.00 Kegiatan; 2. Tersedianya Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) 750.00 Hektar; 3. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 1.00 Kegiatan; 4. Tersedianya Area penyaluran benih padi 1000.00 Hektar.	
4	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen; 2. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen; 3. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan.	449.092.000,00
5	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Tersedianya Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 100.00 Hektar; 2. Tersedianya Kawasan Lada 150.00 Hektar; 3. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan 2.00 kegiatan;	1.630.985.470,00

		<p>4. Terpenuhiya Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan 2.00 Rekomendasi Kebijakan;</p> <p>5. Tersedianya Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 1.00 Hektar.</p>	
6	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen.	254.485.064,00
7	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<p>1. Tersedianya Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor 1.00 Lembaga;</p> <p>2. Terpenuhiya Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2.00 Unit;</p> <p>3. Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2.00 unit.</p>	630.806.500,00
8	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<p>1. Terlaksananya Layanan Kesehatan Hewan 2000.00 layanan;</p> <p>2. Terlaksananya Layanan Optimalisasi Reproduksi 600.00 layanan.</p>	108.191.315,00
9	Program Dukungan Manajemen	<p>1. Terlaksananya Layanan BMN 1.00 Layanan;</p> <p>2. Terlaksananya Layanan Data dan</p>	239.828.442,70

		Informasi 1.00 Layanan; 3. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 6.00 Dokumen; 4. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen; 5. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 4.00 Dokumen.	
10	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Tersedianya Sarana Pascapanen Hortikultura 2.00 Unit; 2. Tersedianya Sarana Pengolahan Hortikultura 2.00 Unit; 3. Tersedianya Prasarana Pascapanen Hortikultura 2.00 Unit;	699.425.000,00
11	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen; 2. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen.	100.000.000,00

3) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1. Terlaksananya Sampel Monitoring Residu yang diuji 59.00 Sampel; 2. Terlaksananya Sampel Monitoring Penyakit	207.383.863,20

		Ikan yang diuji 23.00 Sampel.	
2	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan; 2. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen; 3. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen; 4. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen.	235.830.246,00
3	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Terlaksananya Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh daerah 1.00 promosi; 2. Terlaksananya Industri pengolahan yang dibina oleh daerah 58.00 Industri.	131.762.500,00
4	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan; 2. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen.	230.242.920,50
5	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1. Tersedianya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP 33.00 Kelompok Masyarakat.	86.600.000,00
6	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen; 2. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen;	79.635.970,00

		3. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan.	
7	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen.	395.881.200,00
8	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1. Terlaksananya Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanannya 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota); 2. Terlaksananya Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina tata kelola dan operasional pelabuhan perikanannya 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota); 3. Terlaksananya Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap 1.00 Provinsi; 4. Tersedianya Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya 100.00 laporan; 5. Tersedianya Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya 8.00 laporan; 6. Tersedianya Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi 150.00 laporan.	278.465.987,40

9	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan; 2. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Layanan 3. Terlaksananya Layanan Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap 1.00 Provinsi; 4. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Layanan; 5. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan. 	195.188.758,50
10	Program Kualitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut 1.00 Rekomendasi Kebijakan; 2. Terlaksananya Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut 1.00 Kesepakatan; 3. Tersedianya Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya 3.00 Orang. 	145.166.900,00
11	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan penerbitan persetujuan dan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 1.00 Rekomendasi Kebijakan. 	303.122.900,00
12	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen; 	50.344.300,00

		2. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen; 3. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen.	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Terlaksananya Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Tugas Pembantuan 74.00 Industri; 2. Terlaksananya IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi, dan Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan 32.00 Industri; 3. Terlaksananya Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Unit Pendampingan Langsung (UPL) Melalui Tugas Pembantuan 1.00 Lembaga.	642.222.588,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	59.160.000,00
3	Program Perdagangan Dalam Negeri	1. Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komiditas di Daerah 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota);	216.019.965,00

		2. Terlaksananya Perlindungan Kunsumen di Daerah (Edukasi Konsumen dan Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen) 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota); 3. Terlaksananya Pelatihan Pelaporan Distribusi Komuditas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Hasil Industri, serta Barang Penting Tahun Anggaran 2024 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota).	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	1. Tersedianya SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan 30.00 Orang; 2. Tersedianya SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan 48.00 Orang; 3. Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataaan Nasional 1.00 kegiatan; 4. Terlaksananya Pendukung Event	1.290.638.179,00

		Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan) 3.00 Kegiatan; 5. Tersedianya Pelaku ekraf yang mendapat pengembangan akses kepada ekosistem ekonomi kreatif melalui Tugas Pembantuan 62.00 Orang.	
2	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Administrasi Tugas Pembantuan 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota).	120.778.580,00

6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1. Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi 2.00 Lembaga; 2. Terlaksananya Permasalahan Tanah Transmigrasi yang Difasilitasi Penyelesaiannya 2.00 Perkara; 3. Terlaksananya Layanan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi 5.00 Orang.	220.370.200,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	47.030.000,00

7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1. Terpenuhinya Fasilitas Umum yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 1.00 Unit; 2. Terpenuhinya Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 0.60 km.	1.091.904.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	53.412.980,00

8) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	1. Terlaksananya Pengembangan Rumah Kemas bagi Usaha Mikro 1.00 Unit.	1.291.831.000,00

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Infrastruktur Konektivitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.826.216.000,00	4.821.855.000,00	99,91	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	99,98	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.826.216.000,00	4.821.855.000,00	99,91	Peningkatan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	99,98	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Dukungan Teknis								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	1,00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
			2. Output : OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)								
			1. Rincian Kegiatan : Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.386.778.000,00	1.386.221.000,00	99,96	30.03 Km	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.000.000,00	-	0,00	0,0	0	APBN TA. 2024
			3. Rincian Kegiatan : Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.011.332.000,00	2.008.682.000,00	99,87	37.94 Km	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Output : OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)								
			1. Rincian Kegiatan : Preservasi Jembatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.020.906.000,00	1.020.906.000,00	100,00	18.30 m	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	316.200.000,00	316.046.000,00	99,95	447.70 m	100	APBN TA. 2024
2.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	670.595.000,00	657.992.000,00	98,12	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	670.595.000,00	657.992.000,00	98,12	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Umum	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	464.138.000,00	461.934.000,00	99,53	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	206.457.000,00	196.058.000,00	94,96	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024
3.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketahanan Sumber Daya Air	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.240.277.000,00	3.231.614.163,00	99,73	Terwujudnya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana pada Prgram Ketahanan Sumber Daya Air	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.240.277.000,00	3.231.614.163,00	99,73	Meningkatnya Persentase Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air								
			1. Rincian Kegiatan : Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.240.277.000,00	3.231.614.163,00	99,73	80.00 Km	100	APBN TA. 2024
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	576.262.000,00	576.262.000,00	100,00	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	576.262.000,00	576.262.000,00	100,0 0	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	460.582.000,00	460.582.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	115.680.000,00	115.680.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	61.787.569.000,00	60.562.562.135,00	98,02	Terwujudnya Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Penyediaan Lahan, serta Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	95,12	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.283.026.000,00	1.277.026.000,00	99,53	Meningkatnya pemenuhan pengairan lahan pertanian	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Irigasi Perpipaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	2.00 Unit	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.083.026.000,00	1.077.026.000,00	99,45	9.00 Unit	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Kegiatan : Perlindungan dan Penyediaan Lahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60.259.543.000,00	59.040.700.022,00	97,98	Meningkatnya pemenuhan ketersediaan lahan pertanian	94,99	APBN TA. 2024
			1. Output : Prasarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Optimasi Lahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60.259.543.000,00	59.040.700.022,00	97,98	102.05 km2	94,99	APBN TA. 2024
			3. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	245.000.000,00	244.836.113,00	99,93	Meningkatnya Tingkat kemanfaatan alsintan	100	APBN TA. 2024
			1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	245.000.000,00	244.836.113,00	99,93	1.00 Kegiatan	100	APBN TA. 2024
6	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.186.542.000,00	511.476.837,00	43,11	Terpenuhinya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.186.542.000,00	511.476.837,00	43,11	Terlaksananya serta Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.186.542.000,00	511.476.837,00	43,11	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
7	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.595.000.000,00	1.593.496.986,00	99,91	Terwujudnya Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan serta Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.215.000.000,00	1.213.496.986,00	99,88	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	1.00 kegiatan	100	APBN TA. 2024
			2. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.162.500.000,00	1.160.996.986,00	99,87	750.00 Hektar	100	APBN TA. 2024
			2. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	380.000.000,00	380.000.000,00	100,0 0	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	100	APBN TA. 2024
			1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	1.00 Kegiatan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Area penyaluran benih padi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	365.000.000,00	365.000.000,00	100,00	1000.00 Hektar	100	APBN TA. 2024
8	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	449.092.000,00	449.092.000,00	100,0 0	Terpenuhinya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	449.092.000,00	449.092.000,00	100,0 0	Terlaksananya serta Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39.528.000,00	39.528.000,00	100,00	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	159.564.000,00	159.564.000,00	100,00	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
			3. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024
9	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.650.374.000,00	1.630.985.470,00	98,83	Terwujudnya Penguatan Perlindungan Perkebunan, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan, Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan serta Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Penguatan Perlindungan Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	303.680.000,00	301.178.737,00	99,18	Meningkatnya Penguatan Perlindungan Perkebunan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	303.680.000,00	301.178.737,00	99,18	100.00 Hektar	100	APBN TA. 2024
			2. Kegiatan : Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	980.475.000,00	978.900.909,00	99,84	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	100	APBN TA. 2024
			1. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Kawasan Lada	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	980.475.000,00	978.900.909,00	99,84	150.00 Hektar	100	APBN TA. 2024
			3. Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	145.000.000,00	142.541.800,00	98,30	Terlaksananya Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	100	APBN TA. 2024
			1. Output : Koordinasi								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	145.000.000,00	142.541.800,00	98,30	2.00 kegiatan	100	APBN TA. 2024
			4. Kegiatan : Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	221.219.000,00	208.364.024,00	94,19	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	100	APBN TA. 2024
			1. Output : Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan								
			1. Rincian Kegiatan : Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	130.640.000,00	117.785.024,00	90,16	2.00 Rekomendasi Kebijakan	100	APBN TA. 2024
			1. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90.579.000,00	90.579.000,00	100,00	1.00 Hektar	100	APBN TA. 2024
10	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	261.540.000,00	254.485.064,00	97,30	Terpenuhinya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	261.540.000,00	254.485.064,00	97,30	Terlaksananya serta Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	261.540.000,00	254.485.064,00	97,30	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
11	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	642.500.000,00	630.806.500,00	98,18	Terwujudnya Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak dengan adanya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, serta Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	642.500.000,00	630.806.500,00	98,18	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								
			1. Rincian Kegiatan : Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	242.500.000,00	230.806.500,00	95,18	1.00 Lembaga	100	APBN TA. 2024
			2. Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	2.00 Unit	100	APBN TA. 2024
			3. Output : Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	2.00 unit	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	112.270.000,00	108.191.315,00	96,37	Terwujudnya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50.000.000,00	50.000.000,00	100,0 0	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Pelayanan Publik Lainnya								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Kesehatan Hewan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	2000.00 layanan	100	APBN TA. 2024
			2. Kegiatan : Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	62.270.000,00	58.191.315,00	93,45	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	100	APBN TA. 2024
			1. Output : Pelayanan Publik Lainnya								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Optimalisasi Reproduksi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	62.270.000,00	58.191.315,00	93,45	600.00 layanan	100	APBN TA. 2024
13	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	245.399.000,00	239.828.442,70	97,73	Terpenuhinya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Petrernakan	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Petrernakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	245.399.000,00	239.828.442,70	97,73	Terlaksananya serta Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Petrernakan	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan BMN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17.099.000,00	17.099.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Data dan Informasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	26.710.000,00	26.710.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Panganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	6.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
			3. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	111.090.000,00	105.519.442,70	94,99	4.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
14	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	700.000.000,00	699.425.000,00	99,92	Terwujudnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan adanya Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	700.000.000,00	699.425.000,00	99,92	Terlaksananya Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Sarana Pascapanen Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	2.00 Unit	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Sarana Pengolahan Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	2.00 Unit	100	APBN TA. 2024
			2. Output : Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Prasarana Pascapanen Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	480.000.000,00	479.425.000,00	99,88	2.00 unit	100	APBN TA. 2024
15	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000.000,00	100.000.000,00	100,0 0	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hortikultura	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Terlaksananya serta Meningkatnya Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39.100.000,00	39.100.000,00	100,00	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60.900.000,00	60.900.000,00	100,00	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
16	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	216.838.000,00	207.383.863,20	95,64	Terwujudnya Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	216.838.000,00	207.383.863,20	95,64	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan dengan Penyidikan dan Pengujian Penyakit	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Penyidikan dan Pengujian Penyakit								
			1. Rincian Kegiatan : Sampel Monitoring Residu yang diuji	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	174.350.000,00	164.895.863,20	94,58	59.00 Sampel	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Sampel Monitoring Penyakit Ikan yang diuji	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	42.488.000,00	42.488.000,00	100,00	23.00 Sampel	100	APBN TA. 2024
17	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	240.153.000,00	235.830.246,00	98,20	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	240.153.000,00	235.830.246,00	98,20	Terlaksananya serta Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Data dan Informasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	54.404.000,00	54.404.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024
			2. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Panganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	31.954.000,00	31.954.000,00	100,00	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	81.332.000,00	77.009.246,00	94,69	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	72.463.000,00	72.463.000,00	100,00	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	132.500.000,00	131.762.500,00	99,44	Terwujudnya Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan serta Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70.000.000,00	70.000.000,00	100,0 0	Terlaksananya serta Meningkatnya Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Promosi								
			1. Rincian Kegiatan : Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	1.00 promosi	100	APBN TA. 2024
			2. Kegiatan : Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	62.500.000,00	61.762.500,00	98,82	Terlaksananya serta Meningkatnya Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Output : Fasilitasi dan Pembinaan Industri								
			1. Rincian Kegiatan : Industri pengolahan yang dibina oleh daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	62.500.000,00	61.762.500,00	98,82	58.00 Industri	100	APBN TA. 2024
19	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	230.635.000,00	230.242.920,50	99,83	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	230.635.000,00	230.242.920,50	99,83	Terlaksananya serta Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Data dan Informasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	135.465.000,00	135.072.920,50	99,71	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Panganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95.170.000,00	95.170.000,00	100,00	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
20	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	86.600.000,00	86.600.000,00	100,0 0	Terwujudnya Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	86.600.000,00	86.600.000,00	100,0 0	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	86.600.000,00	86.600.000,00	100,00	33.00 Kelompok Masyarakat	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79.652.000,00	79.635.970,00	99,98	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79.652.000,00	79.635.970,00	99,98	Terlaksananya serta Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Panganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	57.672.000,00	57.655.970,00	99,97	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	396.000.000,00	395.881.200,00	99,97	Terpenuhinya Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	396.000.000,00	395.881.200,00	99,97	Terlaksananya serta Meningkatnya Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Panganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	396.000.000,00	395.881.200,00	99,97	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
23	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	290.682.000,00	278.465.987,40	95,80	Terwujudnya Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40.190.000,00	39.197.307,00	97,53	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah								
			1. Rincian Kegiatan : Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanannya	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40.190.000,00	39.197.307,00	97,53	1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota)	100	APBN TA. 2024
			2. Kegiatan : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	128.640.000,00	120.239.808,00	93,47	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	100	APBN TA. 2024
			1. Output : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah								
			1. Rincian Kegiatan : Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina tata kelola dan operasional pelabuhan perikanannya	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	128.640.000,00	120.239.808,00	93,47	1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota)	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Kegiatan : Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	96.501.000,00	94.136.725,50	97,55	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	100	APBN TA. 2024
			1. Output : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah								
			1. Rincian Kegiatan : Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	46.401.000,00	44.036.725,50	94,90	1.00 Provinsi	100	APBN TA. 2024
			2. Output : Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25.100.000,00	25.100.000,00	100,00	100.00 laporan	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	8.00 laporan	100	APBN TA. 2024
			4. Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25.351.000,00	24.892.146,90	98,19	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Output : Pemantauan produk								
			1. Rincian Kegiatan : Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25.351.000,00	24.892.146,90	98,19	150.00 laporan	100	APBN TA. 2024
24	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	202.373.000,00	195.188.758,50	96,45	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	202.373.000,00	195.188.758,50	96,45	Terlaksananya serta Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Data dan Informasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	71.450.000,00	64.265.758,50	89,95	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024
			2. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Panganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40.223.000,00	40.223.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024
			3. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	53.700.000,00	53.700.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	150.000.000,00	145.166.900,00	96,78	Terwujudnya Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan adanya Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	150.000.000,00	145.166.900,00	96,78	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan								
			1. Rincian Kegiatan : Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	1.00 Rekomendasi Kebijakan	100	APBN TA. 2024
			2. Output : Kemitraan								
			1. Rincian Kegiatan : Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70.000.000,00	65.166.900,00	93,10	1.00 Kesepakatan	100	APBN TA. 2024
			3. Output : Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan								
			1. Rincian Kegiatan : Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	3.00 Orang	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	310.000.000,00	303.122.900,00	97,78	Terwujudnya Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan adanya Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Perencanaan Ruang Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	310.000.000,00	303.122.900,00	97,78	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan								
			1. Rincian Kegiatan : Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan penerbitanpersetuju an dan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan PemanfaatanRuang Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	310.000.000,00	303.122.900,00	97,78	1.00 Rekomendasi Kebijakan	100	APBN TA. 2024
27	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	56.825.000,00	50.344.300,00	88,60	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	56.825.000,00	50.344.300,00	88,60	Terlaksananya serta Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.425.000,00	6.425.000,00	100,00	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024
			3. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40.000.000,00	33.519.300,00	83,80	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
28	Kementerian Perindustrian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	868.408.000,00	642.222.588,00	73,95	Terwujudnya Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dengan adanya Fasilitas dan Pembinaan Industri serta Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	868.408.000,00	642.222.588,00	73,95	Terlaksananya serta Meningkatnya Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Fasilitas dan Pembinaan Industri								
			1. Rincian Kegiatan : Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Tugas Pembantuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	405.923.000,00	179.737.588,00	44,28	74.00 Industri	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Rincian Kegiatan : IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi, dan Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	221.892.000,00	221.892.000,00	100,00	32.00 Industri	100	APBN TA. 2024
			2. Output : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Unit Pendampingan Langsung (UPL) Melalui Tugas Pembantuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	240.593.000,00	240.593.000,00	100,00	1.00 Lembaga	100	APBN TA. 2024
29	Kementerian Perindustrian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	59.160.000,00	59.160.000,00	100,0 0	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	59.160.000,00	59.160.000,00	100,0 0	Terlaksananya serta Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	59.160.000,00	59.160.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024
30	Kementerian Perdagangan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Perdagangan Dalam Negeri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	344.907.000,00	216.019.965,00	62,63	Terwujudnya Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	344.907.000,00	216.019.965,00	62,63	Terlaksananya serta Meningkatnya Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komiditas di Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	108.000.000,00	71.472.965,00	66,18	1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota)	100	APBN TA. 2024
			2. Rincian Kegiatan : Perlindungan Konsumen di Daerah (Edukasi Konsumen dan Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	192.360.000,00	100.000.000,00	51,99	1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota)	100	APBN TA. 2024
			3. Rincian Kegiatan : Pelatihan Pelaporan Distribusi Komuditas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Hasil Industri, serta Barang Penting Tahun Anggaran 2024	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	44.547.000,00	44.547.000,00	100,00	1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota)	100	APBN TA. 2024
31	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.405.000.000,00	1.290.638.179,00	91,86	Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, dan Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), serta Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen.	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	200.000.000,00	178.366.792,00	89,18	Terlaksananya serta Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan								
			1. Rincian Kegiatan : SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk PembekalanKerja melalui Tugas Pembantuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	200.000.000,00	178.366.792,00	89,18	30.00 Orang	100	APBN TA. 2024
			2. Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	200.000.000,00	180.984.674,00	90,49	Terlaksananya serta Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100	APBN TA. 2024
			1. Output : Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif								

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	200.000.000,00	180.984.674,00	90,49	48.00 Orang	100	APBN TA. 2024
			3. Kegiatan : Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	300.000.000,00	267.415.164,00	89,14	Terlaksananya serta Meningkatnya Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100	APBN TA. 2024
			1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataaan Nasional	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	300.000.000,00	267.415.164,00	89,14	1.00 kegiatan	100	APBN TA. 2024
			4. Kegiatan : Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	500.000.000,00	484.530.830,00	96,91	Terlaksananya serta Meningkatnya Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	100	APBN TA. 2024
			1. Output : Konferensi dan Event								
			1. Rincian Kegiatan : Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	500.000.000,00	484.530.830,00	96,91	3.00 Kegiatan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			5. Kegiatan : Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	205.000.000,00	179.340.719,00	87,48	Terlaksananya serta Meningkatnya Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	100	APBN TA. 2024
			1. Output : Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : Pelaku ekraf yang mendapat pengembangan akses kepada ekosistem ekonomi kreatif melalui Tugas Pembantuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	205.000.000,00	179.340.719,00	87,48	62.00 Orang	100	APBN TA. 2024
32	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	130.000.000,00	120.778.580,00	92,91	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	130.000.000,00	120.778.580,00	92,91	Terlaksananya serta Meningkatnya Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah								
			1. Rincian Kegiatan : Administrasi Tugas Pembantuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	130.000.000,00	120.778.580,00	92,91	1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota)	100	APBN TA. 2024
33	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	221.485.000,00	220.370.200,00	99,50	Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	221.485.000,00	220.370.200,00	99,50	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								
			1. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Lembaga Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	178.800.000,00	178.800.000,00	100,00	2.00 Lembaga	100	APBN TA. 2024
			2. Output : Perkara Hukum Kelompok Masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : Permasalahan Tanah Transmigrasi yang Difasilitasi Penyelesaiannya	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39.840.000,00	39.685.200,00	99,61	2.00 Perkara	100	APBN TA. 2024
			3. Output : Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.845.000,00	1.885.000,00	66,26	5.00 Orang	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
34	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	48.709.000,00	47.030.000,00	96,55	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	48.709.000,00	47.030.000,00	96,55	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	48.709.000,00	47.030.000,00	96,55	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
35	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Transmigrasi	Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.092.004.000,00	1.091.904.000,00	99,99	Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.092.004.000,00	1.091.904.000,00	99,99	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Fasilitas Umum yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	1.00 Unit	100	APBN TA. 2023
			2. Output : Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)								
			1. Rincian Kegiatan : Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	992.004.000,00	992.004.000,00	100,00	0.60 km	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
36	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	56.805.000,00	53.412.980,00	94,03	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	56.805.000,00	53.412.980,00	94,03	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perkantoran	Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	56.805.000,00	53.412.980,00	94,03	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
37	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.401.990.000,00	1.291.831.000,00	92,14	Terwujudnya Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro	100	APBN TA. 2024
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara.	1. Kegiatan : Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro	Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.401.990.000,00	1.291.831.000,00	92,14	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro	100	APBN TA. 2024
		3. UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Output : Bantuan Peralatan / Sarana								
			1. Rincian Kegiatan : Pengembangan Rumah Kemasan bagi Usaha Mikro	Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.401.990.000,00	1.291.831.000,00	92,14	1.00 Unit	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JUMLAH TOTAL ANGGARAN DAN REALISASI TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2024						86.064.362.000,00	83.441.065.950,30	96,95		100	APBN TA. 2024

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota

Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.550.799.000,00,- dengan realisasi Rp. 2.383.735.000,- atau 93,45%.

3.2.1 Target Kinerja

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	Rp (4)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Fasilitas Umum yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 1.00 Unit. (2) Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 0.60 km.	Rp 1.092.004.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	Rp 56.805.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Pengembangan Rumah Kemasan bagi Usaha Mikro 1.00 Unit.	Rp 1.401.990.000,00
TOTAL ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2024			Rp 2.550.799.000,00

3.2.2 Realisasi

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp.1.092.004.000,00 Realisasi Rp.1.091.904.000,00 sebesar 99,99%
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp. 1.401.990.000,00 Realisasi Rp. 1.291.831.000,00 sebesar 92,14%

3.3 Permasalahan dan Kendala

1. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Kapasitas Sumber Daya Manusia masih kurang memadai secara kualitas dibandingkan dengan permasalahan pada teknis pelaksanaan Kegiatan di lapangan;
 - b. Faktor Alam yaitu kondisi cuaca mengakibatkan perubahan pada jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Adanya penyesuaian volume pekerjaan terhadap kondisi di lapangan.
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Terdapat capaian realisasi fisik lebih kecil dibandingkan dengan capaian keuangan pada salah satu Kegiatan dikarenakan sistem pembayaran dengan cara transfer uang dulu ke Kelompok Tani penerima, setelah itu baru pelaksanaan pekerjaan dilakukan, dan ketika realisasi fisik tidak sama dengan realisasi keuangan ada proses pengembalian dana dari Kelompok Tani ke negara untuk (NTPN) dan proses NTPN ini masih berjalan, secara pencatatan keuangan tetap sesuai dengan yang ditransfer ke Kelompok Tani;
 - b. Mengalami Blokir anggaran pada Kegiatan Dukungan Manajemen terkait operasional satker, Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja, dan Rapat-rapat persiapan kegiatan.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

Produk Perikanan yang keluar dari Bangka Belitung masih didominasi produk beku dan segar sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha, hal ini disebabkan masih minimnya investasi dalam hilirisasi produk perikanan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perlindungan konsumen, hak advokasi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen serta rendahnya perilaku complain atau mengungkapkan keluhan dikalangan konsumen agar produsen dapat memberikan pelayanan produk yang sesuai aturan.
5. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Kurangnya SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja;

- b. Kurangnya SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja.
- 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Kurangnya SDM dalam rangka Optimalisasi Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi;
 - b. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam mengoptimalkan Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi.
- 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 Masih rendahnya optimalisasi di bidang pengembangan kawasan transmigrasi yang merupakan wadah untuk menciptakan koordinasi dengan mencari dan menggali potensi daerah untuk kemudian di kembangkan serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di wilayah kawasan transmigrasi tersebut.
- 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 Minimnya kualitas Sumber Daya manusia yang mendukung pelayanan di Rumah Promosi dan Kemasan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

- 1. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Perlu adanya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan Mengakselerasi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
 - c. Mengoptimalkan monitoring pengendalian setiap proses tahapan-tahapan pelaksanaan Kegiatan.
- 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi dengan maksimal pada pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
Meningkatkan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh Daerah serta mengoptimalkan Kegiatan pembinaan Industri pengolahan;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
Meningkatkan Pemberdayaan Konsumen tentang pengetahuan terkait undangundang perlindungan konsumen, hak advokasi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen serta komplain atau mengungkapkan keluhan dikalangan konsumen agar produsen dapat memberikan pelayanan produk yang sesuai aturan.
5. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Diknas Kabupaten/Kota terkait kebutuhan SDM dalam rangka mengotimalkan Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
Melakukan Koordinasi dengan Disnaker dan Diknas Kabupaten/Kota terkait kebutuhan SDM dalam rangka mengotimalkan Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
Meningkatkan pengembangan kawasan transmigrasi dengan menguatkan sarana dan prasarana di wilayah kawasan transmigrasi yang belum sepenuhnya tertata dengan baik dengan difokuskan pada dua sasaran, yakni sasaran fisik yakni infrastruktur dan sarana dasar serta non fisik yakni mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas masyarakat yang berkualitas dan mandiri.
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia dengan adanya Pelatihan yang diharapkan dapat menghasilkan tenaga ahli agar mampu menyiapkan desain dan produksi kemasan dengan baik dan sesuai standar sesuai ketentuan yang dibutuhkan pasar.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan pendidikan antara lain:

- a. Pendidikan menengah dengan indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah;
- b. Pendidikan khusus dengan indikator pencapaian jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pencapaian SPM untuk urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Persentase Target
I.	Pendidikan Menengah	Orang	48.619	100
	SMA			
	1. Angka partisipasi kasar	Persentase	89.93	100
	2. Angka partisipasi sekolah	Persentase	100	100
	3. Kemampuan literasi	Nilai	74.03	100
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	60.05	100
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	2	100
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	2	100
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	83.11	100
	8. Indeks iklim kebinekaan	Nilai	74,24	100
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	64,17	100
	10. Kecukupan formasi guru ASN	Persentase	26,3	100
	11. Indeks distribusi guru	Persentase	0,35	100
	12. Proporsi PTK bersertifikat	Persentase	33,06	100
	13. Proporsi PTK penggerak	Persentase	33,06	100
	SMK			
	1. Angka partisipasi kasar	Persentase	89,93	100
	2. Angka partisipasi sekolah	Persentase	100	100
	3. Kemampuan literasi	Persentase	68,97	100
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	56,75	100

	5.	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	92,2	100
	6.	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	77,3	100
	7.	Perbedaan skor literasi	Nilai	2	100
	8.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2	100
	9.	Indeks iklim keamanan	Nilai	81.58	100
	10.	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	72.25	100
	11.	Indeks distribusi guru	Persentase	0,35	100
	12.	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,12	100
	13.	Kecukupan formasi guru ASN	Persentase	23.19	100
	14.	Proporsi PTK bersertifikat	Persentase	33.68	100
	15.	Proporsi PTK penggerak	Persentase	33.68	100
III.	Pendidikan Khusus		Orang	1.246	100
	1.	Angka partisipasi kasar	Persentase	62	100
	2.	Angka partisipasi sekolah	Persentase	100	100
	3.	Kemampuan literasi	Nilai	66.96	100
	4.	Kemampuan numerasi	Nilai	62.55	100
	5.	Perbedaan skor literasi	Nilai	3	100
	6.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	100
	7.	Indeks iklim keamanan	Nilai	84,52	100
	8.	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	75,66	100
	9.	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	74	
	10.	Kecukupan formasi guru ASN	Persentase	62.04	100
	11.	Indeks distribusi guru	Persentase	0,14	100
	12.	Proporsi PTK bersertifikat	Persentase	22,87	100
	13.	Proporsi PTK penggerak	Persentase	22,87	100

4.1.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian %
I.	URUSAN PENDIDIKAN					
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			96.97%
1.	Pendidikan Menengah		Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah			97,52
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	48.619	57.948	+9.329	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.52

	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	87,60
	SMA						87,92
	1.	Angka partisipasi kasar	Persentase	89.93	87.02	2.91	96,76
	2.	Angka partisipasi sekolah	Persentase	100	72.69	27.31	72,69
	3.	Kemampuan literasi	Nilai	74.03	84.6	+10.57	100
	4.	Kemampuan numerasi	Nilai	60.05	76.48	+16.43	100
	5.	Perbedaan skor literasi	Nilai	2	5.67	+3.67	100
	6.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2	1.51	0,49	75,50
	7.	Indeks iklim keamanan	Nilai	83.11	72.68	10,43	87,45
	8.	Indeks kebinekaan iklim	Nilai	74.24	74.48	+0,24	100
	9.	Indeks inklusivitas iklim	Nilai	64.17	59.13	5,04	92,15
	10.	Kecukupan formasi guru ASN	Persentase	26.3	26.3	0	100
	11.	Indeks distribusi guru	Persentase	0.35	0.35	0	100
	12.	Proporsi PTK bersertifikat	Persentase	33.06	33.06	0	100
	13.	Proporsi PTK penggerak	Persentase	33.06	6.09	26,97	18,42
	SMK						87,29
	1.	Angka partisipasi kasar	Persentase	89.93	87.02	2.91	96,76
	2.	Angka partisipasi sekolah	Persentase	100	72.69	27.31	72,69
	3.	Kemampuan literasi	Nilai	68.97	73.73	-4.76	100
	4.	Kemampuan numerasi	Nilai	56.75	65.15	-8.4	100
	5.	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	92.2	83.1	9.1	90,13
	6.	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	77.3	77.3	0	100
	7.	Perbedaan skor literasi	Nilai	2	4.16	-2.16	100
	8.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2	0.97	1.03	48,50
	9.	Indeks iklim keamanan	Nilai	81.58	70.6	10.98	86,54
	10.	Indeks kebinekaan iklim	Nilai	72.25	72.78	-0.53	100
	11.	Indeks distribusi guru	Persentase	0.35	0.35	0	100
	12.	Indeks inklusivitas iklim	Nilai	60.12	56.47	3.65	93,93
	13.	Kecukupan formasi guru ASN	Persentase	23.19	23.19	0	100
	14.	Proporsi PTK bersertifikat	Persentase	33.68	33.68	0	100
	15.	Proporsi PTK penggerak	Persentase	33.68	6.98	26.7	20,72
2.	Pendidikan Khusus			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus			96,41

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR 80 %			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani			1246	1396	-150	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						16,41
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	82,06
	1.	Angka partisipasi kasar	Persentase	62	64.1	-2.1	100
	2.	Angka partisipasi sekolah	Persentase	100	58.5	41.5	58.50
	3.	Kemampuan literasi	Nilai	66.96	45.93	21.03	68.59
	4.	Kemampuan numerasi	Nilai	62.55	64.96	-2.41	100
	5.	Perbedaan skor literasi	Nilai	3	7.29	-4.29	100
	6.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	8.38	-5.38	100
	7.	Indeks iklim keamanan	Nilai	84.52	73.63	10.89	87.12
	8.	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	75.66	65.63	10.03	86.74
	9.	Indeks iklim inklusi	Nilai	74	67.28	6.72	90.92
	10.	Kecukupan formasi guru ASN	Persentase	62.04	46.5	15.54	74.95
	11.	Indeks distribusi guru	Persentase	0.14	0.14	0	100
	12.	Proporsi PTK bersertifikat	Persentase	22.87	22.87	0	100
	13.	Proporsi PTK penggerak	Persentase	22.87	0	22.87	0

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan pendidikan sebesar **96,97 %** dengan kategori **tuntas utama**. Untuk indikator pendidikan menengah realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar **97,52 %**. Sedangkan indikator pendidikan khusus, realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar **96,41 %**.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2024:

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Program Pengelolaan Pendidikan						
	1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah		80,019,396,115	75,704,857,755	94.61	
		1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Unit	12,031,588,200	11,904,326,261	98.94
		2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	8,507,868,950	8,210,099,206	96.50
		3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	524,764,750	480,608,268	91.59
		4	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0
		5	Pembangunan Asrama Sekolah	Ruang	0	0	0
		6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0
		7	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	2,034,434,800	1,887,197,898	92.76
		8	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	0	0	0
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	12,614,101,200	11,789,952,914	93.47
		11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	2,904,023,800	2,829,862,949	97.45
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	557,113,765	513,013,390	92.08
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	772,432,650	657,337,712	85.10
		14	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	407,677,200	356,296,699	87.40
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Ruang	0	0	0
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	190,389,150	116,859,987	61.38
		18	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	771,473,300	725,810,156	94.08
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0
		20	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	2,298,711,600	2,257,326,000	98.20
		21	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0
		22	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0
		23	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0
		24	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit	0	0	0
		25	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0
		26	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0

		27	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Peserta didik	1,613,604,900	1,408,169,506	87.27
		28	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	0	0	0
		29	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	6,537,161,650	5,840,200,765	89.34
		30	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	15,827,400,000	15,640,200,000	98.82
		31	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	0	0	0
		32	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Satuan Pendidikan	864,896,600	864,896,600	100
		33	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Satuan Pendidikan	0	0	0
		34	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang	0	0	0
		35	Pemeliharaan Mebel	Unit	0	0	0
		36	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Orang	0	0	0
		37	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	100,078,700	83,678,119	83.61
		38	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	49,804,100	36,899,552	74.09
		39	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1,737,400	1,500,000	86.34
		40	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	69,600,000	60,719,798	87.24
		41	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0
		42	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0
		43	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0
		44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0
		45	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0
		46	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	213,180,000	203,089,000	95.27
		47	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	411,798,650	308,284,708	74.86
		48	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0
		49	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	2,558,963,400	2,157,264,120	84.30
		50	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0
		51	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	7,403,148,450	6,698,303,896	90.48

		52	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0
		53	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0
		54	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	703,352,900	628,954,851	89.42
		55	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0
		56	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0
		57	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	50,090,000	44,005,400	87.85
			JUMLAH INDIKATOR		80,019,396,115	75,704,857,755	94.61
	2.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		70,527,178,025	65,335,880,166	92.64
		1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	0	0	0
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0
		3	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	7,696,367,800	7,080,724,593	92.00
		4	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	8,300,000,000	7,451,477,884	89.78
		5	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	400,000,000	358,694,900	89.67
		6	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0
		7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0
		8	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0
		9	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1,149,464,000	1,057,821,910	92.03
		10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0
		11	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0
		12	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	2,702,056,700	2,444,704,508	90.48
		13	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0
		14	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0
		15	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	0	0	0
		16	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0
		17	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0
		18	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0
		19	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit	0	0	0
		20	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0
		21	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0
		22	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Peserta didik	0	0	0
		23	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	21,823,249,800	20,082,810,000	92.02
		24	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	4,861,863,325	4,092,171,156	84.17
		25	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Orang	16,213,352,500	16,021,480,000	98.82

			Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
		26	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	0	0	0
		27	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	902,300,000	824,818,057	91.41
		28	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	0	0	0
		29	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	0	0	0
		30	Pemeliharaan Mebel	Unit	0	0	0
		31	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Orang	0	0	0
		32	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	6,574,900	4,801,676	73.03
		33	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	159,699,500	154,577,490	96.79
		34	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
		35	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0
		36	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0
		37	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Orang	0	0	0
		38	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0
		39	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0
		40	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0
		41	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Orang	0	0	0
		42	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0
		43	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0
		44	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang	0	0	0
		45	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0
		46	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0
		47	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0
		48	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0
		49	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0

		50	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	6,098,244,500	5,576,654,350	91.45
		51	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0
		52	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0
		53	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Satuan Pendidikan	119,005,000	104,116,842	87.49
		54	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	95,000,000	81,026,800	85.29
		55	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0
		56	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0
			JUMLAH INDIKATOR		70,527,178,025	65,335,880,166	92.64
	3.		Pengelolaan Pendidikan Khusus		9,296,064,100	8,372,674,008	90.07
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	196,202,000	177,285,910	90.36
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0
		5	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0
		6	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0
		7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	351,829,000	318,012,023	90.39
		8	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0
		9	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	491,632,000	444,025,687	90.32
		10	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0
		11	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang	0	0	0
		12	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang	0	0	0
		13	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang	0	0	0
		14	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang	0	0	0
		15	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang	0	0	0
		16	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0
		17	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang	0	0	0
		18	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang	0	0	0
		19	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang	0	0	0
		20	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang	0	0	0
		21	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang	0	0	0
		22	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk	Ruang	0	0	0

			Tunalaras (E)				
		23	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	0	0	0
		24	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0
		25	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0
		26	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	134,304,000	134,184,000	99.91
		27	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit	0	0	0
		28	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	41,671,400	36,122,000	86.68
		29	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0
		30	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Peserta didik	465,016,600	448,975,000	96.55
		31	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	0	0	0
		32	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	2,275,471,900	2,129,194,360	93.57
		33	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang	2,473,700,000	2,404,100,000	97.19
		34	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	0	0	0
		35	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	490,415,000	315,889,396	64.41
		36	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	0	0	0
		37	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang	0	0	0
		38	Pemeliharaan Mebel	Unit	0	0	0
		39	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Orang	0	0	0
		40	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	37,671,000	26,904,360	71.42
		41	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	47,751,500	46,526,852	97.44
		42	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
		43	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	134,399,800	43,699,370	32.51
		44	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0
		45	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus	Orang	0	0	0
		46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0
		47	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0
		48	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Orang	0	0	0
		49	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0
		50	Rehabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0

			Ruang Unit Kesehatan Sekolah				
		51	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0
		52	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0
		53	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1,336,623,600	1,193,193,131	89.27
		54	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	126,000,000	45,526,440	36.13
		55	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0
		56	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	63,595,900	45,603,257	71.71
		57	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0
		58	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0
		59	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0
		60	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0
		61	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0
		62	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	287,696,400	259,310,585	90.13
		63	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	342,084,000	304,121,637	88.90
			JUMLAH INDIKATOR		9,296,064,100	8,372,674,008	90.07
			JUMLAH PROGRAM		159,842,638,240	149,413,411,929	93.48

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan pendidikan tahun 2024, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	4.677
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	259

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Tidak terdapat kendala dalam pengumpulan data karena data sudah tersedia di Dapodik dan Raport Pendidikan. Akan tetapi jumlah anggaran dan realisasi anggaran SPM lebih kecil karena efisiensi anggaran.

4.2 Urusan Kesehatan

SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan kesehatan antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan indikator jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 ditampilkan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Satuan	Target	Persentase Target
I.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		Orang	136	100
	1.	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang	154	100
	2.	Tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan	Orang	5	
	3.	Sarana dan prasarana	Unit	23	100
II.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi		Orang	572	100
	1.	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Unit	102	100
	2.	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Unit	337	100

	3.	Wadah pengiriman specimen (Specimen Carrier)	Unit	31	100
	4.	Tempat sampai biologis	Unit	4	100
	5.	Formulir: Form Penyelidikan Epidemiologi Form/Lembar KIE Alat Tulis yang Diperlukan	Formulir	20	100
	6.	Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit	Unit	294	100
	7.	Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit	4	100
	8.	Tenaga Medis : Dokter	Orang	4	100
	9.	Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	9	100
	10.	Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	4	100
	11.	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	1	100
	12.	Tenaga Laboratorium	Orang	3	100
	13.	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	4	100
	14.	Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	16	100

4.2.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output	Total Pencapaian %
II.	Urusan Kesehatan			
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA	100

1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi			Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	136	136	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)						20
	Jumlah Muti Barang/Jasa/SDM			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100
	1.	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang	154	154	0	100
	2.	Tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan	Orang	5	5	0	100
	3.	Sarana dan prasarana	Unit	23	23	0	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi			Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80 %)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	572	572	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)						20
	Jumlah Muti Barang/Jasa/SDM			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100
	1.	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Unit	102	102	0	100
	2.	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Unit	337	337	0	
	3.	Wadah pengiriman specimen (Specimen Carrier)	Unit	31	31	0	100
	4.	Tempat sampai biologis	Unit	4	4	0	
	5.	Formulir: Form Penyelidikan Epidemiologi Form/Lembar KIE Alat Tulis yang Diperlukan	Formulir	20	20		100
	6.	Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit	Unit	294	294	0	100
	7.	Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit	4	4	0	100
	8.	Tenaga Medis : Dokter	Orang	4	4	0	100
	9.	Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	9	9		100
	10.	Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	4	4	0	100
	11.	Tenaga kesehatan	Orang	1	1	0	100

		masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi					
	12.	Tenaga Laboratorium	Orang	3	3	0	100
	13.	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	4	4	0	100
	14.	Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	16	16	0	100

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan kesehatan sebesar **100 %** dengan kategori **tuntas paripurna**. Untuk indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 100 %. Sedangkan indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 100 %.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan kesehatan pada Tahun Anggaran 2024.

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			141,914,772	71,559,270	50.42
	1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		141,914,772	71,559,270	50.42
	a.	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	78,207,172	38,675,000	49.45
	b.	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang	63,707,600	32,884,270	51.62
2.	Program lainnya			39,000,000	26,167,521	67.10
	2.	Koordinasi dan Sinkronisasi penerapan SPM bidang Kesehatan lintas Kabupaten/Kota		39,000,000	26,167,521	67.10
TOTAL				180,914,772	97,726,791	54.02

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan kesehatan tahun 2024, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau bencana berpotensi provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 orang
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	44 orang

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

- Pengumpulan data SPM Kesehatan mengalami kesulitan karena data tersebut ada di beberapa bidang yang mengelola SPM Krisis Kesehatan dan SPM Kejadian Luar Biasa sehingga pengumpulan data sering telat.
- Masih sulitnya menghitung sasaran awal dikarenakan pengampu program tidak mempunyai dasar yang konkrit untuk menghitung target atau sasaran tersebut,
- Realisasi atau serapan anggaran hanya 52 % dikarenakan adanya kebijakan pemerintah provinsi untuk merasionalisasi dan efisiensi anggaran dikarenakan PAD pemerintah provinsi berkurang. sehingga untuk kegiatan koordinasi SPM kesehatan ini volumenya berkurang.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan pekerjaan umum antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Satuan	Target	Persentase Target
I.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota		orang	0	100
	1.	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	rupiah	0	100
	2.	Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota	1	100
II.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota		orang	0	100
	1.	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	rupiah	0	100
	2.	Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota	4	100

4.3.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian %
III.	Urusan Pekerjaan Umum						
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			Tuntas Paripurna			100
I.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota			Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Terlayani		Orang	0	0	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	1.	Pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	100
	2.	Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	1	1	0	100
II.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota			Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaen/Kota			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Terlayani		Orang	0	0	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100
	1.	Pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam	Rupiah	0	0	0	100

		rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota					
	2.	Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	4	4	0	100

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan pekerjaan umum sebesar **100 %** dengan kategori **Tuntas Paripurna**. Untuk indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum regional lintas kabupaten/kota realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 100 %. Sedangkan indikator penyediaan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 100 %.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2024.

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				609.998.400	498.769.828	81,76
	1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			609.998.400	498.769.828	81,76
		1.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	-	-	-
		2.	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Liter/Detik	-	-	-
		3.	Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	Liter/Detik	-	-	-
		4.	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan	SR	-	-	-
		5.	Perluasan SPAM jaringan perpipaan	Dokumen	-	-	-
		6.	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan	SR	-	-	-
		7.	Fasilitasi kerja sama pengelolaan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	-	-	-
		8.	Pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Provinsi	Kab/Kota	-	-	-

		9.	Operasi dan pemeliharaan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Unit	-	-	-
		10.	Survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		11.	Penyediaan lahan untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Ha	-	-	-
		12.	Pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha	-	-	-
		13.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	-	-	-
		14.	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Kab/Kota	-	-	-
		15.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	609.998.400	498.769.828	81,76
		16.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	-	-	-
		17.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	-	-	-
		18.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	-	-	-
		19.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	-	-	-
		20.	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Unit	-	-	-
		21.	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	-	-	-
2.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			3.920.980.900	3.818.461.034	97,38
		2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		3.920.980.900	3.818.461.034	97,38
		1.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	-	-	-
		2.	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pembinaan penyediaan prasarana Cubluk	Dokumen	-	-	-
		3.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Rumah Tangga	-	-	-
		4.	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik regional	Rumah Tangga	-	-	-
		5.	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Dokumen	-	-	-
		6.	Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	-	-	-
		7.	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	-	-	-

		8.	Fasilitasi kerja sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		9	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	-	-	-
		10.	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Kab/Kota	-	-	-
		11.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M ³ /Hari	-	-	-
		12.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Unit	-	-	-
		13.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M ³ /Hari	-	-	-
		14.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	3.545.987.600	3.461.628.092	97,62
		15.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	374.993.300	356.832.942	95,15
		16.	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	-	-	-
		17.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	-	-	-
		18.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	-	-	-
TOTAL					4.530.979.300	4.317.230.862	95,28

4.3.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan pekerjaan umum tahun 2024, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	PNS 12 orang PHL 5 orang
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	PNS 12 orang PHL 5 orang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

1. Berdasarkan study kelayakan SPAM Regional di Pulau Belitung, hasil kajian menyatakan bahwa pembangunan SPAM Regional tidak layak untuk dilaksanakan. Salah satu faktornya dikarenakan sumber air baku untuk mendukung kapasitas 20L/detik di Pulau Belitung belum ada, termasuk di juga Pulau Bangka.
2. *Iddle Capacity* untuk infrastruktur yang sudah terbangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih besar sehingga prioritas untuk SPAM saat ini adalah meningkatkan capaian SR dan perluasan jaringan SPAM Perpipaan.
3. Belum adanya kebutuhan/ pengusulan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi untuk dilaksanakan SPAM Regional dan SPALD Regional.
4. Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan perumahan rakyat antara lain:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target
I.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Orang	n/a	100

	1.	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/ Kota	n/a	100
II.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi		Orang	n/a	100
	1.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	Rumah	n/a	100
	2.	Subsidi uang sewa	Rumah	n/a	100
	3.	Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah	n/a	100

4.4.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (Persentase) %
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100
IV.	Urusan Perumahan Rakyat					
I.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Orang	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR 80 %)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	0	0	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100
	1. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/Kota	0	0	0	100

II.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi		Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	0	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100
	1.	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0	0	100

Dengan tidak terjadinya bencana provinsi dan juga tidak adanya program pemerintah yang menyebabkan terjadinya relokasi, maka sesuai tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan perumahan rakyat sebesar **100%** dengan kategori **tuntas paripurna**.

Untuk indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar capaiannya sebesar 100 %. Sedangkan indikator fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar capaiannya sebesar 100 %.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM perumahan rakyat Tahun Anggaran 2024

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pengembangan Perumahan		-	-	-
	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi		-	-	-

		Program Provinsi					
		1.	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen	-	-	-
		2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	-	-	-
		3.	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	-	-	-
		4.	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	-	-	-
		5.	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen	-	-	-
		6.	Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	-	-	-
		7.	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	-	-	-
		8.	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	-	-	-
		9.	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Dokumen	-	-	-
		10.	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen	-	-	-
		11.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	-	-	-
	2.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				-	-
		1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	-	-	-
		2.	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi	Dokumen	-	-	-

		3.	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	-	-	-
		4.	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	-	-	-
		5.	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
		6.	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
		7.	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Rumah Tangga	-	-	-
		8.	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
		9.	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
		10.	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
		11.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
		12.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
TOTAL					-	-	-

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan perumahan rakyat tahun 2024, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Dukungan Personil
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	8 orang PNS 2 orang PHL

2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	8 orang PNS 2 orang PHL
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM antara lain

1. Belum adanya rencana pengembangan kawasan strategis yang menyebabkan adanya relokasi sehingga belum ada penerima layanan.
2. Belum adanya data penerima layanan sehingga belum dapat membuat rencana dan penganggaran serta belum adanya penetapan ruang perbatasan yang menjadi kewenangan provinsi.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target
I.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	orang	10	100
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka	unit	278	100

		mendukung penegakan perda dan perkara			
	2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara*	dokumen	10	100
	3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	orang	65	100
	4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	3	100
	5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	10	100
	6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	10	100

4.5.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output	Total Pencapaian (Persentase) %
V.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA	96,28
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi		Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	96,28

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN (80%)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang harus dilayani		Orang	100	10	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						16,28
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	81,41
	1.	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	278	246	32	88,49
	2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	Dokumen	10	10	0	100
	3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	65	65	0	100
	4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan perumahan) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	3	1	2	0
	5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	10	0	10	100
	6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	10	0	10	100

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar **96,28 %** dengan kategori **tuntas utama**. Capaian indikator pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar capaiannya sebesar 96,28 %.

4.5.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)		2,722,555,820	2,182,730,566	80.17
	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		2,341,120,100	2,112,790,506	90.25
	1. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	1,773,892,900	1,634,779,608	92.16
	2. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	69,993,600	43,892,000	62.71
	3. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Dokumen	127,998,700	118,890,720	92.88
	4. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	217,995,600	193,749,968	88.88
	5. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	149,491,900	121,478,210	81.26
	6. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dokumen	0	0	0
	7. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0
	8. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	0
	9. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan	Laporan	1,747,400	0	0

			Peraturan Kepala Daerah				
		10.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0
		11.	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0
		12.	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Dokumen	0	0	0
		13.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Unit	0	0	0
		14.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	0	0	0
		15.	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0
		16.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	0	0	0
		17.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	0	0	0
		18.	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0
		19.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	0	0	0
	2.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			304,985,900	69,940,060	22.93
		1.	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	93,999,600	34,667,200	36.88
		2.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	105,986,700	35,272,860	33.28
		3.	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0
		4.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang	Unit	0	0	0

			Penyimpanan Barang Bukti)				
		5.	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0
		6.	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	0	0	0
		7.	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0
		8.	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0
		9.	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	104,999,600	0	0
	3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			76,449,820	0	0
		1.	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0
		2.	Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan pelaksanaan sidang ditempat, Penguatan sekretariat bersama PPNS	Dokumen	0	0	0
		3.	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0
		4.	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0
		5.	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0
		6.	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satuan	0	0	0
TOTAL					2,722,555,820	2,182,730,566	80,17

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2024, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	78 orang PNS 103 orang PHL Bantuan Polisi 7 orang Damkar 11 pramu bhakti 23 P3K full time

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Pengumpulan data:

- a. Sulitnya koordinasi dengan bidang karena kurangnya pemahaman SPM;
- b. Belum adanya standar penghitungan satuan yang jelas terhadap penghitungan kerugian materil bagi warga yang terdampak
- c. Belum adanya petunjuk pengisian secara detail pengisian tahapan pada aplikasi E SPM

Penghitungan kebutuhan:

- a. Sulitnya menentukan dan memperkirakan berapa jumlah korban dalam radius 50 meter
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penegakkan Perda dan Perkada sulit untuk mendata KTP para korban karena pada saat penindakan berlangsung, jauh dari permukiman penduduk
- c. Sulitnya menentukan estimasi berapa kali terjadi penegakkan Perda dan Perkada yang akan dilaksanakan, karena kebanyakan penegakkan dilakukan karena ada laporan dari masyarakat dan perintah pimpinan
- d. Sulitnya menyusun dokumen standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal

Perencanaan dan Penganggaran;

Defisit anggaran sehinga dilakukan efisiensi anggaran pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Pelaksanaan:

- a. Anggaran yang terbatas
- b. Kurangnya komitmen dari internal Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Petunjuk teknis yang belum tersusun secara rinci

4.6 Urusan Sosial

SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan sosial antara lain:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial dengan indikator capaian jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan

- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
 - d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;
 - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 ditampilkan pada table berikut ini :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Persentase Target (%)
I.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Orang	42	100
	1. Penyediaan Permakanan	Orang	42	100
	2. Penyediaan Sandang	Orang	33	100
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	5	100
	4. Penyediaan alat bantu	Orang	9	100
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	37	100
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	100	100
	7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	40	100
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	100
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	20	100

	10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	25	100
	11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	14	100
II.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		Orang	203	100
	1.	Pengasuhan	Orang	30	100
	2.	Penyediaan Permakanan	Orang	203	100
	3.	Penyediaan Sandang	Orang	103	100
	4.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	40	100
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	Orang	3	100
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Orang	100	100
	7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	0	100
	8.	Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	100
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	100
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Orang	0	100
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	0	100
	12.	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	Orang	0	100
III.	Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		Orang	45	100
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	45	100
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	25	100
	3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	4	100
	4.	Penyediaan Alat bantu	Orang	12	100
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial	Orang	24	100
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Orang	115	100
	7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	20	100
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	100
	9.	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	0	100
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	100
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	0	100
	12.	Pemulasaran	Orang	6	100
IV.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan		Orang	8	100

	dan Pengemis di Dalam Panti				
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	8	100
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	8	100
	3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	2	100
	4.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	Orang	8	100
	5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Orang	30	100
	6.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari	Orang	2	100
	7.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Orang	10	100
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	0	100
	9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	100
	10	Pemulangan ke daerah asal**	Orang	8	100
	V.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi	Orang	50	100
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	50	100
	2.	Penyediaan sandang	Orang	5	100
	3.	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	2	100
	4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang	10	100
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	10	100

4.6.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian %
VI.	Urusan Sosial					
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			93,13
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			87,41
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	70,48
	Jumlah yang Harus Dilayani		42	37	5	88,10
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16,94

	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	84,68
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	42	37	5	88,10
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	33	28	5	84,85
	3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	5	5	0	100
	4.	Penyediaan alat bantu	Orang	9	9	0	100
	5.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	37	32	5	86,49
	6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	100	100	0	100
	7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	40	40	0	100
	8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	0
	9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	20	20	0	100
	10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	25	18	7	72
	11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	14	15	+1	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			Jumlah Anak Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya			90
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani			203	203	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)						10
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	50
	1.	Pengasuhan	Orang	30	31	+1	100
	2.	Penyediaan Permakanan	Orang	203	203	0	100
	3.	Penyediaan Sandang	Orang	103	103	0	100
	4.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	40	40	0	100
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	Orang	3	3	0	100
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Orang	100	100	0	100
	7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	0	0	0	0
	8.	Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0	0

	9.	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0	0
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Orang	0	0	0	0
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	0	0	0	0
	12.	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	Orang	0	0	0	0
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial			95
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani			45	47	+2	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)						15
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	75
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	45	47	+2	100
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	25	27	+2	100
	3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	4	4	0	100
	4.	Penyediaan Alat bantu	Orang	12	12	0	100
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial	Orang	24	26	+2	100
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Orang	115	115	0	100
	7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	20	20	0	100
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	0
	9.	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	0	0	0	0
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	0	100
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	0	0	0	0
	12.	Pemulasaran	Orang	6	5	1	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti			Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			93,25
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani			8	8	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)						13,25

	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	66,25
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	8	8	0	100
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	8	9	+1	100
	3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	2	0	2	10
	4.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	Orang	8	5	3	62,50
	5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Orang	30	30	0	100
	6.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari	Orang	2	3	+1	100
	7.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Orang	10	10	0	100
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0	0
	9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0	0
	10.	Pemulangan ke daerah asal**	Orang	8	8	0	100
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi			Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani			50	50	0	20
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)						100
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	75
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	50	50	0	100
	2.	Penyediaan sandang	Orang	5	5	0	0
	3.	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	2	2	0	100
	4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang	10	10	0	95
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	10	10	0	100

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan sosial sebesar **93,13 %** dengan kategori **tuntas utama**. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 87,41 %. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 90 %. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 95 %. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 93,25 %. Capaian SPM untuk indikator perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 100 %.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan sosial Tahun Anggaran 2024.

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Rehabilitasi Sosial				1,318,567,850	1,086,057,349	82.37
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti			565,577,700	478,477,655	84.60
		1.	Penyediaan permakanan	Orang	296,752,800	240,204,480	80.94
		2.	Penyediaan sandang	Orang	48,361,800	34,279,900	70.88
		3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	3,072,500	2,650,000	86.25
		4.	Penyediaan alat bantu	Orang	10,701,500	10,050,000	93.91
		5.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	45,217,800	42,188,900	93.30
		6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	65,426,800	57,077,376	87.24
		7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	54,044,500	52,651,000	97.42
		8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	0	0	0
		9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	4,000,000	3,960,000	99.00
		10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10,000,000	8,960,000	89.60

		11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	24,000,000	23,995,999	99.98
		12.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Dokumen	4,000,000	2,460,000	61.50
	2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			236,558,600	204,421,675	86.41
		1.	Pengasuhan	Orang	101,500,000	93,528,375	92.15
		2.	Penyediaan makanan	Orang	24,331,300	17,645,000	72.52
		3.	Penyediaan sandang	Orang	34,768,900	29,205,000	84
		4.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	16,424,600	16,200,000	98.63
		5.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	6,133,800	5,847,200	95.33
		6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	37,400,000	33,638,400	89.94
		7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	0	0	
		8.	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0
		9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0
		10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0
		11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0
		12.	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	0	0	0
		13.	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dokumen	16,000,000	8,357,700	52.24
	3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			384,958,400	322,254,823	83.71
		1.	Penyediaan permakanan	Orang	164,470,200	151,233,283	91.95
		2.	Penyediaan sandang	Orang	70,800,100	44,500,040	62.85
		3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	5,484,000	4,900,000	89.35
		4.	Penyediaan alat bantu	Orang	3,023,200	2,770,000	91.62
		5.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang	52,863,900	42,911,500	81.17
		6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	36,658,000	30,810,000	84.05
		7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	24,512,000	23,880,000	97.42
		8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	0	0	0
		9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0
		10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	4,000,000	4,000,000	100
		11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0
		12.	Pemulasaraan	Orang	19,147,000	13,250,000	69.20
		13.	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	4,000,000	4,000,000	100

	4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		131,473,150	80,903,196	61.54
	1.	Penyediaan permakanan	Orang	22,914,900	13,848,000	60.43
	2.	Penyediaan sandang	Orang	10,737,700	9,265,000	86.28
	3.	Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses	Orang	317,5	0	0
	4.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	6,185,200	5,847,200	94.54
	5.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang	17,028,600	10,601,300	62.26
	6.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	56,2	0	0
	7.	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	28,230,350	26,731,696	94.69
	8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Orang	0	0	0
	9.	Akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0
	10.	Pemulangan ke daerah asal	Orang	10,000,000	3,500,000	35
	11.	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	36,002,700	11,110,000	30.86
2.	Program Penanganan Bencana			1,023,602,140	1,015,173,220	99.18
	5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		1,023,602,140	1,015,173,220	99.18
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	657,039,200	657,005,200	99.99
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	584,5	444,15	75.99
	3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	46,565,500	39,051,840	83.86
	4.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	11,999,940	11,535,880	96.13
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	307,413,000	307,136,150	99.91
TOTAL				2,342,169,990	2,101,230,569	89.71

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan sosial tahun 2024, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	ASN 16 orang Non ASN 17 orang
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	ASN 10 orang Non ASN 8 orang

3.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	ASN 11 orang Non ASN 7 orang
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	ASN 12 orang Non ASN 6 orang
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	ASN 5 orang Non ASN 21 orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM urusan sosial antara lain :

1. Pengumpulan data gelandangan dan pengemis didapatkan dari pendataan dan pembinaan gelandangan dan pengemis di lapangan karena tidak ada data dari Lembaga Kesejahteraan Sosial.
2. Proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memperhatikan hubungan erat antara kemampuan pembiayaan perangkat daerah dan penerimaan/pendapatan pemerintah daerah, hal ini berpengaruh kepada konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Belum kuatnya komitmen atau dukungan terhadap program dan kegiatan yang memiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau cost sharing serta penguatan/pengembangan program dalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian outcome kegiatan belum berjalan maksimal;
4. Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level pusat - provinsi, provinsi - kabupaten, lintas sektor maupun lintas program/bidang. Hal ini menyebabkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi kurang maksimal baik efektifitas dan juga pemanfaatannya;
5. Adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu

anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;

6. Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2024 diakhir bulan Oktober 2024 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan.

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1 Urusan Pendidikan

Penerapan dan pencapaian SPM urusan pendidikan dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Pendidikan

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
 1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
 2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
 9. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
 10. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 11. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 12. Pengadaan Mebel Sekolah
 13. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
 14. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 15. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 16. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
 17. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
 18. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
 19. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

20. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
21. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
22. Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
23. Pembangunan Ruang Laboratorium
24. Pembangunan Ruang Kelas Baru
25. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
26. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 1. Pembangunan Ruang Praktik Siswa
 2. Pembangunan Ruang Laboratorium
 3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 5. Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 6. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 7. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 8. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 9. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
 10. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
 11. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
 12. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
 13. Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik
 14. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
3. Pengelolaan Pendidikan Khusus
 1. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 3. Pembangunan Kantin Sekolah
 4. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 5. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
 6. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
 7. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 8. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
 9. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
 10. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
 11. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
 12. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 13. Pembangunan Ruang Kelas Baru

14. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
15. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
16. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
17. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

4.7.2 Urusan Kesehatan

Penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
 - b. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

B. Program lainnya

2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penerapan SPM bidang Kesehatan lintas Kabupaten/Kota

4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum

Penerapan dan pencapaian SPM urusan pekerjaan umum dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
 1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) Regional
 1. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 2. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat

Tidak ada program, kegiatan atau sub kegiatan yang dilaksanakan untuk urusan Perumahan Rakyat.

4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan dan pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawalan
 - b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
 - c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi
 - d. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
 - e. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - f. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - a. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - c. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

- a. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

4.7.6 Urusan Sosial

Penerapan dan pencapaian SPM urusan sosial dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Program Rehabilitasi Sosial

- I. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti
 1. Penyediaan permakanan
 2. Penyediaan sandang
 3. Penyediaan asrama yang mudah diakses
 4. Penyediaan alat bantu
 5. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti
 6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 9. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 10. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 11. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar
- II. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
 1. Pengasuhan
 2. Penyediaan makanan
 3. Penyediaan sandang
 4. Penyediaan asrama yang mudah diakses
 5. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti
 6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 7. Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
- II. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
 1. Penyediaan permakanan
 2. Penyediaan sandang
 3. Penyediaan asrama yang mudah diakses
 4. Penyediaan alat bantu
 5. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial
 6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 8. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 9. Pemulasaraan

10. Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti
- IV. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
 1. Penyediaan permakanan
 2. Penyediaan sandang
 3. Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses
 4. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti
 5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial
 6. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 7. Pemberian bimbingan keterampilan dasar
 8. Pemulangan ke daerah asal
 9. Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti
 - B. Program Penanganan Bencana
 - V. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 1. Penyediaan Permakanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 5. Pelayanan Dukungan Psikososial

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 mencapai kinerja baik namun harus disadari bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai keterbatasan baik dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, regulasi maupun anggaran. Meskipun demikian dengan segala kekurangan tersebut Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu menunjukkan hasil kinerjanya, yaitu dengan memperoleh penghargaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah status baik dari pemerintah pusat. Perolehan penghargaan tersebut tidak lepas dari hasil kerja keras dan kerjasama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan support dan partisipasi dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan harapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dapat menjadi referensi dan sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun yang akan datang menjadi lebih baik, sehingga apa yang dikerjakan oleh pemerintah semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat.